



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rancangan Akhir
**RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH (RPD)**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024-2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang sejalan dengan berakhirnya dokumen RPJMD periode 2018 – 2023. Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru memberikan solusi bagi daerah untuk mengisi kekosongan dokumen pembangunan jangka menengah akibat kekosongan jabatan kepada daerah. Inmendagri tersebut juga memerintahkan secara khusus bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan RPD Tahun 2024 – 2026 ini merupakan bagian dari kerangka mewujudkan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yaitu untuk mewujudkan “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”.

RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 sebagai bagian dari RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 tahapan ke-empat serta merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya. RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 juga harus memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, serta perlu menyelaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034. Perencanaan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program utama dalam dokumen RTRW.

Atas dasar hal tersebut, penyusunan dokumen RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026 perlu dirumuskan tujuan dan sasaran hingga program pembangunan daerah yang

mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, terutama mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, dokumen RPD tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan, dan sub kegiatan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat;
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 agar terwujud sinergi antara kebijakan, strategi, program dan kegiatan di dalam RPD ini. Selain itu, penyusunan RPD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan acuan mengenai pola dan struktur ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan.

Setiap tahun dalam periode pelaksanaannya, RPD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di dalam RKPD inilah rencana program dan kegiatan indikatif RPD

dijabarkan menurut urusan dan fungsi, dilengkapi dengan indikator keluaran, alokasi pendanaan serta lokasi pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026 adalah untuk menyediakan pedoman perencanaan pembangunan pada masa transisi yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran Daerah strategi, kebijakan umum, program pembangunan indikatif selama periode 2024-2026 atau hingga RPJMD periode berikutnya tersusun. Adapun tujuan penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026 adalah untuk:

1. menjabarkan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
2. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun dalam periode RPD sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat;
3. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD;
4. menjadi pedoman dalam penyusunan dan evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
5. menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, serta menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

1.5. Sistematika Rancangan Akhir Dokumen RPD

RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dibagi menjadi 9 (sembilan) bab dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bagian ini diuraikan mengenai gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah hingga tahun 2017.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini diuraikan mengenai kinerja keuangan daerah di masa lalu dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bagian ini diuraikan mengenai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

BAB V. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bagian ini diuraikan mengenai strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini akan ditampilkan matriks yang berisi program, kegiatan indikatif, kebutuhan dana, hingga Perangkat Daerah penanggungjawab.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB IX. PENUTUP

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 Km² atau 1,13 kali luas Pulau Jawa dan termasuk provinsi terbesar kedua setelah Provinsi Kalimantan Tengah (153.564,50 Km²), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Bagian barat berbatasan dengan Selat Karimata.
2. Bagian utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa.
4. Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat



Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. empat belas kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan dan 2.148 kelurahan/desa. Dilihat dari posisinya, desa di Kalimantan Barat yang terletak di tepi pantai atau desa pesisir sebanyak 162 desa dan desa non pesisir 1.986 desa, sebagaimana pada table berikut ini. Pengelompokan desa berdasarkan posisi letak merujuk pada karakteristik yang berbeda desa pesisir dan non pesisir) desa pedalaman dan perbatasan. Pendekatan pembangunan yang lebih sesuai dengan posisi letak geografis desa diharapkan memberi hasil yang lebih optimal.

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat
Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Desa Tepi Laut (Pesisir)	Desa Non Pesisir	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sambas	19	36	157	193
Bengkayang	17	10	114	124
Landak	13	-	156	156
Mempawah	9	28	39	67
Sanggau	15	-	175	175
Ketapang	20	34	228	262
Sintang	14	-	407	407
Kapuas Hulu	23	-	282	282
Sekadau	7	-	87	87
Melawi	11	-	169	169
Kayong Utara	6	21	22	43
Kubu Raya	9	23	105	128
Kota Pontianak	6	-	29	29
Kota Singkawang	5	10	16	26
Kalimantan Barat	174	162	1.986	2.148

Sumber: BPS,. Termasuk Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kalimantan Barat secara geografis terletak pada posisi 2°05' LU - 3°05' LS dan 108°30' - 114°10' BT. Secara dimensi kewilayahan, Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan antar negara.

Untuk wilayah pesisir dan kepulauan terdiri atas Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah pesisir yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk wilayah pedalaman terdiri atas Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kabupaten Sekadau, Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Ketapang.

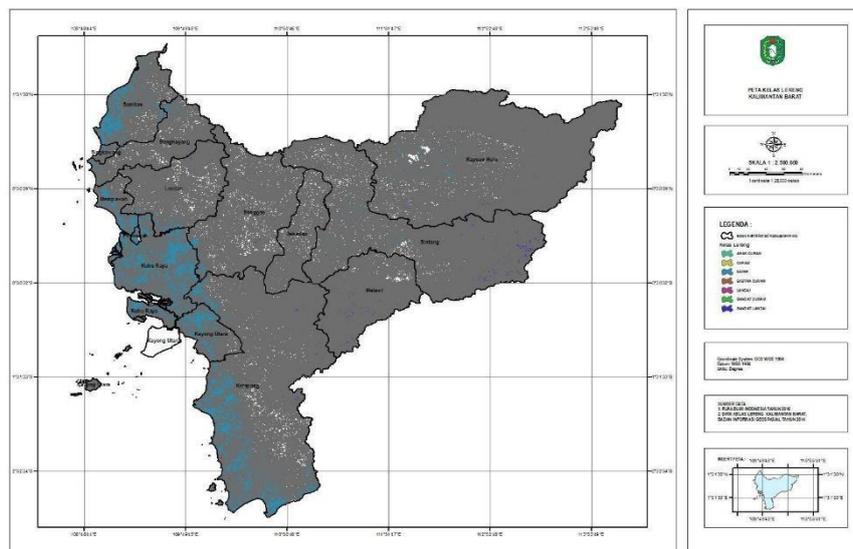
Sementara itu, untuk dimensi wilayah perbatasan antara negara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia disebelah utara yakni terdiri atas Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

2.1.1.3. Topografi

Topografi Provinsi Kalimantan Barat dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan daratan rendah, sedikit berbukit yang menghampar dari barat ke timur di sepanjang Lembah Sungai Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata, sepanjang daerah daratan berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan diapit oleh pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian utara dan Pegunungan Schwaner di bagian Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dipengaruhi oleh daratan rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung di Kalimantan Barat relatif rendah dan non aktif, adapun gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Ambalau Kab. Sintang dengan ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut dan terendah adalah gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara.

Sekitar 29,21 persen atau 4.287.880 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng <2 persen atau cenderung landai. Sementara itu, sekitar 33,34 persen atau 4.894.333 Ha berada pada kelas lereng 2-15 persen atau cenderung bergelombang. Sedangkan 21,31 persen atau 3.127.844 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng 15-40 persen atau cenderung curam dan sekitar 16,15 persen atau 2.370.643 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng >40 persen atau cenderung sangat curam.

Gambar 2.2
Peta Lereng Wilayah Kalimantan Barat

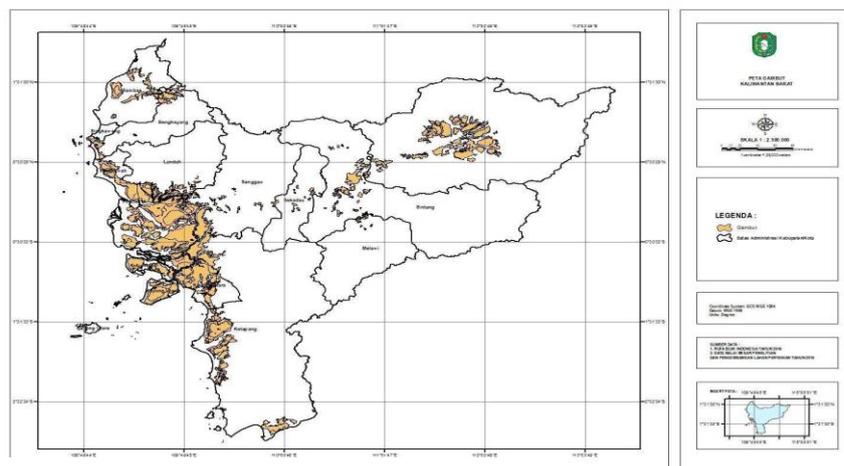


Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia.

2.1.1.4. Geologi

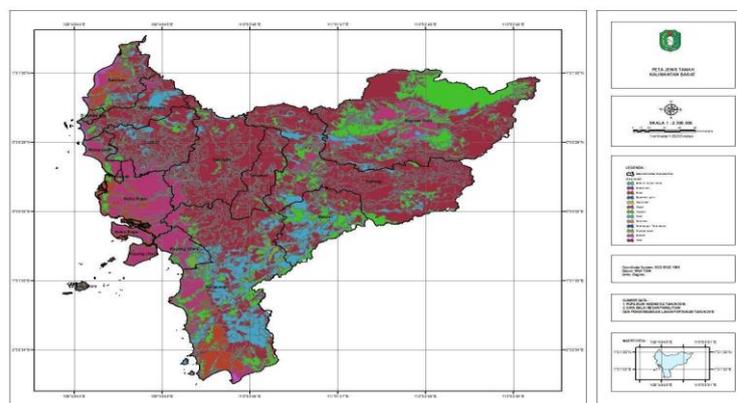
Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kalimantan Barat memiliki jenis tekstur tanah Sedang yakni seluas sekitar 6.714.126 Ha, sementara sekitar 3.439.943 Ha merupakan jenis tekstur tanah halus, sekitar 2.762.006 Ha merupakan jenis tekstur tanah kasar, 1.543.752 Ha merupakan jenis tekstur tanah Gambut dan 220.873 Ha merupakan jenis tekstur tanah rawa. Sementara itu dilihat dari kandungan tanah, sebesar 5.806.633 Ha memiliki kandungan tanah Kwarter. Sedangkan 3.102.464 Ha memiliki kandungan tanah Carboniferous jenis Effusive, dan 1.468.680 Ha memiliki kandungan tanah intrusif dan plutonik asam. Beberapa wilayah lainnya memiliki kandungan tanah Naegon, Kapur, Jura, Trias, Permokarbon Trias Atas, dan beberapa jenis Carboniferus lainnya.

Gambar 2.3
Peta Gambut Wilayah Kalimantan Barat



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia .

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah Wilayah Kalimantan Barat

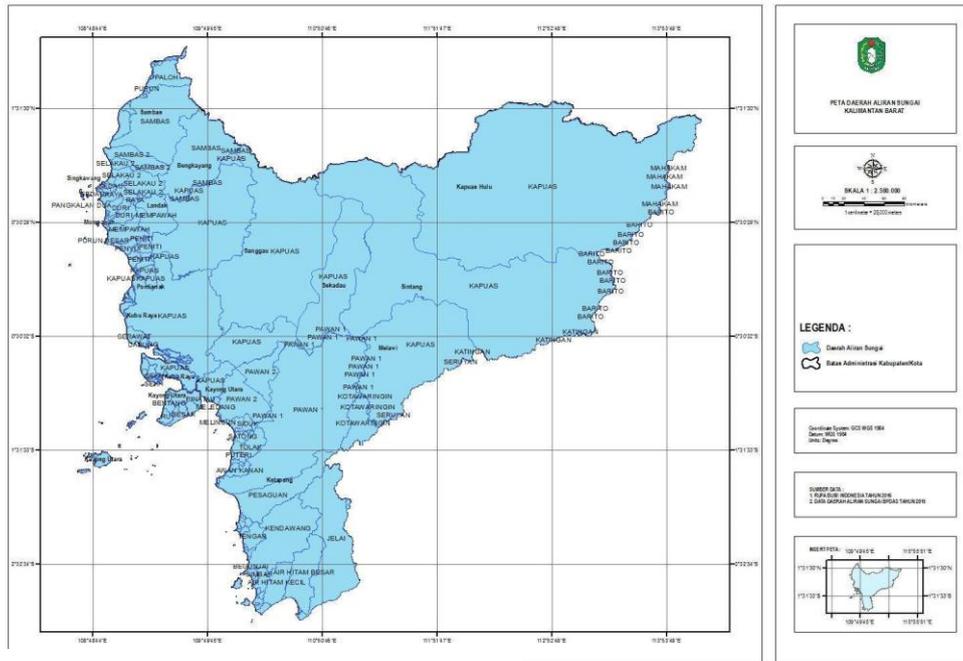


Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia.

2.1.1.5. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai di Kalimantan Barat cukup banyak, akan tetapi terdapat 3 (tiga) DAS terbesar diantaranya yakni DAS Kapuas, DAS Pawan dan DAS Jelai.

Gambar 2.5
Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia.

Kalimantan Barat merupakan provinsi yang dijuluki daerah “**Seribu Sungai**”, julukan ini selaras dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari serta merupakan urat nadi dan jalur utama sarana transportasi daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama dan terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yaitu 1.086 km (daerah yang dilalui adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab.Sekadau, dan Kota Pontianak). Selanjutnya Kalimantan Barat memiliki Danau Sentarum dengan luas (117.500 hektar) dan Danau Luar I (5.400 hektar). Kedua danau ini berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

2.1.1.6. Klimatologi

Wilayah Kalimantan Barat secara geografis dilintasi garis khatulistiwa dan beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Suhu udara Daerah relatif panas dengan kelembaban udara yang tinggi. Berdasarkan catatan empiris tahun 2022 suhu maksimum di Kalimantan Barat mencapai 34,20 °C dan minimum 21,90 °C. Kecepatan angin maksimum mencapai 15,90 m/ detik dengan tekanan udara maksimum 1.014,00 mbar. Jumlah curah hujan selama tahun 2022 sebanyak 3.057,00 mm..

Terjadi kenaikan curah hujan pada tahun 2022 sebesar 3.057,00 mm. Jumlah hari hujan selama tahun 2022 adalah 239 hari dan penyinaran matahari sebanyak 54,00 persen. Data perkembangan unsur iklim disajikan pada table berikut.

Tabel 2.2.
Perkembangan Unsur Iklim di Kalimantan Barat Tahun 2019-2022

Unsur Iklim Climate Elements	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suhu/Temperature (°C)				
Minimum/Minimum	21,40	22,20	21,40	21,90
Rata-rata/Average	28,93	28,90	28,90	27,60
Maksimum/Maximum	34,40	34,40	34,60	34,20
Kelembaban/Humidity (%)				
Minimum/Minimum	40,00	48,00	49,00	71,00
Rata-rata/Average	78,48	80,00	79,00	83,00
Maksimum/Maximum	99,00	100,00	98,00	95,00
Kecepatan Angin (m/det) Wind Velocity (m/sec)				
Minimum/Minimum	<i>calm</i>	<i>calm</i>	<i>calm</i>	0,50
Rata-rata/Average	1,76	1,34	3,10	5,60
Maksimum/Maximum	14,39	12,34	18,00	15,90
Tekanan Udara (mbar) Atmospheric Pressure (mbar)				
Minimum/Minimum	1 003,90	1 001,10	1 003,70	1007,50
Rata-rata/Average	1 009,77	1 009,20	1 009,10	1010,30
Maksimum/Maximum	1 015,70	1 014,90	1 015,00	1014,00
Jumlah Curah Hujan (mm) Number of Precipitation (mm)	3 036,60	3 673,40	2 918,2	3057,00
Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	191	242	208	239,00
Penyinaran Matahari (°) Duration of Sunshine (°)	45,23	65,00	67,50	54,00

Catatan : **calm* adalah kecepatan angin mendekati nol/*Calm is wind velocity close to zero*

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Kalbar

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi Kawasan budidaya dan Kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari Kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman, pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam Kalimantan Barat Dalam Angka 2023, bahwa total luas kawasan budidaya di Kalimantan Barat sekitar 6.429.721. Ha dan kawasan non budidaya sekitar 8.322.447 Ha.

2.1.2. Demografi

Berdasarkan data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 berjumlah sekitar 5.497.151 jiwa, dimana 51,41 persen atau 2.826.287 jiwa laki-laki dan 48,59 persen atau 2.670.864 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah 146.807.00 Km² maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat tahun 2022 adalah 37 jiwa perkilometer persegi.

Dilihat dari sebaran penduduk, pada tahun 2022 Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu 6.247 jiwa per Km² Kapuas Hulu merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni sebesar 9 jiwa per Km²

Tabel 2.3.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota
di Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Penduduk		Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
		Laki-Laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	328.468	312,370	640,838	6,394.70	100
2	Mempawah	158.173	150,598	308,771	1,276.90	242
3	Sanggau	255.208	235,597	490,805	12,857.70	38
4	Ketapang	298.430	277,387	575,817	31,240.74	18
5	Sintang	224.384	209,230	433,614	21,635.00	20
6	Kapuas Hulu	136.680	129,971	266,651	29,842.00	9
7	Bengkayang	150.920	139,668	290,588	5,397.30	54
8	Landak	213.231	192,089	405,320	9,909.10	41
9	Sekadau	112.711	104,757	217,468	5,444.30	40
10	Melawi	108.297	101,661	209,958	10,644.00	20
11	Kayong Utara	662.76	62,408	128,684	4,568.26	28
12	Kubu Raya	313.951	300,959	614,910	6,985.20	88
13	Kota Pontianak	336.695	336,705	673,400	107.80	6247
14	Kota Singkawang	122.863	117,464	240,327	504.00	477
	Kalimantan Barat	2,826,287	2,670,864	5,497,151	146,807	37

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, 2022.

Perkembangan terakhir jumlah penduduk Kalimantan Barat tahun 2022 pada usia produktif dari usia 25 tahun sampai dengan 50 tahun masih cukup dominan hal ini memberi dampak terhadap kondisi demografi wilayah Kalimantan Barat yang sering disebut sebagai bonus demografi. Namun demikian bonus demografi ini tidak tidaklah secara otomatis membawa keuntungan bagi Daerah, tantangannya adalah pilihan kebijakan diambil Daerah dalam rangka perluasan lapangan pekerjaan penduduk usia produktif.

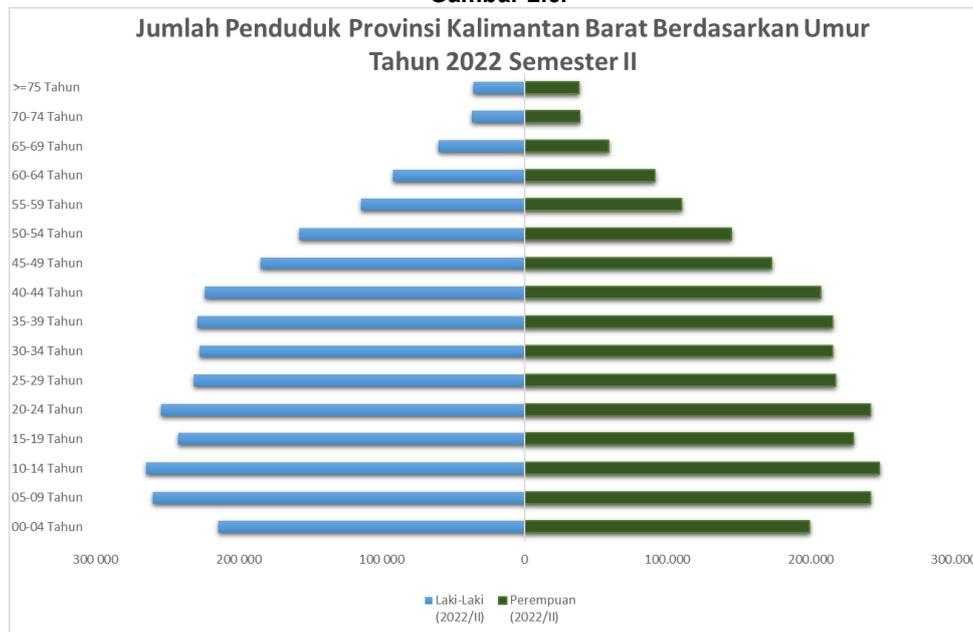
Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Kalimantan Barat
Menurut Kelompok Usia Tahun 2018-2022

Kel Usia (Th)	2018	2019	2020	2021	2022 Sms 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-4	493.951	390.585	387.857	391.559	413.46
5-9	489.43	506.517	508.237	509.025	501.884
10-14	458.23	500.347	502.828	502.735	512.971
15-19	440.563	524.301	511.57	507.989	472.089
20-24	428.916	473.302	485.634	487.322	495.627
25-29	419.951	449.671	447.578	445.66	448.517
30-34	403.606	462.908	461.988	451.378	442.937

Kel Usia (Th)	2018	2019	2020	2021	2022 Sms 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35-39	384.982	463.567	459.426	457.554	444.196
40-44	349.041	400.792	419.209	414.516	430.4
45-49	300.595	334.079	341.405	348.189	357.651
50-54	250.929	277.408	287.11	286.86	302.101
55-59	202.243	223.298	221.237	222.775	224.073
60-64	150.418	167.662	179.456	176.904	183.157
65-69	101.566	116.296	110.347	113.114	119.078
70-75	65.539	73.189	72.497	71.902	75.488
>75	61.704	76.108	75.931	74.511	73.522
Jumlah	5.001.664	5.440.030	5.472.310	5.461.993	5.497.151

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar 2022

Gambar 2.5.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dalam 2 tahun terakhir dari 2020 sampai 2022 laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat rerata pertahun 1,33 persen per tahun. Laju pertumbuhan tinggi diatas 2 persen berasal dari Kabupaten Ketapang, 2,11 persen, Bengkayang 2,08 persen, Kayong Utara 2,03 persen. Sementara itu 3 kab/kota dengan kontribusi terbesar terhadap jumlah penduduk Kalimantan Barat tahun 2022 berasal dari Kota Pontianak 12,25 persen, Kabupaten Sambas 11,66 persen dan Kubu Raya 11,19 persen. Tiga kab/kota dengan kepadatan tertinggi per kilometer persegi pada tahun 2022 adalah Kota Pontianak 6.247 penduduk, Kota Singkawang 477 penduduk dan Kabupaten Mempawah 242 penduduk.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kab/ Kota
di Kalimantan Barat

Kab/Kota	Laju Pertumbuhan (%)		Kepadatan/Km ²	Share (%) Thdp Prov
	2010-2020	2020-2022	2022	2022
Sambas	2,34	1.62	100	11.66
Mempawah	2,48	1.76	242	5.62
Sanggau	1,67	0.96	38	8.93
Ketapang	2,84	2.11	18	10.47
Sintang	1,40	0.69	20	7.89
Kapuas Hulu	1,25	0.54	9	4.85
Bengkayang	2,80	2.08	54	5.29
Landak	1,83	1.11	41	7.37
Sekadau	1,49	0.77	40	3.96
Melawi	2,40	1.68	20	3.82
Kayong Utara	2,75	2.03	28	2.34
Kubu Raya	1,91	1.2	88	11.19
Pontianak	1,68	0.96	6247	12.25
Singkawang	2,27	1.55	477	4.37
Kalimantan Barat	2,04	1.33	37	100,00

Sumber: BPS tahun 2022.

Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kalimantan Barat, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5.497.151 seperti dalam tabel dibawah ini. Mayoritas penduduk Kalimantan Barat beragama Islam atau 60,41 persen, penganut agama Katholik 22,11 persen. Sedangkan penganut Kristen 11,62 persen, penganut Khonghucu 0,29 persen, Hindu 0,05 persen, dan Budha 5.51 persen.

Tabel 2.6
Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Menurut Agama Tahun 2022

No (1)	Agama (2)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Islam	1,693,363	1,627,356	3,320,719	60.41
2.	Kristen	332,132	306,825	638,957	11.62
3.	Katholik	632,139	583,134	1,215,273	22.11
4.	Hindu	1,477	13	2,777	0.05
5.	Budha	158.308	144.365	302.673	5.51
6.	Konghuchu	8,371	7,438	15,809	0.29
7.	Aliran Kepercayaan	497	446	943	0.02
	Total	2,826,287	2,670,864	5,497,151	100

Sumber: Dinas Dukcapil Kalimantan Barat, Tahun 2022.

Untuk memfasilitasi kehidupan umat beragama, terdapat rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut ada dalam kondisi baik, rusak ringan, dan rusak parah. Lebih jelasnya jumlah dan keadaan rumah ibadah di Kalimantan Barat seperti tabel berikut :

Tabel 2.7
Kondisi Rumah Ibadah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Agama	Kondisi Rumah Ibadah			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Islam	2947	2431	1989	7367
2.	Katholik	2801	1936	865	5602
3.	Kristen	3000	450	660	4110
4.	Khonghucu	39	23	15	77
5.	Hindu	-	15	1	16
6.	Budha	519	317	180	1016

Sumber: Kanwil Kemenag Kal bar

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Kawasan Budidaya

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 Kawasan budidaya di Kalimantan Barat meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; Kawasan peruntukan hortikultura; Kawasan peruntukan perkebunan; Kawasan peruntukan peternakan; Kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan permukiman; dan Kawasan peruntukan pertahanan.

b. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di Kalimantan Barat terdiri atas :

1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 2.116.885,26 hektar yang tersebar di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang;
2. Hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 2.097.484,16 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan di seluruh kabupaten; dan
3. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 206.098,54 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Sintang, Melawi serta Kapuas Hulu.

c. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Pengembangan kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat seluas sekitar 542.455 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan Kawasan Perlindungan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 460.000 hektar yang diarahkan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

d. Kawasan Peruntukan Hortikultura

Pengembangan Kawasan Hortikultura berada di kawasan pertanian lahan kering dan lahan basah yang diarahkan tersebar diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

e. Kawasan peruntukan perkebunan

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat berada di diseluruh Kabupaten/Kota dengan tanaman komoditi unggulan berupa Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Lada dan Kakao.

f. Kawasan peruntukan peternakan

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kota Singkawang yang khusus untuk peternakan unggas, sedangkan untuk peternakan hewan pemamah biak (ruminansia) maupun yang non ruminansia yang berada di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

g. Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kabupaten Sambas Kecamatan Pemangkat dan sekitarnya; Kota Singkawang di Kecamatan Singkawang Utara; Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan; Kabupaten Mempawah di Kecamatan Mempawah Hilir dan Segedong; Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Kakap dan Teluk Pakedai; Kabupaten Kayong Utara di Kecamatan Pulau Maya dan Kepulauan Karimata; Kabupaten Ketapang di Kecamatan Matan Hilir Utara, Delta Pawan dan sekitarnya, serta Kendawangan; dan Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan Jongkong dan sekitarnya.

Untuk menunjang pengembangan kawasan peruntukan perikanan, kelautan, dan pulau-pulau kecil tersedia :

1. Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Pemangkat di Kabupaten Sambas yang direncanakan menjadi pelabuhan perikanan samudera (PPS);
2. Pelabuhan perikanan pantai (PPP) Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara yang direncanakan menjadi PPN;
3. Pelabuhan perikanan pantai (PPP) Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya;
4. Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Mempawah di Kabupaten Mempawah yang direncanakan menjadi PPP; dan
5. PPI yang tersebar di:
 - a.) Kabupaten Sambas sebanyak 6 (enam) PPI;
 - b.) Kota Singkawang sebanyak 2 (dua) PPI;
 - c.) Kabupaten Bengkayang sebanyak 8 (delapan) PPI;
 - d.) Kabupaten Mempawah sebanyak 9 (sembilan) PPI;
 - e.) Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) PPI;
 - f.) Kabupaten Kubu Raya sebanyak 8 (delapan) PPI;
 - g.) Kabupaten Kayong Utara sebanyak 11 (sebelas) PPI; dan
 - h.) Kabupaten Ketapang sebanyak 3 (tiga) PPI;
6. Rencana PPI Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

h. Kawasan peruntukan pertambangan

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan berupa KPP mineral, batubara, minyak dan gas bumi, dan/atau panas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan berada di seluruh Kabupaten dan Kota Singkawang.

i. Kawasan peruntukan industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Provinsi Kalimantan Barat :

1. Kawasan industri berada di daerah Semparuk, Sungai Raya (Kab Bengkayang); Sungai Raya Kepulauan, Sungai Kunyit, Mandor, Siantan, Pontianak, Sungai Raya (Kab Kubu Raya); Tayan (Kab.Sanggau), Teluk Batang, Matan Hilir Selatan, Kendawangan (Kab Ketapang), Sei Ringin (Kab Sintang) dan Badau (Kab Kapuas Hulu); dan
2. Kawasan industri khusus pertambangan di Sungai Kunyit, Tayan, Kendawangan, dan Tanjung Api.

j. Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan Kawasan pariwisata di Provinsi Kalimantan Barat berada di wilayah sebagai berikut :

1. Kawasan Metropolitan Pontianak dan sekitarnya;
2. Kawasan Pantai Pasir Panjang, Kota Singkawang dan sekitarnya;
3. Sekitar (di luar kawasan) CA Gunung Niyut-Penrinsen;
4. Danau Lait dan sekitarnya;
5. Gunung Palung dan sekitarnya;
6. Bukit Baka - Bukit Raya;
7. Sekitar (di luar kawasan) CAL Karimata; dan
8. Danau Sentarum dan sekitarnya.

k. Kawasan peruntukan permukiman

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman meliputi :

1. Kawasan permukiman perkotaan berada di Kawasan perkotaan ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan kota, ibukota kecamatan dan desa yang sudah menampakkan gejala perkotaan; dan
2. Kawasan permukiman perdesaan berada di luar kawasan perkotaan yang didominasi oleh penggunaan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan.

l. Kawasan Peruntukan Pertahanan.

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertahanan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertahanan baik wilayah darat, laut maupun udara diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

1. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang meliputi:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

1. Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata;
2. Kawasan Pelabuhan Sungai Kunyit dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri;
3. Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
4. Kawasan Industri Semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
5. Kawasan Industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan;
6. Kawasan Industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit, dan pertambangan;
7. Kawasan Industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
8. Kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan Mempawah dengan sektor unggulan pertambangan;
9. Kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan;
10. Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan;
11. Kawasan Manismata-Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri; dan
12. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan pertambangan mineral radioaktif di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi dengan sektor unggulan pertambangan.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Palung di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang;
2. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya-Pasi di Kota Singkawang dan Bengkayang;
3. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Niyut-Penrinsen di Bengkayang, Landak dan Sanggau;
4. Kawasan Strategis Ekosistem Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, dan
5. Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut di Sambas dan Kota Singkawang.

2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, kawasan lindung provinsi yang diarahkan ke seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang berupa kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri atas :

1. Pantai tersebar di enam kabupaten dan satu kota yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang dan Kota Singkawang dengan lebar jalur paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
2. Sempadan sungai terdiri atas :
 - Sempadan sungai besar yang terdapat di:
 - a. WS Sambas, yaitu Sungai Paloh, Sambas Besar, Bantan, Kumba, Sambas Kecil, Sebangkau, Selakau, dan Terusan Senujuh;
 - b. WS Mempawah, yaitu Sungai Raya, Duri, Mempawah, dan Sungai Peniti;
 - c. WS Kapuas, yaitu Kapuas Kecil, Mandor, Landak, Menyuke, Behe, Pede, Ambawang, Kapuas, Tayan, Mengkiang, Kembayan, Sekayam, Sekadau, Belitang, Melawi, Kayan, Belimbing, Pinoh, Sayan, Keruas, Ella, Mentatai, Serawai, Ambalau, Ketungau, Silat, Tawang, Empanang, Embaloh Leboyan, Jongkong, Bunut, Embaloh, Palin, Mandai, Sibau, Mendalam, Keriyau (Kapuas Hulu), Mendawak, Labai, Lida, Kualan, Kerawang, dan Sungai Durian Sebatang;
 - d. WS Pawan, yaitu Sungai Simpang, Semandang, Matan, Tolak, Pawan, Kayung, Tayap, Laur, Jekah, Keriyau (Ketapang), Kerabai, Biya, dan Sungai Pesaguan; dan
 - e. WS Kendawangan-Jelai, yaitu Sungai Kendawangan, Membuluh, Air Hitam Besar, Berais, Jelai, dan Sungai Kawah;
 - Sempadan kecil yang terdapat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kawasan sekitar danau atau waduk tersebar di Kota Singkawang dan di 5 (lima) kabupaten yaitu Sambas, Kubu Raya, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang.
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. Kawasan rawan bencana alam yang terdiri atas :
 1. Kawasan rawan gelombang pasang tersebar di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan di 6 Kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang yang merupakan bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 2. Kawasan rawan banjir tersebar di seluruh kab/kota pada daerah-daerah di sekitar sungai besar.
 3. Kawasan rawan tanah longsor tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan-pegunungan, kecuali Kota Pontianak.
- e. Kawasan lindung geologi yang terdiri atas :
 1. Kawasan rawan abrasi tersebar di daerah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang.
 2. Kawasan sekitar mata air tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- f. Kawasan lindung lainnya yang terdiri atas :
 1. Kawasan terumbu karang tersebar di Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, dan Ketapang.

2. Kawasan kebun raya berada di Kabupaten Sambas.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Masalah menurunnya kualitas lingkungan di Kalimantan Barat menjadi fenomena yang kian mengkhawatirkan. Bencana lingkungan terus terjadi semakin banyak hingga bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan tanah longsor semakin meningkat intensitasnya. Bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi di semua kabupaten/kota. Hasil identifikasi sebanyak 322 desa di Kalimantan Barat sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, sekitar 471 desa/kelurahan termasuk dalam daerah potensi banjir dan sebanyak 72 Desa/Kelurahan termasuk dalam daerah potensi longsor.

Tabel 2.8

Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Kebakaran Hutan, Banjir dan Longsor di Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/ Kota	Desa/ Kelurahan Potensi Karhutla	Desa/ Kelurahan Potensi Banjir	Desa/ Kelurahan Potensi Longsor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Pontianak	3	3	0
2.	Kota Singkawang	8	7	2
3.	Kab. Kubu Raya	18	13	0
4.	Kab. Kapuas Hulu	12	104	2
5.	Kab. Bengkayang	40	5	11
6.	Kab. Sambas	34	6	1
7.	Kab. Kayong Utara	23	21	2
8.	Kab. Mempawah	28	33	7
9.	Kab. Landak	27	82	9
10.	Kab. Sanggau	14	59	6
11.	Kab. Sekadau	13	36	2
12.	Kab. Melawi	15	37	0
13.	Kab. Ketapang	45	26	13
14.	Kab. Sintang	42	39	7
Jumlah		322	471	72

Sumber : BPBD Provinsi Kalimantan Barat.

Banjir dan tanah longsor menjadi indikasi menurunnya daya dukung lingkungan yaitu makin meningkatnya lahan kritis dan makin menyempitnya ruang terbuka sebagai daerah resapan. Ditambah lagi persoalan rob yang melanda beberapa kawasan pemukiman akibat air pasang yang cenderung semakin meningkat. Kerusakan dan bencana lingkungan memperburuk kondisi kemiskinan yang jumlahnya masih cukup tinggi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran kondisi aspek kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat diuraikan dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut.

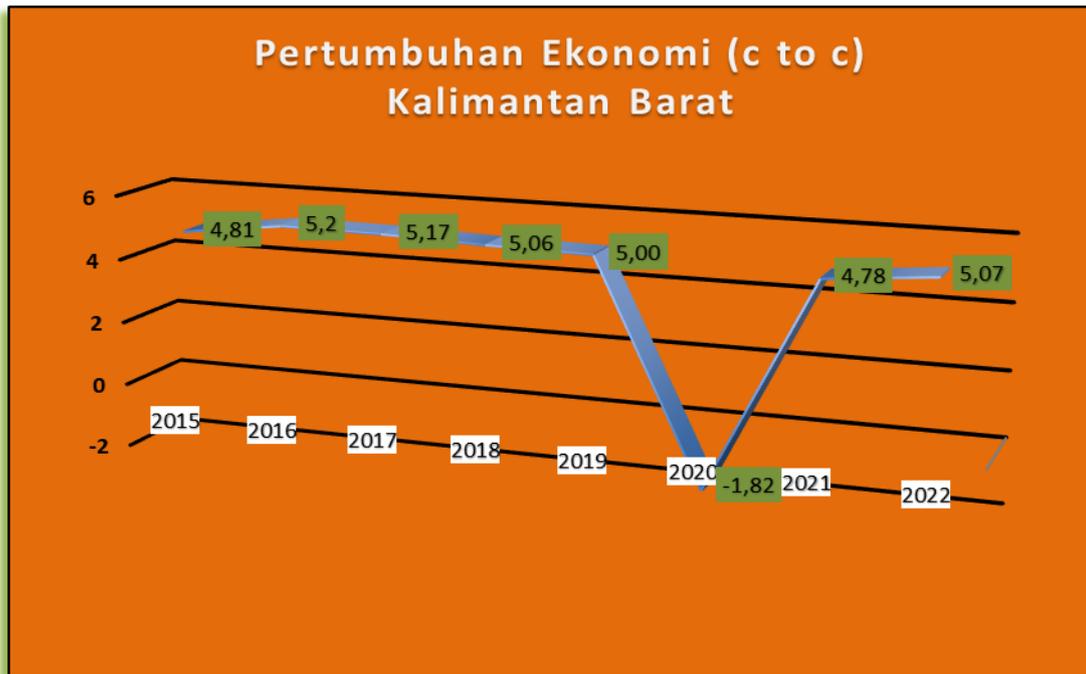
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi diukur dari pertumbuhan ekonomi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini, laju inflasi, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan penjumlahan dari total nilai tambah sektoral dalam suatu periode tertentu dan menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah kontribusinya berasal dari tiap sektor. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan selama kurun waktu 2015-2022. Pertumbuhan kumulatif Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2022 mengindikasikan adanya keberhasilan dalam merecovery perekonomian Daerah pasca Covid-19 bertumbuh sebesar 5,07 (cumulative to cumulative)

Gambar 2.7
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2015-2022



Perkembangan ekonomi Kalbar dari tahun 2019 hingga 2022 membentuk kurva V dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mengalami kontraksi hingga minus -1,82 yang diakibatkan oleh Covid-19, namun ekonomi Kalimantan Barat kembali pulih pada beberapa triwulan berikutnya hingga pada akhir tahun 2021 pertumbuhan berhasil Kembali mencapai 4,78 dan pada tahun 2022 mencapai 5,07, lebih tinggi 0,07 persen dari pertumbuhan ekonomi tahun 2019.

Tabel 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	4,93	4,75	-2,04	4,37	4,64
2	Bengkayang	5,25	5,14	-1,99	4,33	5,45
3	Landak	4,92	4,88	-0,71	4,89	4,65
4	Mempawah	5,76	5,78	0,18	4,10	4,70
5	Sanggau	4,21	3,73	0,71	4,19	4,61

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
6	Ketapang	7,83	6,58	-0,49	5,23	5,45
7	Sintang	5,15	4,99	-2,19	3,80	4,96
8	Kapuas Hulu	4,66	3,80	-2,43	4,43	4,51
9	Sekadau	5,83	5,44	-0,98	4,31	5,10
10	Melawi	5,25	4,41	-1,11	4,54	4,90
11	Kayong Utara	4,94	4,97	-0,76	4,59	5,03
12	Kubu Raya	5,25	5,68	-2,39	5,18	5,48
13	Kota Pontianak	4,22	4,02	-3,96	4,60	4,98
14	Kota Singkawang	4,64	4,41	-2,51	4,82	5,05

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022.

Kinerja perekonomian beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat dari tahun 2017-2022 menunjukkan kecenderungan menurun hingga tahun 2020. Hal tersebut merupakan dampak Covid-19 yang mengakibatkan hampir semua tatanan ekonomi kabupaten/kota mengalami kontraksi. kecuali Kabupaten Mempawah dan Sanggau walaupun masih positif tetapi masih tumbuh dilevel 0,18 dan 0,71 persen. Namun pertumbuhan kembali meningkat ditahun 2021-2022 kuartal ke-IV yang direpresentasi oleh pertumbuhan aggregate Kalimantan Barat sebesar 5,07 persen.

Tabel 2.10
Pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,53	5,78	1,30	4,14	2,18
2	Pertambangan dan Penggalian	1,78	9,17	6,90	20,59	2,43
3	Industri Pengolahan	2,80	7,63	-2,52	5,23	4,04
4	Pengadaan Listrik, Gas	3,58	5,70	12,68	1,13	4,34
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,63	7,06	5,73	5,83	6,65
6	Konstruksi	1,94	0,73	-4,11	8,16	0,82
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,24	5,72	-9,41	4,16	12,48
8	Transportasi dan Pergudangan	7,47	3,67	-19,01	-7,29	24,10
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	8,10	6,69	-19,26	8,72	10,57
10	Informasi dan Komunikasi	6,65	6,49	8,27	6,54	7,70
11	Jasa Keuangan	8,15	-2,73	-0,32	4,50	0,94
12	Real Estate	4,11	2,99	1,15	3,44	0,53
13	Jasa Perusahaan	4,06	4,93	-4,45	0,43	12,29
14	Adpem, Pertahanan & Jamsos Wajib	5,73	5,86	0,51	-0,66	-1,77
15	Jasa Pendidikan	3,41	3,92	-8,46	5,02	6,04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,73	7,09	26,81	36,51	7,12

17	Jasa Lainnya	5,43	8,26	-14,01	1,18	13,61
Produk Domestik Regional Bruto		5,07	5,09	-1,82	4,78	5,07

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2022.

Paling tidak ada 9 jenis lapangan usaha pada tahun 2020 di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan negative sebagai dampak pandemi Covid-19. Lapangan usaha dimaksud adalah industri pengolahan -2,52 persen, konstruksi -4,11 persen, perdagangan besar & eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor -9,41 persen, transportasi dan pergudangan -19,01 persen, penyediaan makan minum -19,26 persen, jasa perusahaan -4,45 persen, jasa pendidikan -8,46 persen dan jasa-jasa lainnya -14,01 persen. Secara keseluruhan pertumbuhan aggregate sectoral di Kalimantan Barat tahun 2020 mengalami pertumbuhan negative -1,82 persen. Pada tahun 2021 ada dua jenis lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negative dan di tahun 2022 hanya ada satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negative yaitu adpem, pertahanan dan jamsos wajib yang mana hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam upaya pemulihan perekonomian sudah tepat dan berjalan dengan baik. Pada tahun 2022 dari 17 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 24.10 diikuti oleh jasa lainnya sebesar 13.61.

Tingginya pertumbuhan jasa transportasi lebih disebabkan semakin terkendalinya kasus COVID-19 dan semakin gencarnya program vaksinasi selama tahun 2022 yang mendorong sektor transportasi tumbuh, khususnya jumlah penumpang yang berangkat dengan transportasi darat, laut, dan udara selama tahun 2022. Aktivitas sektor jasa juga tumbuh positif. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya aktivitas di Tempat Rekreasi, Salon Kecantikan, Jasa Reparasi, dll. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi juga meningkatkan permintaan Jasa Arsitektur dan Akuntan, Agen Perjalanan dan Biro Wisata. Sehingga secara umum, sektor jasa baik jasa perusahaan maupun jasa lainnya mengalami trend pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.11
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (%)

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20.23	20.18	20.92	21.24	21,10
2	Pertambangan dan Penggalian	6.07	6.71	8.44	7.02	6,56
3	Industri Pengolahan	17.61	19.51	19.55	16.49	16,46
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.12	0.13	0.15	0.12	0,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0.12	0.11	0.12	0.12	0,12
6	Konstruksi	12.52	12.31	12.18	12.77	12,53
7	Perdag Besar & Eceran,Reparasi Mobil & Sepeda Motor	14.08	14.29	13.23	12.77	13,70
8	Transportasi dan Pergudangan	5.23	5.63	4.69	3.41	4,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.57	2.86	2.42	2.05	2,09
10	Informasi dan Komunikasi	4.12	4.55	4.98	4.11	4,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.14	4.12	4.10	3.43	3,34
12	Real Estate	3.17	3.42	3.47	2.72	2,52

13	Jasa Perusahaan	0.48	0.53	0.50	0.38	0,40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.63	8.44	8.85	6.87	6,36
15	Jasa Pendidikan	4.31	4.69	4.21	3.43	3,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.53	1.72	2.22	2.36	2,35
17	Jasa Lainnya	1.07	1.21	0.97	0.71	0,76
PDRB		100	100	100	100.00	100,00

Sumber :BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

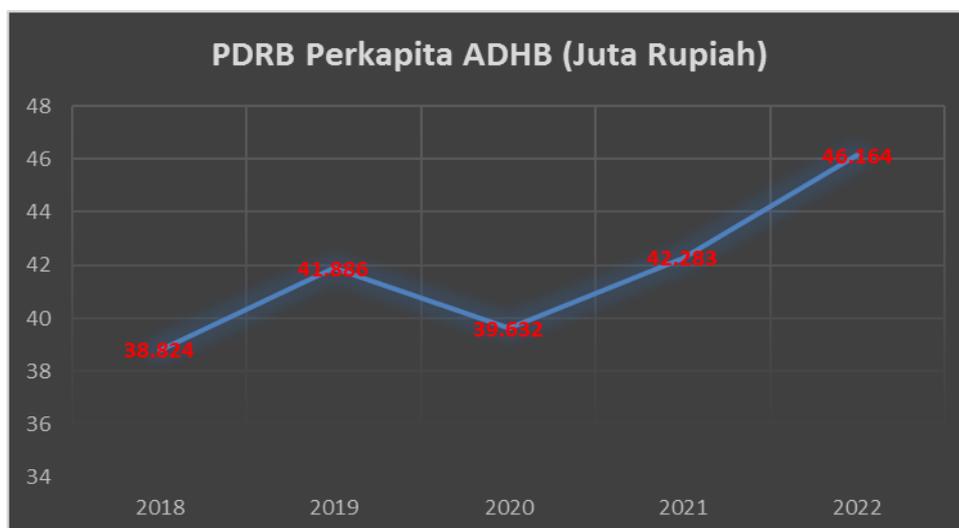
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah hasil bagi antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk periode tertentu. Nilai PDRB per kapita digunakan untuk mengetahui nilai PDRB per satuan penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita Kalimantan Barat menunjukkan kecenderungan meningkat walaupun pada tahun 2020 akibat Covid-19 angka per kapita pada posisi Rp.39,632 juta namun Kembali bangkit pada tahun 2021 pada level Rp 42,283 juta per kapita per tahun, dan dengan ditetapkannya pandemi covid 19 berakhir perekonomian Kalimantan Barat kembali bergairah dengan capaian PDRB perkapita sebesar Rp 46,16 juta di tahun 2022 , ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi covid 19.

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita.

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan.

Gambar 2.8

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (Juta Rp)



Sumber : BPS Kalimantan Barat, Tahun 2022.

Tabel 2.12

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Kalimantan Barat 2018-2022

Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rp)	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
• ADHB	194.199	212.318	214.001	231.321	255.797
• ADHK (2010)	130.589	137.121	134.743	141.187	148.386
PDRB per Kapita (Ribu Rp)					
• ADHB	38.824	41.886	39.632	42.283	46.161
• ADHK (2010)	26.107	27.051	24.954	25.807	26.778
• Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	7,87	8,32	-5,76	6,72	9,17
Jumlah Penduduk (Ribu Org)	5.002	5.069	5.414	5.470	5.541
Pertumbuhan Penduduk (%)	1,58	1,56	2,04	1,39	1,62

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022.

Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Triwulan IV- tahun 2022

Sisi Produksi

- 1) **Transportasi dan Pergudangan tumbuh positif** → Dibandingkan Triwulan IV-2021, transportasi udara meningkat sangat signifikan. Hal ini terindikasi karena semakin terkendalinya COVID-19 dan peningkatan mobilitas penduduk.
- 2) **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh positif** → TPK hotel berbintang meningkat signifikan dibandingkan dengan Triwulan IV-2021
- 3) **Perdagangan tumbuh positif** → Hal ini didorong oleh peningkatan volume penjualan mobil dan motor yang cukup tajam dibandingkan dengan triwulan IV-2021
- 4) **Jasa Kesehatan tumbuh positif** → Klaim Asuransi Kesehatan meningkat tinggi dibandingkan triwulan IV-2021
- 5) **Jasa Lainnya tumbuh Positif** → Aktivitas ekonomi bioskop, salon dan tempat hiburan sudah semakin baik dibandingkan tahun lalu. Hal ini terindikasi karena penurunan signifikan pada kasus Covid-19.

Sisi Produksi

- 1) **Pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat** → Peningkatan terjadi di sebagian besar sub komponen PKRT kecuali di sub komponen komunikasi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdampak juga akibat kenaikan harga bbm sehingga memacu kenaikan harga komoditas lain. Selain itu sudah normal Kembali aktivitas di masyarakat memacu peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga.
- 2) **Pengeluaran konsumsi PMTB tumbuh** → didorong oleh peningkatan jumlah investasi di wilayah Kalimantan Barat baik dari dalam maupun luar negeri dan didukung oleh realisasi belanja modal pemerintah APBD/APBN yang meningkat serta peningkatan yang signifikan pada impor barang modal.
- 3) **Pengeluaran konsumsi impor barang dan jasa meningkat** → Impor barang terutama impor barang bahan baku dan penolong serta barang modal yang digunakan dalam proses industri

dan pembangunan meningkat cukup signifikan seiring permintaan domestik yang menguat. Selain itu, tahun 2022 haji dan umroh sudah mulai diselenggarakan.

c. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Apabila nilai Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna sedangkan apabila bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan sempurna.

Selama periode 2018-2022, nilai Indeks Gini Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan dilihat dari nilai indeks yang bergerak menjauh dari angka 1. Untuk perhitungan bulan Maret dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7.37 persen atau turun 0,025 poin. Sedangkan perhitungan bulan September dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami penurunan sebesar 4,32 persen atau 0.014 poin.

Tabel 2.13
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

Semesteran	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Maret	0,339	0,327	0,317	0,313	0,314
September	0,325	0,318	0,325	0,315	0,311

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022.

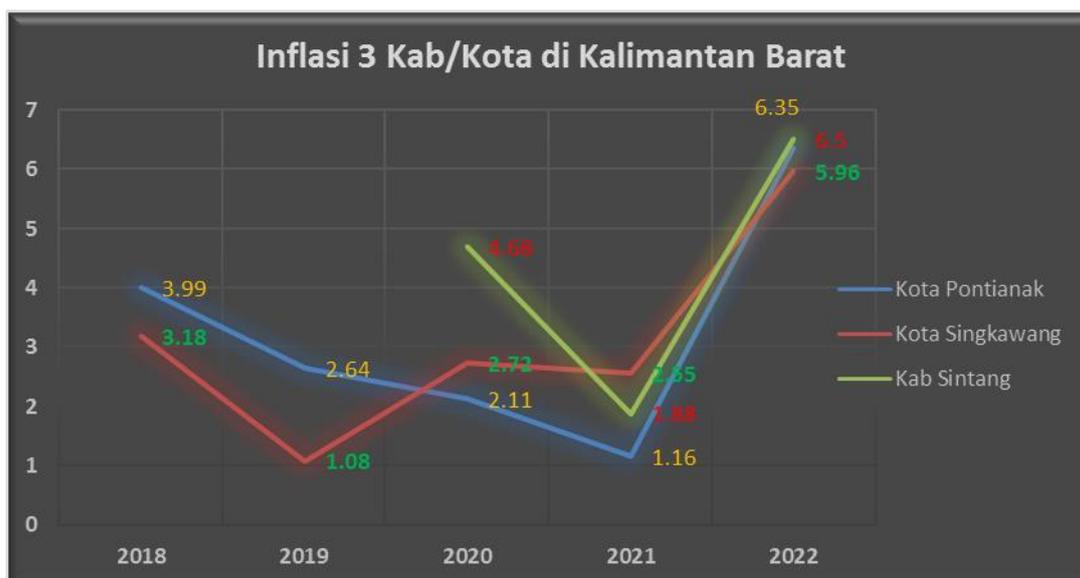
d. Laju Inflasi

Laju Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Untuk mengendalikan laju inflasi, Pemerintah Kalimantan Barat sudah membentuk Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Instansi Vertikal seperti BPS, Bank Indonesia, serta seluruh PD terkait. Forum TPID melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif, untuk menjaga agar inflasi dapat dikendalikan, dan ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga terjangkau.

Laju inflasi Kalimantan Barat diukur dari laju inflasi ibu kota provinsi yakni laju inflasi Kota Pontianak. Selama periode 2018-2022 laju inflasi Kota Pontianak cukup terkendali. Pada tahun 2018 inflasi Kota Pontianak sebesar 3.99 persen turun menjadi 2.37 persen pada tahun 2019.

Gambar 2.9
Laju Inflasi Ibu Kota Provinsi Tahun 2018-2022 (%)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023.

Tabel 2.14
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

Semesteran	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inflasi	3,99	2,37	1,45	2,46	5,37

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023.

e. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (*sumber : idm.kemendesa.go.id*).

Adapun proses penetapan indeks desa membangun melalui 5 tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Kompilasi Data Lapangan oleh Kepala Desa Dibantu Pendamping Lokal Desa (PLD)
2. Verifikasi di Tingkat Kecamatan oleh Camat dan Pendamping Desa
3. Validasi di Tingkat Kabupaten, dan Provinsi Hasil Akhir ditandatangani Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PMD Kabupaten dengan didampingi oleh Tenaga Ahli (TA) Kabupaten
4. Validasi oleh Ditjen PPMD
5. Validasi oleh PUSDATIN Kemendesa dan PDTT.

Perkembangan IDM di Provinsi Kalimantan Barat bersifat sangat positif dari 1 desa di 2018, 87 desa di 2019 , hingga 586 desa di 2022 seperti tabel – tabel dibawah ini :

Tabel 2.15
Perbandingan Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 s/d 2022

NO	STATUS DESA	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		JUMLAH	%								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sangat Tertinggal	677	33.33	208	10.24	12	0.59	0	0	0	0
2	Tertinggal	928	45.69	781	38.45	566	27.87	280	13,79	94	4,62
3	Berkembang	372	18.32	767	37.76	907	44.66	910	44,81	802	39,49
4	Maju	53	2.61	188	9.26	332	16.35	456	22,45	549	27,03
5	Mandiri	1	0.05	87	4.28	214	10.54	385	18.96	586	28,85
TOTAL		2031	100.00								

Sumber : idm.kemendesa.go.id

f. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Selama periode 2018-2022, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2018 persentase penduduk miskin Kalimantan Barat sebesar 7,77 persen turun menjadi 6,73 persen atau sebesar 1,04 poin pada bulan Maret 2022. Sementara itu, selama periode 2018-2022 jika dibandingkan, persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih besar yakni rata-rata 8 hingga 9 persen per tahun dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di perkotaan yang rata-rata sebesar 4 hingga 5 persen per tahun.

Tabel 2.16
Perkembangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

Indikator	2018		2019		2020		2021		2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Persentase Penduduk Miskin () (Kota+Desa)	7.77	7.37	7.49	7,28	7.17	7.24	7.15	6.84	6,73	6.81
Kota	5.03.	4.58	4.60	4,61	4.69	4.86	4.68	4.72	4,44	4.63
Desa	9.16	8.84	9.05	8.73	8.50	8.57	8.54	8.05	8,06	8,10
Garis Kemiskinan (Rp / kapita/Bulan) Kota + Desa	409.287	420.831	438.555	409.287	471.200	474.259	483.454	505.228	520,660	551.667
Kota	423.128	434.470	456.525	477.154	500.131	504.445	513.341	540.474	558,78	592,432
Desa	402.349	413.806	429.220	441.084	456.192	458.524	467.362	486.544	500,049	529,055
Jumlah penduduk miskin (jiwa) (Kota+Desa)	387.080	369.730	378.410	370.470	378.410	370.470	367.890	354000	350,520	356.510

Kota	84.520	79.360	81.640	82.280	81.640	84.360	86.900	89.040	85,040	89,810
Desa	302.560	290.370	296.770	288.190	296.770	228.190	280.990	264.960	265.210	266,690

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat selama periode 2018-2022 digambarkan melalui tabel 2.18. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Melawi yakni sebesar 11,44 persen, sedangkan persentase terendah berada di Kabupaten Kubu Raya sebesar 4,12 persen.

Tabel 2.17

Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/kota di Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Lokasi	Persentase Penduduk Miskin				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	8,55	8,19	7,70	7,66	6,92
2	Bengkayang	7,17	6,96	6,62	6,48	6,03
3	Landak	11,77	11,47	11,12	10,99	10,01
4	Mempawah	5,61	5,32	4,95	5,18	5,32
5	Sanggau	4,67	5,57	4,46	4,55	4,51
6	Ketapang	10,93	10,54	10,29	10,13	9,39
7	Sintang	40,30	9,65	9,27	9,28	8,57
8	Kapuas Hulu	25,22	9,62	8,99	8,93	8,59
9	Sekadau	12,28	6,11	5,87	6,26	5,85
10	Melawi	25,71	12,38	12,04	12,01	11,44
11	Kayong Utara	11,21	9,98	9,56	9,33	9,04
12	Kubu Raya	27,37	4,74	4,42	4,34	4,12
13	Kota Pontianak	31,46	4,88	4,70	4,58	4,46
14	Kota Singkawang	10,90	4,91	4,53	4,83	4,67

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022

Tabel 2.18

Perkembangan Kemiskinan Kalimantan Barat

Bulan/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Maret 2020	387.410	7,17
Sept 2020	370.470	7,24
Maret 2021	367.890	7,15
Sept 2021	354.000	6,84
Maret 2022	350.250	6,73
Sept 2022	356.510	6,81

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2022

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari

kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 2.19
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2)
di Kalimantan Barat Menurut Daerah, September 2021-September 2022

Tahun (1)	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Total (4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
September 2021	0.620	1.240	1.016
Maret 2020	0.540	1.330	1.040
September 2022	0.690	1.340	1.100
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2)			
September 2021	0.169	0.310	0.240
Maret 2022	0.120	0.330	0.240
September 2022	0.120	0.310	0.240

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2022.

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. TPT Kalimantan Barat cenderung meningkat pada tahun 2021 sebesar 5,82 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 4,26 persen yang berarti bertambah 1,56 persen, peningkatan jumlah pengangguran terbuka ini antara lain disebabkan atau disumbangkan oleh tingginya angka pengangguran terbuka Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kubu Raya dan Ketapang. Namun pada periode Agustus tahun 2022 terjadi penurunan angka pengangguran terbuka yang cukup baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 5.11 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,71 persen.

Tabel 2.20
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
se Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (%)

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	3,34	3,58	5.81	3.97	5,08
2	Bengkayang	2,40	2,71	3.71	4.42	2,84
3	Landak	2,75	3.38	3.91	3.22	1,78
4	Mempawah	6,87	5,19	3.38	7.71	7,48
5	Sanggau	2,47	3,07	7.55	3.45	3,76
6	Ketapang	3,23	4,53	3.52	6.94	6,71
7	Sintang	2,34	3,20	7.30	3.95	2,97
8	Kapuas Hulu	1,58	2,46	4.50	4.18	2,21
9	Sekadau	2,80	3,14	4.02	2.92	1,33
10	Melawi	3,15	2,45	3.39	2.66	1,95
11	Kayong Utara	3,93	4,00	2.70	3.78	3,10
12	Kubu Raya	5,04	5,62	3.71	7.02	6,87

13	Kota Pontianak	10,37	9,13	7.14	12.38	9,92
14	Kota Singkawang	7,88	6,44	12.36	9.16	9,16
Kalimantan Barat						
	• Februari	4,15	4,14	4,56	5,73	4,86
	• Agustus	4,26	4,45	5,81	5,82	5,11

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2,69 juta orang, naik 59 ribu orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,52 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,56 juta orang, naik sebanyak 75,07 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (mendekati 62 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan (mendekati 27 ribu orang). Sebanyak 1,5 juta orang (58,77 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 2,11persen poin dibanding Agustus 2021. Persentase setengah pengangguran turun 2,41 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 2,15 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Terdapat 44,63 ribu orang (1,14 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (2,68 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (1,31 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,98 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (38,67 ribu orang).

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 48,37 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 14,27 persen; dan Konstruksi sebesar 5,50 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2021.

Persentase lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,03 persen poin); Transportasi dan Pergudangan (0,76 persen poin); dan Jasa Pendidikan (0,27 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah Industri Pengolahan (1,23 persen poin); Konstruksi (0,55 persen poin); dan Pertambangan dan Penggalian (0,42 persen poin).

Pada Agustus 2022, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/ pegawai, yaitu sebesar 38,21 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 3,03 persen. Dibandingkan Agustus 2021, status buruh /karyawan/ pegawai dan yang berusaha sendiri mengalami peningkatan dengan peningkatan terbesar pada status buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 2,21 persen poin . Status pekerjaan yang lain mengalami penurunan persentase dengan penurunan terbesar pada pekerja keluarga yaitu sebesar 2,27 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka

dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

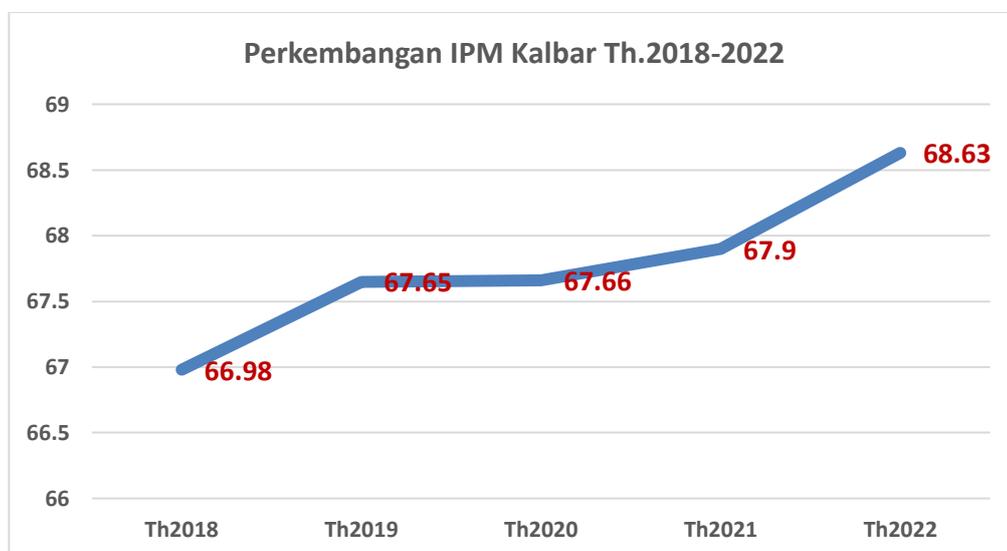
Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,50 juta orang (58,77 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,05 juta orang (41,23 persen). Dibandingkan Agustus 2021, persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal mengalami penurunan sebesar 2,10 persen poin.

h. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai aspek pembangunan, salah satunya melalui pendekatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang merupakan indikator penting untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan yang layak. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Selama periode 2018-2022, IPM Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan, bahkan tahun ketika kondisi Covid-19 dalam kondisi memuncak. Pada tahun 2018 IPM Kalimantan Barat sebesar 66,98 poin menjadi 68,63 poin pada tahun 2022 atau meningkat 2,31 persen atau 1,65 poin selama 5 tahun. Meskipun terus mengalami peningkatan, status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat masih berstatus sedang.

Gambar 2.10
Perkembangan IPM Kalbar Tahun 2018-2022



Tabel 2.21
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat
Tahun 2018-2022

No	Wilayah	Tahun					Δ 2022-2021	Pertumbuhan 2022
		2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kalimantan Barat	66.98	67.65	67.66	67.90	68,63	0,73	1,08
1	Sambas	66.61	67.02	67.03	67.10	67,95	0,85	1,27
2	Bengkayang	66.85	67.57	67.87	68.04	68,74	0,70	1,03
3	Landak	65.45	65.96	65.98	66.21	67,17	0,96	1,45
4	Mempawah	64.90	65.50	65.74	66.03	66,94	0,91	1,38
5	Sanggau	65.15	65.67	65.77	66.20	66.91	0,71	1,07
6	Ketapang	66.41	67.16	67.17	67.43	67,92	0,49	0,73
7	Sintang	66.07	66.70	66.88	66.93	67,86	0,93	1,39
8	Kapuas Hulu	65.03	65.65	65.69	65.75	66,70	0,95	1,44
9	Sekadau	63.69	64.34	64.76	64.93	65,58	0,65	1,00
10	Melawi	65.05	65.54	65.55	65.87	66,81	0,94	1,43
11	Kayong Utara	61.82	62.66	62.68	62.90	63,81	0,91	1,45
12	Kubu Raya	67.23	67.76	67.95	68.16	68,91	0,75	1,10
13	Kota Pontianak	78.56	79.35	79.44	79.93	80,48	0,55	0,69
14	Kota Singkawang	71.08	71.72	71.94	72.11	72,89	0,78	1,08

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022.

i. Konflik Sosial

Faktor keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berpengaruh dalam mendorong percepatan pembangunan di suatu daerah. Kondusifitas di suatu wilayah juga berperan dalam mendorong datangnya investasi di wilayah tersebut. Selama periode 2019-2022, kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kalimantan Barat cukup kondusif dengan digambarkan tidak terdapatnya kasus konflik sosial di masyarakat dan tentu akan terus dipertahankan. Selain selalu diupayakan mencegah kemungkinan faktor-faktor yang kemungkinan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik seperti terkait dengan kesenjangan ekonomi dan social.

Kedepan menuju tahun politik 2024 diperkirakan tensi politik akan sedikit memanas karena perbedaan pilihan politik dan kontestasi saling merebut pengaruh dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislative dan pilpres yang secara serentak dilaksanakan. Untuk itu agar perhelatan demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan tentu tanpa konflik sosial harus ada persiapan, kebijakan dan langkah teknis untuk mencegah berbagai kemungkinan yang terjadi.

j. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah: (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total

Coliform: (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO₂ dan NO₂; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Perkembangan indeks kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Barat tahun 2017-2022 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.22

Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,17	73,09	65,92	70,07	72,96	71,90
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	80,00	55,8	50,00	51,67	54,36	55,52
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	--	-	-	73,25	77,83	63,30
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,12	87,9	90,07	88,88	90,71	90,90
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	58,58	64,19	NA	54,22	59,35	59,05*)

Sumber : Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, KLHK Tahun 2017-2022

*) merupakan capaian nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup bahwa Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan hasil gabungan perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial digambarkan melalui indikator jumlah penduduk usia sekolah, Angka melek aksara, angka rata-rata lama sekolah, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja.

a. Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Gambaran umum tentang akses penduduk terhadap berbagai jenjang dan jenis pendidikan di Kalimantan Barat disajikan pada tabel berikut. Pada tabel tersebut, penduduk pada jenjang Sekolah Dasar memiliki jumlah yang paling banyak dibanding dengan jenjang sekolah lainnya. Apabila diperhatikan penduduk usia sekolah yang bersekolah dijenjang yang selayaknya penduduk itu sekolah tampak bahwa angka paling besar terjadi pada sekolah dasar sederajat. Sementara jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah di jenjang yang selayaknya mereka sekolah yang paling kecil jumlahnya adalah jenjang pendidikan menengah.

Tabel 2.23

Jumlah Guru Sekolah di Kalimantan Barat Tahun 2020-2022

Jenjang Pendidikan	Jumlah	
	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)
TK/PAUD	4312	4219
SD/MI sederajat	7596	8235
SMP/MTs sederajat	20.252	20.887
SMA/MA sederajat	7.857	7.413

Sumber : BPS Kalbar, 2022

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kalimantan Barat Tahun 2020-2022

Jenjang Pendidikan	Keterangan	Jumlah	
		2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)
TK/PAUD	Usia 3-6 tahun	39.557	36.721
SD/MI sederajat	Usia 7-12 tahun	644.985	630.888
SMP/MTs sederajat	Usia 13-15 tahun	280.080	277.012
SMA/MA sederajat	Usia 16-18 tahun/SMK	78.963	84.346
	Bersekolah di SMA/MA sederajat	156.274	154.861

Sumber: BPS Kalbar, 2022.

b. Angka Melek Aksara

Angka melek aksara berdasarkan BPS yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek aksara merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek aksara maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Tabel berikut menyajikan angka melek aksara di Kalimantan Barat tahun 2018-2022.

Tabel 2.25
Angka Melek Aksara Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Melek Aksara	Persen	92,58	93,21	93,41	93,41	93,96	0,59

Sumber: BPS *) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Kalbar**)

Angka melek aksara Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 0.59 persen pada periode 2018-2022. Dengan terus meningkatnya angka melek huruf selama 4 tahun ini mengindikasikan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang lebih baik.

Tabel 2.26
Angka Melek Aksara Per Kabupaten/Kota Kalimantan Barat
Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Melek Aksara (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Kalimantan Barat	91.66	93.21	93.41	93.41	93.96
Sambas	90.62	93.00	91.44	94.31	93.61
Bengkayang	92.69	93.12	93.5	92.93	94.74
Landak	92.27	93.63	92.64	92.93	93.04
Mempawah	91.65	91.67	92.79	92.48	92.74
Sanggau	93.24	91.63	94.81	93.34	93.34

Kab/Kota (1)	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Melek Aksara (Persen)				
	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)	2022 (5)
Ketapang	91.58	95.16	95.15	94.08	92.52
Sintang	93.53	93.44	92.75	89.98	92.18
Kapuas Hulu	92.20	94.63	93.52	93.13	93.31
Sekadau	91.88	91.92	92.93	93.36	93.92
Melawi	84.71	91.13	90.87	93.08	90.68
Kayong Utara	92.17	88.14	85.39	87.52	88.71
Kubu Raya	96.68	91.59	89.56	92.06	92.96
Kota Pontianak	91.77	96.67	97.26	97.99	97.95
Kota Singkawang	92.58	91.05	92.35	91.99	95.38

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Kalbar (Data BPS 2022).

c. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rerata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan semakin baik.

Tabel 2.27
Angka Rata-rata Lama Sekolah Per Kabupaten di Kalimantan Barat
Tahun 2018-2022

Kab/Kota (1)	Angka Rata-Rata Lama Sekolah				
	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)
KALIMANTAN BARAT	7.12	7.31	7.37	7.45	7.59
Sambas	6.68	6.70	6.71	6.72	6,74
Bengkayang	6.27	6.53	6.76	6.80	7,00
Landak	7.09	7.10	7.11	7.12	7,15
Mempawah	6.63	6.82	7.03	7.04	7,17
Sanggau	6.94	6.95	7.15	7.39	7,41
Ketapang	7.04	7.26	7.31	7.46	7,48
Sintang	6.74	6.89	7.07	7.08	7,36
Kapuas Hulu	7.25	7.47	7.52	7.53	7,59
Sekadau	6.58	6.60	6.83	6.85	7,12
Melawi	6.66	6.67	6.76	6.91	7,18
Kayong Utara	5.86	6	6.01	6.02	6,21
Kubu Raya	6.81	6.82	6.83	7.00	7,02
Kota Pontianak	9.90	10.14	10.17	10.43	10,44
Kota Singkawang	7.57	7.72	7.89	7.90	8,19

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022.

d. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

Tabel 2.28

Angka Harapan Lama Sekolah per Kabupaten di Kalimantan Barat
Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN BARAT	12,55	12,58	12,60	12,65	12,66
Sambas	12,52	12,60	12,61	12,63	12,70
Bengkayang	12,01	12,08	12,09	12,10	12,14
Landak	12,37	12,39	12,40	12,43	12,44
Mempawah	12,31	12,33	12,39	12,65	12,87
Sanggau	11,54	11,56	11,57	11,59	11,65
Ketapang	11,77	11,79	11,80	11,81	11,95
Sintang	11,98	12,02	12,03	12,04	12,29
Kapuas Hulu	12,03	12,04	12,05	12,08	12,14
Sekadau	11,56	11,57	11,88	11,89	11,90
Melawi	11,13	11,15	11,16	11,17	11,18
Kayong Utara	11,79	11,81	11,82	11,84	11,95
Kubu Raya	13,59	13,64	13,82	13,87	13,88
Kota Pontianak	14,81	14,99	15,00	15,01	15,02
Kota Singkawang	12,87	12,89	12,90	12,91	12,92

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022.

e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator angka pendidikan yang ditamatkan merupakan perhitungan persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Sehingga dapat disusun program atau bentuk intervensi lain untuk meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu. Pada indikator ini, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat. Berikut Tabel 2.30 menunjukkan angka pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2021.

Tabel 2.29

Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kalimantan Barat Tahun 2018-2021

Status Pendidikan	Persentase Penduduk 7-24 tahun menurut Pendidikan yang ditamatkan			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak/ Belum Pernah Sekolah	0,62	0,89	0,71	0,97
SD/MI/Paket A	38,00	38,11	37,37	35,96
SLTP/MTs/Paket B	14,10	13,82	14,03	13,63
SMU/SMK/MA/Paket C	12,85	13,27	13,34	13,63
Diploma I s.d Universitas	4,58	4,64	5,44	6,47
Jumlah yang Masih Sekolah	69,52	69,84	70,18	69,69
Tidak Bersekolah Lagi	29,86	29,25	29,11	29,35

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2021.

f. Angka Harapan Hidup

Usia harapan hidup Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan rata-rata nasional, masih berada dibawah capaian secara nasional. Namun, pergerakan usia harapan hidup pertahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Angka usia harapan hidup tahun 2022 mencapai 71.02 tahun meningkat 0,26 tahun bila dibandingkan kondisi tahun 2021 sebesar 70.76 tahun.

Gambar 2.11



(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat 2023, diolah)

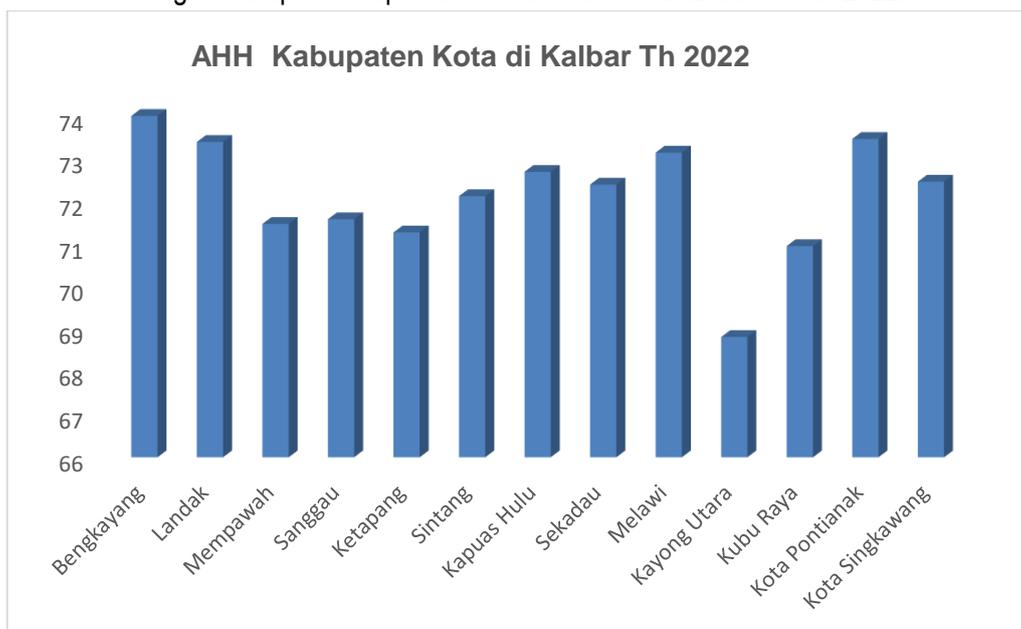
Angka Harapan Hidup tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bengkayang sebesar 74,00 tahun, sedangkan Angka Harapan Hidup yang terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara, yaitu 68.82 tahun. Berikut tabel angka harapan hidup di Kalimantan Barat.

Tabel 2.30
 Angka Harapan Hidup per Kabupaten di Kalimantan Barat
 Tahun 2019-2022

Kab/Kota	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Barat	70.56	70.69	70.76	71.02
Sambas	68.83	68.93	69.08	69.39
Bengkayang	73.67	73.83	73.84	74,00
Landak	72.70	72.84	73.04	73,39
Mempawah	70.90	71.04	71.18	71,47
Sanggau	71.35	71.42	71.42	71,58
Ketapang	71.01	71.10	71.11	71,27
Sintang	71.62	71.71	71.84	72,12
Kapuas Hulu	72.44	72.52	72.53	72,69
Sekadau	71.65	71.84	72.05	72,39
Melawi	72.88	72.97	72.98	73,14
Kayong Utara	68.11	68.28	68.48	68,82
Kubu Raya	70.43	70.59	70.69	70,95
Kota Pontianak	72.80	72.96	73.12	73,46
Kota Singkawang	71.85	72.06	72.18	72,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat,2022.

Gambar 2.12
 Angka Harapan Hidup Kab/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2022



(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat 2023, diolah)

g. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

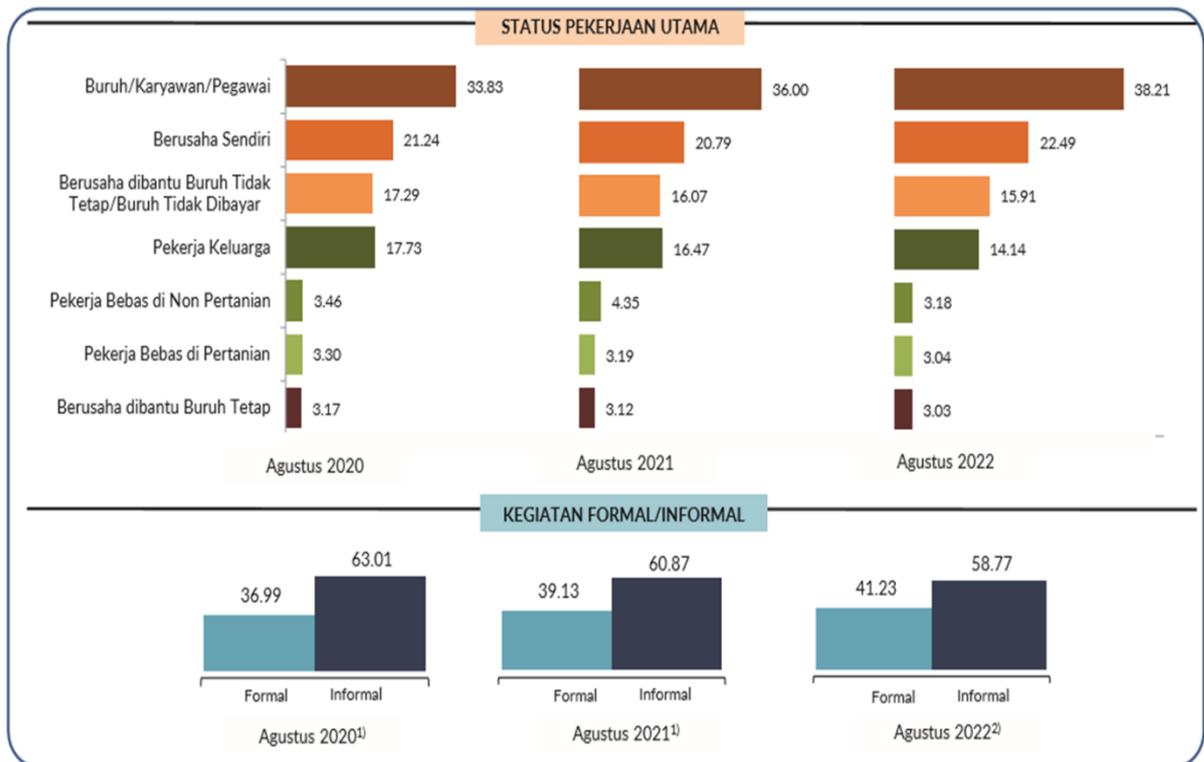
Dari Tabel 2.31 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja setiap tahun fluktuatif. Berdasarkan data pada tabel tersebut pada akhir tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 94.89 dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan.

Tabel 2.31
 Persentase Penduduk Bekerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase penduduk yang bekerja (%)	95.74	95.55	94.19	94.18	94.89

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Tahun 2022

Gambar 2.13
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal Agustus 2020-Agustus 2022



Gambar 2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020–Agustus 2022

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Tahun 2022

Berdasarkan status pekerjaan utama dapat diperoleh gambaran tentang pekerja Formal dan pekerja Informal. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja Formal terdiri dari yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan kategori buruh/karyawan. Sedangkan pekerja Informal adalah yang berstatus berusaha sendiri, bekerja dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja tidak dibayar.

Tabel 2.32
Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018-2022

Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018-Agustus 2022	Status Pekerjaan (Agustus)				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
FORMAL					
~ Berusaha Sendiri	454,906	360,900	554,334	547,975	606,150
~ Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	416,748	324,357	451,245	423,567	428,806
INFORMAL					
~ Berusaha dibantu Buruh Tetap	69,429	39,182	82,733	82,236	81,665
~ Buruh/Karyawan/ Pegawai	881,446	467,783	882,916	948,874	1029836
~ Pekerja Bebas Pertanian	120,077	47,137	86,125	84,081	81,934
~ Pekerja Bebas Non Pertanian		44,591	90,301	114,656	85,707
~ Pekerja Keluarga/tak Dibayar	404,275	326,350	462,728	434,110	381,101
Total	2,346,881	1,610,300	2,610,382	2,635,496	2,695,200

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Tahun 2022

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Indikator kinerja dalam bidang pendidikan pada aspek pelayanan umum bidang pendidikan digambarkan melalui angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs.

1. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan keadaan proporsi kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah tahun 2017 pada untuk jenjang Pendidikan yang merupakan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yaitu jenjang sekolah tingkat SMA/SMK/MA dimana pada tahun 2019 sebesar 255 murid dan naik pada tahun 2020 dan 2021 namun kemudian turun pada tahun 2022 yaitu 294 murid.

Tabel 2.33

Perkembangan Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2022

No	Bidang Urusan Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Angka Putus Sekolah SMA/MA	255	693	882	294

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2021.

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasiya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Tabel 2.34 menunjukkan APK pendidikan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2022.

Tabel 2.34

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2022 (%)

No	Indikator	TAHUN				Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	82,49	84,51	85,21	84,79	-0,49

Sumber: BPS-Kalbar 2023, Susenas 2019-2022

Secara umum, dari tahun 2021-2022 terjadi penurunan APK pendidikan menengah sebesar -0,49 persen. Dengan demikian berarti minat penduduk usia pendidikan menengah untuk mendapatkan pendidikan menengah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang sekolah menengah dan penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di sekolah menengah pada setiap kabupaten/kota disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35

Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Penduduk yang Bersekolah di Sekolah Menengah Berdasarkan Kabupaten di Kalimantan Barat 2021

Kab/Kota	Penduduk Usia 16-18 tahun	Penduduk Bersekolah di Sekolah Menengah	Penduduk Usia 16-18 Bersekolah di Sekolah Menengah
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN BARAT	262.700	198.613	198.613
Sambas	24,850	18,002	13,550

Bengkayang	11,505	8,970	6,506
Landak	19,299	16,338	11,640
Mempawah	48,510	35,662	25,002
Sanggau	19,559	14,189	10,112
Ketapang	29,151	17,184	12,601
Sintang	19,702	15,428	10,938
Kapuas Hulu	11,443	8,986	6,505
Sekadau	8,796	7,500	5,144
Melawi	9,815	8,141	5,849
Kayong Utara	5,708	4,684	3,500
Kubu Raya	27,631	20,446	14,649
Kota Pontianak	11,360	9,823	7.128
Kota Singkawang	15,371	11,642	8,231

Sumber: APK dan APM PAUD, SD, SMP dan SM Tahun Ajaran 2018/2021

Tabel 2.36

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Paket C				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN BARAT	81,90	84,47	90,72	95,23	97,48
Sambas	79,80	83,63	89,78	96,88	94,80
Bengkayang	86,80	94,58	100,35	101,04	101,40
Landak	91,30	91,43	93,61	92,90	96,11
Mempawah	96,40	100,01	105,66	120,16	113,31
Sanggau	80,60	83,47	89,28	95,09	92,36
Ketapang	66,10	68,93	73,95	76,78	77,58
Sintang	83,80	90,63	101,67	111,77	104,18
Kapuas Hulu	85,20	85,25	91,93	93,06	93,97
Sekadau	92,20	99,48	105,10	104,42	107,50
Melawi	91,30	89,92	93,05	98,39	97,68
Kayong Utara	90,30	95,72	98,50	95,42	100,93
Kubu Raya	82,60	85,55	90,97	99,10	97,45
Kota Pontianak	78,60	78,63	87,15	89,83	87,43
Kota Singkawang	79,30	80,13	85,24	88,75	88,28

Sumber : *) BPS Kalbar 2023

3. Angka Partisipasi Murni

Tabel 2.37

Perkembangan Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	57,70	65,27	64,50	64,97	65,36

Sumber: BPS Kalimantan Barat, Susenas 2010-2022

Tabel 2.38
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
KALIMANTAN BARAT	57,70	65,27	64,50	64,97	65,36
Sambas	59,30	67,41	63,35	69,55	69,08
Bengkayang	62,40	76,89	63,79	69,75	70,74
Landak	62,10	72,18	62,33	61,40	63,47
Mempawah	67,20	74,11	78,47	80,90	80,23
Sanggau	55,60	65,12	59,06	62,69	62,35
Ketapang	47,60	54,89	51,62	52,90	54,75
Sintang	59,00	69,26	67,34	70,87	67,71
Kapuas Hulu	57,90	67,80	64,43	66,68	67,32
Sekadau	63,50	76,47	71,78	71,69	73,10
Melawi	61,20	68,00	62,87	60,10	61,72
Kayong Utara	66,50	74,54	70,33	68,65	73,43
Kubu Raya	57,50	65,03	63,38	66,50	67,55
Kota Pontianak	55,80	58,40	71,50	63,63	63,21
Kota Singkawang	55,90	60,84	63,86	62,43	63,13

Sumber : *) BPS Kalbar 2023

Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat telah menunjukkan pencapaian yang cukup positif. Terdapat 4 (empat) Indikator Kerja Utama pada sektor kesehatan yang perlu dicapai, yang salah satunya telah dipaparkan di atas yaitu Angka Harapan Hidup. Tiga indikator lainnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Balita (AKaBa) dengan kondisi faktual saat ini (tahun 2022) secara umum AKB Kalbar mengalami kenaikan yaitu mencapai 11 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara untuk AKI di Kalbar pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 85/100.000 kelahiran hidup dimana pada tahun sebelumnya berada di angka 214/100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.39
Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan
Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi Kalimantan Barat

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	95	130	131	214	85
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7	7	8	8	11

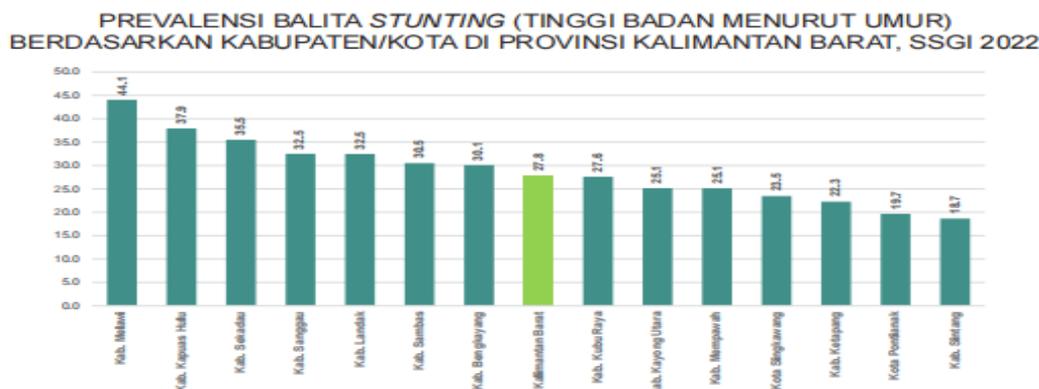
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran	8	7	9	NA	NA
Prevalensi Stunting	28,44	27,30	22,15	17,7	27.8
Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular	NA	NA	NA	7,76	3,45

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, Tahun 2022
 *Prevalensi Stunting Sumber Data Kemenkes RI 2022

a) Pravalensi Stunting.

Gambar 2.14

Prevelensi Balita Stunting Kalimantan Barat Tahun 2022



Sumber Data : Kemenkes RI 2022

Prevelensi Stunting di Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 27.8, lebih tinggi daripada Prevelensi Ballita Stunting Nasional sebesar 21,6 .Prevelensi balita stunting tetinggi di Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Melawi yaitu sebesar 44,1 dan yang terendah di Kabupaten Singang sebesar 18,7.

2.3.1.2. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kondisi perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021-2022 dijelaskan melalui indikator rumah layak huni. Capaian tahun 2022 menunjukkan indikator rumah layak huni sebesar 60,74 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian tersebut lebih rendah yaitu sebesar 61,17 persen pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.40

Kondisi Perumahan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat 2021-2022

No	Indikator	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)
1	Rumah yang layak huni	%	61,17	60,74

Sumber : Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat 2022.

Capaian tahun 2022 menunjukkan persentase penduduk yang terlayani sistem Air Limbah yang memadai (sesuai standar) adalah sebesar 62,23 persen mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 50,42 persen. Sedangkan persentase penduduk yang berakses air minum pada tahun 2022 sebesar 55,28 persen menurun dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 68,79

persen. Sementara itu Panjang jalan permukiman perkotaan dan perdesaan yang telah dibangun pada tahun 2018 yakni 142.111 Kilometer yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Tabe 2.41

Perkembangan Kondisi Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No (1)	Indikator (2)	Satuan (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)
1	Persentase Penduduk yang berakses air minum	%	54,69	66,87	64,03	68,79	55,28
2	Persentase Penduduk yang terlayani sistem Air Limbah yang memadai (sesuai standar)	%	47,52	61,23	61,82	50,42	62,23
3	Persentase Penduduk yang terlayani sistem Drainase skala kota	%		-	-	10,18	-
4	Persentase Penduduk yang terlayani Persampahan sesuai standar	%		-	-	18,44	-
5	Panjang Jalan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	km	142.111	253.000	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022.

Sanitasi adalah perilaku manusia yang disengaja untuk membudayakan kebiasaan hidup bersih dan sehat untuk mencegah manusia terkontaminasi langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya dengan harapan bisa menjaga dan memperbaiki tingkat kesehatan manusia. Kondisi pelayanan sanitasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 62,23. Adapun untuk pelayanan sanitasi setiap kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42

Pelayanan Sanitasi Kabupaten/Kota Tahun 2022

No (1)	Kabupaten / Kota (2)	Total Jumlah Rumah Tangga (KK) (3)	Σ Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi (KK) (4)	Capaian (%) (5)
1	SAMBAS	112,285	92,892	82.73
2	MEMPAWAH	87,545	70,100	80.07
3	SANGGAU	144,195	88,891	61.65
4	KETAPANG	182,934	112,742	61.63
5	SINTANG	133,735	90,498	67.67
6	KAPUAS HULU	85,656	39,170	45.73

7	BENGKAYANG	81,651	37,082	45.42
8	LANDAK	101,071	77,489	76.67
9	SEKADAU	52,413	38,392	73.25
10	MELAWI	66,126	5,061	7.65
11	KAYONG UTARA	28,955	17,662	61.00
12	KUBU RAYA	180,348	117,390	65.09
13	PONTIANAK	160,713	160,147	99.65
14	SINGKAWANG	47,975	45,195	94.21
	JUMLAH	1,076,566	669,979	62.23

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat baik untuk minum, maupun mencuci atau mandi serta untuk keperluannya lainnya. Kebutuhan air bersih di Kalimantan Barat pada umumnya masih bersumber pada air sungai, air danau, dan air hujan. Kebutuhan air bersih di Kalimantan Barat pada umumnya disalurkan dan dikelola oleh PDAM, mapapun oleh masyarakat sendiri. Pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kalimantan Barat belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, karena tidak semua wilayah di Kalbar dapat diakses oleh air bersih. Cakupan pelayanan air bersih di Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 55,28.

Tabel 2.43

Data Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Total Jumlah Rumah Tangga (KK)	Σ JUMLAH RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH (PERPIPAAN DAN NON PERPIPAAN)	PERSENTASE AIR MINUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SAMBAS	125,981	74,971	59.51
2	MEMPAWAH	87,545	55,789	63.73
3	SANGGAU	144,195	73,545	51.00
4	KETAPANG	182,934	128,045	70.00
5	SINTANG	133,735	63,418	47.42
6	KAPUAS HULU	85,656	48,592	56.73
7	BENGKAYANG	81,651	50,184	61.46
8	LANDAK	101,071	22,412	22.17
9	SEKADAU	52,413	38,861	74.14
10	MELAWI	66,126	17,034	25.76

No	Kabupaten / Kota	Total Jumlah Rumah Tangga (KK)	Σ JUMLAH RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH (PERPIPAAN DAN NON PERPIPAAN)	PERSENTASE AIR MINUM
11	KAYONG UTARA	28,676	17,722	61.80
12	KUBU RAYA	178,229	56,191	31.53
13	PONTIANAK	160,713	143,166	89.08
14	SINGKAWANG	47,975	23,591	49.17
	JUMLAH	1,428,925	789,930	55.28

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

a. Jumlah Kabupaten yang Tertangani Infrastruktur Jalan Permukiman Pedesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun

Jumlah Kabupaten yang Tertangani Infrastruktur Jalan Permukiman Pedesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun pada tahun 2018 sebanyak 12 kabupaten dan untuk tahun 2019 dengan target sebanyak 12 kabupaten sudah tercapai.

b. Jumlah Permukiman Perkotaan yang Tertangani Infrastrukturnya

Sudah mencapai target sebanyak 2 Kota dengan realisasi luas terbangun seluas 638 m² dalam bentuk jalan, drainase, lapangan *volley*, *play group*.

c. Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menghendaki bahwa perumahan dan kawasan pemukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan. Dinas Perkim mempunyai tugas dan fungsi yang strategis, bagaimana penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang kumuh, bagaimana penanganan rumah tidak layak huni dan bagaimana meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana serta utilitas. Pada tahun 2020-2022 penanganan rumah tidak layak huni sebagai berikut:

Tabel 2.44
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tahun 2020	Jumlah RTLH Tahun 2020	Penanganan RTLH Tahun 2020-2022		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	192.028	42.634	2.069	150	185
2	Mempawah	64.288	7.019	1.325	175	115
3	Sanggau	144.977	44.641	1.666	300	15
4	Ketapang	121.349	34.165	1.805	883	280
5	Sintang	68.985	17.604	2.984	3.516	801

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tahun 2020	Jumlah RTLH Tahun 2020	Penanganan RTLH Tahun 2020-2022		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Kapuas Hulu	59.928	14.099	2.815	50	1.980
7	Bengkayang	47.177	8.352	2.710	100	129
8	Landak	79.496	15.800	2.343	50	50
9	Sekadau	48.262	8.556	840	420	301
10	Melawi	56.433	11.019	2.059	624	373
11	Kayong Utara	25.985	4.904	1.052	100	140
12	Kubu Raya	136.423	6.618	2.380	2.932	1.444
13	Pontianak	149.937	859	1.478	409	367
14	Singawang	54.192	1.475	1.659	51	25
	Jumlah	1.249.460	217.745	27.185	9.760	6.205

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar tahun 2022

2.3.1.4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Capaian persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat dari 66,94 persen tahun 2021, menjadi 72,28 persen pada tahun 2022. Kondisi irigasi provinsi dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan dari 55,84 persen tahun 2021, menjadi 56,90 persen pada tahun 2022. Sementara indikator persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang juga mengalami Peningkatan dari 68 persen tahun 2021, menjadi 72 persen pada tahun 2022. Berikut disampaikan kondisi pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022

a. Jalan dan Jembatan

Pada tahun 2021 kondisi Panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap yakni sebesar 66,94 persen dari total Panjang jalan provinsi sepanjang 1.534,75 Kilometer. Sedangkan dari hasil pembaharuan data yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi mantap adalah 1181,60 Kilometer atau 72,28 persen. Untuk Jumlah Jembatan yang dikelola pada tahun 2022 yakni sebanyak 906 unit dengan total Panjang jembatan yakni 11.392,74 Meter.

Tabel 2.45

Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Kilometer	762,98	871,85	921,61	1027,51	1109,31
2	Panjang Jalan Provinsi	Kilometer	1.534,75	1.534,75	1.534,75	1.534,75	1.534,75

3	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Persen	49,71	56,81	60,05	66,94	72,28
4	Panjang Jembatan Provinsi	Meter	11.392,74	11.392,74	11.392,74	11.392,74	11.392,74
5	Jumlah Jembatan	Unit	906	906	906	906	906

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022.

1. Peningkatan Persentase Kemantapan Jalan

Panjang jalan yang berstatus jalan provinsi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 72,28 persen dari 1.534,75 km. Berikut tabel jenis dan kondisi jalan di Kalimantan Barat Tahun 2022 :

Tabel 2.46
Kondisi Jalan Tahun 2020 - 2022

No	Kondisi permukaan	Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022	
		Panjang (km)	Persentase	Panjang (km)	Persentase	Panjang (km)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mantap	921,61	60,05	1027,51	66,95	1109,31	72,28
2	Tidak Mantap	616,13	39,95	507,25	33,05	425,43	27,72
	Total	1.534,74	100	1.534,74	100	1.534,74	100

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar Tahun 2022.

b. Sumber Daya Air

1) Jenis dan Kriteria Status Daerah Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, jenis dan kriteria status Daerah Irigasi diklasifikasikan sebagai berikut :

Berdasarkan jenisnya, Daerah Irigasi terdiri dari :

- a. Daerah Irigasi Permukaan;
- b. Daerah Irigasi Air Bawah Tanah;
- c. Daerah Irigasi Rawa;
- d. Daerah Irigasi Pompa;
- e. Daerah Irigasi Tambak.

Kriteria penetapan status Daerah Irigasi, yakni sebagai berikut :

- a. Kewenangan Pemerintah Pusat
 - Luasan > 3.000 Ha;
 - Lintas Negara;
 - Lintas Provinsi.
- b. Kewenangan Pemerintah Provinsi
 - Luasan 1.000 - 3.000 Ha;
 - Lintas Kabupaten/Kota.
- c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

- Luasan < 1.000 Ha.
- 2) Daerah Irigasi Provinsi
Luas Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jenisnya, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.47 berikut :

Tabel 2.47
Kondisi Daerah Irigasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No.	Jenis Daerah Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi	Luasan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Daerah Irigasi Permukaan (D.I.)	12	6.765
2.	Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.)	35	54.520
3.	Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.)	1	1.350
Total		48	62.635

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar, Tahun 2022.

- 3) Kondisi Irigasi Provinsi
Kondisi irigasi diklasifikasikan, sebagai berikut :
1. Kondisi baik : Tingkat kerusakan < 10
 2. Kondisi rusak ringan : Tingkat kerusakan 10 - 20
 3. Kondisi rusak sedang : Tingkat kerusakan 21 - 40
 4. Kondisi rusak berat : Tingkat kerusakan > 40

Kondisi irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per Tahun 2022 berdasarkan jenisnya diuraikan pada 2.48 di bawah.

Tabel 2.48
Kondisi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No.	Jenis Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Kondisi per Tahun 2022							
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Daerah Irigasi Permukaan (D.I.)	6.765,00	2.492,14	36,84	1.397,00	20,65	449,00	6,64	2.426,86	35,87
2.	Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.)	54.520,00	32.475	59,57	5.689,00	10,43	6.518	11,96	9.838,00	18,05
3.	Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.)	1.350,00	675,00	50,00	202,50	15,00	67,50	5,00	405,00	30,00
Total		62.635	35.642,14	56,90	7288,50	11,64	7034,50	11,23	12.669,86	20,23

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar.

Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik tahun 2022 sebesar 56,90. Pengelolaan jaringan daerah irigasi rawa, daerah jaringan irigasi permukaan dan daerah jaringan irigasi tambak di Kalimantan Barat mempunyai peranan yang strategis, mengingat jaringan tersebut berperan dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat.

Secara umum luas jaringan irigasi pada tahun 2022 mencapai 62.635 ha dengan kondisi baik mencapai 35.642,14 ha (56,90), kondisi rusak ringan mencapai 7.288,50 (11,64), kondisi rusak sedang mencapai 7.034,50 (11,23) dan kondisi rusak berat mencapai 12.669,86 ha (20,23).

Luas jaringan irigasi rawa pada tahun 2022 mencapai 54.520 ha, dengan kondisi baik mencapai 32.475 ha, kondisi rusak ringan mencapai 5.689 ha, kondisi rusak sedang mencapai 6.518 ha dan kondisi rusak berat mencapai 9.838 ha. Sedangkan luas jaringan daerah Irigasi Permukaan pada tahun 2022 mencapai 6.765 ha, dengan kondisi baik mencapai 2.492,14 ha, kondisi rusak ringan mencapai 1.397 ha, kondisi rusak sedang mencapai 449 ha dan kondisi rusak berat mencapai 2.426,86 ha dan untuk luas jaringan daerah irigasi tambak pada tahun 2022 mencapai 1.350 ha, dengan kondisi baik mencapai 675 ha, kondisi rusak ringan mencapai 202,50 ha, kondisi rusak sedang mencapai 67,50 ha dan kondisi rusak berat mencapai 405 ha.

Tabel 2.49

Kondisi Irigasi Rawa di Kalbar Tahun 2018-2022

No	Kondisi Daerah Irigasi Rawa	Capaian 2018 (Ha)	Capaian 2019 (Ha)	Capaian 2020 (Ha)	Capaian 2021 (Ha)	Capaian 2022 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Baik	28.784	30.407	30.018	31.325	32.475
2	Rusak Ringan	6.795	6.795	6.274	5.689	5.689
3	Rusak Sedang	6.860	6.860	6.800	6.620	6.518
4	Rusak Berat	12.082	10.459	11.428	10.887	9.838
	Jumlah	54.520	54.520	54.520	54.520	54.520

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

Tabel 2.50

Kondisi Irigasi Permukaan di Kalbar Tahun 2018-2022

No	Kondisi Daerah Irigasi Permukaan	Capaian 2018 (Ha)	Capaian 2019 (Ha)	Capaian 2020 (Ha)	Capaian 2021 (Ha)	Capaian 2022 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Baik	2.433	2.614	2.480	2.492,14	2.492,14
2	Rusak Ringan	2.404	2.404	1.397	1.397	1.397
3	Rusak Sedang	459	357	449	449	449
4	Rusak Berat	1.469	1.391	2.439	2.426,86	2.426,86
	Jumlah	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Tabel 2.51

Kondisi Irigasi Tambak di Kalbar Tahun 2018-2022

No	Kondisi Daerah Irigasi Tambak	Capaian 2018 (Ha)	Capaian 2019 (Ha)	Capaian 2020 (Ha)	Capaian 2021 (Ha)	Capaian 2022 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Baik	675	675	675	675	675
2	Rusak Ringan	203	202,5	203	202,50	202,50
3	Rusak Sedang	68	67,5	68	67,50	67,50
4	Rusak Berat	405	405	405	405	405
	Jumlah	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Indikator lainnya untuk sumber daya air digambarkan melalui Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir, kapasitas tersedianya air baku

untuk memenuhi kebutuhan pokok dan berkurangnya persentase pantai kritis. Untuk capaian selama periode 2018-2022 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.52

Kondisi Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	Persentase	46,76	50,64	51,18	52,77	53,02
2.	Persentase peningkatan pengendalian banjir (sungai dan saluran) dalam kondisi baik	Persentase	-	3,88	0,54	1,59	0,25
3	Kapasitas tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok	Liter/detik	2	2	-	-	-
4	Berkurangnya persentase pantai kritis	Persentase	56,86	56,47	-	-	-

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar, Tahun 2022.

Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir tahun 2022 sebesar 53,02 sedangkan capaian tahun 2021 sebesar 52,77. Capaian tahun 2019 tersebut telah mencapai target (target 2022 52,70).

Persentase berkurangnya pantai kritis tahun 2018 sebesar 56,85 sedangkan tahun 2019 sebesar 56,47. Wilayah pesisir di Kalimantan Barat sebanyak 7 kabupaten/Kota yang meliputi Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Adapun panjang pantai kritis di Kalimantan Barat pada tahun 2019 mencapai 59.530 m. Dari total panjang pantai kritis yang ada di Kalbar yang belum tertangani sampai tahun 2019 mencapai 33.619,41 meter, sedang yang sudah tertangani mencapai 25.910,59 meter. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 pantai kritis tidak pernah lagi ditangani sehingga data tersebut masih sama dengan tahun 2019.

Tabel 2.53

Penanganan Pantai Kritis

Uraian	Tahun 2018 (m)	Tahun 2019 (m)	Tahun 2020 (m)	Tahun 2021 (m)	Tahun 2022 (m)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panjang Pantai Kritis (m)	59.530	59.530	59.530	59.530	59.530
Penanganan pantai kritis	0	224	224	224	224
Panjang Pantai Kritis Yang sudah ditangani	25.686,59	25.910,59	25.910,59	25.910,59	25.910,59

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Adapun capaian indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :

a. Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap

Persentase panjang jalan mantap pada tahun 2021 adalah sebesar 66,94 dan pada tahun 2022 persentase panjang jalan mantap meningkat menjadi sebesar 72,28.

b. Persentase Irigasi Provinsi dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi provinsi yang berada dalam kondisi baik pada tahun 2021 adalah sebesar 55,84 sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 56,90

c. Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir

Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai yang berfungsi sebagai pengendali banjir pada tahun 2021 adalah sebesar 52,77 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 53,02

d. Persentase Penduduk yang berakses air minum

Persentase penduduk yang memiliki akses air minum pada tahun 2021 adalah sejumlah 68,79 dan pada tahun 2022 juga sebesar 68,79

e. Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (sesuai standar)

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai pada tahun 2021 adalah 50,42 dan pada tahun 2022 adalah 50,42

f. Jumlah luasan bangunan Gedung yang dibangun dan ditata (m2)

Jumlah luasan bangunan Gedung yang dibangun dan ditata pada tahun 2021 adalah sebesar 29.643,24 dan pada tahun 2022 adalah sebesar 15.026,08

g. Jumlah Luasan kawasan yang dibangun dan ditata (m2)

Jumlah luasan Kawasan yang dibangun dan ditata pada tahun 2021 adalah sebesar 3.227,83 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 6.311,63

h. Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat

Persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang memiliki sertifikat pada tahun 2021 adalah sebesar 75,11 dan pada tahun 2022 naik menjadi 78,56

i. Presentase data yang tersedia di SIPJAKI

Persentase Data yang tersedia di SIPJAKI tahun 2020 adalah sebesar 35,71 sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 data belum tersedia.

j. Persentase pelayanan mutu jasa konstruksi

Persentase pelayanan mutu jasa konstruksi tahun 2020 adalah 78, sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 data belum tersedia

k. Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang

Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2021 adalah sebesar 68 sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 72

2.3.1.5. Sosial

a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan rehabilitasi

Fasilitas sosial disediakan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Pemerintah melalui Dinas Sosial menyediakan fasilitas yang dimaksud. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Panti Asuhan, Panti Asuhan Disabilitas, Panti Jompo, Rumah Singgah, Panti Sosial Anak, Panti Sosial Lanjut Usia, dan Rumah Rehabilitasi NAPZA.

Tabel 2.54
Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata (Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Panti Asuhan Anak Berbasis Masyarakat	Unit	118	139	136	139	139	0,57
2	UPT Panti Sosial Anak	Unit	1	1	1	1	1	0
3	Panti Jompo Berbasis Masyarakat	Unit	4	9	10	10	10	1.1
4	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia	Unit	2	2	2	1	1	0
5	Rumah Rehabilitasi NAPZA	Unit	5	5	5	5	5	400
Jumlah seluruh sarana sosial		Unit	130	156	154	156	156	80,13

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2022.

Dapat dilihat dalam Tabel 2.56 bahwa dalam kurun waktu 2018-2019 jumlah sarana sosial di Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan. Sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan hingga pada tahun 2021-2022 kembali mengalami kenaikan sebesar 2. Berdasarkan data di atas pula, fasilitas sosial yang tersedia di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Panti sosial yang berbasis masyarakat dan panti sosial milik pemerintah daerah dengan status sebagai unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Tersedianya sarana sosial ini diharapkan dapat membantu bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Tabel 2.55
Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Jenis Lembaga Kesejahteraan Sosial	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Panti Asuhan Anak	Unit	139
2.	Panti Asuhan Disabilitas	Unit	6

3.	Panti Jompo	Unit	10
4.	Rumah Rehabilitasi NAPZA	Unit	5
5.	Rumah Singgah	Unit	1
6.	Panti Sosial Anak	Unit	1
7.	Panti Sosial Lanjut Usia	Unit	1
	Jumlah seluruh sarana sosial	Unit	163

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2022.

b. PKMS yang memperoleh bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.56

Perkembangan Jumlah PMKS 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	jiwa	1.532	2.196	2.796	3.396	3.996
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	jiwa	1.532	2.196	2.796	3.396	3.996
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2022.

Pada Tabel 2.58 dapat dilihat bahwa, perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan 2022. Kenaikan bantuan sosial pada tahun 2018-2022 dikarenakan pada kurun waktu tersebut terjadi pandemi Covid19 yang memberikan dampak sosial yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2018-2022, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 100 persen. Meningkatnya jumlah PMKS di Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2022 mengindikasikan masih banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggungjawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial.

PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

c. Cakupan Anak Terlantar yang Dibina

Sebagaimana yang tertera dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, seluruh anak terlantar yang ada di Provinsi Kalimantan Barat seharusnya menjadi tanggungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui dinas-dinas terkait. Berikut ini merupakan data jumlah anak terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.

Tabel 2.57

Anak Terlantar yang Dibina di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata (Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Anak terlantar yang dibina	Jiwa	-	-	-	30	60	45

Sumber: Dinas Sosial, 2022.

Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2021-2022 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah anak terlantar yang dibina sebanyak 30 jiwa dan terus mengalami peningkatan sehingga mencapai 60 jiwa pada tahun 2022. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.58

Data Sebaran Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sambas	165	1.69%
2	Bengkayang	384	3.94%
3	Landak	800	3.94%
4	Mempawah	835	8.57%
5	Sanggau	1874	19.24%
6	Ketapang	925	9.50%
7	Sintang	723	9.50%
8	Kapuas Hulu	469	9.50%
9	Sekadau	114	1.17%
10	Melawi	264	2.71%

No (1)	Kabupaten/Kota (2)	Jumlah (3)	Persen (4)
11	Kayong Utara	400	4.11%
12	Kubu Raya	857	8.80%
13	Singkawang	505	5.19%
14	Pontianak	1,423	14.61%
JUMLAH		9738	100%

Sumber Data :: Dinas Sosial, Provinsi Kalimantan Barat 2022

Berdasarkan data di atas sebaran penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 terbanyak di Kabupaten Sanggau yakni 1.874 orang (19,24%) disusul Kota Pontianak sebanyak 1.423 orang (14,61%) dan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Sekadau yakni 114 orang (1,17%).

Sementara itu anak terlantar baru penerima bantuan di Kalimantan Barat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.59
Anak Terlantar Baru Penerima Bantuan (2022)

No (1)	Kabupaten/Kota (2)	Jumlah (3)	Persen (4)
1	Sambas	25	0.92
2	Bengkayang	43	1.58
3	Landak	30	1.10
4	Mempawah	206	7.57
5	Sanggau	37	1.36
6	Ketapang	35	1.29
7	Sintang	34	1.25
8	Kapuas Hulu	0	0.00
9	Sekadau	15	0.55
10	Melawi	70	2.57
11	Kayong Utara	2110	77.49
12	Kubu Raya	39	1.43
13	Singkawang	42	1.54
14	Pontianak	37	1.36
JUMLAH		2723	100.00

Sumber : Dinas Sosial, 2022.

Berdasarkan data pada tabel di atas anak terlantar baru penerima bantuan terbanyak ada di Kabupaten Kayong Utara yakni sebanyak 2.110 anak atau 77.49 dari keseluruhan penerima bantuan baru pada tahun 2022 dengan jumlah anak sebanyak 2.723 anak.

2.3.1.6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Keamanan dan Ketertiban Umum

Gambaran kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai pelaksanaan urusan wajib bidang pelayanan dasar digambarkan melalui perkembangan jumlah

aparatur pamong praja, aparatur linmas serta jumlah kasus unjuk rasa seperti termuat dalam tabel 2.55 berikut :

Tabel 2.60

Perkembangan Kondisi Aparatur Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022

<i>Variabel</i>	<i>Satuan</i>	2018	2019	2020	2021	2022
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
<i>Jumlah Aparat Pamong Praja</i>	Orang	110	101	113	114	110
<i>Jumlah Aparat Linmas</i>	Orang	19.528	22.652	-	-	-
<i>Jumlah Petugas Patroli Satpol PP</i>	Orang	93	84	-	-	-
<i>Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat</i>	Orang	12	12	-	-	-
<i>Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Politik</i>	Kasus	-	4	-	-	-
<i>Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Ekonomi</i>	Kasus	-	2	-	-	-
<i>Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Agama</i>	Kasus	-	-	-	-	-

Sumber : SIPD - Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar dan Polda Kalbar 2022

b. Bencana

Kalimantan Barat dengan letak geografis yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim dan abrasi yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana yang dilakukan perlu diawali dengan pemahaman risiko bencana yang ada melalui kajian risiko bencana yang ada, untuk kemudian dijadikan dasar perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Risiko Bencana merupakan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunungapi, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi.

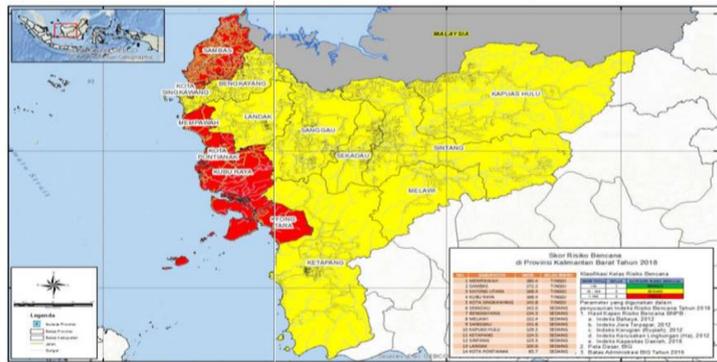
Indeks Risiko Bencana Indonesia merupakan penilaian tingkat risiko bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tingkat risiko bencana dihitung berdasarkan indeks bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitas di suatu daerah. Melalui informasi tingkat risiko bencana tersebut, para pelaku penanggulangan bencana dapat menentukan upaya prioritas di daerah masing-masing untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan upaya penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas ini, pada akhirnya dapat menurunkan indeks risiko bencana di suatu daerah. Indeks Risiko Bencana Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.61
Indeks Resiko Bencana Kalimantan Barat Tahun 2020, 2021 dan 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	KALIMANTAN BARAT	138,49	138,49	138,49
1	Kab. Sambas	172,20	172,20	172,20
2	Kab. Bengkayang	134,33	134,33	134,33
3	Kab. Mempawah	180,40	180,40	180,40
4	Kab. Landak	100,64	100,64	100,64
5	Kab. Kubu Raya	168,40	168,40	168,40
6	Kab. Sanggau	131,60	131,60	131,60
7	Kab. Sekadau	142,00	142,00	142,00
8	Kab. Sintang	123,26	123,26	123,26
9	Kab. Melawi	132,40	132,40	132,40
10	Kab. Kapuas Hulu	129,23	129,23	129,23
11	Kab. Ketapang	124,47	124,47	124,47
12	Kab. Kayong Utara	168,40	168,40	168,40
13	Kota Pontianak	85,66	85,66	85,66
14	Kota Singkawang	145,82	145,82 </td <td>145,82</td>	145,82

Sumber : IRBI, 2018 dan InaRISK, 2022.

Gambar 2.15
Peta Indeks Resiko Bencana Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
(Sumber : IRBI 2018 BNPB Tahun 2019)



c. Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana

Kondisi Penanggulangan Bencana digambarkan melalui Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana yang meliputi informasi ketersediaan sarana dan prasarana berupa kendaraan roda 2, roda 4, roda >4, kapal penyelamat, alat komunikasi, peralatan kesehatan, mobil tangka air, MCK mobile, dan Perlengkapan pendukung hunian sementara. Informasi dimaksud secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.62
Jumlah Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana
Tahun 2018-2022

Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kendaraan Roda 2	Unit	6	6	6	6	6
Kendaraan Roda 4	Unit	5	5	5	6	6
Kendaraan Roda > 4	Unit	5	5	5	5	5
Kapal Penyelamat	Unit	4	4	4	4	4
HandyTalky	Unit	14	14	14	14	14
Mobil Ambulance	Unit	1	1	1	1	1
Mobil Tangki Air	Unit	1	1	1	1	1
MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile	Unit	1	1	1	1	1
Tenda Hunian Sementara	Unit	26	26	26	26	26
Dapur Umum	Unit	1	1	1	1	1
Generator	Unit	4	4	4	6	6

Sumber : SIPD – BPBD Prov. Kalbar.

d. Indeks Kebebasan Sipil

Tabel 2.63
Indeks Kebebasan Sipil
Tahun 2020-2022

No	Indikator	Capaian (poin)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kebebasan Sipil	81,09	81,15	* 81,24

Sumber: Badan Kesbangpol Prov. Kalbar, Tahun 2022.

(* data sementara, capaian tahun 2022 belum rilis dari BPS)

e. Masyarakat yang memperoleh layanan dalam menegakkan PERDA/PERKADA

Tabel 2.64
Masyarakat Yang Memperoleh Layanan Dalam Menegakkan PERDA/PERKADA
Tahun 2020-2022

No	Indikator	Capaian (orang)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Masyarakat yang memperoleh layanan dalam menegakkan PERDA/PERKADA	1454	3370	3475

Sumber: Satpol PP Prov. Kalbar, Tahun 2023.

f. Orang/Kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi

Tabel 2.65

Orang/Kelompok Masyarakat Miskin Yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum Litigasi/Non Litigasi	100	100

Sumber: Biro Hukum Setda Prov. Kalbar, Tahun 2023.

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Gambaran kondisi urusan tenaga kerja selain telah digambarkan sebelumnya melalui Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diamati dari perkembangan jumlah balai latihan kerja, jumlah pelatihan kerja jumlah tenaga kerja di luar negeri serta jumlah perusahaan yang memperkerjakan warga negara asing seperti termuat dalam tabel 2.61 berikut :

Tabel 2.66

Perkembangan Kondisi Urusan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat
Tahun 2018-2022

Variabel	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Balai Latihan Kerja	Lembaga	7	7	7	7	7
Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja	Orang	2000	2214	-	1988	2041
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terakreditasi	Lembaga	11	5	6	6	6
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Belum Terakreditasi	Lembaga	49	54	42	49	54
Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri**	Orang	-	-	-	-	-
1. Terdidik	Orang	1.814	1.421	-	-	-
2. Tidak Terdidik	Orang	N/A	N/A	-	-	-
Jumlah Kasus PMI di Luar Negeri	Kasus	906	198	-	-	-
Jumlah Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara Asing	Perusahaan	57	40	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar, Tahun 2022.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah tingkat partisipasi angkatan kerja dimana unsurnya jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja diatas 15 tahun ke atas. Dapat juga dikatakan bahwa TPAK sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Tabel 2.67
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Agustus 2021-2022

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
	2021	2022	+/-
(1)	(2)	(3)	(4)
Sambas	72,84	74,12	1,28
Bengkayang	70,16	69,95	-0,21
Landak	70,19	72,29	2,1
Mempawah	60,86	63,31	2,45
Sanggau	69,41	70,27	0,86
Ketapang	64,44	60,57	-3,87
Sintang	77,78	73,14	-4,64
Kapuas Hulu	72,35	77,68	5,33
Sekadau	71,98	74,31	2,33
Melawi	72,31	74,41	2,1
Kayong Utara	65,53	70,02	4,49
Kuburaya	67,47	64,66	-2,81
Pontianak	61,94	64,82	2,88
Singkawang	64,31	68,86	4,55
Kalimantan Barat	68.65	68.30	-0.35

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2023

Tabel 2.68
Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Terbanyak dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2021-2022

Kab/Kota	Angkatan Kerja						Bukan Angk. Kerja	
	Bekerja		Pengangguran		Jumlah		2021	2022
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Sambas	278.708	282.918	11.534	15.143	290.242	298.061	108.222	104.085
Bengkayang	126.749	131.176	5.858	3.831	132.607	135.007	56.398	57.985
Landak	192.004	202.555	6.387	3.673	198.391	206.228	84.264	79.058
Mempawah	111.290	117.570	9.302	9.499	120.592	127.069	77.561	73.647
Sanggau	242.376	248.149	8.665	9.707	251.041	257.856	110.645	109.082
Ketapang	234.852	225.481	17.523	16.217	252.375	241.698	139.239	157.363
Sintang	234.184	224.629	9.625	6.899	243.809	231.528	69.659	85.388
Kapuas Hulu	140.523	156.483	6.128	3.535	146.651	160.018	56.047	45.974
Sekadau	105.744	112.073	3.179	1.513	108.923	113.586	42.405	39.275
Melawi	111.710	117.714	3.056	2.339	114.766	120.053	43.943	41.287
Kayong Utara	53.087	58.109	2.084	1.860	55.171	59.969	29.026	25.676

Kab/Kota	Angkatan Kerja						Bukan Angk. Kerja	
	Bekerja		Pengangguran		Jumlah			
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kuburaya	273.284	266.217	20.633	19.643	293.917	285.860	141.677	156.234
Pontianak	277.910	303.616	39.251	33.452	317.161	337.068	194.903	182.933
Singkawang	100.032	109.833	10.082	10.369	110.114	120.202	61.099	54.363
Kalbar	2.482.453	2.369.015	153.307	137.680	2.635.760	2.506.695	1.215.088	1.212.350

Sumber : BRS – BPS Kalbar, 2022

Tabel 2.69
Perkembangan Kondisi Urusan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat
Tahun 2021-2022

Variabel	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Balai Latihan Kerja	Lembaga	7	7
Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja	Orang	1988	2041
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terakreditasi	Lembaga	6	6
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Belum Terakreditasi	Lembaga	49	54
Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri**			
1. Terdidik	Orang	-	-
2. Tidak Terdidik	Orang	-	-
Jumlah Kasus TKI di Luar Negeri	Kasus	-	-
Jumlah Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara Asing	Perusahaan	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar, 2022.

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2022 IPG Kalimantan Barat sebesar 87,61 mengalami peningkatan 0,06 poin dibandingkan kondisi 2021 sebesar 86,95. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian dari tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan dari 71,14 pada tahun 2021 menjadi 73,18 pada tahun 2022. Akan tetapi capaian tersebut masih berada di bawah capaian nasional.

Tabel 2.70
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (2018-2022)

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	Kalimantan Barat	Indonesia	Kalimantan Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	86,74	90,99	64,47	72,10

2019	86,81	91,07	68,07	75,24
2020	86,87	91,06	68,07	76,67
2021	86,95	91,27	71,14	76,26
2022	87,61	91,63	73,18	76,59

Sumber : Dinas PPPA Prov. Kalbar (Data BPS), Tahun 2022.

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Apabila IPG=IPM maka dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya bila IPG < IPM maka terjadi kesenjangan gender. Sedangkan IDG merupakan indikator yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Tabel 2.71

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat (2021-2022)

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
NASIONAL	91.27	91.63
KALIMANTAN BARAT	86.95	87.61
Sambas	87.00	87.96
Bengkayang	82.79	82.86
Landak	88.44	88.83
Mempawah	87.80	88.53
Sanggau	81.19	82.14
Ketapang	88.60	89.12
Sintang	86.73	87.38
Kapuas Hulu	84.95	85.99
Sekadau	82.72	83.40
Melawi	80.15	80.82
Kayong Utara	86.04	87.07
Kubu Raya	84.30	85.26
Kota Pontianak	94.01	94.10
Kota Singkawang	92.00	92.83

Sumber : BPS Nasional, data diolah.

Tabel 2.72

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Regional Kalimantan

IDG	TAHUN	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
INDONESIA	75.57	76.26
Kalimantan Barat	68.07	71.14
Kalimantan Tengah	82.41	82.08
Kalimantan Selatan	74.48	74.58
Kalimantan Timur	65.54	66.64
Kalimantan Utara	64.31	61.70

Sumber : BPS Nasional, data diolah 2023

2.3.1.9. Pangan

Rata-rata konsumsi energi pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 1892 Kal/Kap/hari sedangkan kenaikan terjadi pada rata-rata konsumsi protein yaitu mencapai 58,2 gram/Kap/hari dan Pola Pangan Harapan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 82.5 dibandingkan tahun 2021.

Tabel 2.73

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2018-2022

Indikator (1)	Satuan (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)
Indeks Ketahanan Pangan		n.a	55,17	71,13	71,32*	70,81
Jumlah Cadangan Beras	Ton	246,8	246,8	212,375	286,62	216,50
Jumlah Cadangan Beras yang digunakan untuk Penanganan Bencana	Ton	n/a	n/a	126,375	270,119	n/a
Total Kebutuhan Beras	Ton	570.194	577.946	604.138	567.978	516.736

Sumber : Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat 2022,
 * Data Sementara Olahan Indeks Badan Ketahanan Pangan
 ** Proyeksi Baseline Susenas 2020

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi pangan masyarakat terbagi menjadi konsumsi energi dan konsumsi protein. Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 82.5 dimana pada tahun 2021 hanya sebesar 76,7 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.74

Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2018-2022

INDIKATOR (1)	SATUAN (2)	2018 (3)	2019* (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)
Rata-Rata Konsumsi Energi	Kal/Kap/Hari	1.926	1.913	1908	1941	1892
Angka Kecukupan Energi		91,7	91,1	90,9	92,4	90,1
Rata-Rata Konsumsi Protein	Gram/Kap/Hari	55,8	56	55,6	57,2	58,2
Angka Kecukupan Protein		97,9	98,2	97,6	100,3	102,1
Pola Pangan Harapan (PPH)		74,8	76,3	76,4	76,7	82,5
Total Kebutuhan Beras	Ton	570.194	577.946	604.138	567.978	516.736

Sumber : Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat 2022,

Ketersediaan beras sebagai salah satu konsumsi pangan utama masyarakat di Kalimantan Barat digambarkan pada tabel di bawah ini dimana ketersediaan beras yang paling tinggi berada di Kabupaten Kubu Raya diikuti oleh Kab Sambas dan yang paling rendah adalah Kab Landak , sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.75

Ketersediaan Beras (Ton) Per Kab/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	81.090	99.247	121.147,04	825.892	219.516
2	Bengkayang	13.669	21.336	19.726,65	612.199	127.676
3	Landak	47.440	60.536	75.712,86	40.845	22.920
4	Mempawah	30.939	40.057	51.936,33	416.319	40.894
5	Sanggau	30.802	50.104	42.941,25	1.151.352	103.279
6	Ketapang	36.631	64.061	70.326,74	367.834	49.112
7	Sintang	9.416	21.055	13.399,19	530.435	202.195
8	Kapuas Hulu	12.652	14.459	13.803,29	36.144	30.307
9	Sekadau	12.989	20.276	18.214,01	56.363	37.391
10	Melawi	2.416	6.881	5.702,48	220.440	36.239
11	Kayong Utara	27.160	24.939	39.194,98	321.012	90.342
12	Kubu Raya	54.412	68.539	72.468,02	410.028	686.561
13	Kota Pontianak	507	278	419,36	326.956	254.310
14	Kota Singkawang	5.975	7.244	8.111,27	138.943	37.211

Sumber : Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat 2022.

Tabel 2.76

Rasio Ketersediaan Pangan Dan Konsumsi Per Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Sambas	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
2	Bengkayang	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
3	Landak	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
4	Mempawah	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
5	Sanggau	DEFISIT	SURPLUS	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
6	Ketapang	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
7	Sintang	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
8	Kapuas Hulu	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
9	Sekadau	DEFISIT	SURPLUS	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
10	Melawi	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
11	Kayong Utara	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
12	Kubu Raya	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
13	Kota Pontianak	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
14	Kota Singkawang	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS

Sumber : Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat 2022.

Pada tahun 2020 masih terdapat 8 kabupaten/kota yang mengalami defisit pada rasio ketersediaan pangan dan konsumsi, namun pada tahun 2021 dan 2022 semua kab/kota sudah mengalami surplus.

2.3.1.10. Pertanian

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah sertifikat hak atas tanah yang cukup signifikan, hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan sertifikat hak atas tanah bidang. Dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten dengan Jumlah Bidang Sertifikat Hak Atas Tanah yang paling banyak yang telah diberikan yakni sebanyak 49.853 bidang.

Tabel 2.77

Perkembangan Redistribusi Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kalimantan Barat 2017-2022

No	Wilayah	SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (BIDANG)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KAB. SAMBAS	10.011	12.363	49.724	4.870	1.130	1.000
2	KAB. MEMPAWAH	12.692	4.757	43.862	4.026	6.477	2.000
3	KAB. SANGGAU	9.883	2.285	34.564	2.946	13.384	1.900
4	KAB. KETAPANG	14.256	10.086	64.853	2.350	8.650	2.720
5	KAB. SINTANG	13.799	22.565	6.733	7.350	6.150	4.800
6	KAB. KAPUAS HULU	3.500	12.689	2.209	7.485	515	2.161
7	KAB. BENGKAYANG	4.000	16.979	2.872	5.370	6.130	4.004
8	KAB. LANDAK	14.500	21.246	9.270	9.000	3.048	2.500
9	KAB. SEKADAU	3.902	12.278	2.954	900	13.490	900
10	KAB. MELAWI	5.000	12.497	2.777	3.543	3.144	3.543
11	KAB. KAYONG UTARA	3.000	8.438	4.950	1.500	3.500	1.857
12	KAB. KUBU RAYA	20.671	49.853	11.214	2.500	3.500	NA
13	KOTA PONTIANAK	2.000	17.914	640	NA	NA	NA
14	KOTA SINGKAWANG	16.195	16.927	1.613	NA	NA	NA
KALIMANTAN BARAT		12.079	133.409	277.809	51.840	69.118	27.385

Sumber : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kanwil Prov Kalbar, Tahun 2022.

2.3.1.11. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai ukuran indikator kualitas lingkungan hidup apakah dalam kondisi baik atau buruk. Informasi kualitas lingkungan meliputi kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan yang direpresentasikan melalui nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Air (IKA) diukur berdasarkan kualitas air atas parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fospat, Fecal Coli dan Total Coliform, Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan Kualitas Udara atas parameter SO₂ dan NO₂ sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan Kualitas Tutupan Lahan sesuai luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Indeks Kualitas Air (IKA) ditentukan berdasarkan nilai dari Indeks Pencemaran. Nilai IKA berkisar antara 0 hingga 100. Nilai ideal adalah 100 merupakan gambaran kualitas air terbaik sedangkan 0 merupakan kondisi kualitas air terburuk. Nilai IKA dipengaruhi oleh : (1) penurunan beban pencemaran, (2) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global, (3) penggunaan air, serta (4) tingkat erosi dan sedimentasi.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Begitu juga dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), nilai IKTL berkisar antara 100 hingga 0. Nilai 100 menggambarkan kondisi kualitas tutupan lahan terbaik, sedangkan nilai 0 merupakan kondisi tutupan lahan terburuk. Secara lengkap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.78
Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU),
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,80	50,00	51,67	54,36	55,52
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,90	90,07	88,88	90,71	90,90
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	-	-	73,25	77,83	63,30
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	64,19	59,76	54,22	59,35	59,05
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,09	65,92	70,07	72,96	71,90

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

IKLH dapat digunakan sebagai informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain itu IKLH dapat juga menggambarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digambarkan melalui indeks kualitas air tahun 2022 adalah sebesar 55,52. Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digambarkan melalui indeks kualitas udara tahun 2022 adalah sebesar 90,90

Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Estimasi timbulan sampah berdasarkan teori sebesar 0,7 Kg/hari/orang memprediksi bahwa jumlah sampah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 3.767 m³/hari. Selain itu permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sampah adalah kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menggunakan sistem *Open Dumping* dan belum ada pengolahan lebih lanjut untuk penanganan masalah sampah tersebut. Sistem open dumping masih dapat dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat karena masih luasnya lahan di Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Sambas	640,838	852,174
2	Kab. Mempawah	308,771	418,078
3	Kab. Sanggau	490,805	742,392
4	Kab. Ketapang	575,817	806,413
5	Kab. Sintang	433,614	661,390
6	Kab. Kapuas Hulu	266,651	414,374
7	Kab. Bengkayang	290,588	402,112
8	Kab. Landak	405,320	596,174
9	Kab. Sekadau	217,468	319,322
10	Kab. Melawi	209,958	328,477
11	Kab. Kayong Utara	128,684	177,438
12	Kab. Kubu Raya	614,910	913,462
13	Kota Pontianak	673,400	1.020,357
14	Kota Singkawang	240,327	350,498
	<i>Jumlah</i>	5,497,151	8.002,662

Sumber : DRKPLH Prov. Kalbar 2022.

Adapun untuk menampung sampah-sampah yang dihasilkan tersebut, telah tersedia tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di 14 Kabupaten/kota dengan kondisi seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.80
TPA dan Sistem Operasi di Provinsi Kalimantan Barat

No	TPA	Luas (Ha)	Kapasitas TPA (m ³ /hari)	Sistem Operasi TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sukadana (Kab. Kayong Utara)	-	36,00	<i>Open Dumping</i>
2	Melawi	6,50	35,00	<i>Open Dumping</i>
3	Putussibau (Kab. Kapuas Hulu)	0,00	0,00	<i>Open Dumping</i>
4	Sekadau	4,50	34,00	<i>Open Dumping</i>
5	Sintang	6,00	96,25	<i>Controlled Landfill</i>
6	Bengkayang	10,00	20,80	<i>Open Dumping</i>
7	Tebedak (Kab. Landak)	6,60	300,00	<i>Open Dumping</i>
8	Sorat (Kab. Sambas)	13,00	72,00	<i>Open Dumping</i>
9	Bakau Besar (Kab Mempawah)	2,20	160,00	<i>Open Dumping</i>
10	Kubu Raya	4,00		<i>Open Dumping</i>
11	Batulayang (Kota Pontianak)	26,60	1.373,03	<i>Controlled Landfill</i>

12	Sanggau	2,00	60,00	Open Dumping
13	Ketapang	9,00	60,00	Controlled Landfill
14	Wonosari (Kota Singkawang)	8,57	194,60	Controlled Landfill

Sumber : DRKPLH Prov. Kalbar 2022

2.3.1.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Kalimantan Barat yang telah memiliki E-KTP pada tahun 2022 adalah sebesar 3,620.872 orang, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 3,208,496 orang.

Tabel 2.81
Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP

Wilayah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KAB. SAMBAS	Orang	394,208	410,084	435.283	446.039	427.150
KAB. MEMPAWAH	Orang	170,482	178,272	190.635	199.060	190.230
KAB. SANGGAU	Orang	272,338	288,073	310.396	324.824	313.827
KAB. KETAPANG	Orang	299,243	319,177	343.876	360.077	352.616
KAB. SINTANG	Orang	254,124	268,518	290.227	300.060	294.187
KAB. KAPUAS HULU	Orang	164,960	173,389	186.187	192.196	186.455
KAB. BENGKAYANG	Orang	152,543	159,392	174.904	182.186	175.056
KAB. LANDAK	Orang	236,319	245,179	260.340	273.728	265.112
KAB. SEKADAU	Orang	134,071	140,410	148.961	155.182	150.469
KAB. MELAWI	Orang	122,758	129,181	139.080	145.650	141.842
KAB. KAYONG UTARA	Orang	67,709	72,954	77.887	82.966	82.104
KAB. KUBU RAYA	Orang	361,105	379,535	407.187	424.973	416.256
KOTA PONTIANAK	Orang	433,708	447,380	470.435	487.728	464.438
KOTA SINGKAWANG	Orang	144,928	152,088	163.377	169.488	161.130
KALIMANTAN BARAT	Orang	3,208,496	3,363,632	3.598.775	3.744.157	3.620.872

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar, Tahun 2022.

Sementara itu, untuk penduduk yang telah memiliki akte kelahiran pada tahun 2022 adalah 1.507.942 jiwa. Jumlah tertinggi berada di Kota Pontianak yakni sebanyak 191.590 jiwa yang telah memiliki akte kelahiran dan terendah di Kabupaten Kayong Utara sebesar 40.326 jiwa yang telah memiliki akte kelahiran.

Tabel 2.82
Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akte Kelahiran

Wilayah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KAB. Sambas	Orang	246,000	276,352	188.257	182.527	186.760
KAB. Mempawah	Orang	111,671	99,689	69.795	72.261	77.483
KAB. Sanggau	Orang	129,167	153,451	111.996	112.882	121.247
KAB. Ketapang	Orang	227,077	238,711	181.998	164.500	164.277
KAB. Sintang	Orang	128,724	144,717	99.056	101.918	110.893
KAB. Kapuas Hulu	Orang	92,529	109,484	67.860	70.495	75.477
KAB. Bengkayang	Orang	44,790	53,979	46.318	50.629	58.500

KAB. Landak	Orang	130,761	146,044	103.623	110.715	116.282
KAB. Sekadau	Orang	79,757	87,527	55.383	54.201	56.567
KAB. Melawi	Orang	61,319	71,068	53.869	54.761	56.644
KAB. Kayong Utara	Orang	50,691	55,152	40.887	38.733	40.326
KAB. Kubu Raya	Orang	261,538	280,877	180.944	174.339	180.131
KOTA Pontianak	Orang	362,877	395,735	195.832	188.262	191.590
KOTA Singkawang	Orang	115,895	123,143	70.205	69.382	71.765
Kalimantan Barat	Orang	2,042,796	2,235,929	1.466.023	1.445.605	1.507.942

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar, Tahun 2022.

Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga pada tahun 2022 sebanyak 1.660.046 KK meningkat dibandingkan kondisi pada tahun 2021 sebesar 1.463.934 KK.

Tabel 2.83
Jumlah Penduduk Telah Memiliki Kartu Keluarga

Wilayah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KAB. SAMBAS	KK	176.939	178.807	186.728	189.520	192.277
KAB. MEMPAWAH	KK	81.003	82.545	87.545	89.326	90.699
KAB. SANGGAU	KK	134.408	136.132	143.950	145.674	147.874
KAB. KETAPANG	KK	176.844	169.740	182.322	183.835	185.779
KAB. SINTANG	KK	114.851	114.594	125.187	130.086	133.631
KAB. KAPUAS HULU	KK	76.367	77.615	81.756	83.973	85.656
KAB. BENGKAYANG	KK	74.481	75.895	80.328	81.651	83.015
KAB. LANDAK	KK	101.280	103.185	108.443	111.666	113.812
KAB. SEKADAU	KK	59.980	60.427	62.793	64.267	65.475
KAB. MELAWI	KK	67.431	66.657	71.128	66.126	65.528
KAB. KAYONG UTARA	KK	35.811	36.216	38.168	38.969	39.005
KAB. KUBU RAYA	KK	162.109	163.446	176.489	180.348	184.202
KOTA PONTIANAK	KK	185.653	186.646	195.544	199.215	201.614
KOTA SINGKAWANG	KK	63.275	65.008	68.220	69.846	71.479
Kalimantan Barat		1,365,298. 00	1,364,147.0 0	1,417,648. 00	1,463,934.0 0	1,660,046.0 0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar, Tahun 2022.

b. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalimantan Barat.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

Indeks Desa Mandiri

Tabel 2.84
Perkembangan Desa Menurut Status di Kalimantan Barat
Tahun 2018-2022

No	Status Desa	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jmlh	%								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sangat Tertinggal	677	33.33	208	10.24	12	0.59	0	0	0	0
2	Tertinggal	928	45.69	781	38.45	566	27.87	280	13,79	94	4,62
3	Berkembang	372	18.32	767	37.76	907	44.66	910	44,81	802	39,49
4	Maju	53	2.61	188	9.26	332	16.35	456	22,45	549	27,03
5	Mandiri	1	0.05	87	4.28	214	10.54	385	18.96	586	28,85
Total		2031	100.00								

Sumber : idm.kemendesa.go.id .2018/2022, data diolah.

Kondisi terkini tahun 2022 status desa berdasarkan kriteria Indeks Desa Membangun (IDM) di Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2022 jumlah Desa Mandiri sebanyak 586 Desa atau 28,85 persen dari 2.031 Desa di Kalimantan Barat. Sedangkan Desa Maju dan Berkembang masing-masing meningkat menjadi 27,03 persen (549 Desa) dan 39,49 persen (802 Desa). Sejak tahun 2021 tidak ada lagi Desa **Sangat Tertinggal** di Kalimantan Barat.

Namun jumlah Desa Tertinggal masih menjadi pekerjaan rumah Prov Kalimantan Barat tersisa 94 desa atau 4,62 persen dari jumlah desa yang ada sebagaimana digambarkan pada table berikut ini.

Tabel 2.85
Data Desa Tertinggal Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mempawah	SADANIANG	ANSIAP	0.7257	0.4	0.6667	0.5975	Tertinggal
2	Mempawah	SADANIANG	SUAK BARANGAN	0.7257	0.3	0.6	0.5419	Tertinggal
3	Ketapang	NANGA TAYAP	MENSUBANG	0.7486	0.5167	0.4667	0.5773	Tertinggal
4	Ketapang	NANGA TAYAP	SEBADAK RAYA	0.76	0.4333	0.6	0.5978	Tertinggal
5	Ketapang	NANGA TAYAP	SIANTAU RAYA	0.7257	0.4833	0.4	0.5363	Tertinggal
6	Ketapang	SIMPANG DUA	BATU DAYA	0.7829	0.3833	0.5333	0.5665	Tertinggal
7	Ketapang	SIMPANG HULU	KENANGA	0.6457	0.3667	0.5333	0.5152	Tertinggal

8	Ketapang	SIMPANG HULU	KUALAN HULU	0.76	0.4167	0.4	0.5256	Tertinggal
9	Ketapang	SIMPANG HULU	SEKUCING KUALAN	0.6057	0.4333	0.6	0.5463	Tertinggal
10	Ketapang	SIMPANG HULU	SEKUCING LABAI	0.68	0.4833	0.4	0.5211	Tertinggal
11	Ketapang	SINGKUP	PANTAI KETIKAL	0.68	0.3	0.7333	0.5711	Tertinggal
12	Ketapang	SUNGAI LAUR	MERABU JAYA	0.6457	0.55	0.5333	0.5763	Tertinggal
13	Ketapang	SUNGAI LAUR	RANAU LIMAT	0.6743	0.4	0.6	0.5581	Tertinggal
14	Sintang	AMBALAU	MENSUANG	0.5943	0.35	0.6	0.5148	Tertinggal
15	Sintang	AMBALAU	NANGA AMBALAU	0.64	0.3333	0.6	0.5244	Tertinggal
16	Sintang	AMBALAU	NANGA MENTOMOI	0.7771	0.3	0.6	0.559	Tertinggal
17	Sintang	AMBALAU	NANGA SAKAI	0.7143	0.3	0.6667	0.5603	Tertinggal
18	Sintang	AMBALAU	NANGA UKAI	0.6229	0.4	0.6	0.541	Tertinggal
19	Sintang	KETUNGAU HULU	NERACI JAYA	0.6457	0.4333	0.5333	0.5375	Tertinggal
20	Sintang	KETUNGAU HULU	SEBETUNG PALUK	0.7714	0.45	0.5333	0.5849	Tertinggal
21	Sintang	KETUNGAU HULU	SUNGAI KELIK	0.7314	0.3667	0.6	0.566	Tertinggal
22	Sintang	SERAWAI	NANGA BIHE	0.5257	0.2	0.8	0.5086	Tertinggal
23	Sintang	SERAWAI	TANJUNG BARU	0.6686	0.2667	0.7333	0.5562	Tertinggal
24	Kapuas Hulu	JONGKONG	TEMENANG	0.6914	0.5667	0.4667	0.5749	Tertinggal
25	Kapuas Hulu	KALIS	BAHENAP	0.6	0.3667	0.6667	0.5444	Tertinggal
26	Kapuas Hulu	KALIS	PENIUNG	0.76	0.5	0.5333	0.5978	Tertinggal
27	Kapuas Hulu	KALIS	TAPANG DA'AN	0.7257	0.3833	0.6	0.5697	Tertinggal
28	Kapuas Hulu	SILAT HULU	LANDAU RANTAU	0.6514	0.4167	0.6	0.556	Tertinggal
29	Kapuas Hulu	SILAT HULU	NANGA LUAN	0.6971	0.4333	0.5333	0.5546	Tertinggal
30	Kapuas Hulu	SILAT HULU	NANGA LUNGU	0.6971	0.3833	0.6667	0.5824	Tertinggal
31	Kapuas Hulu	SILAT HULU	SELANGKAI	0.7314	0.3	0.6	0.5438	Tertinggal
32	Kapuas Hulu	SUHAID	LUBUK PENGAIL	0.6171	0.3833	0.5333	0.5113	Tertinggal
33	Bengkayang	LEMBAH BAWANG	JANYAT	0.7486	0.5	0.3333	0.5273	Tertinggal
34	Bengkayang	SELUAS	BENGKAWAN	0.7029	0.35	0.6	0.551	Tertinggal
35	Bengkayang	SELUAS	KALON	0.7714	0.45	0.4	0.5405	Tertinggal
36	Bengkayang	SIDING	SUNGKUNG II	0.7657	0.3167	0.6667	0.583	Tertinggal
37	Bengkayang	SIDING	TAMONG	0.6114	0.2833	0.6667	0.5205	Tertinggal
38	Bengkayang	SIDING	TANGGUH	0.6686	0.4333	0.6	0.5673	Tertinggal
39	Bengkayang	SIDING	TAWANG	0.7314	0.2667	0.6667	0.5549	Tertinggal

40	Bengkayang	SUTI SEMARANG	KELAYUK	0.6571	0.4333	0.6667	0.5857	Tertinggal
41	Bengkayang	SUTI SEMARANG	KIUNG	0.6457	0.55	0.5333	0.5763	Tertinggal
42	Bengkayang	SUTI SEMARANG	MUHI BERSATU	0.6343	0.4333	0.6667	0.5781	Tertinggal
43	Bengkayang	SUTI SEMARANG	SUKA MAJU	0.6514	0.4333	0.6	0.5616	Tertinggal
44	Bengkayang	TERIAK	BENTENG	0.64	0.45	0.6	0.5633	Tertinggal
45	Bengkayang	TERIAK	TEMIA SIO	0.6171	0.3833	0.6667	0.5557	Tertinggal
46	Landak	BANYUKE HULU	GAMANG	0.5771	0.3667	0.6667	0.5368	Tertinggal
47	Landak	BANYUKE HULU	PADANG PIO	0.6686	0.4833	0.6	0.584	Tertinggal
48	Landak	JELIMPO	KERSIK BELANTIAN	0.64	0.3667	0.6	0.5356	Tertinggal
49	Landak	JELIMPO	NYI'IN	0.6571	0.2833	0.5333	0.4913	Tertinggal
50	Landak	JELIMPO	SEKAIS	0.6571	0.3333	0.8	0.5968	Tertinggal
51	Landak	JELIMPO	TEMAHAR	0.68	0.3833	0.5333	0.5322	Tertinggal
52	Landak	KUALA BEHE	ANGKANYAR	0.6457	0.3667	0.6	0.5375	Tertinggal
53	Landak	KUALA BEHE	BENGAWAN AMPAR	0.7257	0.4667	0.5333	0.5752	Tertinggal
54	Landak	KUALA BEHE	SEHE LUSUR	0.7543	0.3	0.6667	0.5737	Tertinggal
55	Landak	KUALA BEHE	SEJOWET	0.6286	0.3667	0.6	0.5317	Tertinggal
56	Landak	MEMPAWAH HULU	BABATN	0.7314	0.3833	0.6667	0.5938	Tertinggal
57	Landak	MENJALIN	RE'ES	0.7314	0.3167	0.7333	0.5938	Tertinggal
58	Landak	MENYUKE	BERINANG MAYUN	0.6857	0.35	0.5333	0.523	Tertinggal
59	Landak	MENYUKE	KAYU ARA	0.7143	0.5167	0.5333	0.5881	Tertinggal
60	Landak	MENYUKE	LINTAH BETUNG	0.6629	0.35	0.5333	0.5154	Tertinggal
61	Landak	MENYUKE	SIDAN	0.6	0.3833	0.5333	0.5056	Tertinggal
62	Landak	MENYUKE	SONGGA	0.6857	0.6167	0.4	0.5675	Tertinggal
63	Landak	MENYUKE	SUNGAI LUBANG	0.6	0.5	0.6	0.5667	Tertinggal
64	Landak	MENYUKE	TA'AS	0.6114	0.2667	0.6	0.4927	Tertinggal
65	Landak	MERANTI	AMPADI	0.6914	0.4833	0.5333	0.5694	Tertinggal
66	Landak	MERANTI	MORO BETUNG	0.5886	0.4167	0.5333	0.5129	Tertinggal
67	Landak	MERANTI	TAHU	0.5657	0.45	0.7333	0.583	Tertinggal
68	Landak	NGABANG	RASAN	0.7314	0.4167	0.5333	0.5605	Tertinggal
69	Landak	NGABANG	SEBIRANG	0.7371	0.45	0.6	0.5957	Tertinggal
70	Melawi	ELLA HILIR	SUNGAI LABUK	0.7086	0.3333	0.6667	0.5695	Tertinggal
71	Melawi	MENUKUNG	NANGA SIYAI	0.64	0.4	0.6667	0.5689	Tertinggal
72	Melawi	PINOH UTARA	MERPAK	0.68	0.4167	0.6667	0.5878	Tertinggal
73	Melawi	PINOH UTARA	NATAI PANJANG	0.6857	0.35	0.6667	0.5675	Tertinggal
74	Melawi	PINOH UTARA	SUKA DAMAI	0.7657	0.3833	0.6	0.583	Tertinggal
75	Melawi	SOKAN	KELUING TAJA	0.6286	0.3833	0.6667	0.5595	Tertinggal

76	Melawi	SOKAN	NANGA LIBAS	0.5429	0.3667	0.6	0.5032	Tertinggal
77	Melawi	SOKAN	NANGA ORA	0.6914	0.3833	0.6	0.5583	Tertinggal
78	Melawi	SOKAN	PENYENGGUANG	0.6971	0.3667	0.6667	0.5768	Tertinggal
79	Melawi	SOKAN	SIJAU	0.6286	0.3333	0.6667	0.5429	Tertinggal
80	Melawi	SOKAN	TANJUNG MAHUNG	0.64	0.4	0.6667	0.5689	Tertinggal
81	Melawi	SOKAN	TELUK PONGKAL	0.6971	0.3667	0.6667	0.5768	Tertinggal
82	Melawi	TANAH PINOH	MARIS PERMAI	0.7257	0.4667	0.6	0.5975	Tertinggal
83	Melawi	TANAH PINOH BARAT	DURIAN JAYA	0.8114	0.3667	0.6	0.5927	Tertinggal
84	Melawi	TANAH PINOH BARAT	GANJANG	0.7086	0.3333	0.7333	0.5917	Tertinggal
85	Melawi	TANAH PINOH BARAT	HARAPAN JAYA	0.8114	0.45	0.5333	0.5983	Tertinggal
86	Melawi	TANAH PINOH BARAT	KELUAS HULU	0.7429	0.4	0.6	0.581	Tertinggal
87	Melawi	TANAH PINOH BARAT	LAJA	0.7829	0.4667	0.5333	0.5943	Tertinggal
88	Melawi	TANAH PINOH BARAT	LINTAH TAUM	0.7543	0.4333	0.6	0.5959	Tertinggal
89	Melawi	TANAH PINOH BARAT	TOGAN BARU	0.8571	0.3167	0.6	0.5913	Tertinggal
90	Kubu Raya	BATU AMPAR	MUARA TIGA	0.7886	0.4	0.6	0.5962	Tertinggal
91	Kubu Raya	BATU AMPAR	TANJUNG HARAPAN	0.6343	0.3833	0.6667	0.5614	Tertinggal
92	Kubu Raya	KUBU	SERUAT TIGA	0.7143	0.3833	0.6667	0.5881	Tertinggal
93	Kubu Raya	TERENTANG	BETUAH	0.6629	0.4667	0.4	0.5098	Tertinggal
94	Kubu Raya	TERENTANG	SUNGAI DUNGUN	0.7829	0.3833	0.5333	0.5665	Tertinggal

Sumber : idm.kemendes.go.id 2022

2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan. Pada tahun 2022 CPR Kalimantan Barat sebesar 73,12 persen meningkat dibandingkan kondisi tahun 2021 sebesar 71,72 persen. Angka CPR tahun 2022 tertinggi berada di Kota Pontianak sebesar 80,99 persen. Sedangkan angka CPR terendah pada tahun 2022 berada di Kabupaten Kubu Raya sebesar 58,21 persen.

Tabel 2.86
Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi di Kalimantan Barat

No	Wilayah	PREVALENSI PEMAKAIAN KONTRASEPSI (1)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MEMPAWAH	69,62	71,14	71,51	70.89	70.52
2	SAMBAS	69,36	69,40	69,62	71.38	71.43
3	KETAPANG	70,76	72,48	71,71	76.23	79.84
4	SANGGAU	82,87	77,74	73,52	72.33	73.12
5	SINTANG	73,20	75,63	76,51	78.77	78.45
6	KAPUAS HULU	76,09	77,94	79,14	78.38	80.50
7	PONTIANAK	69,42	69,54	69,94	70.43	80.99
8	SINGKAWANG	59,58	57,26	55,10	77.57	78.38
9	BENGKAYANG	N/A	71,79	73,95	69.66	71.47
10	LANDAK	71,15	72,36	74,55	69.48	69.60
11	SEKADAU	71,13	62,98	67,00	76.48	77.66
12	MELAWI	72,31	72,73	71,93	65.00	66.75
13	KAYONG UTARA	80,21	78,14	77,39	70.14	70.48
14	KUBU RAYA	63,19	63,22	63,67	56.46	58.21
	KALIMANTAN BARAT	71,02	70,86	70,93	71.72	73.12

Sumber : BKKBN Perwakilan Kalbar 2022

c. Persentase Fasilitas Perencanaan Program KB, KS, dan Dalduk

Penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kualitas generasi mendatang untuk mensukseskan pembangunan. Terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan. Pertama, bahwa penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek yang berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Kedua, ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

2.3.1.15. Perhubungan

Terminal di Kalimantan Barat sebanyak 27 unit, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, baik itu tipe A,B dan C. Untuk tipe A sebanyak 1 (satu) unit yang terletak di Kabupaten Kubu Raya yaitu di Sei Ambawang, sedang tipe B sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan tipe c sebanyak 1 (satu) unit di Sei Pinyuh Kabupaten Mempawah. Sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terminal Tipe B merupakan kewenangan dari pada Pemerintah Provinsi, sehingga untuk pembangunan dan pemeliharaannya di tangani oleh Pemerintah Provinsi.

Tabel 2.87
Sebaran Terminal di Provinsi Kalimantan Barat 2022

No. (1)	Kab/Kota (2)	Terminal (3)	Type (4)
1	Kota Pontianak	Batulayang	B
2	Kabupaten Kubu Raya	ALBN Sei Ambawang	A
		Sungai Durian	B
3	Kabupaten Mempawah	Mempawah	B
		Sei Pinyuh	C
		Jungkat	B
4	Kota Singkawang	Pasiran	B
		Beringin	B
5	Kabupaten Sambas	Sambas	B
		Kartiasa	B
		Aruk	B
		Pemangkat	B
6	Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	B
		Seluas	B
7	Kabupaten Landak	Ngabang	B
8	Kabupaten Sanggau	Sosok	B
		Sanggau	B
		Entikong	B
		Tayan	B
9	Kabupaten Sekadau	Lawang Kuari	B
		Sungai Uko	B
10	Kabupaten Sintang	Sungai Durian	B
		Tanjung Puri	B
11	Kabupaten Melawi	Sido Mulyo	B
12	Kabupaten Kapuas Hulu	Badau	B
13	Kabupaten Ketapang	Ketapang	B
14	Kabupaten Kayong Utara	Kayong Utara	B

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kalbar, Tahun 2022

a. Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat

Persentase ketersediaan sarana perhubungan darat tahun 2022 sebesar 56,85 sedangkan untuk capaian tahun 2022 sebesar 59,32. Sektor Perhubungan merupakan sektor yang mempunyai dan memegang peran sentral dalam menciptakan nilai tambah melalui penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perkembangan antar wilayah serta meningkatkan konektivitas antar daerah. Kebijakan di bidang perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, selain dimaksudkan untuk mendukung pergerakan penduduk dan angkutan barang terutama untuk wilayah pedalaman juga untuk memperlancar arus transportasi antar modal. Untuk itu perlu adanya sarana pendukung baik itu terminal, bandara, pelabuhan serta fasilitas keselamatan maupun armadanya.

Tabel 2.88
Sarana Perhubungan Darat Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe B	Pelabuhan	Bandar Udara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sambas	1	3 (Sintete, Pemangkat, Paloh/sekura)	
2	Mempawah			
3	Sanggau			

4	Ketapang		3 (Ketapang, Kendawangan, Sukaharja)	1 (Rahadi Usman)
5	Sintang	1		1 (Tebelian)
6	Kapuas Hulu	1		1 (Pangsuma)
7	Bengkayang			
8	Landak			
9	Sekadau			
10	Melawi	1		1 (Ng. Pinoh)
11	Kayong Utara		1 (Teluk Melano)	
12	Kubu Raya			1 (Supadio)
13	Pontianak		1 (Pontianak)	
14	Singkawang		1 (singkawang)	
	Jumlah	4	9	5

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kalbar Tahun 2022.

b. Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Laut dan SDP

Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Laut dan SDP tahun 2022 sebesar 27 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 33,59.

c. Persentase Penurunan Jumlah Laka Lantas per Tahun

Persentase Penurunan Jumlah Laka Lantas per Tahun capaian 2018 sebesar 6,69 sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 13,41.

d. Ratio Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum

Ratio Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum capaian 2018 sebesar 1:170 sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 1:783.

e. Persentase Penurunan Jumlah Laka SDP per Tahun

Persentase Penurunan Jumlah Laka SDP per Tahun untuk tahun 2018 sebesar 27 sedangkan capaian tahun 2019 sebesar 33,33.

f. Ratio Jumlah Pelabuhan terhadap Penumpang Angkutan SDP

Ratio Jumlah Pelabuhan terhadap Penumpang Angkutan SDP tahun 2018 sebesar 1:63 sedangkan tahun 2019 sebesar 1:34.

g. Persentase Pengembangan Sistem Transportasi

Persentase Pengembangan Sistem Transportasi tahun 2018 sebesar 10 sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 37,04.

h. Persentase Kecukupan Angkutan Umum dan Prasarana yang Layak

Persentase Kecukupan Angkutan Umum dan Prasarana yang Layak tahun 2018 sebesar 80 sedangkan tahun 2019 sebesar 88,24.

2.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2019 Jumlah Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat yang telah terlayani telepon seluler sebanyak 1828 desa/kelurahan. Sedangkan untuk jumlah desa/kelurahan yang terlayani internet dari data yang berhasil dikumpulkan diluar Kabupaten pada tahun 2019 adalah sebanyak 913 desa/kelurahan.

Sementara itu, untuk Jumlah BTS yang ada di Kalimantan Barat pada tahun 2019 adalah sebanyak 8013 unit, dengan jumlah terbanyak berada di Kota Pontianak sebanyak 1419 BTS .

Tabel 2.89

Jumlah Desa Terlayani Telepon Seluler dan Internet serta Jumlah BTS Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	2019			2020			2021		
Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan Terlayani Telepon Seluler	Jumlah Desa/Kel urahan Terlayan i Internet	Jumlah BTS	Jumlah Desa/ Kelurahan Terlayani Telepon Seluler	Jumlah Desa/Kel urahan Terlayan i Internet	Jumlah BTS	Jumlah Desa/ Kelurahan Terlayani Telepon Seluler	Jumlah Desa/Kelur ahan Terlayani Internet	Jumlah BTS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KAB. SAMBAS	190	148	768	192	157	768	193	170	768
KAB. MEMPAWAH	56	40	519	57	52	519	57	55	519
KAB. SANGGAU	151	40	835	152	109	835	156	129	835
KAB. KETAPANG	229	131	1013	233	152	1013	240	182	1013
KAB. SINTANG	331	111	606	348	191	606	365	222	606
KAB. KAPUAS HULU	249	143	356	253	157	356	260	181	356
KAB. BENGKAYANG	102	31	486	110	67	486	109	78	486
KAB. LANDAK	128	33	366	138	63	366	141	91	366
KAB. SEKADAU	76	35	223	84	57	223	85	69	223
KAB. MELAWI	108	47	108	118	86	108	129	113	108
KAB. KAYONG UTARA	43	20	120	43	37	120	43	37	120
KAB. KUBU RAYA	110	81	754	113	101	754	113	106	754
KOTA PONTIANAK	29	29	1419			1419			1419
KOTA SINGKAWANG	26	26	440			440			440
KALIMANTAN BARAT	1828	913	8013			8013			8013

Sumber : SIPD Dinas Komunikasi dan Informastika Prov. Kalbar, 2022.

2.3.1.17. Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah

Kinerja pembangunan urusan Koperasi dan UMKM pada tahun 2019-2020 terdapat 2 (dua) indikator capaian kinerja pembangunan yaitu Persentase Koperasi Berkualitas dan Persentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil naik kelas . Tahun 2019 capaian kinerja indikator persentase koperasi berkualitas sebesar 23,85 dengan target sebesar 23,00 dan sudah melampaui target. Pada tahun 2020 mencapai sebesar 33,79 atau meningkat sebesar 41,68 dibanding tahun 2019. Jumlah Koperasi pada tahun 2020 sebanyak 4.998 unit dengan volume usaha sebanyak Rp. 9,44 Triliun dan lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 8,45 Triliun.

Pengukuran capaian pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun 2021 mengalami perubahan sejalan dengan pemutakhiran Pemerdagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Sehingga capaian kinerja Urusan

Koperasi dan UKM, belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan indikator dan besaran target.

Perkembangan Volume Usaha Koperasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 7,67 Triliun, tahun 2019 sebesar Rp. 8,45 Triliun, pada tahun 2020 sebesar Rp. 9,44 Triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp.9,56 Triliun.

Pada tahun 2021 indikator kinerja Koperasi menjadi prosentase koperasi berkualitas target 27 dan dengan capaian sebesar 97 atau sebesar 26,28 dan target pada tahun 2022 sebesar 29 dengan capaian menjadi 29,58 . Perkembangan koperasi aktif dari tahun 2018 hingga tahun 2021 berfluktuasi, pada tahun 2020 mengalami perlambatan akibat dampak dari pandemi Covid-19, pada akhir 31 Desember 2021 menunjukkan peningkatan kembali dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi koperasi aktif dan koperasi tidak aktif juga menunjukkan kondisi cenderung meningkat sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 2.16

Perkembangan Koperasi Tahun 2018-2021 Provinsi Kalimantan Barat



Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar 2022

Capaian kinerja indikator Persentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Naik Kelas pada tahun 2021 sebesar 0,23 belum mampu mencapai target baik target 2019 sebesar 0,91 maupun target 2020 sebesar 1,82. Pada tahun 2021-2022 indikator capaian kinerja pembangunan urusan Koperasi dan UMKM mengalami perubahan seiring dengan penyesuaian indikator berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan indikator Persentase Volume Usaha Koperasi dan Persentase Pertumbuhan UMKM.

Tabel 2.90

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan
Urusan Koperasi dan UKM
Tahun 2019-2022

NO	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Koperasi Berkualitas	23	23.85	25	33.79	-	-	-	-

2	Persentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Naik kelas	0.91	0	1.82	0.23	-	-	-	-
3	Persentase Volume Usaha Koperasi	-	-	-	-	11	13.14	12	12.30
4	Persentase Pertumbuhan UMKM	-	-	-	-	5	6.98	7	0.81
5	Prosentase Koperasi Berkualitas	-	-	-	-	27	26.28	29	29.58
6	Prosentase Usaha Kecil Naik Kelas	-	-	-	-	0.24	0.22	0.27	0.08

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

Capaian kinerja Urusan Koperasi pada RPJMD dengan indikator persentase volume usaha koperasi tahun 2022 sebesar 12,30 dengan target sebesar 12. Kinerja Renstra ditunjukkan dengan indikator prosentase usaha kecil naik kelas target sebesar 0,24 dengan realisasi sebesar 0,22 belum mencapai target. Kondisi ini dipicu oleh beberapa program yang belum mencapai target diantaranya program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro. Kendala yang dihadapi adalah akibat bencana Covid-19 dan terjadinya refocusing sehingga pembiayaan tidak maksimal serta masih banyaknya bidang usaha pelaku UMKM yang terdampak covid belum pulih sepenuhnya. Indikator prosentase koperasi berkualitas dengan capaian kinerja 97 dari target 27 atau sebesar 26,28. Kondisi ini akibat masih banyak Koperasi yang terkendala dalam pelaksanaan RAT secara virtual.

2.3.1.18. Penanaman Modal

Melalui penerapan otonomi daerah, diharapkan muncul pusat kekuatan baru di daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi pemerintah memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peran swasta dimana salah satu aspeknya adalah dibidang investasi. Pemerintah berusaha mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal baik untuk swasta domestik (PMDN) maupun asing (PMA), tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk mendorong pengembangan ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja dan penguatan daya saing perekonomian.

Pada tahun 2022 PMDN sebesar Rp. 9.382 923,50 Juta terjadi peningkatan investasi PMDN sebesar 16,75 persen dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 6.591.384,10 Juta.

Tabel 2.91
Rencana dan Realisasi Kumulatif
Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

TAHUN	P M D N				
	REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	INDONESIA	ASING	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	595	6.591.384,10	14.428	3	14.431
2019	1.110	7.695.834,20	11.563	21	11.584

2020	2144	9.256.471,40	12813	39	12.852
2021	4281	10.773.393,00	9828	16	9844
2022	4488	9.382.923,50	16.581	3	16.584
Pertumbuhan	4.84	12.91	68.71	-81,25	68,47

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka 2021, 2022

Keterangan:

- Rencana investasi PMDN berdasarkan izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan SPIPISE BKPMRI, DPMPSTSP Provinsi dan DPMPSTSP kabupaten/kota.
- Realisasi investasi berdasarkan LKPM yang diterima DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat.
- Investasi PMDN/PMA di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha Sektoral dan Industri Rumah Tangga.
- Nilai Investasi PMDN dalam Rp Juta.

Dukungan investasi yang bersumber dari PMA tahun 2022 sebesar 745.467,90 (US \$ ribu,) atau meningkat sebesar 60,86 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 463.413,70 (US\$ ribu).

Tabel 2.92

Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMA di Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

TAHUN	P M A				
	REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	INDONESIA	ASING	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	653	491,938.60	14.835	408	15.243
2019	835	532,540.50	13.263	230	13.493
2020	896	759.264,20	8928	118	9.046
2021	849	463.413,70	13.590	70	13.660
2022	809	745.467,90	12.985	50	13.035
Pertumbuhan	-4,71	60,86	-4,45	-28,57	-4,58

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka 2021, 2022.

Keterangan:

- Rencana investasi PMA berdasarkan izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan SPIPISE BKPMRI.
- Realisasi investasi berdasarkan LKPM yang diterima DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat.
- Investasi PMDN/PMA diluar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha Sektoral dan Industri Rumah Tangga.
- Nilai Investasi PMA dalam US \$ Ribu.

Peran swasta dibidang investasi sangatlah diperlukan oleh Pemerintah untuk mendukung pembangunan. Pemerintah berusaha mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal baik untuk swasta domestik (PMDN) maupun asing (PMA), tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk mendorong pengembangan ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja dan penguatan daya saing perekonomian.

Tabel 2.93
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2021-2022

Indikator	2021	2022	
	Kondisi Awal	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Nilai Investasi (Rp Milyar)	21.170	20.790	20.080

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka 2021, 2022.

Keterangan: Nilai Investasi PMDN dalam Rp Juta

Tabel 2.94
Realisasi Proyek PMDN/PMA Menurut Kab/Kota di Kalimantan Barat Periode Januari-Desember 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	PMA				PMDN			
		JUMLAH PROYEK	TAMBAHAN (US \$ Ribu)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	TAMBAHAN (Rp, Juta)	TENAGA KERJA	
				INDONESIA	ASING			INDONESIA	ASING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kota Sambas	78	47.796,50	261	10	1.033	434.447,10	1.496	-
2	Kota Bengkayang	3	4,60	-	-	641	56.617,30	82	-
3	Kabupaten Landak	75	46.746,30	1.962	2	127	875.917,10	1.158	-
4	Kabupaten Mempawah	10	34.805,10	973	-	113	264.089,30	602	-
5	Kabupaten Sanggau	45	18.662,30	338	8	265	1.368.692,90	1.125	-
6	Kabupaten Ketapang	25	8.992,40	185	-	137	125.447,70	1.625	-
7	Kabupaten Sintang	71	26.909,70	460	3	254	572.475,70	1.516	-
8	Kabupaten Kapuas Hulu	47	25.596,80	2.105	9	317	1.430.579,40	2.546	1
9	Kabupaten Sekadau	12	1.538,70	271	-	141	885.783,40	1.195	-
10	Kabupaten Melawi	284	487.915,40	4.797	4	429	2.155.880,00	1.955	2
11	Kabupaten Kayong Utara	39	26.304,90	1.150	11	79	330.549,70	166	-
12	Kabupaten Kubu Raya	12	10.109,60	152	-	57	210.484,20	314	-
13	Kota Pontianak	2	489,70	-	-	15	42.845,60	374	-
14	Kota Singkawang	106	9.594,90	331	6	880	629.164,10	2.400	-
	JUMLAH	809	745.466,90	12.985	53	4488	9.382.923,50	16.581	3

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka 2022

Kurs PMA = Rp 15.000

Tabel 2.95
Realisasi Proyek PMDN/PMA Menurut Sektor Di Kalimantan Barat Periode Januari-Desember 2022

NO.	BIDANG USAHA/SEKTOR	PMA				PMDN			
		JUMLAH PROYEK	TAMBAHAN (US\$.Ribu)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	TAMBAHAN (US\$.Ribu)	TENAGA KERJA	
				INDONESIA	ASING			INDONESIA	ASING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Sektor Primer								
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Peternakan	322	442.006,30	11.094	16	606	3.791.877,10	9.875	-
2.	Kehutanan	21	29.043,10	180		50	150.570,30	85	-
3.	Perikanan					30	3.395,80	3	-

4.	Pertambangan	25	1.116,80	121		306	1.792.448,60	1.510	3
II	Sektor Sekunder								
5.	Industri Kendaraan Bermotor Dan Alat Transportasi Lain	2	-	-	-	12	95,00	35	-
6.	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik Dan Jam	-	-	-	-	3	4,00	-	-
7.	Industri Karet Dan Plastik	31	2.534,60	213	3	18	2.575,00	15	-
8.	Industri Kayu	9	9,30	-	-	25	9.967,90	411	-
9.	Industri Kertas Dan Percetakan	-	-	-	-	10	2,00	1	-
10.	Industri Kimia Dan Farmasi	16	11.060,90	-	-	32	125.492,30	17	-
11.	Industri Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Industri Mineral Non Logam	11	294,60	20	1	37	3.482,30	32	-
13.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya	20	79.598,40	18	2	31	364.282,40	34	-
14.	Industri Makanan	193	109.206,00	1.238	15	307	1.517.481,30	1.085	-
15.	Industri Tekstil	-	-	-	-	8	4,00	-	-
16.	Industri Lainnya	3	-	-	-	48	19.378,00	79	-
III	Sektor Tersier								
17.	Hotel Dan Restoran	21	14,90	7	-	173	103.707,00	245	-
18.	Konstruksi	-	-	-	-	461	152.101,10	283	-
19.	Listrik, Gas Dan Air	10	623,90	24	-	22	68.615,90	7	-
20.	Perdagangan Dan Reparasi	60	60,10	10	9	1.703	325.310,10	1.716	-
21.	Perumahan, Kawasan Industri Dan Perkantoran	12	12.851,40	1	-	54	170,347	383	-
22.	Transportasi, Gudang Dan Telekomunikasi	29	47.894,30	32	5	265	622.121,10	271	-
23.	Jasa Lainnya	24	9.152,30	27	2	287	159.665,00	494	-
	JUMLAH	809	745.467,90	12.985,90	53	4.281	9.382.923,30	16.581	3

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka 2022.

Kurs PMA = Rp 14.600

2.3.1.19. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran urusan Kepemudaan dan Olahraga digambarkan melalui indikator indeks pembangunan pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda merupakan instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks ini memiliki lima fungsi. Pertama, IPP akan memberikan indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor tentang kemajuan pembangunan pemuda. Kedua, IPP juga berfungsi sebagai pengarah dan insentif bagi domain atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus para pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, serta kelompok pemuda sendiri. Ketiga, IPP berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan pemuda yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah serta menunjukkan dampak yang telah disepakati bersama di antara para pemangku kepentingan. Keempat, IPP dapat pula memberikan arah penelitian mengenai berbagai aspek kehidupan dan kesejahteraan pemuda yang dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan kebijakan dan program pemuda yang berbasis data. Kelima, IPP dapat mengukur dampak bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2022 IPP Kalimantan Barat berada pada peringkat 27 Nasional dengan skor 50,17.

Tabel 2.96

Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan Pemuda	49,33	48,00	47.83	49.50	50,17
2	Peringkat Indeks Pembangunan Pemuda	26	30	33	24	27

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) 2022

Sementara itu untuk Kondisi Venue olahraga Provinsi Kalimantan Barat, data yang berhasil dikumpulkan untuk tahun 2022 digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 2.97

Kondisi Venue Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Nama Venue	Fungsi	Kondisi
1	Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA)	Sepakbola	Baik
		Atletik	Baik
2	GOR Pangsuma	Futsal	Baik
		Volly Indoor	
		Bola Basket	
3	Kolam Renang Oevang Oeray	Renang	Baik
4	GOR Bumi Khatulistiwa	Bulutangkis	Baik
5	Lapangan Tenis Sutera	Tenis Outdoor	Baik
6	Lapangan Tenis Akcaya	Tenis Indoor	Baik
7	Lapangan Tembak	Latihan Tembak	Baik

8	Lapangan Panahan	Panahan	Baik
9	Sirkuit SSA (Halaman)	Balap Motor	Baik
		Balap Sepeda	Baik
		Sepatu Roda	Baik
10	Dinding Panjat Tebing	Panjat Tebing	Kurang baik
11	Gedung Anggar	Kempo	Tidak baik
12	Pedepokan Silat	Pencak Silat	Tidak baik
13	Gedung Tenis Meja	Tenis Meja	Baik
14	Lapangan Voli Pasir	Voli Pasir	Baik

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, Tahun 2022.

2.3.1.20. Kebudayaan

Gambaran kondisi kebudayaan dapat dijelaskan, jumlah museum sebanyak 2 unit dan jumlah pusat kebudayaan/taman budaya sejumlah 1 unit.

Tabel 2.98

Gambaran Kondisi Urusan Kebudayaan di Kalimantan Barat 2018-2022

Variabel Data	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Sanggar Kesenian	437	n/a	512	580	660
Jumlah Gedung Kesenian	9	9	9	9	9
Jumlah Museum	2	2	2	2	2
Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar 2022

a) Koleksi Daerah yang dilestarikan

Gambaran kondisi kebudayaan dapat dijelaskan, jumlah museum sebanyak 2 unit dan jumlah pusat kebudayaan/taman budaya sejumlah 1 unit. Selain itu, terdapat sejumlah objek yang menjadi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di Kalimantan Barat dengan sebaran seperti berikut ini:

Tabel 2.99

Sebaran Cagar Budaya/ yang Diduga Cagar Budaya

No	Kabupaten/Kota	Cagar Budaya/ yang Diduga Cagar Budaya	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Singkawang	14	14 Laporan Inventarisasi
2	Sambas	7	2 SK Menteri : PM.26/PW.007/MKP/2008, 5 Laporan Inventarisasi
3	Bengkayang	7	7 Laporan Inventarisasi.
4	Sekadau	6	6 Laporan Inventarisasi.
5	Ketapang	108	106 SK Bupati : 07 Tahun 2009, 2 Laporan Kajian
6	Melawi	2	2 Laporan Inventarisasi
7	Landak	7	1 SK Menteri : PM.26/PW.007/MKP/2008, 6 Laporan Inventarisasi
8	Kapuas Hulu	15	2 SK Menteri : KM.10/PW.007/MKP/2003, 13 SK Bupati : 212 Tahun 2012
9	Kota Pontianak	12	2 SK Menteri : PM.26/PW.007/MKP/2008, 10 Laporan inventarisasi

10	Sintang	20	1 SK Menteri : KM.10/PW.007/MKP/2003, 19 SK Bupati : 432.21/189/2012
11	Kubu Raya	3	3 Laporan Inventarisasi
12	Mempawah	9	1 SK Menteri : PM.26/PW.007/MKP/ 2008, 8 Laporan Inventarisasi
13	Kayong Utara	6	5 Laporan Identifikasi dan 1 informasi masyarakat.
14	Sanggau	25	2 SK Menteri : KM.10/PW.007/MKP/ 2003, 23 SK Bupati : 333 Tahun 2010
Jumlah		241	

Sumber : Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

Berdasarkan tabel di atas terdapat 241 Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya. Objek-objek tersebut memiliki status yang berbeda. Dari 241 objek yang ada hanya 11 objek cagar budaya atau 4,56 yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Cagar Budaya Tingkat Pusat, Selebihnya baru ditetapkan dengan oleh Bupati melalui SK Bupati sebagai Objek Diduga Cagar Budaya, karena Objek Diduga Cagar Budaya bisa disebut sebagai cagar budaya harus diteliti dan mendapatkan rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya, baik untuk Tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

b) Peningkatan Warisan Budaya yang diapresiasi

Dalam melaksanakan urusan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 9 buah.
- 2) Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebanyak 4 (empat) kali.
- 3) Karya Seni baru yang diinventarisir pada tahun 2019 adalah sebanyak 14 (empat belas) karya.

Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan di tingkat internasional yang diperoleh pada tahun 2019 adalah sebanyak 2 (dua) medali.

2.3.1.21. Perpustakaan

Jumlah kunjungan perpustakaan selama periode 2019-2022 menunjukkan penurunan dari 84.534 kunjungan orang pada tahun 2019 menurun menjadi 28.656 kunjungan orang pada tahun 2022. Sementara itu jumlah koleksi buku yang terdata dari 155.966 buku pada tahun 2019 meningkat menjadi 269.370 buku pada tahun 2022. Sedangkan koleksi daerah yang dilestarikan pada tahun 2019 adalah sebanyak 336 buah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni sebanyak 486 buah.

Tabel 2.100

Gambaran Kondisi Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	87.908	84.534	46.650	239.983	28.656

2	Jumlah Koleksi Buku (Buku)	88.817	155.966	155.966	155.966	269.370
3	Koleksi Daerah yang dilestarikan (Buah)	486	336	290	168	45.371

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar, Tahun 2022

2.3.1.22. Kearsipan

Pada tahun 2022, persentase Perangkat Daerah Dalam Pengolahan Kearsipan Dengan Kategori B Ke Atas yakni sebesar 17,65 persen. Selain itu, jumlah arsip vital pada tahun 2022 sebanyak 10 dokumen dan jumlah arsip statis pada tahun 2022 sebanyak 30.527 dokumen, meningkat dibandingkan kondisi tahun sebelumnya sebesar 30.007 dokumen. Untuk Persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup sudah tidak ada lagi di tahun 2021 dan seterusnya karena penilaian di tahun tersebut berasal dari nilai lembaga Kearsipan kabupaten / kota. Sedangkan penilaian pada tahun 2022 merupakan gabungan antara hasil pengawasan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dengan komposisi 60 dan 40 penilaian berasal dari pengawasan kearsipan internal perangkat daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.101

Gambaran Kondisi Urusan Kearsipan di Kalimantan Barat
Tahun 2018-2022

No	Jenis Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup	Persen	43	46	6.52	n/a	n/a
2	Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dalam pengelolaan kearsipan dengan kategori cukup	Persen	14	14	78.57	n/a	n/a
3	Jumlah Arsip Vital	Dokumen	10	10	10	10	10
4	Jumlah Arsip Statis	Dokumen	28.176	28.775	29.523	30.007	30.527
5	Persentase Perangkat Daerah Dalam Pengolahan Kearsipan Dengan Kategori B Ke Atas	n/a	n/a	n/a	n/a	0	17.65
6	Persentase LKD Dalam Pengelolaan Kearsipan Dengan Kategori B Ke Atas	n/a	n/a	n/a	n/a	78.57	0

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar, 2022

Persentase LKD dengan kategori B ke atas untuk tahun 2022 belum rilis

2.3.1.23. Statistik

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memulai membangun kebijakan satu data melalui

kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan integrasi data statistik sektoral PD dan Kabupaten Kota dalam aplikasi portal satu data yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

Capaian kinerja sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi melalui penerbitan buku Kalimantan Barat Dalam Angka.

2.3.1.24. Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Provinsi Kalimantan Barat.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kelautan dan Perikanan menunjukkan *trend* turun naik. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan PDRB sub sector perikanan sebesar 3,84 lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2021 sebesar 3,59 persen. Sedangkan NTP Perikanan pada tahun 2022 telah mencapai angka di atas 100 persen yang berarti nilai indeks yang dikeluarkan petani perikanan lebih rendah dibandingkan nilai yang diterima oleh petani perikanan. Sementara itu, total produksi perikanan pada tahun 2022 mengalami penurunan 4,06 persen dibandingkan total produksi pada tahun 2021.

Tabel 2.102

Perkembangan Kondisi Indikator Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	persen	3,18	3,65	3,37	1,89	3,59	3,84
NTP Perikanan	point	102,03	103,5	109,01	98,22	105,19	98,22
Total Produksi Perikanan	ton	240.294,37	248.699	246.128	231.651	241.460	231.651

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar, Tahun 2022 (1&2 Data BPS) Data Sementara.

2.3.2.2. Pariwisata

Pariwisata internasional dan nasional pada pertengahan tahun 2022 berusaha bangkit kembali setelah terpuruk di tahun 2020 akhir dikarenakan Pandemi Covid-19. Kurang lebih 2 (dua) tahun pariwisata global mati suri dengan pelarangan bepergian atau diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh dunia bahkan Indonesia.

PPKM diberlakukan pada skala nasional bahkan daerah sehingga membuat perkembangan pariwisata di daerah Kalimantan Barat dimulai dari nol setelah kenaikan signifikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pada tahun 2021 dan 2022. Setelah penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021, pariwisata daerah Kalimantan Barat bertahap melanjutkan pemulihan di tahun 2022. Perkembangan pariwisata Indonesia dari tahun ke tahun tercatat terus tumbuh bahkan daya saing sektor pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan. Pesatnya perkembangan kondisi pariwisata nasional disinyalir sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang disertai peningkatan daya beli masyarakat serta didukung dengan kondisi keamanan yang cukup kondusif, maka hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, khususnya kunjungan penduduk Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata di wilayah teritorial Indonesia atau yang biasa disebut kunjungan wisatawan nusantara (wisnus).

Tabel 2.103

Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus Tahun 2018-2022

TAHUN	*WISMAN	**WISNUS	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	70.740	3.226.934	3.297.674
2019	76.764	3.426.794	3.503.558
2020	0	843.143	843.143
2021	73	564.123	564.209
2022	27.126	2.515.154	2.542.280

Sumber: *BPS Prov. Kalbar **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, Tahun 2022.

Data kunjungan wisatawan mancanegara Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 371 persen dari tahun sebelumnya menjadi 27.126 kunjungan.

Selain jumlah kunjungan wisman, faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Kalimantan Barat adalah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) termasuk juga wisatawan lokal (Wislok) Kalimantan Barat. Peranan wisnus dan wislok merupakan yang terbesar dalam menciptakan dampak ekonomi, maka Kementerian Pariwisata semakin gencar untuk mengajak penduduk Indonesia melakukan perjalanan wisata di dalam negeri. Kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2021 sejumlah 564.123 kunjungan, mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 2.515.154 kunjungan.

Dengan makin giatnya promosi dari pemerintah daerah dibantu instansi terkait untuk mengenalkan daerah serta tempat-tempat wisata lainnya, serta didukung oleh prasarana dan sarana yang ada, maka diharapkan jumlah pergerakan wisnus semakin meningkat.

Selain jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata juga mempengaruhi sektor pariwisata. Pada tahun 2022 jumlah obyek wisata di Kalimantan Barat mengalami perubahan dimana pada tahun 2021 jumlah objek daya tarik wisata sebanyak 665 sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 668 dengan penambahan 3 obyek wisata. Adapun Kabupaten yang memiliki obyek wisata terbanyak adalah Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah 108 obyek wisata.

Tabel 2.104
Perkembangan Jumlah Objek Daya Tarik Wisata 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Pontianak	23	22	22	22	22
2	Kab. Mempawah	23	17	17	17	17
3	Kota Singkawang	61	51	51	51	51
4	Kab. Bengkayang	41	42	42	42	42
5	Kab. Sambas	33	33	33	33	33
6	Kab. Kubu Raya	68	80	80	80	80
7	Kab. Landak	70	70	70	70	70
8	Kab. Sanggau	62	62	62	62	62
9	Kab. Melawi	34	45	45	45	45
10	Kab. Sekadau	32	32	32	32	32
11	Kab. Sintang	32	32	32	32	32
12	Kab. Kapuas Hulu	105	108	108	108	108
13	Kab. Ketapang	53	53	53	53	53
14	Kab. KKU	28	41	41	41	41
15	TOTAL	665	668	665	665	668

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, Tahun 2022.

Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan Pariwisata suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Didalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha penyusun PDRB, nilai pertumbuhan sektor Pariwisata dihitung berdasarkan kategori Penyediaan Akomodasi, Makan Minum dan Subsektor Transportasi dengan pertumbuhan sebagai berikut :

Tabel 2.105
Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pariwisata Kalimantan Barat 2018-2022

TAHUN REALISASI / TARGET	PERKEMBANGAN PARIWISATA	
	KONTRIBUSI PADA PDRB (%)	LAJU PERTUMBUHAN PARIWISATA (%)
(1)	(2)	(3)
2018	2,38	8,10
2019	2,42	6,69
2020	2,01	-19,26
2021	2,05	8,72
2022**	2,48	8,55

Sumber : BPS Provinsi Kalbar Tahun 2022.

Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan hasil penjabaran dari total hunian hotel (berbintang dan non berbintang) dengan total kunjungan para wisatawan. Wisatawan yang menjadi sasaran utama adalah Wisatawan Mancanegara dimana diharapkan para wisatawan mancanegara dapat menjadi wisatawan tetap untuk mengunjungi Kalimantan Barat.

Wisatawan Mancanegara yang mengunjungi Kalimantan Barat didominasi oleh Wisatawan Mancanegara yang berasal dari Negara Asean yang sementara ini didata melalui pintu masuk Supadio *International Airport*, PLBN Entikong, PLBN Masuk Badau dan PLBN Masuk Aruk.

Tabel 2.106

Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus Kalbar 2018-2022

TAHUN	*WISMAN	**WISNUS	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	70.740	3.226.934	3.297.674
2019	76.764	3.426.794	3.503.558
2020	18.639	843.143	858.953
2021	73	564.123	564.209
2022	27.126	2.515.154	2.542.280

Sumber: *BPS Prov. Kalbar. Tahun 2023

**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar

2.3.2.3. Pertanian**a. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan**

Total Produksi tanaman pangan pada tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai angka 1.044.235 ton dari tahun 2021 yang sebesar 929.057 ton. Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2022 sebesar -0.33 dan pada tahun 2021 sebesar -5.55 . Sedangkan NTP Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2022 masih dibawah angka 100 yaitu sebesar 92,6 yang berarti nilai yang diterima petani tanaman pangan lebih kecil dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani tanaman pangan.

Tabel 2.107

Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-8	-9			
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Persen	9,8	4,58	-5,91*	-5,55**	-0,33***
NTP Sektor Tanaman Pangan		100	100,11	96,92	94,17	92,6
Total Produksi Tanaman Pangan	Ton	995.246	1.086.676	1.031.669	929.057	1.044.235*

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 2022, diolah.

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

***Data Sementara

b. Sub Sektor Hortikultura

Total Produksi Hortikultura pada tahun 2018 hingga tahun 2019 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 total produksi Hortikultura sebesar 460.310 ton lebih tinggi dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 397.123 ton, dan pada tahun 2022 sebesar 559.400 ton lebih kecil dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 574.264 ton. Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 yakni dari 1,59 persen menjadi 2,44 persen pada tahun 2022.

Sedangkan NTP Sektor Hortikultura pada tahun 2019 konsisten diatas 100 yang berarti nilai yang diterima petani hortikultura lebih besar dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani hortikultura.

Tabel 2.108

Realisasi Produksi Sub Sektor Holtikultura dan Sub Sektor Florikultura Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persentase	4,78	4,42	6,34	1,59	2,44
NTP Sektor Hortikultura	Persentase	100,76	100,85	99,05	104,87	102,05
Total Produksi Hortikultura	Ton	397.123	460.310	427.489	574.264	559.400

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat 2022.

*data sementara

c. Sub Sektor Perkebunan

1) Produksi Sub Sektor Perkebunan

Usaha perkebunan pada umumnya dikelola oleh masyarakat (kebun rakyat), namun ada beberapa perusahaan swasta dan BUMN yang mengusahakan perkebunan dalam skala besar. Perkembangan produksi jenis perkebunan besar komoditas Kelapa Sawit sebesar 4,965,488 ton tahun 2020 meningkat menjadi 6,614,709 ton pada tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan produksi kelapa sawit didukung oleh meningkatnya investasi di sektor perkebunan, terutama investasi di perkebunan besar kelapa sawit.

Secara keseluruhan terjadi peningkatan produksi di sektor perkebunan dari 5,331,325 ton di tahun 2020 menjadi 7,022,642 ton pada tahun 2021 .

Tabel 2.109

Produksi Sektor Perkebunana Tahun 2018-2022

KOMODITAS	PRODUKSI (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022*
AREN	46	50	52	56	55
CENGKEH	289	288	285	283	285
KAKAO	2,517	2,416	2,131	1,893	902
KAPUK	5	5	3	3	6
KARET	265,119	258,365	266,556	306,282	264,862
KELAPA DALAM	81,182	79,409	78,662	76,086	76,783
KELAPA DERES	2,652	2,652	3,231	7,203	7,097
KELAPA HIBRIDA	2,519	2,372	2,234	2,510	2,524
KELAPA SAWIT	3,472,202	3,992,182	4,965,488	6,614,709	5,633,448
KEMIRI	147	152	148	148	147
KOPI	3,617	3,799	3,701	3,138	3,150
LADA	5,445	5,820	6,197	6,480	6,653

PALA	26	27	24	28	31
PINANG	937	937	973	2,565	2,577
SAGU	308	308	1,529	1,147	1,168
TEBU	111	1,163	111	111	131
Grand Total	3,837,122	4,349,945	5,331,325	7,022,642	5,999,819

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022

Catatan : Produksi tahun 2022 masih data sementara

Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021 yakni dari 7,95 persen menjadi 6,35 persen pada tahun 2022. Sedangkan NTP Sektor Perkebunan pada tahun 2022 berada diatas angka 100 yang berarti nilai yang diterima petani perkebunan lebih besar dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani perkebunan.

Tabel 2.110

Perkembangan Capaian Indikator Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	*2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	7,47	7,43	2,57	7,95	6,35
NTP Sektor Perkebunan	Persen	94,44	89,38	114,66	146,95	167,85

Sumber : SIPD – Dinas Perkebunan Prov. Kalbar (Data BPS). Tahun 2023

* data sementara

d. Sub Sektor Peternakan

Kondisi Umum Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Barat pada Tahun 2013-2019 menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- Populasi ternak pada tahun 2022 rata-rata mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 kecuali Ayam ras pedagin secara keseluruhan.
- Produksi daging di tahun 2022 juga menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2021 kecuali daging ayam buras dan daging itik keseluruhan.
- Produksi telur di tahun 2022 untuk semua jenis telur menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2021 tanpa terkecuali.
- Kondisi pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Tahun 2022 meningkat lebih baik dibandingkan tahun 2021
- Untuk tren peningkatan populasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun yang meningkat 10,22 untuk sapi perah,3,30 untuk ayam ras pedaging. Sedangkan perlambatan populasi dari tahun 2018-2022 tertinggi pada ternak babi (81,41).

Kondisi umum peternakan dan kesehatan hewan ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.111
Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton) Tahun 2018-2022

No	Jenis Data	Realisasi					Rata-Rata	Pertumbuhan (%)	
		Satuan	2018	2019	2020	2021			2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Populasi Ternak								
	1) Sapi Potong	Ekor	143,307	154,382	158,190	156,578	123,067	147,105	-21.40
	2) Sapi Perah	Ekor	111	170	167	186	205	168	10.22
	3) Kambing	Ekor	155,444	148,086	143,900	146,729	113,355	141,503	-22.75
	4) Domba	Ekor	125	154	193	222	210	181	-5.41
	5) Babi	Ekor	493,786	465,53	463,570	410,654	76,348	361,090	-81.41
	6) Ayam Buras	Ekor	5,920,669	5,790,527	6,025,606	6,167,568	6,069,275	5,994,729	-1.59
	7) Ayam Ras Petelur	Ekor	3,793,955	3,611,908	4,732,800	3,753,341	3,678,263	3,914,053	-2.00
	8) Ayam ras Pedaging	Ekor	55,551,015	50,317,979	50,600,958	42,304,613	43,698,722	48,494,657	3.30
	9) Total Ayam	Ekor	65,265,639	59,720,414	61,359,364	52,225,522	53,446,260	58,403,440	2.34
	10) Itik (Bebek)	Ekor	566,059	556,149	556,149	529,695	502,023	542,015	-5.22
2	Hasil Produksi Ternak								
	1) Daging Sapi Potong	Ton	5,447	5,350	4,817	5,060	4,593	5,053	-9.23
	2) Daging Kambing	Ton	411	417	384	364	335	382	-7.97
	3) Daging Babi	Ton	12,079	11,435	10,244	12,145	5,010	10,183	-58.75
	4) Daging Ayam Buras	Ton	3,417	3,478	3,412	3,455	5,572	3,867	61.27
	5) Daging Ayam Ras Pedaging	Ton	53,396	55,535	55,793	61,500	57,845	56,814	-5.94
	6) Total Daging Ayam	Ton	56,813	59,013	59,205	64,955	63,417	60,681	-2.37
	7) Daging Itik	Ton	285	287	322	301	314	302	4.32
	8) Ternak Ruminansia Kecil	Ton	-	-	-	-	-	-	-
3	Produksi Telur								
	1) Telur Ayam Buras	Ton	3,320	3,500	4,540	3,763	3,703	3,765	-1.59
	2) Telur Ayam Ras Petelur	Ton	29,161	29,936	69,160	50,495	49,365	45,623	-2.24
	3) Telur Itik	Ton	2,761	2,578	3,604	3,462	3,155	3,112	-8.87
4	Produksi Susu								
	Sapi Perah	Kg	62,464	76,968	115,778	-	-	85,070	-
5	Produktivitas Susu								
	Sapi Perah	lt/ekor/hari	4,300	4,300	-	-	-	4,300	-
6	Pemotongan								

No	Jenis Data	Realisasi					Rata-Rata	Pertumbuhan (%)	
		Satuan	2018	2019	2020	2021			2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1) Sapi Potong	Ekor	36,033	35,657	27,947	33,441	30,601	32,736	-8.49
	2) Kambing	Ekor	284	28,323	27,857	26,171	24,000	21,327	-8.30
	3) Domba	Ekor	11	19	13	100	44	37	-56.00
	4) Babi	Ekor	150,712	154,944	133,614	175,945	72,026	137,448	-59.06
7	Terkendalnya Penyakit Hewan Menular								
	1) Penyakit Avian Influenza	%		100	100	100	100	Bebas	-
	2) Penyakit Brucellosis	%		100	100	100	100	Bebas	-
	3) Penyakit Hog Cholera	%	Bebas		100	100	100	Bebas	-
	4) Penyakit Parasiter	%	-	-	0,67	0,83	1,02	Turun 5%	
	5) Penyakit Rabies	%	-	-	64,29	50	50	54,76	

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat 2022.

Produksi Peternakan Kalimantan Barat terbagi menjadi produksi daging dan produksi telur, selain itu kinerja peternakan juga dilihat dari wilayah yang dapat dikendalikan Zoonosisnya. Laju pertumbuhan PDRB Peternakan merupakan bagian dari laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dikeluarkan datanya oleh BPS setahun sekali. NTP Peternakan merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan peternak dengan membandingkan antara harga yang diterima oleh peternak dengan harga yang dikeluarkan oleh peternak.

Tabel 2.112
Capaian Sektor Peternakan Tahun 2018-2022

Indikator	Realisasi Capaian				
	2018	2019*	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)			
Jumlah Wilayah Terkendali PHMS/ Zoonosis	4	6	-	-	-
Produksi Daging Peternakan (Ton)	78.526	135515	134177	147780	137086
Produksi Telur (Ton)	35.242	36.014	77304	57720	56223
Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan (%)	5,51	5,02	-	-	-
NTP Peternakan	94,26	94,92	97,55	99,06	100,53

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dan BPS 2022.

* Data Sementara

2.3.2.4. Kehutanan

Sektor kehutanan memiliki empat indikator yang mengukur keberhasilan program dibidang kehutanan. Lahan kritis di Kalimantan Barat pada tahun 2022 secara umum capaiannya tidak jauh berbeda dengan tahun 2021, baik lahan kritis didalam maupun diluar kawasan hutan. Potensi lahan kritis tahun 2022 sebesar 3.850.837,03 ha, luas lahan kritis sebesar 999.654,44 ha, lahan kritis di dalam kawasan hutan sebesar 940.475,17 ha.Sedangkan lahan kritis di luar Kawasan hutan pada tahun 2022 adalah sebesar 59.179,32

Kerusakan hutan tahun 2022 dilihat dari titik api penyebab kejadian kebakaran hutan mengalami kenaikan di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 656 unit pada tahun 2022 dan 418 unit pada tahun 2021. Sedangkan luas kebakaran hutan pada tahun 2022 adalah sebesar 6.869,61 hektar, lebih kecil dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 7.956,94.

Tabel 2.113

Kondisi Umum Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lahan Kritis					
1. Potensi Lahan Kritis (Ha)	6.306.529,27		5.194.886,65		3.850.837,03
2. Luas Lahan Kritis (Ha)	999.563,10		969.229,76	999.178,65	999.654,44
3. Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan (Ha)	945.880,22		694.125,46	949.945,58	940.475,17
4. Lahan Kritis di luar Kawasan Hutan (Ha)	53.528,38		273.987,82	49.233,07	59.179,32
Kerusakan Hutan					
1. Luas Kerusakan Hutan (Ha)					
2. Titik Api Penyebab Kejadian Kebakaran Hutan (Unit)	2006	4140	455	418	656
3. Luas Kebakaran Hutan (Ha)	25.976,01	48.326,12	4.765,45	7.956,94	6.869,61
Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
1. Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	382,00	11.050,00	1.500,00	2.472,26	2.982,56
2. Luas Penghijauan (Ha)	-	-	-	1.072,26	467,56
3. Luas Lahan Reboisasi (Ha)	382,00	11.050,00	1.500,00	1.400,00	2.515,00
Produksi Kayu Bulat Asal Kayu (M³)					
Hak Pengusaha Hutan (M ³)	194.656,59	172.119,23	84.584,12	197.534	303.589
Hutan Tanaman Industri (M ³)	1.160.674,86	909.085,38	748.201,00	673.713	861.619
IPK/Hutan Hak/Hutan Adat (M ³)	28.298,41	37.251,37	25.904,58		
Non HPH				33.728	0

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.114

Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Per Kabupaten Se Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bengkayang	0	0	0	0	0
2	Kapuas Hulu	132	1450	0	0	50
3	Kayong Utara	0	250	0	0	0
4	Ketapang	0	0	0	0	0
5	Kota Pontianak	0	0	0	0	0
6	Kota Singkawang	0	0	0	0	0
7	Kubu Raya	0	0	0	0	0
8	Landak	0	100	0	0	0
9	Melawi	150	1950	575	400	750
10	Mempawah	0	225	0	0	0
11	Sambas	0	0	0	0	0
12	Sanggau	0	0	0	0	150
13	Sekadau	0	100	0	0	140
14	Sintang	100	6450	925	925	1425

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.115

Kerusakan Hutan Per Kabupaten Se Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kapuas Hulu	278,99	552,40	28,47	48,67	-
2	Sintang	796,92	1.793,27	193,23	421,76	104,27
3	Melawi	3.118,96	9.261,01	732,63	466,45	268,83
4	Sekadau	-	298,34	10,74	11,03	-
5	Sanggau	208,27	1.246,90	319,13	291,31	17,90
6	Landak	39,55	211,90	325,29	116,70	7,76
7	Mempawah	1.699,12	2.212,48	782,16	911,94	1.866,37
8	Kubu Raya	1.436,71	2.406,64	-	197,34	90,65
9	Sambas	6.255,36	2.322,39	437,61	3.573,93	2.823,47
10	Bengkayang	471,47	164,70	460,65	66,59	15,81
11	Ketapang	8.869,09	22.588,63	1.475,55	1.851,23	1.335,22
12	Kayong Utara	2.740,53	5.266,94	-	-	339,34

13	Kota Singkawang	-	-	-	-	-
14	Kota Pontianak	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Produksi Kehutanan Kalimantan Barat masih dilihat dari produksi kayu bulat selama setahun. Laju pertumbuhan PDRB Kehutanan merupakan bagian dari laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dikeluarkan datanya oleh BPS setahun sekali. Sedangkan Indeks Tutupan Hutan merupakan luas tutupan yang dipengaruhi oleh Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Prov. Kalbar termasuk pembangunan HTI dan Hasil kegiatan BPDAS Kapuas.

Tabel 2.116
Capaian Sektor Kehutanan Tahun 2018-2022

INDIKATOR	Keterangan	REALISASI CAPAIAN				
		2018	2019*	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produksi Kayu Bulat (M ³) ¹	Indikator Sasaran Strategis OPD	981.200	1.114.280	826.332	905.599	
Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan ADHK ²	Indikator Tujuan OPD	(0,98)	(0,88)	(1,49)	0,27	Belum terbit
Indeks Tutupan Kualitas Lahan ³	Indikator Tujuan OPD	64,19	59,76	59,49	59,81	Belum ada

Sumber : 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar 2022.

2. BPS Kalbar (KDA)

3. LAKIP 2021 LHK

* Data Sementara

Catatan: Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Prov. Kalbar termasuk pembangunan HTI dan Hasil kegiatan BPDAS Kapuas.

2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

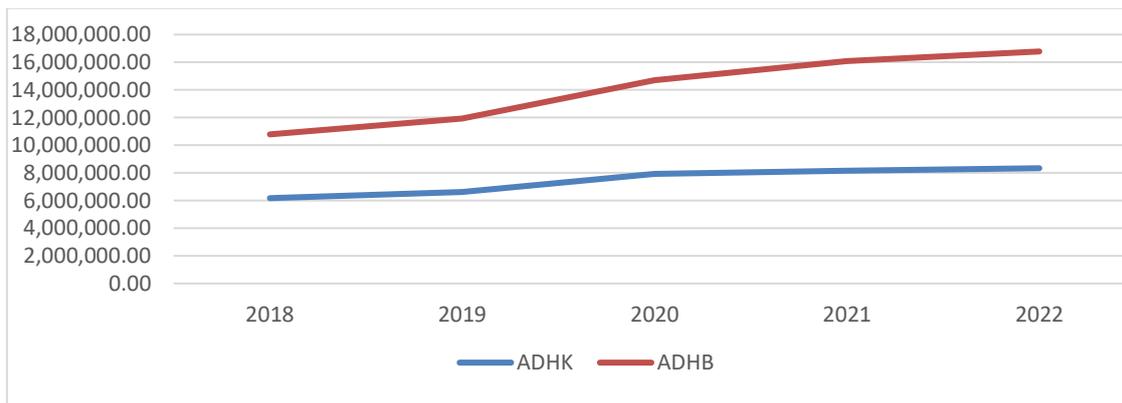
Sektor Pertambangan dan Penggalian sampai dengan tahun 2022 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.117
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertambangan dan Penggalian Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

Tahun (Juta Rupiah)	PDRB	
	Harga Konstan	Harga Berlaku
(1)	(2)	(3)
2018	6,171,038,00	10,782,611,40
2019	6,596,833,50	11,916,492,62
2020	7 926 297,60	14 714 649,11
2021	8 136 119,15	16 066 175,72
2022	8 333 880,59	16 777 172,85

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022.

Gambar 2.17
Perkembangan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022.

Kalimantan Barat memiliki potensi sumberdaya mineral yang berlimpah dengan potensi yang tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota. Kalimantan Barat, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel. 2.118
Potensi Jenis Bahan Galian sesuai Lokasi di Kalimantan Barat Tahun 2021

No.	Bahan Galian	Satuan	Sumber Daya Bijih	Cadangan Bijih	Sumber Daya Logam	Cadangan Logam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BENGKAYANG					
	LOGAM					
	BAUKSIT	TON	8,568,850.00	5413639.00	467469.83	-
	EMAS ALLUVIAL	TON	216,602,975.29	-	18.58	-
	EMAS PRIMER	TON	-	791.45	-	791.45
	MANGAN	TON	1,524,700.00	-	723341.00	-
	PERAK	TON	-	-	5.44	-
	TIMBAL	TON	1,174,312.00	89247.75	-	-
	BUKAN LOGAM					
	ANDESIT	TON	283,750,000.00	-	-	-
	BALL/BOND CLAY	TON	-	603,850.00	-	-
	GRANIT	TON	1,211,860.00	906,620.00	-	-
	GRANIDIORIT	TON	1,755,000,000.00	-	-	-

	KAOLIN	TON	188,700,000.00	-		
	LEMPUNG	TON	417,750,000.00	-		
	PASIR KUARSA	TON	70,850,000.00	-		
	PASIR ZIRKON	TON	7,056,148.72	-		
2.	KAPUAS HULU					
	LOGAM					
	AIR RAKSA	TON	4,881.50	72.04	467469.83	-
	ANTIMONI	TON	4,070,421.26	3958633.00	15834.53	15834.53
	EMAS ALLUVIAL	TON	4,815,935.34	3.33	1.29	-
	TEMBAGA	TON	-	8731198.00	-	-
	BUKAN LOGAM					
	ANDESIT	TON	886,850,586.16	30,097,946.36		
	DASIT	TON	625,000,000.00	-		
	DIORIT	TON	1,055,050,000.00	-		
	KAOLIN	TON	57,000,000.00	-		
	LEMPUNG	TON	122,625,000.00	-		
	PASIR KUARSA	TON	60,537,500.00	-		
	SIRTU	TON	70,120,899.00	4,440,792.00		
	TOSEKI	TON	31,000,000.00	-		
3.	KAYONG UTARA					
	LOGAM					
	BAUKSIT	TON	36,936,952.00	34,185,021.19	4,625,966.44	5,501,207.64
	EMAS ALLUVIAL	TON	61,082.00	-	0.03	-
	BUKAN LOGAM					
	GRANIT	TON	200,000,000.00	-		
4.	KETAPANG					
	LOGAM					
	BAUKSIT	TON	2,510,442,863.86	1,569,241,805.84	382,806,340.52	255,062,609.47
	BESI PRIMER	TON	288,000.00	73,118,728.00	0.00	25,650,000.00

	EMAS PRIMER	TON	13,811,176.43	11,448,146.93	30.64	25.93
	MONASIT	TON	10,416,600.00	-	1,175.93	-
	PERAK	TON	7,604,113.40	7,604,113.40	64.64	64.64
	SENG	TON	1,870,400.00	119,090.90	205,744.00	13,100.00
	TIMAH	TON	13,040,000.00	981,261.79	3,912.00	30,851.80
	TIMBAL	TON	1,870,400.00	119,090.90	187,040.00	11,909.09
	BUKAN LOGAM					
	AMETIS	TON	8,668.00	-		
	BALL/BOND CLAY	TON	12,500,000.00	-		
	GRANIT	TON	300,000,000.00	-		
	KAOLIN	TON	104,000,000.00	2302612.00		
	LEMPUNG	TON	104,000,000.00	-		
	PASIR KUARSA	TON	587,600,000.00	-		
	PASIR ZIRKON	TON	750,000.00	2597217.85		
5.	SINGKAWANG					
	BUKAN LOGAM					
	PASIRKUARSA	TON	6,000,000.00	-		
6.	KUBU RAYA					
	BUKAN LOGAM					
	ANDESIT	TON	36,711,228.00	-		
	PASIR ZIRKON	TON	-	22560.00		
7.	LANDAK					
	LOGAM					
	BAUKSIT	TON	781,099,389.18	173,459,268.53	155,953,465.97	34,429,429.04
	TITAN LATERIT	TON	347,245,887.81	101,285,556.00	1,851,494.60	611,345.47
	BUKAN LOGAM					
	KAOLIN	TON	92,223,000.00	-		
	PASIR ZIRKON	TON	226,050.00	-		

8.	MELAWI					
	LOGAM					
	BESI PRIMER	TON	-	-	-	-
	EMAS ALLUVIAL	TON	5,827,777.50	-	4.66	-
	BUKAN LOGAM					
	ANDESIT	TON	17,000,000.00	-		
	GRANIT	TON	23,500,000.00	-		
	KAOLIN	TON	1,500,000.00	-		
	LEMPUNG	TON	3,500,000.00	-		
	PASIR KUARSA	TON	7,650,000.00	-		
	PASIR ZIRKON	TON	273,885.52	-		
	SIRTU	TON	2,700,000.00	-		
9.	MEMPAWAH					
	LOGAM					
	BAUKSIT	TON	67,925,416.43	32,556,552.07	12,441,791.00	6,263,322.00
	BESI PRIMER	TON	72,907.95	-	43,015.69	-
	TITAN LATERIT	TON	31,820,000.00	15,505,228.00	3,930,937.00	126,324.00
	BUKAN LOGAM					
	ANDESIT	TON	23,242,929.00	-		
	DIORIT	TON	780,730.00	604195.00		
	GRANIT	TON	31,968,825.00	7367452.00		
	PASIRKUARSA	TON	3,600,000.00	-		
	SIRTU	TON	30,762,509.65	3510844.38		
10.	SAMBAS					
	LOGAM					
	BESI PRIMER	TON	-	-	-	-
	EMAS ALLUVIAL	TON	706,268.03	-	0.05	-
	EMAS PRIMET	TON	650,000.00	-	2.76	-
	BUKAN LOGAM					
	ANDESIT	TON	14,535,334,453.40	12,699,463.40		

	BALL/BOND CLAY	TON	66,250,000.00	-		
	FELSPAR	TON	9,000,000.00	-		
	KAOLIN	TON	201,555,227.64	-		
	LEMPUNG	TON	25,000,000.00	-		
	PASIR KUARSA	TON	350,500,000.00	-		
	PASIR ZIRKON	TON	138,600.00	-		
	TOSEKI	TON	13,500,000.00	-		
11.	SANGGAU					
	LOGAM					
	BAUKSIT	TON	1,786,094,266.32	694,109,524.97	318,044,152.04	126,462,380.19
	BESI PRIMER	TON	-	21,875,000.00	0.00	13,617,187.50
	EMAS ALLUVIAL	TON	59,967,684.40	50,590,800.00	136.41	114.76
	EMAS PRIMER	TON	885,345.39	593,963.08	0.41	0.69
	TITAN LATERIT	TON	231,277,961.27	89,070,000.00	1,723,352.60	554,031.00
	BUKAN LOGAM					
	ANDESIT	TON	586,500,000.00	-		
	BATUGAMPING	TON	390,000.00	-		
	FELSPAR	TON	4,292,000.00	-		
	GIPSUM	TON	31,300,000.00	-		
	GRANIT	TON	732,708,000.00	-		
	KAOLIN	TON	520,000.00	-		
	LEMPUNG	TON	2,600,000.00	-		
	PASIR KUARSA	TON	6,000,000.00	-		
	SIRTU	TON	18,529,275.00	-		
12.	SEKADAU					
	LOGAM					
	BAUKSIT	TON	930,396.00	45,936.00	197,031.12	-
	BUKAN LOGAM					
	PASIR KUARSA	TON	98,800,000.00	-		

	PASIR ZIRKON	TON	294,000.00	-		
13.	SINTANG					
	LOGAM					
	BAUKSIT	TON	3,642,492.50	-	813,399.74	0.00
	EMAS ALLUVIAL	TON	-	6,472,558.00	-	2.87
	EMAS PRIMER	TON	1,115,658.92	875,650.76	0.14	0.10
	MONASIT	TON	-	-	1,483.72	-
	BUKAN LOGAM					
	ANDESIT	TON	10,700,500,000.00	-		
	DIORIT	TON	62,500,000.00	-		
	FELSPAR	TON	1,000,000,000.00	-		
	GRANIT	TON	5,150,000,000.00	-		
	KAOLIN	TON	7,000,000.00	-		
	LEMPUNG	TON	21,050,000.00	-		
	PASIR KUARSA	TON	871,900,000.00	-		
	PASIR ZIRKON	TON	3,673,737.51	-		

Sumber : Badan Geologi Kementerian ESDM 2021

Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah dilakukan di Kalimantan Barat baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Purnian, Pengangkutan, dan Penjualan serta Kegiatan Pasca Tambang.

Jumlah Perizinan sektor Pertambangan Mineral & batubara Provinsi Kalbar yang telah dikeluarkan atau diberikan kepada Perusahaan sampai dengan Desember 2022 adalah sebanyak 360 IUP yang terdiri dari 59 IUP Komoditas Mineral Logam, 2 IUP Komoditas Batubara, 3 IUP Komoditas Mineral Non Logam, 48 IUP Bukan Logam Jenis Tertentu, 248 IUP Batuan. Sedangkan berdasarkan tahap kegiatannya, jumlah IUP di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 124 IUP Eksplorasi dan 236 IUP Operasi Produksi.

Dilihat dari penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tersebut, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (luran tambang) Kalimantan Barat (Prov/Kab/Kota) tahun 2022 sebesar Rp. 1,144,356,069,936 terdiri dari Landrent (luran tetap) sebesar Rp. 77,288,578,471 dan Royalti (luran produksi) sebesar Rp. 1,067,067,491,465. Sedangkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 sebesar Rp. 183,096,971,190. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 sebesar

Rp. 159,784,164,079,- terdiri dari Landrent (luran tetap) sebesar Rp. 100,861,211,328,- dan Royalti (luran produksi) sebesar Rp. 897,789,814,168,-. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi penurunan PNBPN di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 14,59 % pada tahun 2022, sebagaimana disampaikan pada tabel 2.128

Tabel. 2.119
DATA PENERIMAAN BUKAN PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN KALIMANTAN BARAT
Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Landrent	Royalty	Jumlah	Dana Bagi Hasil (16%) PP 55 2005	Peningkatan/Penurunan PNBPN	
		(luran tetap)	(luran produksi)			(Rp)	%
1	2018	34,820,917,688	135,563,037,294	170,383,954,982	27,261,432,797	70,383,954,982	41.3
2	2019	51,380,603,257	266,746,847,052	318,127,450,309	50,900,392,049	147,743,495,327	86.71
3	2020	42,517,343,528	565,005,632,136	607,522,975,664	97,203,676,106	289,395,525,355	90.97
4	2021	100,861,211,328	897,789,814,168	998,651,025,496	159,784,164,079	391,128,049,832	64.38
5	2022	77,288,578,471	1,067,067,491,465	1,144,356,069,936	183,096,971,190	145,705,044,440	14.59

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat 2022

Untuk potensi cekungan air tanah, berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki 7 (tujuh) titik cekungan air tanah yaitu cekungan air tanah Paloh seluas 561 km², cekungan air tanah Sambas (3.178 km²), cekungan air tanah Singkawang (728 km²), cekungan air tanah Pontianak (22.620 km²), cekungan air tanah Sintang (24,74 km²), cekungan air tanah Kapuas Hulu (7.107 km²) dan PalangkarayaBanjarmasin (95.980 km²).

2.3.2.5.1. Ketenagalistrikan

Pembangkit listrik terdiri dari pembangkit listrik PLN, pembangkit listrik swasta dan *captive power* serta pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan. Sampai dengan akhir tahun 2022, produksi energi listrik sebesar 3.034.846.549 kWh meningkat 4,18 dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.120
Persentase Peningkatan Produksi Listrik Per Tahun Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Produksi Listrik (kWh)	Persentase Peningkatan (%)
(1)	(2)	(3)
2018	2.372.672.170	5,36
2019	2.572.688.237	8,43
2020	2.746.058.085	6,74
2021	2.912.978.141	6,08
2022	3.034.846.549	4,18

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kalbar, 2022

Ratio elektrifikasi pada akhir tahun 2022 sebesar 99,58 dengan jumlah pelanggan 2.855.996 pelanggan. Sementara Ratio Desa Berlistrik pada tahun 2022 berdasarkan data PLN sebesar 100 .

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi Energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dan berdasarkan inventarisasi potensi tersebut adalah sebagai berikut :

Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 MW, suatu potensi yang tidak kecil nilainya sehingga perlu dikaji lebih jauh bagaimana memanfaatkan potensi energi air ini untuk kebutuhan sarana listrik masyarakat secara maksimal.

Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m². Kalimantan Barat yang dilintasi Garis Khatulistiwa mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m² sampai dengan 9.583,9 Wh/m² sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses fotovoltaic atau dengan menggunakan secara langsung panas energi matahari tersebut. Pada tahun 2017, potensi tenaga surya di Kalimantan Barat telah dimanfaatkan dengan adanya 11 (sebelas) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dari 11 unit PLTS tersebut, tiga diantaranya merupakan milik PT. PLN dengan total kapasitas terpasang sebesar 180 kilowatt.

Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 megawatt. Pemanfaatan potensi energi air di Kalimantan Barat telah dilakukan PT. PLN dengan adanya enam pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas total 2.030 kilowatt. Selain itu pemanfaatan energi air juga dimanfaatkan melalui pembangunan satu unit pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berkapasitas total 200 kilowatt.

Potensi energi angin yang cukup banyak untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi untuk pembangkitan energi listrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Supadio, secara umum kecepatan angin rata-rata 26 knot dan kecepatan maksimum rata-rata per bulan adalah 626 knot.

Dengan melihat potensi perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Barat yaitu sebesar 921.560 ton per tahunnya, maka dapat diperkirakan besar potensi daya listrik yang mampu dihasilkan. Dari 921.560 ton produksi TBS (Tandan Buah Segar) per tahun akan dihasilkan CPO sebanyak 22 atau sekitar 202.743 ton CPO. Jika kita memperkirakan bahwa 50 dari CPO tersebut dapat digunakan sebagai biodiesel, maka dapat dihasilkan sekitar 101.371 ton biodiesel. Jika kita anggap 1 liter = 1 kg, maka biodiesel yang dihasilkan setara dengan 101.371.000 liter per tahunnya. Potensi daya yang dihasilkan dari biodiesel tersebut adalah 893.907.909,09 kWh per tahunnya.

Dampak lain perkembangan pesat produksi minyak sawit mentah adalah limbah cair kelapa sawit, yang sering disebut sebagai Palm Oil Mill Effluent atau POME. Setiap ton tandan buah segar yang diolah menghasilkan limbah cair sekitar 50 dibandingkan dengan total limbah lainnya, sedangkan tandan kosong sebanyak 23 (Sutarta dalam Wibisono, 2013).

Limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent atau POME) adalah limbah cair yang berminyak dan tidak beracun, berasal dari proses pengolahan minyak kelapa sawit, namun limbah

cair tersebut dapat menyebabkan bencana lingkungan apabila tidak dimanfaatkan dan dibuang di kolam terbuka karena akan melepaskan sejumlah besar gas metana dan gas berbahaya lainnya ke udara yang menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca. Tingginya kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) sebesar 50.00070.000 mg/l dalam limbah cair kelapa sawit memberikan potensi untuk dapat di konversi menjadi listrik dengan menangkap biogas (gas metana) yang dihasilkan melalui serangkaian tahapan proses pemurnian. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit berkisar 600-700 liter/ton tandan buah segar (TBS). Limbah cair kelapa sawit ini kemudian dimanfaatkan menjadi tenaga listrik melalui proses anaerob digestion dengan teknologi *covered lagoon* atau *continuos stirred tank reactor* (CSTR). Limbah cair sawit memiliki kandungan organik kemudian difermentasi dengan bakteri untuk menghasilkan biogas yang mengandung gas methane.

Potensi biomassa di Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki potensi yang cukup besar jika dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Potensi ini didapat dari hasil pengelolaan limbah pertanian, antara lain : sekam padi yang memiliki potensi setara dengan 73.107.507,20 SLM atau dalam bentuk energi listrik setara dengan 664.613.701,82 kWh setiap tahunnya, karet setara dengan 101.766.582 SLM atau dalam bentuk energi setara dengan 925.150.745,45 kWh per tahun, kelapa setara dengan 1.808.400 SLM atau 16.440.000 kWh per tahun, kopi setara dengan 1.628.676 SLM atau 14.806.145,45 kWh per tahunnya, coklat/kakao setara dengan 974.970 SLM atau 8.863.363,64 kWh per tahunnya.

Potensi energi biogas di Provinsi Kalimantan Barat dapat diperoleh dari limbah ternak yaitu sapi, kerbau, babi, maupun unggas. Dari hasil inventarisasi, pengumpulan data dan analisa yang dilakukan maka potensi energi dari pemanfaatan limbah ternak yang dapat dimanfaatkan untuk biogas ini dapat mencapai 6.084.067,95 SLM yang jika dikonversi menjadi energi listrik setara dengan 55.309.708,64 kWh.

Selain tenaga surya dan tenaga air, sistem kelistrikan di Kalimantan Barat juga mencakup pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar biomassa dengan kapasitas total 7.000 kilowatt.

2.3.2.5.2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Berdasarkan hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengklasifikasikan kandungan uranium di Kalimantan Barat (Kecamatan Nanga Ella, Kabupaten Melawi) sebagai cadangan terukur/terbukti sebesar 900 ton, dengan cadangan terindikasi sebesar 6.962 ton, cadangan tereka sebesar 1.737 ton, dan cadangan hipotetik sebesar 14.517 ton. Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Pemerintah Kalbar mendorong Pemerintah Pusat agar pemanfaatan potensi uranium tersebut di atas dapat dioptimalkan sebagai bahan bakar pengembangan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah satu upaya penerapan kebijakan ini adalah adanya perjanjian kerjasama antara Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN) BATAN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 298.3/SEN/RN01.01/12/2016 dan 01/PKBAPPEDA/2016 tentang Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.

Sebelumnya, sudah pernah dilakukan Kajian Tapak oleh BATAN berupa Penentuan Tapak Potensial PLTN dengan Metode SIG Di Wilayah Pesisir Provinsi Kalimantan Barat (Susiati, 2014). Dalam kajian tersebut, pemilihan tapak PLTN, IAEA telah mengeluarkan pedoman (IAEA

Safety Guide NSR3) dan peraturan BAPETEN (Perka BAPETEN No. 5 tahun 2007) tentang evaluasi tapak untuk mendapatkan tapak PLTN yang aman dan menjamin keselamatan. Untuk mempersiapkan program PLTN di Kalimantan Barat, BATAN telah melakukan penelitian di sepanjang pesisir Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan tapak potensial PLTN di wilayah pesisir Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara berdasarkan kriteria pembobotan dan pemodelan spasial dan SIG. Penentuan tapak potensial didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: kemiringan lereng, litologi, geologi, topografi, curah hujan, kerawanan bencana, jarak ke badan air, posisi daerah pemukiman, tataguna lahan, lahan gambut, hidrogeologi, dll. Berdasar hasil pembobotan dan pemeringkatan diperoleh 4 lokasi yang sesuai untuk dijadikan sebagai tapak potensial PLTN, diantaranya berada di wilayah pesisir yang terdapat di Kecamatan Kendawangan, Sukadana Matan Hilir Utara dan Matan Hilir Selatan.

2.3.2.6. Perdagangan

Sektor perdagangan Kalimantan Barat pada sisi ekspor banyak menghasilkan produk primer yang cukup laku dipasaran sehingga kegiatan ekspor masih tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Kinerja nilai ekspor di Kalimantan Barat dari tahun 2018 sampai dengan 2019 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, total nilai ekspor sebesar 1.006.960.000 US\$ mengalami kenaikan menjadi sebesar 1.168.660.000 pada tahun 2019. Namun di tahun 2020 kinerja dalam ekspor Kalimantan Barat mengalami penurunan, dimana nilai ekspor hanya sebesar 1.115.850.000 US \$, dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 nilai ekspor di Kalimantan Barat Kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 1.851.530.000. Peningkatan nilai ekspor ini terus mengalami perkembangan positif pada tahun 2022, dimana tercatat nilai ekspor menjadi 2.455.340.000 US\$, sedangkan impor juga naik volumenya menjadi 283.425.000 dengan nilai sebesar 337.129.000

Tabel 2.121

Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2022

Tahun	Ekspor		Impor	
	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	9.765.020.000	1.006.960.000	537.010.000	463.070.000
2019	15.326.240.000	1.168.660.000	408.740.000	482.250.000
2020	18.723.210.000	1.115.850.000	347.500.000	439.810.000
2021	20.779.910.000	1.851.530.000	250.570.000	282.220.000
2022	18.453.655.000	2.455.340.000	283.425.000	337.129.000

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023

Sektor perdagangan Kalimantan Barat pada sisi ekspor banyak menghasilkan produk primer yang cukup laku dipasaran sehingga kegiatan ekspor masih tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Ekspor Kalimantan Barat didominasi oleh 4 (empat) golongan barang yaitu Bahan Kimia Anorganik; Bijih, Kerak dan Abu Logam; Kayu, Barang dari Kayu; dan Lemak dan Minyak Hewan/Nabati.

Tabel 2.122
Ekspor Kalimantan Barat Menurut Golongan Barang 2018-2022

Golongan Barang (HS)	Nilai FOB (Juta US \$) Jan -Des				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bahan Kimia Anorganik (HS28)	457.69	375.77	253.20	243.36	762.05
Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26)	253.55	427.77	512.97	452.33	-
Kayu, Barang dari Kayu (HS44)	103.12	62.79	59.73	101.11	103.17
Lemak & Minyak Hewan / Nabati (HS15)	76.70	131.87	136.85	457.01	736.64
Karet dan Barang dari Karet (HS40)	55.46	86.27	92.94	153.66	123.67
Ampas / Sisa Industri Makanan (HS23)	21.30	25.13	25.21	82.16	40.01
Buahbuahan (HS08)	13.56	15.74	40.86	50.76	34.41
Ikan dan Udang (HS03)	3.52	3.95	-	6.40	5.54
Tembakau (HS24)	13.77	17.24	15.28	20.92	12.02
Berbagai Makanan Olahan (HS21)	1.45	2.25	-	61.10	-
Berbagai Produk Kimia (HS 38)	-	-	4.67	-	-
Lokomotif dan Peralatan Kereta Api (HS86)	-	-	0.62	-	-
Lainnya	13.11	19.88	13.52	190.93	637.83
Total	1,013.23	1,168.66	1,115.85	1.851.53	2.455,34

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023.

Tujuan Negara Ekspor Kalimantan Barat masih didominasi oleh Negara di Asia yaitu China, Malaysia, Jepang dan India.

Tabel 2.123
Ekspor Kalimantan Barat Menurut Negara Tujuan 2018-2022

NEGARA TUJUAN	Nilai FOB (Juta US\$)				
	Jan-Des 2018	Jan-Des 2019	Jan-Des 2020	Jan-Des 2021	Jan-Des 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TIONGKOK	41.21	499.79	657.27	678.05	822.73
MALAYSIA	8.76	342.62	137.91	294.39	331.94
JEPANG	9.46	77.67	66.17	64.27	143.88
INDIA	15.02	169.08	175.37	352.94	688.59
VIETNAM	1.14	11.39	11.71	19.11	-
THAILAND	0.53	8.19	16.88	25.61	10.69
TAIWAN	0.54	7.38	6.50	12.74	8.72
ARGENTINA	0.82	15.38	-	16.24	16.62
HUNGARIA	-	4.52	-	-	-
KOREA	-	-	26.36	82.23	65.48
PANAMA	-	-	8.77	-	-
PAKISTAN	-	-	-	97.20	-
LAINNYA	935.75	32.64	48.91	305.95	366.69
Total	1,013.23	1,168.66	1,115.85	1.851.53	2.455,34

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023

Dari sisi Impor Kalimantan Barat masih mengalami peningkatan nilai transaksi dengan didominasi dengan 4 (empat) golongan barang yaitu Mesinmesin/Pesawat Mekanik; Bahan Bakar Mineral; Mesin/Peralatan Listrik; dan Kapal Laut dan Bangunan Terapung.

Tabel 2.124

Impor Kalimantan Barat Menurut Golongan Barang 2018-2022

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (Juta US\$)				
	Jan-Des 2018	Jan-Des 2019	Jan-Des 2020	Jan-Des 2021	Jan-Des 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mesinmesin / Pesawat Mekanik (HS84)	59.41	134.1	143.29	35.02	52.42
Bahan Bakar Mineral (HS27)	224.78	198.48	168.00	142.04	162.61
Mesin / Peralatan Listrik (HS85)	8.04	30.71	42.28	14.20	10.85
Bahan Kimia Anorganik (HS29)	1.69	11.21	6.34	1.32	4.93
Perangkat Optik (HS90)	0.69	5.59	-	-	-
Besi dan Baja (HS72)	1.86	10.27	4.55	7.89	6.90
Benda benda dari Besi dan Baja (HS73)	11.87	25.77	-	-	-
Kapal Laut dan Bangunan Terapung (HS89)	48.29	5.91	-	-	-
Bijibijian berminyak (HS12)	10.38	10.02	10.79	9.09	7.69
Plastik dan Barang dari Plastik (HS39)	5.26	5.9	5.70	4.76	-
Pupuk (HS 31)	-	-	6.46	4.58	1.54
Lokomotif dan Peralatan Kereta Api (HS86)	-	-	7.78	9.61	9.08
Kendaraan dan Bagiannya (HS87)	-	-	4.59	4.16	-
Produk Keramik (HS69)	-	-	2.80	-	-
Perabot, Penerangan Rumah	-	-	1.24	-	-
Karet dan Barang dari Karet (HS 40)	-	-	-	15.79	26.54
Lainnya	90.85	44.29	45.52	33.76	54.57
Total	463.12	482.25	439.81	282.22	337.13

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023.

Negara Asal Impor Kalimantan Barat masih didominasi oleh Negara di Asia yaitu China, Malaysia dan Singapura.

Tabel 2.125

Impor Kalimantan Barat Menurut Menurut Negara Asal Barang 2018-2022

NEGARA ASAL BARANG	Nilai CIF (Juta US\$)				
	JanDes 2018	JanDes 2019	JanDes 2020	JanDes 2021	JanDes 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TIONGKOK	141.58	195.16	179.27	54.84	53.73
MALAYSIA	144.60	195.61	189.93	122.08	163.17
JEPANG	6.10	5.12	7.85	8.82	25.95
INDIA	9.07	8.69	9.51	17.67	11.02
SINGAPURA	124.17	44.74	30.60	47.58	-
THAILAND	2.51	1.26	0.64	9.65	14.18
JERMAN	0.65	3.28	-	-	-
KANADA	0.02	0.01	-	-	-
AMERIKA SERIKAT	7.05	5.47	4.31	4.47	4.17
PANTAI GADING	-	-	-	4.33	10.43
LAINNYA	27.37	22.91	18.34	12.78	54.48
Total	463.12	482.25	439.81	282.22	337.13

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023.

Peningkatan nilai ekspor Kalimantan Barat terus mengalami perkembangan positif (surplus). Diharapkan trend positif ini terus berlanjut dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi Kalimantan Barat.

Tabel 2.126
Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2022

Tahun	Ekspor		Impor		Total Transaksi
	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Nilai (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	9.765.020.000	1.006.960.000	537.010.000	463.070.000	1.476.350.000
2019	15.326.240.000	1.168.660.000	408.740.000	482.250.000	1.650.910.000
2020	18.723.210.000	1.115.850.000	347.500.000	439.810.000	1.555.660.000
2021	20.779.910.000	1.851.530.000	250.570.000	282.220.000	2.133.750.000
2022	18.453.655.000	2.455.340.000	283.425.000	337.129.000	2,792.469.000

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023.

Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan Perdagangan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Didalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha penyusun PDRB, nilai pertumbuhan sektor Perdagangan dihitung berdasarkan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 2.127
Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Perdagangan Kalimantan Barat 2018-2022

TAHUN REALISASI / TARGET	PERKEMBANGAN PERDAGANGAN	
	KONTRIBUSI PADA PDRB (%)	LAJU PERTUMBUHAN PERDAGANGAN (%)
(1)	(2)	(3)
2018	14,01	4,59
2019	14,26	5,54
2020	13,72	-9,4
2021	12,77	4,16
2022	13,70	12,48

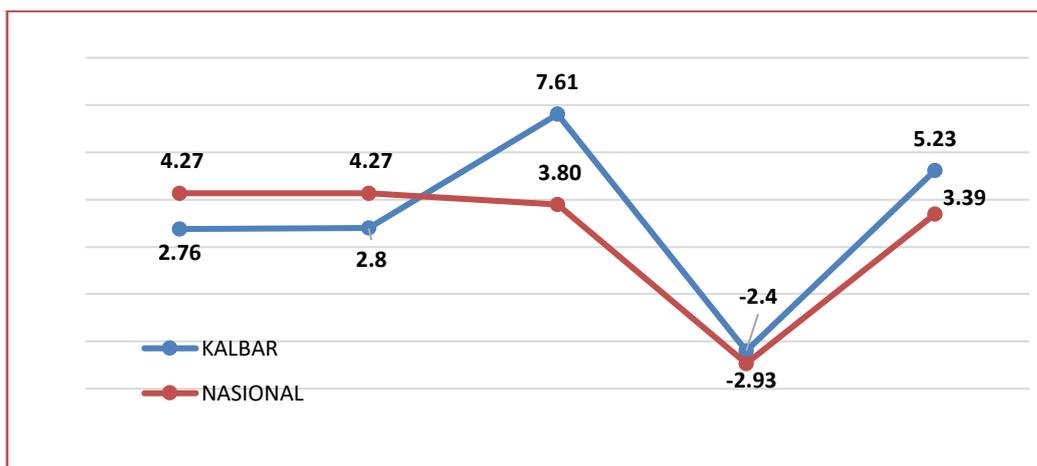
Sumber : BPS Provinsi Kalbar Tahun 2023.

2.3.2.7. Perindustrian

Sektor industri sampai dengan tahun 2022 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Pada tahun 2022 perkembangan industri khususnya kontribusi pada PDRB adalah sebesar 16,46 % yang mana mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya pada 2021 yang hanya sebesar 16,10 persen. Sementara itu pada tahun 2022 laju pertumbuhan industri mengalami penurunan menjadi sebesar 4,04 % dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 5,23 persen.

Gambar 2.18

Perkembangan Laju Pertumbuhan Industri Nasional dan Kalimantan Barat



Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2019. (Data Diolah)

Selain berakibat pada lambannya pergerakan perekonomian Kalimantan Barat, kondisi tersebut menyebabkan potensi kehilangan nilai tambah yang sangat besar dari komoditas primer Kalimantan Barat yang cenderung meningkat akhir akhir ini terutama sektor pertanian (termasuk perkebunan) dan pertambangan. Penurunan peranan sektor industri terutama disebabkan menurunnya kinerja industri kayu dan perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang masih sangat lamban dan hanya berbentuk industri hulu relatif peningkatan nilai tambahnya sangat kecil. Kondisi tersebut mau tidak mau mengharuskan Kalimantan Barat mencari alternatif bagi pengembangan industri lain yang memberi dayaangkit terhadap perekonomian. Bagaimanapun kedepan daerah Kalimantan Barat harus segera menerapkan strategi percepatan proses transformasi sektor industri pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah produksi, berdaya saing dan efisien. Percepatan penumbuhan Kawasan Industri untuk lokalisasi pemenuhan infrastruktur dan pengendalian lingkungan serta upaya pengembangan dan penyebaran IKM hingga ke desa dapat menjadi jalan percepatan pengembangan sektor industri daerah.

Sebagai langkah dalam penumbuhan dan pengembangan industri Kalimantan Barat, Pemprov Kalimantan Barat melalui Dinas Perindag Prov. Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat 2017-2037 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. RPIP tersebut telah mengakomodir 7 (tujuh) komoditi industri unggulan serta sebagai wadah sinergitas antar stakeholder dalam menentukan langkah dan arah kedepannya dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri Kalimantan Barat. Hal tersebut juga merupakan langkah dalam mencapai Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang pada Tahun 2025 yang mencanangkan Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang ditandai dengan Kemampuan seimbang antara IKM dan Industri Besar.

RPIP Kalimantan Barat 2017-2037 juga diharapkan dapat menjadi wadah sinergitas antar stakeholder dalam pemecahan masalah-masalah lainnya terkait dengandengan kendala yang dihadapi sektor industri seperti : kurang memadainya sarana infrastruktur daerah seperti jalan,

pelabuhan, energi, ketersediaan air bersih, pembangunan kawasan industri, kemudahan investasi, dll, dimana dengan diatasnya permasalahan-permasalahan yang ditemui akan dapat menumbuhkembangkan unit usaha industri baik Industri Kecil, Menengah, maupun Besar termasuk hilirisasi komoditas yang ada di Kalimantan Barat.

Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan Industri suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Didalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha penyusun PDRB, nilai pertumbuhan sektor Industri dihitung berdasarkan kategori Industri Pengolahan.

Tabel 2.128

Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Kalimantan Barat 2018-2022

TAHUN REALISASI / TARGET	PERKEMBANGAN INDUSTRI	
	KONTRIBUSI PADA PDRB (%)	LAJU PERTUMBUHAN INDUSTRI (%)
(1)	(2)	(3)
2018	16,50	2,80
2019	16,40	7,61
2020	16,14	-2,41
2021	16,10	5,23
2022	16,46	4,04

Sumber : BPS Provinsi Kalbar Tahun 2023.

2.3.2.8. Transmigrasi

Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Sejak Pra Pelita s/d tahun 2013 telah datang transmigran sebanyak 127.554 KK / 536.540 jiwa ke Kalimantan Barat. Sepanjang tahun tahun 2008-2013 sebanyak 5.277 KK / 20.380 jiwa (TPS 3.142 KK / 12.620 jiwa dan TPA 2.135 KK / 5.277 jiwa). Sejak adanya program transmigrasi sampai pada tahun 2013 telah dibangun Unit Pemukiman Transmigrasi sebanyak 344 UPT. Dari jumlah tersebut 216 UPT telah menjadi desa baru dan 11 kecamatan baru. Namun seiring berjalannya waktu sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 sudah tidak ada lagi penempatan transmigrasi di wilayah Kalimantan Barat.

Tabel 2.129

Penempatan Transmigrasi di Kalimantan Barat 2013-2022

Tahun	Jenis Transmigrasi		Jumlah
	Umum (jiwa)	Swakarsa Mandiri (jiwa)	
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	455	133	588
2014	160	-	160
2015	245	-	245
2016	371	-	371
2017	170	-	170
2018	258	-	258
2019	0	0	0

Tahun	Jenis Transmigrasi		Jumlah
	Umum (jiwa)	Swakarsa Mandiri (jiwa)	
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0

Sumber: olahan dari BPS. statistikmobilitaspendudukantenagakerja, Tahun 2023.

Dalam menyukseskan program transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah bekerja sama dengan Pemerintah provinsi Daerah Asal Transmigrasi. Ada 10 Pemprov. Daerah Asal Transmigrasi: Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Transmigrasi Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

2.3.3. Fokus Urusan Penunjang, Pengawasan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

2.3.3.1. Sekretariat Daerah

- a. Penataan perundang-undangan.

Tabel 2.130

Penataan Perundang-Undangan

No	Indikator	Capaian ()	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penataan perundangundangan.	177	159

Sumber : Biro Hukum Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022.

- b. Kondisi Capaian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 2.131

Kondisi Capaian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	Capaian(%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol						
1	Persentasi Dokumentasi Dan Publikasi Pemberitaan Melalui Media Cetak Elektronik Online Dan Media Luar Ruang	77,50	97,06			
	Jumlah berita/informasi memalui Situs provinsi Kalbar	100% 200 Berita/ TH				
	Jumah Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Baliho, spanduk dan benner	100% Pembuatan Baliho 60bh/TH				

No	Indikator (2)	Capaian(%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah Dialog Interaktif Melalui TV dan RRI					
	Jumlah Klarifikasi Pembertaan	100% Klarifikasi berita 20 kali/Tahun				
	Jumah Jumpa Pers	kegiatan jumpa pers 20 kali/Tahun				
	Jumlah pengelolaan Informasi Pembangunan daerah	80% 1 Lap Informasi Pembangunan daerah				
	Jumah Publikasi Pemberitaan dan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik	55% 10 kali Liputan Khusus/Th				
	Jumlah rapat koordinasi Bakohumas Pemkab/Kota seKalbar	Jumlah Rakor Bakohuas Pemkab/kota seKalbar 1 kali/th				
	Jumlah Notulen/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Prov.Kalbar	90.20% 20 Buku Notulen/Risalah Rapat Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Rapat Pimpinan /Coffe Morning				
	Jumlah penyaringan Informasi dan penghimpunan Kliping Koran Pemberitaan Media Cetak Jumlah Kliping Koran Pemberiaan Media Cetak	100% 1095 Kliping Koran Harian Cetak Kliping Bulan 60 buku Cetak				
	Jumlah Naskah pidato Bulanan dan Himpunan Pidato Gubernur	80% 12 Naskah pidato awal bulan				

No	Indikator (2)	Capaian(%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah bahan Dokumentasi dan Publikasi Kehumasan	66.7% Penyusunan Dokumentasi Elektronik Pejabat Pemrov Kalbar Dalam Bentuk CD 100 Paket (1 Paket s3 CD)				
	Jumlah Bahan Bacaan Setda dilingkungan Pemrov. Kalbar	66.67% Bahan Bacaan Gubernur 336 Expl/Th Bahan Bacaan Sekda 168 Expl/Th Bahan Bacaan Sekretariat dan Perpustakaan 1020 Explr/th				
	Jumlah Peliputan dan Pemberitaan kegiatan Pimpinan dan Kebijakan Pemerintahan Prov. Kalbar	100% 1000 Peliputan dan Pemberhentian/Tahun				
	Jumlah Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi daerah	100% 1 kali Sosialisasi Dan Rapat Koordinasi				
	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti	50% Keikutsertaan Kegiatan Pameran Dalam Dan Luar Daerah sebanyak 31 Kali				
	Jumlah Buletin Esksekutif	100% 400 buku buletin				

No	Indikator (2)	Capaian(%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi	100% Laporan pengelolaan informasi				
	Jumlah kegiatan Dialog/pertemuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0,00				
2	Persentase pelayanan Pimpinan Pemerintah Provinsi Kalbar Dan Tamu Pimpinan Sesuai Standar Pelayanan	82,50	70,40			
	Jumlah Fasilitasi Hubungan Kerjasama antar Media	55% Jumlah Media Cetak 3 Media Cetak				
	Jumlah Pendampingan dan pengelolaan administrasi perjalanan	74% Perjalanan luar daerah 25 kali				
	Jumlah Pengaturan Acara, tempat dan sarana upacara	100,9 % Acara Apel Rutin Awal Bulan 12 kali/th Acara peringatan kegiatan Hari Besar/Hari Raya 2 kali/th Acara peringatan hari Nasional 37 kali/th Acara Kegiatan Kedinasan Pem prov kalbar dll, 285 kali/th				
	Jumlah Bimtek Kaprotokolan Daerah	100% Jumah Bimbingan Keprotokolan Daerah 1 kali				
	Jumah rancangan Pergub Keprotokolan	0,00				

No	Indikator (2)	Capaian(%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah layanan di lingkungan Setda per Tahun	71% Sewa Sarana Mobilitas Darat 85 unit/th Perjalanan dinas dalam daerah 285 kali/th				
	Jumlah pemeliharaan mobilisasi kendaraan Jabatan, Dinas, Dan Operasional dan dukungan mobilitasnya	100% Pemeliharaan Kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang difasilitasi mobilitasnya 26 unit/ th				
	Jumlah pelayanan Tamu dan Pimpinan yang difasilitasi	78% Kunjungan Presiden RI 0 kali/th Kunjungan Tamu Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan kunjungan tamu Non Departemen/ Luar Negeri 524 kali/th				
	Fasilitasi pemakaian Ruang Praja 2, Balai Petitih dan VVIP Bandara Supadio	87,75% Layanan peminjaman Ruang Praja 120 kali/per tahun Layanan peminjaman ruang rapat Balai Petitih 180/th Layanan peminjaman ruang VVIP Bandara Supadio 524/th				

No	Indikator (2)	Capaian(%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Layanan MC	92% Layanan Permintaan MC 230 kali/th				
	Jumlah Penyediaan Jasa milik daerah	60% 20 jasa jaminan kendaraan Dinas/asurans i				
	Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan kendaraan dinas/operasional	86,67% 26 perijinan kendaraan dinas/operasi onal				
Biro Administrasi Pimpinan						
1	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur(%)		20%	40%	60%	80%
2	Prosentase PNS setda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur(%)		16%	32%	48%	64%
3	Prosentase pengelolaan administrasi perencanaan dan pelaporan Setda(%)		100%	100%	100%	100%
4	Prosentase Informasi Publikasi Pemberitaan Melalui media Cetak, Media Elektronik dan Media Online, Media Luar Ruang(%)		90%	93%	95%	100%
5	Prosentase Peningkatan Jumlah Media Publikasi(%)		80%	86%	95%	98%
6	Prosentase Layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan Sesuai Sop(%)		90%	93%	95%	98%
7	Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah(%)		90%	94%	96%	98%

No	Indikator	Capaian(%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Persentase Kab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang tertib administrasi dalam melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)		100%	100%	100%	100%

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022

c. MOU dan Perjanjian Kerjasama.

Tabel 2.132
MoU dan Perjanjian Kerjasama

No	Indikator	Capaian Jumlah (%)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MoU dan Perjanjian Kerjasama	100	100

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022.

d. Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tabel 2.133
Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan 2018-2022

No	Indikator	Capaian (%)				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan.	100	100	100	100	100

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022.

e. Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum).

Tabel 2.134
Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum) 2018-2022

No	Indikator	Capaian (%)				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum).	AMPRAS	20	40	-	-

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022

f. Pembentukan Kabupaten.

Tabel 2.135
Pembentukan Kabupaten 2018-2022

No	Indikator	Capaian ()				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pembentukan Kabupaten	3 AMPRAS	20	40	-	-

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022.

g. Segmen Batas Daerah.

Tabel 2.136
Segmen Batas Daerah 2018-2022

No	Indikator	Capaian (Jumlah)				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Segmen Batas Daerah	27	3	4	-	-

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022.

h. Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Tabel 2.137
Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota Yang Penyelenggarakan Kerjasama

No	Indikator	Capaian (Jumlah)				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di Dalam Negeri dan Luar Negeri.	1	100	100	-	-

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022.

i. Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan.

Tabel 2.138
Persentase Peningkatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan.	100	100

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

j. Kondisi Capaian Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tabel. 2.139
Kondisi Capaian Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase pelayanan umum dan pimpinan.	94.44	91.67	86.99	-	-
2.	Persentase Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Aset dilingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	100	100	93.21	-	-
3.	Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum	-	-	-	102.29	107.62

Sumber : Biro Umum Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022.

k. Presentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran.

Tabel 2.140

Presentase Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Ditata Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

No	Indikator	Capaian (%)				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Presentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran.	41	73	51	100	100

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022.

l. IKM Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.141

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IKM Provinsi Kalimantan Barat.	85,01	86,22

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022

m. Indeks penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.142

Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2021-2022

No	Capaian	Tahun	
		2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kategori	III (Baik)	IV (Sangat Baik)
2.	Nilai	313	325,5
3.	Indeks	0,76	0,79

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar, tahun 2022

n. Klasifikasi ASN di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Jabatan.

Tabel 2.143

Klasifikasi ASN di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan 2018-2022

No	Klasifikasi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Jabatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

I. Jenis Pendidikan						
1	S3	6	5	5	7	7
2	S2	777	820	840	860	872
3	Sarjana/D4	6,414	6,628	6,484	6,651	7,158
4	D 1/2/3	1,321	1,297	1,269	1,264	1,292
5	SMA/Sederajat	2,150	1,977	1,740	1,561	1,336
6	SMP	114	103	87	71	58
7	SD	63	52	38	33	24
	Total	10,845	10,882	10,463	10,447	10,747
II. Jenis Jabatan						
1	Eselon I	0	1	1	0	1
2	Eselon II	43	43	49	45	50
3	Eselon III	242	259	252	226	220
4	Eselon IV	743	752	828	268	251
	Total	1,028	1,055	1,130	539	522
5	Fungsional Tertentu	5,810	1,055	5,619	6,085	6,937
6	Fungsional Umum	9,817	5,763	3,714	3,823	3,288
	Total	15,627	6,818	9,333	9,908	10,225

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar, Tahun 2022.

o. Nilai SAKIP.

Tabel 2.144

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2022

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai			
			2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,55	21,73	21,98	22,23
b.	Pengukuran Kinerja	30	14,44	15,07	15,38	20,69
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,52	10,70	10,83	10,76
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,62	6,76	6,76	-
e.	Capaian Kinerja	20	12,72	12,90	13,09	-
f.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	-	-	17,36
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,85	67,16	68,04	71,04
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	BB

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Tahun 2022

Catatan : Pada penilaian SAKIP 2022, berdasarkan Permenpan dan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot Komponen dan Sub Komponen serta kriteria penilaian menjadi tinggal 4 komponen yang dinilai.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa **Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh nilai 71,04 atau predikat BB**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu Implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi

penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi

- p. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja.

Tabel 2.145

Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2020-2022

No	Indikator	Capaian (Nilai)		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja.	10,70	10,83	10,76

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Tahun 2022

2.3.3.2. Sekretariat DPRD

- a. Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD.

Tabel 2.146

Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD

No	Indikator	Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD.	80%	83%

Sumber : Sekretariat DPRD Prov. Kalbar, Tahun 2022.

2.3.3.3. Pengawasan

- a. Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK.

Tabel 2.147

Persentase Penyelesaian Temuan Keuangan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2021-2022

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK.	61,95	85,20

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2022.

- b. Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti.

Tabel 2.148

Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP Yang Selesai Ditindaklanjuti

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti.	85,36	89,11

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2022.

- c. Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP.

Tabel 2.149

Persentase Penyelesaian Temuan Keuangan Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2021-2022

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP.	87,83	91,75

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2022.

- d. Level maturitas SPIP.

Tabel 2.150

Level Maturitas SPIP Tahun 2021-2022

No	Indikator	Capaian (Level)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Level maturitas SPIP.	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2022.

- e. Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional

Tabel 2.151

Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional

No	Indikator	Capaian (Jumlah)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional.	10	10

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2022.

- f. Level Kapabilitas APIP

Tabel 2.152

Level Kapabilitas APIP Tahun 2021-2022

No	Indikator	Capaian (Level)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2022.

- g. Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti

Tabel 2.153

Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK Yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti.	87,02	81,92	89,81	87,02	80,92

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2022.

2.3.3.4. Keuangan Daerah

a. Pencapaian target pendapatan daerah

Persentase pencapaian target pendapatan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2018 sebesar 100 sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 106,32 untuk pajak daerah dan 96,23 untuk retribusi daerah. Gubernur Kalbar berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan layanan publik di perangkat daerah (PD) dengan menyisir masalah berdasarkan pengaduan masyarakat agar layanan publik di seluruh PD dapat mencapai 90 pada akhir RPJMD.

2.3.3.5. Perencanaan

a. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja

Tabel 2.154

Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2019-2022

No	Indikator	Capaian (Nilai)			
		2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,55	21,73	21,98	22,23

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Tahun 2022

b. Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja

Tabel 2.155

Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja Tahun 2019-2022

No	Indikator	Capaian (Nilai)			
		2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	12,72	12,90	13,09	-

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Tahun 2022.

c. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tabel 2.156

Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Indikator	Capaian (Nilai)			
		2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	-	-	17,36

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Tahun 2022.

Catatan : Pada penilaian SAKIP 2022, berdasarkan Permenpan dan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot Komponen dan Sub Komponen serta kriteria penilaian menjadi tinggal 4 komponen yang dinilai.

2.3.3.6. Penelitian dan Pengembangan

a. Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti untuk Mendukung Kebijakan Daerah

Tabel 2.157

Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti untuk Mendukung Kebijakan Daerah

No	Indikator	Capaian (Jumlah Rekomendasi)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti untuk Mendukung Kebijakan Daerah.	n.a	14	19	19	22

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar, Tahun 2022

b. Jumlah Inovasi

Tabel 2.158

Jumlah Inovasi Tahun 2021-2022

No	Indikator	Capaian (Jumlah)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inovasi	59	9

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar, Tahun 2022.

c. Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta

Tabel 2.159

Persentase Sistem Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan Yang Baik Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta Tahun 2021-2022

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.	92,72%	94,24%

Sumber : Badan Penghubung Prov. Kalbar, Tahun 2022.

d. Persentase kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta

Tabel. 2.160

Persentase Kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta Tahun 2021-2022

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase kegiatan kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.	97,44%	95,88%

Sumber : Badan Penghubung Prov. Kalbar, Tahun 2022.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Tingkat Efisiensi Pembiayaan Investasi Pembangunan

Salah satu indikator penting untuk mengukur kemampuan daya saing suatu daerah adalah tingkat efisiensi pembiayaan investasi. Pengelolaan pembiayaan investasi yang efisien sangat penting untuk menghindari terjadinya pemborosan anggaran pembangunan daerah. Semakin efisien pembiayaan investasi dalam menghasilkan satu satuan output maka akan semakin tinggi kemampuan daya saing suatu daerah.

Incremental Capital Output Ratio atau ICOR adalah suatu pendekatan yang menunjukkan besaran tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menambah satu unit output. ICOR juga dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja perekonomian suatu wilayah, semakin besar ICOR semakin tidak efisien pengelolaan investasi untuk pembiayaan pembangunan dalam menghasilkan satu (satuan) unit output (produksi).

Tabel. 2.161
Perkembangan ICOR Kalimantan Barat dan Indonesia
Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
ICOR Kalimantan Barat *)	6,42	6,23	16,08	6,64	6,01
ICOR Indonesia	6,72	6,88	15,09	8,16	6,20

Keterangan: *) Hasil Analisis, Tim Pokja RPD Kalimantan Barat Th 2024-2026.

Interpretasi Hasil Analisis (Bappeda Prov Kalbar, 2023)

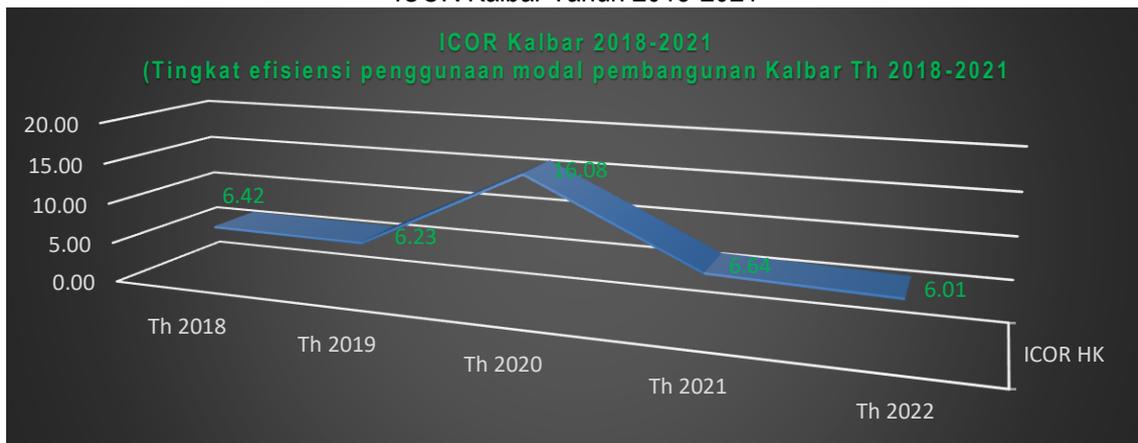
Performance perekonomian Kalimantan Barat (pengecualian tahun 2020: tahun Covid-19) menunjukkan ICOR Kalimantan Barat perkembangannya cenderung fluktuatif dan meningkat diatas rata-rata. Pada umumnya nilai ICOR dianggap efisien pada kisaran 3–4 persen terutama untuk wilayah berkembang, artinya untuk meningkatkan 1 persen output dibutuhkan tambahan investasi hingga 3–4 persen.

Tahun 2018 untuk menghasilkan 1 persen PDRB Kalimantan Barat perlu tambahan modal (investasi) sebesar 6,42 persen sedangkan pada tahun 2019 kinerja perekonomian menunjukan adanya perbaikan (efisiensi) menjadi 6,23 persen untuk menambah 1 persen output (PDRB). Namun pada tahun 2021 kebutuhan investasi pembiayaan pembangunan meningkat 0,41 persen untuk menghasilkan tambahan satu persen output dibutuhkan 6,64 persen modal.

Meski belum mencapai tingkat efisiensi dalam pengelolaan investasi pembiayaan pembangunan namun jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2021 kinerja pengelolaan investasi pembiayaan pembangunan Kalimantan Barat menunjukkan kecenderungan yang lebih efisien atau lebih baik dari Indonesia (Nasional).

Beberapa faktor yang memicu tingginya ICOR antara lain rendahnya kualitas SDM, tingginya biaya logistik dan cost of transportasi, rumit birokrasi memberi ruang terjadi pungutan liar dan korupsi serta rent seeking economy.

Gambar 2.19
ICOR Kalbar Tahun 2018-2021



Target ICOR Kalimantan Barat Tahun 2024-2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk terus meningkat efisiensi pengelolaan pembiayaan investasi dalam penyelenggaraan pembangunan mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Antara lain melalui alokasi penganggaran pembiayaan yang menjadi prioritas pembangunan, melalui program dan kegiatan mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Tabel. 2.162
Target ICOR Kalbar Tahun 2024-2026

Tahun	2024	2025	2026
ICOR Kalbar	6,43	6,37	6,26

Keterangan : Sumber Tim Pokja RPD Tahun 2024-2026 Bappeda Provinsi Kalbar th 2023.

Indeks Williamson

Setiap pihak terutama yang memiliki otoritas boleh saja mengklaim bahwa telah melaksanakan pembangunan dengan segala keberhasilannya, namun apakah pembangunan dan hasilnya telah dinikmati sebagian besar atau merata bagi semua lapisan masyarakat, ini suatu pertanyaan penting bagi kita.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah tidak diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator penting lainnya adalah disparitas pendapatan pada suatu wilayah yang diukur dengan menggunakan Koefisien Gini (KG) dan Indeks Williamson (IW). KG dan IW adalah salah satu alat pengukuran tingkat disparitas pendapatan antar daerah atau antar penduduk. Pada pengukuran KG dan IW membutuhkan data persentase penduduk, persentase kumulatif penduduk, persentase kumulatif total pendapatan, PDRB, dan jumlah penduduk keseluruhan.

Variabel-variabel dalam pengukuran tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yaitu: PDRB, laju inflasi, PDRB perkapita, KG, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, IW, persentase garis kemiskinan dan angka kriminalitas.

Indeks Williamson merupakan suatu instrumen pengukuran pembangunan wilayah melalui tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan antar wilayah merupakan masalah kompleks yang dihadapi dalam proses pembangunan karena menyangkut berbagai faktor. Adapun penyebab ketimpangan ekonomi wilayah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah tidak merata, alokasi investasi, tingkat mobilitas, faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demografi antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan wilayah.

Ketimpangan pembangunan yang tinggi mengindikasikan adanya ketidakadilan dan yang lebih mengkhawatirkan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, memicu terjadinya konflik antar masyarakat dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah daerah serta menunjukkan adanya penguasaan sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh segelintir masyarakat (seperti hasil riset beberapa waktu lalu, sekitar 80 persen sumberdaya ekonomi Indonesia dikuasai oleh 20 persen penduduk Indonesia, dan ironisnya 80 persen dari jumlah penduduk Indonesia hanya menikmati 20 persen sumber daya ekonomi Indonesia).

Gambar 2.20
Indeks Ketimpangan Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2018-2021



Target Penurunan Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)

Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi salah tujuan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tentu tidak hanya untuk satu atau beberapa kelompok masyarakat saja. Pembangunan dan hasil-hasil harus dapat dirasakan dan merata keseluruhan masyarakat tanpa terkecuali. Target capaian indeks ketimpangan pembangunan wilayah ditujukan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan wilayah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel. 2.163
Target Indeks Ketimpangan Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2024-2026

Tahun	2024	2025	2026
Indeks Ketimpangan Wilayah (IW) Kalimantan Barat	0,489	0,479	0,468

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. Secara umum nilai NTP dapat diartikan, jika NTP > 100 maka petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Sebaliknya jika nilai NTP < 100, berarti petani mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. Perkembangan nilai NTP di Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.164
Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2016-2022

Indeks Nilai Tukar (NT)	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NT Petani Palawija (NTPP)	97,34	94,40	95,42	94,58	96,92	94,17	92,60
NT Petani Hortikultura (NTPH)	103,04	101,09	100,76	100,39	99,05	104,87	102,05
NT Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	91,46	97,89	94,44	89,38	114,66	146,95	167,85
NT Petani Peternakan (NTPPT)	95,38	93,95	94,26	94,92	97,55	98,89	100,53
NT Petani Perikanan (NTPN)	102,59	102,03	104,91	109,12	98,22	105,10	103,78
NTP	95,58	96,67	100,01	102,87	108,45	128,63	141,40

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023 (diolah)

Selama kurun 2018 hingga 2022, Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat telah berada diatas nilai 100 yang berarti Petani telah mengalami surplus yaitu Harga Produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Jika dilihat dari NTP per sektor, maka pada tahun 2022 NTP sektor Hortikultura, NTP Sektor Perkebunan Rakyat, NTP sektor Peternakan serta NTP sektor Perikanan nilainya telah melebihi angka 100 yang berarti petani mengalami surplus yakni harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Sementara untuk NTP sektor Palawija, masih dibawah nilai 100, yang berarti petani pada sektor tersebut mengalami defisit.

Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga.

2.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besarnya tingkat pengeluaran rumah tangga.

Angka konsumsi rumah tangga per kapita di tahun 2018 sampai dengan 2022 di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.165
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Di Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan/Food	Rp.	535.534	561.142	584.259	603.291	666.066
Non Makanan/Non Food	Rp.	493.138	519.227	540.803	559.767	566.522
Total Pengeluaran RT	Rp.	1.028.672	1.080.370	1.125.063	1.163.058	1.232.618

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

Secara rata-rata selama periode 2018-2022 total pengeluaran rumah tangga per kapita dalam sebulan, konsumsi makanan lebih mendominasi dibandingkan konsumsi non makanan. Sedangkan perkembangan total rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus menunjukkan peningkatan. Rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 69.560 rupiah atau 4,41 persen per tahunnya.

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan Rata-rata Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Capaian Angka pengeluaran per kapita tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.166
Capaian Angka pengeluaran per kapita tahun 2021 dan 2022

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)
Pengeluaran Per Kapita	8.974.000	9.355.000

Sumber : BPS Nasional, data diolah tahun 2023

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Indeks Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya bertumpu dan terpusat pada salah satu wilayah atau daerah dengan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan berdasarkan aspek pemerataan pembangunan wilayah.

Indeks infrastruktur merupakan gabungan dari beberapa sektor atau bidang, baik itu perumahan dan permukiman, Bina Marga, Sumber Daya Air maupun energi listrik. Indeks infrastruktur merupakan salah cermin dari pada kondisi daya saing daerah, semakin daya saing tinggi maka kondisi infrastruktur akan semakin baik, namun apabila daya saing rendah maka kondisi infrastrukturnya semakin terbatas.

Sebagaimana diketahui bahwa kondisi infrastruktur Kalimantan Barat pada dasarnya masih relatif terbatas, baik itu di sektor jalan dan jembatan, air bersih, sanitasi, energi listrik, sumber daya air, serta infrastruktur pendukung lainnya. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian Asia Competitiveness Institute Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, bahwa Daya Saing Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat pada

tahun 2022 menduduki peringkat 31 dari 34 Provinsi di Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan oleh terbatasnya penyediaan infrastruktur, yang mana akan berpengaruh dalam upaya penyelesaian beberapa permasalahan, baik itu penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

Untuk mengetahui kondisi indeks infrastruktur di Kalimantan Barat, berikut capaian indeks infrastruktur Kalimantan Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 :

Tabel 2.167
Indeks Infrastruktur Kalbar Tahun 2018- 2022

NO	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	INDEKS INFRASTRUKTUR					
1	Indeks Infrastruktur	56,61	67,43	67,28	67,00	69,59
2	Rasio Elektrifikasi	83	98,68	92	93	99,58
3	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap	49,71	56,81	60,05	66,94	72,28
4	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	46,76	53,79	53,68	55,84	56,90
5	Persentase rumah tangga berakses air minum	55,20	66,62	65,32	68,79	68,79
6	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	48,38	61,23	63,79	50,42	-
7	Persentase Penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai	47,52	61,23	61,82	50,42	62,23

Sumber : Bappeda Prov. Kalbar Tahun 2022

2.4.2.2. Jalan Mantap Provinsi

Jalan merupakan salah satu instrumen penunjang dalam proses pembangunan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan yang paling utama sebagai Jalur Transportasi bagi masyarakat, dan kondisi jalan yang ada sangat mempengaruhi itu semua.

Kondisi jalan Provinsi dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dalam kondisi mantap terus mengalami perbaikan dengan capaian 72,82 dari total Panjang jalan provinsi.

Tabel 2.168
Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi di Kalimantan Barat Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Kilometer	1.282,18	762,98	871,847	921,72	1027,50	1,109.35
2	Panjang Jalan Provinsi	Kilometer	1.534,75	1.534,75	1,534,75	1.534,75	1.534,75	1,534,75
3	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Persen	83,54	49,71	56,81	60,06	66,95	72,28

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, 2022

2.4.2.2.1. Peningkatan Persentase Kemantapan Jalan

Panjang jalan yang berstatus jalan provinsi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 mencapai 1.534,75 km. Adapun untuk jenis permukaannya, jalan yang sudah di aspal mencapai 897,67 km (58.49) jalan yang jenis permukaannya beton mencapai 24,03 km (1,57), dan jalan yang masih kerikil/tanah mencapai 289.12 km (18.84), untuk jalan yang jenis permukaannya masih tanah dan belum tembus mencapai 323.94 km (21,11) sedangkan jalan yang dalam kondisi baik mencapai 590,52 km (38,48), jalan dalam kondisi sedang mencapai 436,99 km (28,47), jalan dalam kondisi rusak ringan mencapai 493,90 km (32,18) dan jalan dalam kondisi rusak berat mencapai 13,35 km (0,87). Kemantapan jalan provinsi pada tahun 2021 mencapai 66,95 dan jalan tidak mantap provinsi mencapai 33,05 . Berikut tabel jenis dan kondisi jalan di Kalimantan Barat Tahun 2021 :

Tabel 2.169
Jenis permukaan Jalan Tahun 2021

No.	Jenis permukaan	Panjang (km)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aspal	897,67	58,49
2	Beton	24,03	1,57
3	Kerikil/Tanah	289,12	18,84
4	Tanah/Belum Tembus	323,94	21,11
	Total	1.534,75	100,00

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar Tahun 2022. (belum release untuk tahun 2022).

2.4.2.3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Pada Tahun 2022 jumlah desa/kelurahan yang sudah berlistrik PLN di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1.699 desa/kelurahan atau mencapai 79.21%. Namun, masih terdapat desa belum berlistrik sebanyak 446 desa atau sebesar 20.79 % yang banyak tersebar di beberapa kabupaten pedalaman, contohnya di Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu dan Ketapang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.170
Status Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa Berlistrik PLN	Desa Berlistrik Non PLN	Desa Belum Berlistrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sambas	195	195	-	-
Bengkayang	124	105	-	19
Landak	156	134	-	22
Mempawah	67	67	-	-
Sanggau	169	158	-	11
Ketapang	262	206	-	56
Sintang	406	225	-	181
Kapuas Hulu	282	215	-	67
Sekadau	94	78	-	16
Melawi	169	108	-	61
Kayong Utara	43	37	-	6
Kubu Raya	123	116	-	7
Pontianak	29	29	-	-
Singawang	26	26	-	-
TOTAL	2.145	1.699	-	446

Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa Berlistrik PLN	Desa Berlistrik Non PLN	Desa Belum Berlistrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Presentase (%)		79.21 %	0 %	20.79 %

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2022

2.4.2.3.1 Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi (RE) merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik, baik yang disalurkan dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun dari sumber lain, dengan jumlah rumah tangga pada satuan wilayah tertentu, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat.

Rasio elektrifikasi total Kalimantan Barat pada akhir tahun 2022 sebesar 99,58 persen (RE PLN: 93,82), sedangkan RE total Kalimantan Barat pada akhir tahun 2021 sebesar 99,12 (RE PLN: 93,04). Rasio elektrifikasi Kalimantan Barat berdasarkan kabupaten/kota dirinci lebih lanjut dalam table berikut:

Tabel 2.171
Rasio Elektrifikasi (RE) Kalimantan Barat 2018-2022

NO.	PROVINSI/K AB/KOTA	2018		2019		2020		2021		2022	
		RE PLN	RE TOTAL								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kab. Mempawah	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	99,37	99,99	99,39	99,99
2	Kab. Landak	51,81	61,31	56,07	65,04	89,65	100	88,85	99,99	89,74	99,99
3	Kab. Kubu Raya	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	99,11	99,99	98,99	99,99
4	Kota Pontianak	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	99,98	99,99	99,88	99,99
5	Kab. Sambas	85,49	88,34	100,00	100,00	100	100	98,49	99,99	98,12	99,99
6	Kab. Bengkayang	65,88	77,11	78,04	89,57	87,91	97,82	90,09	99,57	91,09	99,99
7	Kota Singkawang	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	99,12	99,99	98,87	99,99
8	Kab. Sanggau	65,03	80,83	73,27	89,02	82,35	95,81	83,85	96,93	86,38	98,51
9	Kab. Sintang	62,84	76,09	70,21	83,17	83,97	97,87	84,33	97,52	86,67	99,13
10	Kab. Kapuas Hulu	63,04	74,16	72,84	83,39	88,12	99,68	89,10	99,99	89,67	99,99
11	Kab. Sekadau	53,97	67,00	68,65	82,78	81,24	93,78	84,32	96,51	86,69	98,20
12	Kab. Melawi	60,29	72,44	67,56	79,68	80,86	97,03	83,77	99,24	85,09	99,99
13	Kab. Ketapang	74,17	88,00	77,64	89,85	85,41	95,46	86,73	96,27	89,31	98,43
14	Kab. Kayong Utara	74,37	77,14	85,54	88,24	96,15	98,43	97,75	99,96	97,87	99,99
Kalimantan Barat		87,21	87,22	91,17	98,68	93,07	99,49	93,04	99,12	93,82	99,58

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2022

2.4.2.4. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah Kalimantan Barat adalah seluas 147.307 Km² atau 14.730.700 Ha, dengan arahan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.172
Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat

Status Lahan	Luas (Ha)
(1)	(2)
Kawasan Lindung	3.906.423
Hutan Lindung	2.273.779
Suaka Alam (daratan + perairan)	1.632.545
Kawasan Budidaya	4.415.606
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	2.120.402
Hutan Produksi Biasa (HPB)	2.110.372
Hutan Produksi Konversi (HPK)	184.877
Jumlah	8.321.975

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.936/Menhut/II/2013 dan SK.733/Menhut/II/2014 tanggal 02 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan, bahwa untuk peruntukan Luas Kawasan Hutan adalah seluas 8.389.600 Ha, yang terbagi atas Kawasan Lindung seluas 3.906.423 Ha (47,00) dan Kawasan Budidaya seluas 4.415.606 Ha (53,00).

Tabel 2.173

Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung di Kalimantan Barat (dalam Hektar) Tahun 2022

Kabupaten/kota	Pemanfaatan Kawasan Lindung	Luas Wilayah Budidaya
(1)	(2)	(3)
Sambas	26.191	108.729
Kota Singkawang		5.138
Bengkayang	33.717	126.696
Landak	53.945	132.650
Mempawah	3.539	71.403
Kubu Raya	138.598	226.731
Kota Pontianak		-
Sanggau	96.854	406.813
Sekadau	64.678	114.411
Sintang	451.620	761.895
Melawi	225.840	472.754
Kapuas Hulu	811.286	609.486
Ketapang	292.302	1.288.002
Kayong Utara	75.209	90.898
JUMLAH	2.273.779	4.415.606

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Catatan: Kawasan lindung hanyalah hutan lindung (tidak termasuk kawasan konservasi berupa Taman Nasional, Suaka Alam dan Taman Wisata Alam). Luas Kawasan Budidaya terdiri dari HPT, HP, HPK.

Berdasarkan tabel diatas sesuai data terakhir tahun 2022 dari 14 kabupaten/kota, diperoleh pemanfaatan untuk Kawasan Lindung terluas terletak di kabupaten Kapuas Hulu (811.286 Ha) atau 35,68 persen, diikuti kab Sintang seluas (451.620 Ha) atau 19,86 persen dan terkecil di kabupaten Mempawah seluas (3.539 Ha) atau 0,16 persen dari total pemanfaatan Kawasan Lindung 2.273.779 Ha.

Berikutnya untuk pemanfaatan Kawasan Budidaya terluas terletak di kabupaten Ketapang (1.288.002 Ha) atau 29,17 persen, diikuti kabupaten Sintang (761.895 Ha) atau 19,86 persen dari total pemanfaatan Kawasan Budidaya 4.415.606 Ha.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD sepanjang tahun 2018-2022 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai yang ditargetkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan APBD tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kerangka pendanaan dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2018–2022 rata-rata sebesar 2,7 persen (Tabel 3.1). Dari kurun waktu tersebut, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Provinsi Kalimantan Barat terjadi peningkatan sebesar 11,2%. Sementara itu pertumbuhan pendapatan transfer dan Transfer lainnya mengalami penurunan secara rata-rata dalam 5 tahun yaitu sebesar -2,9 persen dan -11,9 persen. Penurunan ini sebagai akibat dampak dari kebijakan pemerintah pusat melalui *refocusing*, rasionalisasi dan pemangkasan lainnya yang bersifat *automatic adjustment*. Selanjutnya, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami pertumbuhan rata-rata 42,8 persen, cukup signifikan kenaikannya di tahun 2021 dan tahun 2022.

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus meningkatkan kemandirian fiskal dengan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap APBD Provinsi Kalimantan Barat dengan meski dengan berbagai permasalahannya seperti kondisi dampak *pandemic covid*, rendahnya animo masyarakat untuk membayar pajak maupun skala perusahaan.

Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 - 2022 Provinsi Kalimantan Barat

No.	URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pendapatan	5.660,1	5.939,8	5.665,1	6.431,3	6.098,5	2,7
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.194,9	2.301,3	2.154,1	2.507,3	3.212,9	11,2
1.2	Pendapatan Transfer	3.462,8	3.635,4	3.506,8	3.878,1	2.826,5	-2,9
1.3	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	17,8	15,3	-	16,6	16,3	-11,9
1.4	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2,4	3,1	4,1	45,9	59,1	42,8
2	Belanja	5.341,4	5.677,4	5.879,4	6.303,1	5.721,9	1,9
2.1	Belanja Operasi	3.702,5	3.813,7	3.967,2	4.227,7	3.549,3	0,1
2.2	Belanja Modal	676,5	871,6	759,3	927,1	992,5	3,2
2.3	Belanja Tak Terduga	1,0	0,0	208,1	1,7	0,6	-80,0
2.4	Belanja Transfer	961,4	992,1	944,8	1.146,7	1.179,5	11,8
	Surplus/Defisit	318,7	262,4	-214,2	128,1	376,6	-3,8
3	Pembiayaan	46,3	314,9	527,3	258,0	336,2	116,7
3.1	Penerimaan Pembiayaan	212,1	364,9	577,3	313,0	386,2	26,1
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	165,9	50,0	50,0	55,0	50,0	3,1
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	364,9	577,3	313,0	386,2	712,8	38,4

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar, 2022 (LRA yang diolah)

Rasio efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pencapaian yang cukup baik yakni mencapai 106 persen. Akan tetapi kinerja dari Rasio Efektivitas ini harus terus dipertahankan karena masih terus berfluktuasi pada kisaran 95,6 - 122,5 persen. Untuk mendapatkan rasio efektivitas yang cenderung linier, perlu terus diperbaiki kinerja perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan titik berat pada upaya peningkatan Pajak Daerah

Tabel 3.2. Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2022

Tahun	Target (dalam miliar Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi (dalam miliar Rp)	Pertumbuhan (%)	Rasio Efektivitas (%)
2018	1.791,6	1,9	2.194,9	12,8	122,5
2019	2.179,0	21,6	2.301,3	4,8	105,6
2020	2.251,7	3,3	2.154,1	-6,4	95,7
2021	2.622,0	16,4	2.507,3	16,4	95,6

2022	2.883,2	10,0	3.212,9	28,1	111,4
	Rata-rata	8,64		8,91	106,0

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar, 2022 (LRA yang diolah)

3.1.2 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2017-2021, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 11,2% setiap tahunnya. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Komponen aset yaitu Aset Lancar mengalami pertumbuhan sebesar 21,4%, Investasi Jangka Panjang meningkat rata-rata sebesar 12,1%, Aset Tetap meningkat rata-rata 12,3%, dan Asset Lainnya meningkat sebesar 12,3%. Pertumbuhan Aset Lancar dalam kecenderungan yang positif ini menunjukkan bahwa kondisi aset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kondisi sehat.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 tahun (2017–2021) selalu dapat diselesaikan, dari tahun 2018 Kewajiban Jangka Pendek adalah sebesar Rp. 230,9 miliar pada tahun 2021 turun menjadi Rp.57,3 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu tersebut dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek dengan komitmen yang baik..

Ekuitas dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 2017–2021 mengalami pertumbuhan sebesar 10,8% yang berarti bahwa ekuitas dananya cukup tinggi.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien

dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2017–2021 seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017–2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.4.1	ASET	8.896,6	11.394,5	12.135,1	12.527,1	13.409,6	11,2
5.4.1.1	ASET LANCAR	400,9	416,2	787,4	659,0	717,6	21,4
5.4.1.1.1	Kas dan Setara Kas	112,3	214,9	582,0	313,1	386,3	
5.4.1.1.2	Investasi Jangka Pendek	100,0	-	-	-	-	
5.4.1.1.3	Piutang Pendapatan	109,1	119,5	155,4	146,7	125,6	
5.4.1.1.4	Piutang Lainnya	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	- 7,6
5.4.1.1.5	Penyisihan Piutang	-12,9	-15,3	- 17,1	- 10,6	- 10,7	- 1,6
5.4.1.1.6	Beban Dibayar Dimuka	1,5	1,1	1,5	1,1	0,8	- 11,0
5.4.1.1.7	Persediaan	90,6	95,9	65,6	208,6	215,5	48,8
5.4.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.239,4	1.508,8	1.650,0	1.793,6	1.945,0	12,1
5.4.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	1.239,4	1.508,8	1.650,0	1.793,6	1.945,0	
5.4.1.3	ASET TETAP	6.069,8	8.147,1	8.523,7	8.804,0	9.414,8	12,3
5.4.1.3.1	Tanah	2.755,0	4.225,5	4.228,6	4.114,0	4.253,9	
5.4.1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.035,5	1.193,9	1.424,9	1.744,4	1.874,0	
5.4.1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.584,2	2.246,1	2.477,5	2.500,7	2.717,3	
5.4.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.063,3	2.683,4	2.906,3	3.316,2	3.536,8	
5.4.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	251,8	322,4	357,7	384,4	374,4	
5.4.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	795,4	46,1	139,2	163,3	506,3	
5.4.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	- 2.415,4	- 2.570,4	- 3.010,5	- 3.419,1	- 3.848,0	
5.4.1.4	ASET LAINNYA	1.186,6	1.172,4	1.173,9	1.287,7	1.292,2	12,3
5.4.1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	0,1	3,3	3,2	3,2	3,2	
5.4.1.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	567,1	550,4	550,0	664,3	666,1	
5.4.1.4.3	Aset Tidak Berwujud	3,7	3,2	5,8	8,2	6,7	
5.4.1.4.4	Aset Lain-Lain	615,7	615,5	614,9	611,9	616,1	
	JUMLAH ASET	8.896,6	11.244,5	12.135,0	12.544,2	13.369,6	48,0
5.4.2	KEWAJIBAN	2,8	230,9	245,9	185,4	137,3	- 14,7
5.4.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	2,8	230,9	245,9	48,1	57,3	- 18,3
5.4.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,0	0,0	4,7	0,1	0,1	
5.4.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,2	0,3	0,6	30,1	11,2	
5.4.2.1.3	Utang Belanja	2,6	230,6	240,6	17,9	45,9	
5.4.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	137,3	80,0	
5.4.3	EKUITAS	8.893,8	11.163,7	11.889,3	12.341,7	13.272,3	10,8
	Ekuitas	8.893,8	11.163,7	11.889,3	12.341,7	13.272,3	
5.4.4	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.896,6	11.394,5	12.135,1	12.527,1	13.409,6	11,2

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar, 2022 (LRA yang diolah)

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) pendapatan transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa serta transfer atar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI, PT. Jasa Raharja dan Bank Kalbar.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan retribusi daerah.
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
8. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
9. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta

pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh Kabupaten/Kota.

3.2.1. Proporsi Penyusunan Anggaran

Selama periode tahun 2018–2022, rata-rata proporsi realisasi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah yaitu Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran Daerah adalah sebesar 23,9%. Proporsi dalam jumlah terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 26,1%, hal ini terjadi karena penerimaan tenaga PPPK dan CPNS baru terutama pada belanja tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Tabel 3.4. Analisis Proporsi Belanja Pegawai Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2022

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (dalam milyar Rp)	Total pengeluaran(Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (dalam milyar Rp)	Prosentase (%)
1	2018	1.303,9	5.507,3	23,7
2	2019	1.368,1	5.727,4	23,9
3	2020	1.400,4	5.929,4	23,6
4	2021	1.414,5	6.358,1	22,2
5	2022	1.506,4	5.771,9	26,1
Rata - Rata				23,9

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar, 2022 (LRA yang diolah)

Selama periode tahun 2018–2022, rata-rata proporsi realisasi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah adalah sebesar 23,6%. Proporsi Belanja Barang dan Jasa cukup berfluktuatif setiap tahunnya, 16,39 % pada tahun 2015 yang paling rendah sampai dengan paling besar 31,1 % pada tahun 2022 dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah.

**Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2022**

No	Tahun	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (dalam milyar Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (dalam milyar Rp)	Persentase
1	2018	1.139,2	5.507,3	20,7
2	2019	941,4	5.727,4	16,4
3	2020	1.441,0	5.929,4	24,3
4	2021	1.608,2	6.358,1	25,3
5	2022	1.796,4	5.771,9	31,1
Rata - Rata				23,6

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar, 2022 (LRA yang diolah)

Selama periode tahun 2018–2022, rata-rata proporsi realisasi Belanja Modal dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah adalah sebesar 14,4 persen. Proporsi belanja modal dibandingkan total pengeluaran daerah tahun 2018 sebesar 12,3 persen meningkat pada tahun 2018 yaitu menjadi 17,2 persen. Persentase yang berfluktuatif menunjukkan dinamika program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang cukup dinamis dan dampak yang dihasilkan adalah sesuai kebutuhan yang diharapkan.

Tabel. 3.6 Analisis Proporsi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Belanja Modal (dalam milyar Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (dalam milyar Rp)	Persentase (%)
1	2018	676,5	5.507,3	12,3
2	2019	871,6	5.727,4	15,2
3	2020	759,3	5.929,4	12,8
4	2021	927,1	6.358,1	14,6
5	2022	992,5	5.771,9	17,2
Rata - Rata				14,4

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar, 2022 (LRA yang diolah)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam kebijakan pembiayaan daerah tentunya memperhatikan keadaan Defisit Riil Anggaran tahun berkenaan agar tidak terjadi kendala dalam anggaran belanja. Selama lima tahun terakhir, defisit riil anggaran cenderung berfluktuatif, hanya ditahun 2020 yang terjadi defisit yaitu sebesar Rp. 264,2 miliar, sedangkan tahun 2021 sudah surplus dan hingga tahun 2022 masih dalam kondisi surplus yaitu sebesar Rp. 326,6 miliar. Ini menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah memang mengalami peningkatan dan kembali pulih seperti tahun sebelum pandemi covid di tahun 2020.

Tabel 3.7. Defisit Riil Anggaran Tahun 2018–2022

No	Uraian	Realisasi (nilai dalam Miliar Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.660,1	5.939,8	5.665,1	6.431,3	6.098,5
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	5.341,4	5.677,4	5.879,4	6.303,1	5.721,9
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	165,9	50,0	50,0	55,0	50,0
	Defisit riil	152,8	212,4	(264,2)	73,1	326,6

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar, 2022 (LRA yang diolah)

Komposisi pembiayaan daerah, selama ini penerimaan pembiayaan masih berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Penggunaan SiLPA adalah menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja dan mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. Sepanjang kurun tahun 2018–2022 rata-rata pertumbuhan SiLPA adalah 26,1 persen jumlah SiLPA paling tinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 577,26 miliar dan pada tahun 2022 terjadi SiLPA sebesar Rp. 386,16 miliar. Tingginya nilai tersebut berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama Pajak Daerah yang melebihi target dari APBD-P, dan realisasi dana perimbangan naik/turun (fluktuatif) utamanya Dana Bagi Hasil (DBH) pada akhir tahun dan adanya tambahan dana transfer dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) di pertengahan tahun. Penyebab terjadinya SiLPA juga disebabkan proses pelaksanaan lelang jangka waktu yang pendek dan keterbatasan bahan baku. Penyerapannya terkonsentrasi atau menumpuk pada triwulan IV, terutama pada komponen belanja modal.

Sementara itu, sisi pengeluaran pembiayaan hanya berasal dari penyertaan modal yaitu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) dan Perusahaan Daerah (Perusda). Setiap tahunnya penyertaan modal direncanakan pada Bank Kalbar sebesar Rp. 50 miliar dan untuk Perusda sebesar Rp. 5 miliar dan pertumbuhannya sebesar 3,7 persen selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.8. Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022

No	PEMBIAYAAN	Realisasi (nilai dalam Miliar Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
1	Penggunaan SiLPA	212,12	364,91	577,26	313,02	386,16	26,10
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN	212,12	364,91	577,26	313,02	386,16	26,10
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-

3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	-
6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	-
7	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	165,87	50,00	50,00	55,00	50,00	3,07
9	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-
10	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-
11	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN		165,87	50,00	50,00	55,00	50,00	3,07

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar, 2022 (LRA yang diolah)

3.3. Kerangka Pendanaan

Setelah menyampaikan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu dari periode tahun 2018-2022, berdasarkan hal tersebut maka Pendapatan Daerah diupayakan meningkat dan Belanja Daerah dalam lima tahun kedepan lebih berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan sesuai perkiraan kondisi pada tahun mendatang. Kondisi Kerangka Keuangan pada tahun tahun 2023 yang sudah menjadi Perda disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.9 Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

Kode	URAIAN (nilai dalam Miliar Rp)	2023*
4	PENDAPATAN	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.029,2
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	2.583,5
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	11,9
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120,3
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	313,4
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.926,2
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.926,2
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	56,5
4.3.01	Pendapatan Hibah	56,5
	Jumlah Pendapatan	6.011,8
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	3.595,3
5.1.02	Belanja Pegawai	1.689,4
5.1.03	Belanja Barang	1.664,8
5.1.04	Hibah	240,4
5.1.05	Bantuan Sosial	0,7
5.2	BELANJA MODAL	1.375,3
5.2.01	Belanja Tanah	0,03
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	229,4
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	409,7
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	714,2
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	18,8
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	3,1

5.3	BELANJA TAK TERDUGA	30,0
5.3.01	Belanja Tak Terduga	30,0
5.4	BELANJA TRANSFER	1.280,4
5.4.01	BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	1.218,8
5.4.02	BELANJA TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	61,6
	Jumlah Belanja	6.281,0
	Surplus/Defisit	-269,14
6	PEMBIAYAAN	269,1
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319,1
6.1.01	Penggunaan SILPA	319,1
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50,0
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50,0
	Jumlah Pembiayaan	269,1
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00
	TOTAL APBD	6.331,0

Keterangan: * = Berdasarkan Perda APBD tahun 2023

Selanjutnya digambarkan proyeksi Keuangan Daerah (Pendapatan dan Belanja Daerah) dari tahun 2024–2026 sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 3.10 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2024 – 2026**

No.	URAIAN	Proyeksi (nilai dalam Miliar Rp)		
		2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	6.422,0	6.867,1	7.272,7
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.329,5	3.660,6	3.973,3
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.858,7	3.163,3	3.448,0
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12,5	13,2	13,8
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	129,1	138,6	148,7
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	329,1	345,5	362,8
1.2	Pendapatan Transfer	3.034,4	3.146,7	3.237,9
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	3.034,4	3.146,7	3.237,9
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	58,1	59,8	61,5
1.3.1	Pendapatan Hibah	58,1	59,8	61,5
2	BELANJA	6.642,0	7.037,1	7.402,7
2.1	Belanja Operasi	3.775,8	3.972,7	4.186,7
2.1.1	Belanja Pegawai	1.757,0	1.827,4	1.900,5
2.1.2	Belanja Barang	1.801,6	1.949,7	2.109,9
2.1.3	Hibah	216,5	195,0	175,6
2.1.4	Bantuan Sosial	0,7	0,7	0,7
2.2	Belanja Modal	1.447,7	1.523,9	1.604,1
2.2.1	Belanja Tanah	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	243,2	257,8	273,3

2.1.3	Belanja Gedung dan Bangunan	430,2	451,7	474,3
2.1.4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	751,7	791,1	832,6
2.1.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	19,4	19,9	20,5
2.1.6	Belanja Aset Lainnya	3,2	3,2	3,3
2.3	Belanja Tak Terduga	5,0	5,0	5,0
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5,0	5,0	5,0
2.4	Belanja Transfer	1.413,5	1.535,5	1.606,9
2.4.1	BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	1.350,2	1.470,3	1.539,8
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.350,2	1.470,3	1.539,8
2.4.2	BELANJA TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	63,4	65,2	67,1
2.4.2.1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	63,4	65,2	67,1
SURPLUS/DEFISIT		- 220,0	- 170,0	- 130,0
3	PEMBIAYAAN	220,0	170,0	130,0
3.1	Penerimaan Pembiayaan	270,0	220,0	180,0
3.1.1	Penggunaan SiLPA	270,0	220,0	180,0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	50,0	50,0	50,0
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50,0	50,0	50,0
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	0,00	0,00

Sumber : Hasil proyeksi Tim penyusun RPD

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah pada tabel di atas, maka perlu disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada periode 2018-2023 yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang dan menyikapi lonjakan inflasi daerah, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyiapkan regulasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Sawit dari pemerintah pusat terkait konsolidasi pemerintah daerah penyumbang pajak ekspor dari produk CPO kelapa sawit dan turunannya ;
2. Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat Kalimantan Barat;
3. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (*Public Private Partnership*) dan swasta maupun *corporate social responsibility* (CSR). Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi:
 - a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kalimantan Barat;
 - b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lainnya dengan perjanjian yang disepakati;
 - c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;

- d. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
- e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
- f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2014-2026 diarahkan untuk pencapaian program prioritas daerah, pemulihan dan stabilitas ekonomi serta menjaga stabilitas harga terkait pengendalian inflasi daerah. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi ekonomi produktif, padat karya, serta memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2014-2026 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman Harga Satuan Umum (HSU) Barang/Jasa dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan diikuti pelaksanaan Analisa Satuan Biaya (ASB);
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemanfaatan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk

- keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak penempatan dan peningkatan kompetensi tenaga medis;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi, anggaran belanja akan diarahkan pada peningkatan akses suplai, distribusi dan keterjangkauan barang;
 8. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
 9. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
 10. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
 11. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembiayaan yang berkelanjutan;
 12. Kebijakan untuk belanja operasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - c. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada masyarakat/kelompok masyarakat/ UMKM/Koperasi tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan meningkat daya saingnya. Penentuan kelompok-kelompok tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;
 - d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dari alokasi belanja sosial untuk masyarakat tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;
 - e. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Penjabaran dari Alokasi belanja hibah tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;
 - f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Penjabaran dari alokasibelanja tidak terduga tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;

13. Kebijakan belanja transfer diarahkan sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah; Penjabaran dari alokasi belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten dan kota tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik yang duduk di Parlemen, kabupaten dan kota serta Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten dan kota, dan pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penjabaran dari alokasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten, kota dan pemerintah desa tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,

akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman apabila terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD;
4. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.

Berdasarkan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang akan digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan untuk periode 2018 – 2023.

Tabel 3.11 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kalimantan Barat untuk Mendanai Pembangunan 2024 – 2026

No	Uraian	Proyeksi (nilai dalam Miliar Rp)		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan	6.422,04	6.867,08	7.272,72
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	270,00	220,00	180,00
	Total Penerimaan	6.692,04	7.087,08	7.452,72
	Dikurangi			
4	Belanja Operasi (Belanja Pegawai)	1.757,03	1.827,36	1.900,50
5	Pengeluaran Pembiayaan	50,00	50,00	50,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4.885,01	5.209,72	5.502,23

Sumber : Hasil proyeksi Tim penyusun RPD

Hasil dari proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah maka rencana arah kebijakan pengelolaan keuangan secara garis besar periode tiga tahun mendatang diarahkan kepada:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus

dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik dan memiliki kepentingan atau nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

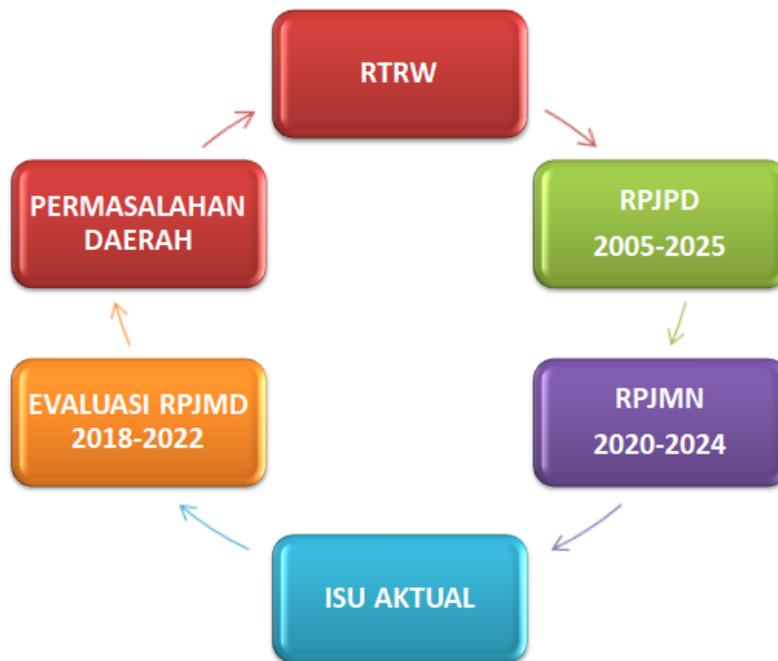
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu;
- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Tabel 3.12 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026

No	Uraian	Proyeksi (nilai dalam Miliar Rp)		
		2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4.885,01	5.209,72	5.502,23
2	Prioritas I	3.150,83	3.391,53	3.554,44
3	Prioritas II	1.314,07	1.359,74	1.447,09
4	Prioritas III	420,11	458,46	500,70

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam BAB IV ini akan diuraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, khususnya untuk jangka waktu 2023-2026. Komponen pembentuk isu strategis tersebut adalah hasil dari beberapa sumber yaitu dari hasil analisis terhadap capaian-capaian pembangunan periode sebelumnya; dari hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Kalimantan Barat 2005-2025; RPJMD Kalimantan Barat 2017-2022; RPJMN 2020-2024; hasil capaian TPB/SDGs; dan isu aktual yang sedang berlangsung termasuk penanganan pandemi COVID-19. Penjelasan dalam bentuk skema disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar: Pembentukan Isu Strategis Provinsi Kalimantan Barat

Sumber: Analisa Bappeda Prov Kalbar, 2022.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan adalah adanya perbedaan atau kesenjangan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Permasalahan pembangunan yang dijabarkan adalah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya).

Matriks Permasalahan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Aspek	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1.	Kesejahteraan Masyarakat	Masih terdapat kesenjangan pendapatan antar wilayah	Angka Indeks GINI	Indeks Gini mengalami penurunan, dari 0,317 di Tahun 2020 menjadi 0,315 di tahun 2021 (per Sept'21). Walaupun angkanya lebih baik dari angka Nasional (0,381, di tahun 2021), namun masih terdapat kesenjangan pendapatan antar wilayah (perdesaan dan perkotaan).
		Tingkat keparahan kemiskinan cenderung naik	Angka Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2) cenderung meningkat walaupun angka peningkatannya relative kecil. Peningkatan tersebut erat kaitannya dengan terjadinya Pandemi COVID-19 dari Tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih belum optimal (terutama di perkotaan).
		Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Tahun 2021 (5.82) cenderung naik jika dibandingkan Tahun 2019 (4.45) dan Tahun 2020 (5.81) walaupun angka kenaikannya kecil terutama pada angkatan kerja laki-laki.

		Prevalensi balita gizi buruk masih cukup tinggi	Angka prevalensi <i>Stunting</i>	Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kategori 7 provinsi dengan angka intervensi prevalensi <i>stunting</i> tertinggi. Terjadinya <i>Stunting</i> dan gizi buruk pada bayi dan balita serta anak lebih disebabkan oleh kurangka pengetahuan ibu terhadap pola asuh anak, kondisi geografis Kalimantan Barat yang cukup luas, sulitnya akses pelayanan kesehatan di berbagai daerah, kurangnya cakupan akses air bersih dan sanitasi lingkungan, minimnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan di daerah.
2.	Pelayanan Umum	Meningkatnya Angka Putus Sekolah	Persentase Angka Putus Sekolah Tahun 2017-2020	Selama rentang waktu Tahun 2017-2021, pertumbuhan harapan lama sekolah (HLS) sebesar 0.29%. Sedangkan pertumbuhan rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 1.39%.
		Masih rendahnya partisipasi pada jenjang Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA).	Angka Partisipasi Murni (APM)	Selama rentang waktu Tahun 2020-2022, angka partisipasi sekolah (APS) untuk jenjang SMA baru mencapai 68.96 - 69.38.
		Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik.	Persentase Guru yang Kompeten	Masih banyaknya tenaga guru yang belum mendapatkan sertifikasi guru sesuai dengan bidang keilmuan dan mata pelajaran yang diampunya.

		Masih belum memenuhi standar kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara kearsipan.	Kualitas layanan arsip siap layan.	Kesadaran dan kepedulian aparaturnya pemerintah terhadap pengelolaan arsip masih rendah sehingga menyebabkan penanganan dan pengelolaan arsip tidak dapat berjalan dengan baik.
		Masih tingginya fluktuasi stabilitas harga pangan pokok antar waktu dan antar wilayah terutama pada harga pangan yang menjadi pemicu inflasi daerah.	Secara Nasional anggaran urusan pangan dialokasikan rata-rata hanya sekitar 0,40% dari total anggaran urusan dalam APBD kab/kota TA 2022.	Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran pemerintah daerah (kab/kota) dalam mengalokasikan anggaran untuk keperluan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sesuai dengan jumlah idealnya sebagaimana yang tercantum dalam Permentan 11/2018.
		Masih rendahnya kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB Kalimantan Barat	Minimnya investasi pada sektor industri pengolahan.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelabuhan, pasokan air bersih, serta infrastruktur terutama energy yang belum mampu memenuhi persyaratan standar industri pengolahan.
		Belum optimalnya capaian air bersih dan sanitasi sesuai dengan Program (100-0-100).	Belum adanya database berbasis spasial terkait pelayanan rumah tangga air bersih dan bersanitasi.	Belum tercapainya penggunaan air bersih dan sanitasi mencapai 100%. Berdasarkan BPS Nasional bahwa capaian Rumah Tangga Air Bersih dan bersanitasi belum mencapai 100%.
		Belum optimalnya kinerja jaringan irigasi provinsi/kabupaten.	Masih rendahnya layanan kualitas, kuantitas dan kapasitas air baku.	Rendahnya layanan kinerja irigasi disebabkan karena belum adanya database berbasis spasial terkait irigasi, rawa,

				<p>cakupan sawah, sumber air baku, dan luasan daerah wilayah banjir. Kondisi irigasi berkategori baik 2.202 Ha, rusak ringan 1.492 Ha, rusak sedang 481 Ha dan rusak berat 2.590 Ha. Kondisi rawa yang baik 24.821 Ha, rusak ringan 6.795 Ha, rusak sedang 6.860 Ha, dan rusak berat 16.044 Ha. Selain itu, kegiatan perencanaan tidak konek dengan kegiatan pembangunan irigasinya.</p>
		<p>Masih banyak desa disekitar perkebunan, kawasan hutan dan pulau- pulau kecil yang belum teraliri listrik.</p>	<p>Masih rendahnya proporsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi listrik Kalimantan Barat.</p>	<p>Walaupun angka rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik PLN terus mengalami peningkatan, namun persentasenya masih berada dibawah rata-rata Nasional.</p>
		<p>Kalimantan Barat masih merupakan provinsi pengemisi Gas Rumah Kaca (GRK).</p>	<p>Masih terus terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dan lahan.</p>	<p>Masih banyak Rencana Strategis (Renstra) daerah yang belum dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)-nya terutama pada kawasan-kawasan strategis provinsi.</p>
		<p>Belum optimalnya pengaturan dan pembinaan Penataan Ruang sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007.</p>	<p>Perda RTRW Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.</p>	<p>Masih lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat pada Perda RTRW Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014, hal ini disebabkan oleh masih banyak terdapat perbedaan penentuan kawasan hutan sehingga</p>

				memerlukan peninjauan kembali (PK) RTRWP.
		Masih kurang transparannya pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja.	Perencanaan anggaran (penyusunan RAPBD) belum sepenuhnya melibatkan <i>stakeholders</i> pembangunan daerah dan evaluasi hasil capaian penggunaan APBD belum berorientasi kepada indikator <i>benefit</i> maupun indikator <i>impact</i> .
		Masih belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil survey pemetaan dan pengukuran Budaya Kerja ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat oleh KemenPAN-RB menunjukkan masih bernilai 67.8% (B)	Walaupun hasil survey tersebut sudah berkategori B (cukup sehat) namun masih belum optimal capaian indikator kinerjanya karena kapasitas SDM belum merata, fasilitas yang terbatas serta prosedur yang belum baku.
3.	Daya Saing Daerah	Belum optimalnya penciptaan iklim usaha/Investasi yang kondusif untuk menarik masuknya arus penanaman modal baik PMDN maupun PMA.	Realisasi investasi PMDN dan PMA belum mampu mencapai 50%.	Belum terintegrasinya pengembangan kerjasama antar <i>stakeholder</i> (pemerintah, swasta dan masyarakat), termasuk dalam pengelolaan promosi investasi, pengembangan kegiatan UMKM, koperasi dan lembaga keuangan mikro.
		Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Belum termanfaatkannya para pelaku ekonomi kreatif dengan keahlian spesifik sesuai keahlian masing-masing.	Sumberdaya manusia penggerak pariwisata dan pengembangan inovasi desa wisata sudah ada, namun belum termanfaatkan dengan baik serta belum seluruhnya dilakukan pembinaan untuk

				menghasilkan suatu produk yang lebih bernilai jual tinggi. Pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif se-Kalimantan Barat masih sangat diperlukan.
		Kapasitas produksi UMKM cenderung stagnan.	Jumlah dan Nilai Produk Ekspor.	Struktur ekspor Kalimantan Barat masih didominasi oleh 3 (tiga) komoditi utama yang bersifat komoditi primer yaitu karet, hasil tambang dan produk perikanan (diatas 80% nilai ekspor total Kalimantan Barat).
		Kondisi jalan provinsi masih banyak dalam kondisi rusak	Jalan provinsi dalam kondisi mantap baru mencapai 66,94%, sedangkan jalan Nasional sudah mencapai sekitar 93,96%.	Masih belum optimalnya pengendalian terhadap praktek <i>Over Dimension and Over Load</i> (ODOL) yang memberikan sumbangan atas kerusakan jalan. Selain itu, masih banyak jalan kabupaten asetya belum diserahkan ke provinsi untuk dialihkan statusnya menjadi jalan provinsi.
		Masih banyak jalan yang belum memenuhi standar teknis.	Fisik jalan lebarnya dibawah 7 meter.	Pengadaan lahan masih mengalami kendala dalam proses penyiapan lahan karena belum tuntasnya permasalahan pembebasan lahan dan proses penganggaran untuk pembangunannya.
		Masih banyak terdapat <i>blank spot</i> terutama di kawasan terdepan, terluar, dan terpencil.	Penetrasi jaringan internet di Kalimantan Barat baru mencapai 17% (tergolong rendah).	Belum adanya database eksisting terkait <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) serta kurangnya koordinasi untuk menangani database <i>blank spot</i> . Hal ini juga

				disebabkan oleh belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana layanan komunikasi dan informatika.
--	--	--	--	---

Sumber: Analisa Bappeda, 2022

4.2. KEBIJAKAN RPJPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 adalah “KALIMANTAN BARAT BERSATU DAN MAJU”. Visi tersebut diwujudkan dengan 9 (sembilan) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan budaya politik yang demokratis dan toleran;
2. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan supremasi hukum dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan infrastruktur yang memadai;
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan;
7. Mewujudkan perekonomian yang maju;
8. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif;
9. Mewujudkan masyarakat yang religius, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.

Sedangkan prioritas pembangunan pada periode 2023-2025 (Tahap Ke-5) adalah periode untuk mewujudkan Pencapaian pembangunan yang telah dicapai dalam empat periode sebelumnya, maka tahap ke-5 ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kalimantan Barat yang ditandai oleh kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, struktur ekonomi yang mapan antar sektor dan antar wilayah dengan partisipasi masyarakat yang luas dan dominan, pelayanan dasar telah melayani masyarakat dengan mapan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dengan penegakan hukum yang sangat baik, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kaedah-kaedah lingkungan hidup.

Pada tahap ke-5 ini sudah dapat ditunjukkan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah tinggi dengan tingkat perkembangan diatas rata-rata Nasional dan sudah mampu bersaing dalam lingkup ASEAN serta beberapa bagian telah bersaing dengan sangat sehat dalam skala Asia-Pasific. Kualitas SDM sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan keterampilan yang memadai dan dapat dipenuhi oleh wilayah setempat; perekonomian tumbuh diatas rata-rata Nasional dengan tingkat ketimpangan yang sangat rendah; prasarana dan sarana menjangkau kesegenap pelosok wilayah dan wilayah unggulan dan strategis telah memiliki prasarana yang unggul; pemerintahan berjalan dengan efisien, efektif, transparan dengan memiliki akuntabilitas yang tinggi serta penegakan hukum dilaksanakan dengan tegas

sesuai aturan; serta penataan ruang menjadi acuan utama kegiatan-kegiatan pembangunan daerah.

4.3. KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2005-2025

Berdasarkan pengamatan permasalahan pembangunan bidang-bidang pembangunan di Kalimantan Barat yang masih harus diselesaikan pada periode RPJMD, permasalahan utama pembangunan Kalimantan Barat yang masih tersisa adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan pada posisi perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-1) yang mengakibatkan maraknya praktek-praktek illegal dan potensi ancaman terhadap wawasan kebangsaan;
- 2) Wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil, pesisir dan kepulauan yang belum berkembang secara optimal;
- 3) Rentang kendali pemerintahan yang panjang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat serta kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang belum memadai;
- 4) Pemerataan layanan akses, kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan dan tata kelola kesehatan yang belum optimal;
- 5) Rendahnya minat investasi di Kalimantan Barat, baik yang bersumber dari modal asing (PMA) maupun modal dalam negeri (PMDN);
- 6) Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (K-UMKM), termasuk pemberdayaan ekonomi kreatif yang masih rendah;
- 7) Produksi dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah, belum mendukung peningkatan ketahanan pangan;
- 8) Nilai dan volume perdagangan Kalimantan Barat keluar negeri maupun dalam negeri masih rendah;
- 9) Masih belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi, termasuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN;
- 10) Belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa dan peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan;
- 11) Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- 12) Derajat kesejahteraan masyarakat masih rendah serta ketimpangan pendapatan yang cenderung stagnan.

4.3.1. Permasalahan Dimensi Kewilayahan

Pembahasan dimensi kewilayahan dikelompokkan berdasarkan kawasan yaitu pedalaman, perbatasan antar negara, serta pesisir dan kepulauan. Secara umum, Kalimantan Barat diklasifikasikan sebagai Daerah Tertinggal, disebabkan dari 14 (empat belas) kab/kota terdapat 8 (delapan) yang masih berstatus Tertinggal. Penyebab keteringgalan beberapa daerah tersebut antara lain (i) letak geografis yang sulit dijangkau atau terisolir; (ii) kepadatan penduduk relatif rendah; (iii) memiliki potensi sumber daya alam namun tidak dapat dikelola secara optimal; (iv)

tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang masih sederhana, (v) minimnya ketersediaan akses prasarana perhubungan, transportasi, komunikasi, listrik, dan air bersih; (vi) karena beberapa faktor pembangunan, seperti keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah, termasuk pula prioritas penanganan dan pendekatan yang dilakukan.

a. Wilayah Pedalaman

- 1) Rendahnya Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana dan Prasarana;
- 2) Terbatasnya Alternatif Lapangan Kerja;
- 3) Rendahnya Akses terhadap Permodalan;
- 4) Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat;
- 5) Rendahnya Tingkat Ketahanan Pangan;
- 6) Degradasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 7) Belum Optimalnya Peran Kelembagaan;
- 8) Masih lemahnya kemandirian desa;
- 9) Masih lemahnya perencanaan pembangunan desa;
- 10) Lemahnya kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan lembaga Lembaga kemasyarakatan;
- 11) Lemahnya komitmen pemerintah daerah.

b. Wilayah Perbatasan antar Negara

Permasalahan dalam pengembangan wilayah perbatasan, antara lain meliputi yaitu:

- 1) Belum tegasnya batas administrasi perbatasan antar negara; Penanganan dan pengelolaan keamanan, hukum, dan pertahanan di wilayah perbatasan;
- 2) Rendahnya kesejahteraan masyarakat karena terbatasnya akses transportasi dan kurang optimalnya pelayanan sosial dasar termasuk ketersediaan energi kelistrikan yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- 3) Belum optimalnya kebijakan dan program-program dari berbagai sektor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat perbatasan, belum optimalnya koordinasi antar Kabupaten, Provinsi dan Pusat. 4) Belum jelasnya mekanisme koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan serta masih belum optimalnya keberpihakan dari kepemimpinan lokal dan kelembagaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

c. Wilayah Pesisir dan Kepulauan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah pesisir dan kepulauan, antara lain:

- 1) Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan dengan wilayah yang relatif lebih maju;
- 2) Kepadatan penduduk relatif rendah dan terpencar di pulau-pulau kecil;
- 3) Kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumberdaya, khususnya sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang belum dikelola secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas;

- 4) Masih belum memadainya ketersediaan energi dan kelistrikan. Masih ada wilayah pesisir dan kepulauan yang belum teraliri listrik, sementara pengelolaan energi terbarukan masih belum berkembang;
- 5) Rendahnya Akses terhadap Modal Usaha;
- 6) Rendahnya akses terhadap permodalan, akan menghambat pengembangan usaha masyarakat nelayan dan berpengaruh terhadap produktivitas nelayan;
- 7) Belum optimalnya pembangunan di wilayah pesisir dan kepulauan;
- 8) Belum memadainya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih termasuk prasarana komunikasi dan informasi yang akan memperlancar dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan;
- 9) Degradasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 10) Belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.

4.4. KEBIJAKAN DALAM RPJMN 2020-2024

Amanat pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 untuk Provinsi Kalimantan Barat tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Lampiran yang memuat Arah Pembangunan Wilayah tersebut menjabarkan Target Pembangunan, Prioritas Pembangunan, dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada masing-masing wilayah. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Nasional, ditetapkan target pembangunan beserta perkiraan kebutuhan investasinya dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024).

Adapun target pembangunan dan perkiraan kebutuhan investasi di Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 1. Target Pembangunan dan Perkiraan Kebutuhan Investasi Provinsi Kalimantan Barat dalam RPJMN 2020-2024

Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
			2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.06	5.06	5.10	5.50	5.90	6.70	7.10
Tingkat Kemiskinan (%)	7.77	7.49	6.43	6.15	5.75	5.15	4.75
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.26	4.45	4.00	3.70	3.60	3.10	2.80
Perkiraan Kebutuhan Investasi (Rp triliun)	63.81	70.29	79.01	87.79	98.45	111.05	127.78

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2020-2024

Selanjutnya, secara eksplisit dijabarkan pula Prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang menjadi Prioritas Nasional dan prioritas Nasional tersebut berada di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam RPJMN 2020-2024

No.	Prioritas Pembangunan Wilayah	Kabupaten / Kota
1	Koridor Pertumbuhan	Kota Pontianak
		Kabupaten Kubu Raya
		Kabupaten Ketapang
2.	Koridor Pemerataan	Kabupaten Sambas
		Kota Singkawang
		Kabupaten Bengkayang
		Kabupaten Landak
		Kabupaten Mempawah

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2020-2024

Sedangkan prioritas pengembangan sektor unggulannya adalah karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, perikanan tangkap, perikanan budidaya, bauksit, emas, dan batu bara; pengembangan Sentra Produksi Perikanan pada WPP-711 (di Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan); pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) antara lain KPPN Kubu Raya, KPPN Mempawah, KPPN Bengkayang, dan KPPN Sambas.

Selain itu Proyek Prioritas Nasional yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan yang difokuskan pada Kawasan Industri (KI) Ketapang;
2. Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah antara lain DPP Baru Sambas - Singkawang;
3. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Trans Kalimantan, serta jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain Jalan Akses KI Ketapang, Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan (Kalbar, Kaltim, dan Kaltara), Pembangunan Pelabuhan Hub Kijing, Bandara Baru Singkawang, Bandara Baru Ketapang Baru dan Kereta Api IKN;
4. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK);
 - a. Pengembangan SMK di wilayah Kalimantan secara keseluruhan berjumlah 204 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan;
 - b. Pengembangan perguruan tinggi prodi vokasi: perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Manufaktur, Tambang), konstruksi, pariwisata dan pertanian);

- c. Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh pertanian, buruh konstruksi gedung dan manajer umum (perdagangan); dan
- d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Kalimantan.
- 5. Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Pontianak dan Singkawang;
- 6. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
- 7. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 8. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Landak, Melawi, Sambas;
- 9. Revitalisasi kawasan transmigrasi di antara lain Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten Sambas;
- 10. Pengembangan ekonomi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN antara lain PKSN Paloh Aruk, dan PKSN Jagoi Babang;
- 11. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 14 kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Barat;
- 12. Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup 5 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan pada tahun 2023;
- 13. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai - 11 - target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,23 persen di Provinsi Kalimantan Barat;
- 14. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui: a. Peningkatan ketahanan wilayah timur Pulau Kalimantan; b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan c. Peningkatan konservasi hutan;
- 15. Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau);
- 16. Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim;
- 17. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon;
- 18. Mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Wilayah dalam kurun waktu 2020-2024 akan dilaksanakan *Major Project* sebagai berikut Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Paloh-Aruk); Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kijing;

Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024 Membangun Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
PP 4: Pembangunan Wilayah Kalimantan	Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)	5,37	303.849,82			
	Share PDRB Wilayah Kalimantan (persen)	8,22				
	IPM Wilayah Kalimantan	71,22-79,25				
	Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan (persen)	3,29				
Provinsi Kalimantan Barat						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	>1				
Pengembangan Pelabuhan Kijing	Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Kijing (lokasi)	1 (selesai)	12.500	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo II), Swasta
Jalan Akses KI Ketapang	Panjang jalan yang dibangun (km)	12	123	Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Terminal Aruk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		76	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pembangunan Terminal Nanga Badau	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		60	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pembangunan Bandara Ketapang Baru/Kayong Utara	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	250	Kalimantan Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Jalan Akses Pelabuhan Kendawangan	Panjang jalan yang dibangun (km)		10	Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Ketapang	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan DPP Baru Sambas-Singkawang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	>1				
Pembangunan Bandara Singkawang-Kalbar	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	1.000	Kalimantan Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Jembatan Sambas Besar	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	1.860	Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku DPP Sambas-Singkawang	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)	0,03	9,75	Kab. Sambas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	617,31	25,60	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Bengkayang, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	3199,44	68,99	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kubu Raya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat					
Akselerasi Replanting dan Penerapan	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	540	3,36	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kalimantan Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan bauksit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat					
Optimalisasi produksi bauksit	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat					
Optimalisasi produksi batu bara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Kalimantan					

Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kalimantan Barat)				Kota Pontianak, Kota Singkawang		
Pembangunan Bandara Singkawang-Kalbar	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	1.000	Kota Singkawang (lingkup pelayanan), Provinsi Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuhub
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalteng - Kalbar	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (km)	407,20		Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat		BU
Jembatan Kapuas 3	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	300	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	602	1.064,34	Provinsi Kalimantan Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		512,17	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		263,31	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		18,20	Kota Pontianak, Kota Singkawang (Provinsi Kalimantan Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		502,87	Kota Pontianak, Kota Singkawang (Provinsi Kalimantan Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		75,85	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		14,77	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1460 desa berkembang; 232 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	0,51				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5,78				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	65,30	56,63	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Prov Kalimantan Barat (kecamatan)	14	4,89	Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Bahang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Bahang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Bahang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp Miliar*)	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Bahang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Bahang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Bahang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	2	0,29	Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Bahang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		4,40	Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Bahang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM

Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Bahang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh-Aruk	0,52	277	Kab. Sambas		
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	jumlah kabupaten yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya	1		Kab. Sambas	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Jalan perbatasan Kalbar	Panjang jalan yang dibangun (km)		98,40	Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah (unit) PLTS Kool Top yang dibangun		2,20	Kab. Sambas	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Sambas	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Sambas	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		9	Kab. Sambas	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	14,10	Kab. Sambas	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Terminal Aruk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		76	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1	50	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	1	3,20	Kab. Sambas	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun		2	Kab. Sambas	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Pengembangan Area Sentra Industri Lada	Luas Area kawasan industri lada yang dikembangkan (Ha)	500	4	Kab. Sambas	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	jumlah kabupaten yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya	1		Kab. Sambas	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Kementerian Perindustrian
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	7	2,35	Kab. Sambas	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jagoi Babang	0,39	115	Kab. Bengkayang		
Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya (ha)	85	6,90	Kab. Bengkayang	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1 (selesai)	50	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	1	4	Kab. Bengkayang	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
Jaringan Air baku yang dibangun/ditingkatkan	Total debit air baku yang dihasilkan (m3/det)	0,19	47,65	Kab. Bengkayang	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPU (lokasi)	1	4	Kab. Bengkayang	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Bengkayang	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	3	0,30	Kab. Bengkayang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	3	1,01	Kab. Bengkayang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	59,18	311,57	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	812	39,13	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Perbincangan aparat pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup	Jumlah aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	812	75,83	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	669	186,72	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar*)			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	3	0,45	Ketapang, Sambas, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang dan Sambas	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kab. Bengkayang dan Kab. Sambas	53.00; 47.00; NA; 45.00	192,45	Kab. Kubu Raya, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, dan Kab. Mempawah	1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	10	2,59	Kab. Kubu Raya, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	1	1,29	Kab. Kubu Raya, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	4	3,37	Kab. Kubu Raya, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaan (kawasan)	1	15,86	Kab. Kubu Raya	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,72	Kab. Kubu Raya, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan (kawasan)	1	8,62	Kab. Kubu Raya	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	4	160	Kab. Kubu Raya, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar*)			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	929.571	210,47	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Kotawaringin Barat	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Diveritalisasi di Provinsi Kalimantan Barat	65,30	56,63	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	24,59	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,61	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang sarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	27,84	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	3,02	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,33	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,23	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,35				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	42,8				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	61				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	61				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4.411				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	61				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	6				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					

	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36	266,77			
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)			Kab. Ketapang	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanian						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	929.571	210,47	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan Pertanian Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanian	Luas cakupan peta dasar pertanian (Ha)	952.995	0,73	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan Pertanian Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanian	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	15	32,09	Kalimantan Barat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Kalimantan Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	7	1,31	Kalimantan Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota	7	0,91	Kalimantan Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2020-2024

4.5. KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Selain analisis terhadap dokumen perencanaan spasial yang ada, dokumen perencanaan secara spasial yakni rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 juga menjadi pertimbangan dalam penentuan isu strategis serta menjadi bahan untuk disinkronkan dalam penyusunan rencana selama Tahun 2023-2026 mendatang. RTRWP Kalimantan Barat digunakan sebagai pedoman bagi:

- Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di daerah;
- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah/kawasan di daerah serta keserasian antarsektor;
- Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di daerah;
- Penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci di daerah;
- Pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.
-

4.6. HASIL EVALUASI CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Selain analisis berdasarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, gap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB SDGs) yang dianalisis dari Laporan Evaluasi Capaian TPB Provinsi Kalimantan Barat juga menjadi pertimbangan dalam penentuan isu strategis.

Tujuan TPB	Tantangan
	<p>Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran; Mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung; Menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan social; dan Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan pencegahan</p>
	<p>Peningkatan produksi pangan pokok dan penting untuk mencapai swasembada berkelanjutan komoditas beras dan jagung serta peningkatan penyediaan pangan untuk komoditas kedelai, gula tebu (Nasional) untuk Kalbar Gula Aren, daging sapi, bawang merah, dan cabai; Perluasan areal tanam untuk komoditas pangan prioritas dengan pencetakan sawah, penyediaan pasokan air untuk pertanian dengan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, <i>long storage</i>, serta bangunan air lainnya; dan peningkatan indeks pertanaman; Percepatan produksi dan perbanyak benih tanaman Unggul Nasional dan unggul Lokal sesuai minat pengguna/petani dan permintaan pasar; Penyediaan sarana produksi pupuk dan benih secara enam tepat (jenis, varietas, dosis, waktu, tempat, dan harga) dan alat mesin pertanian yang sesuai dengan kondisi agroekosistem dan kebutuhan petani; Penyediaan dan peningkatan jumlah indukan sapi, pengembangan ketersediaan pakan, dan pengembangan jumlah populasi sapi; Fasilitasi untuk mendukung peningkatan produksi budidaya ikan dan perikanan tangkap; Penguatan cadangan pangan nasional dan pembentukan cadangan pangan pemerintah serta pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan; Percepatan penganekaragaman ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal, termasuk pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga; Hilirisasi produk pangan (penanganan pasca panen dan pengembangan produk olahan) terutama berbasis pangan lokal, untuk menciptakan nilai tambah, menyediakan pangan beragam, mengurangi kehilangan hasil, dan meningkatkan pendapatan usaha skala kecil/rumah tangga; Pemberdayaan petani kecil/kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan daya saing produk pangan; dan Fasilitasi untuk mendorong usaha swasta dan BUMN berinvestasi di bidang agribisnis pangan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah perbatasan antarnegara.</p>
	<p>Meningkatkan Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat; Penyediaan data dan Informasi Kesehatan; Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai; Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan; dan Perluasan Kapasitas dan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit.</p>

<p>4 PENDIDIKAN BERKUALITAS</p> 	<p>Perluasan dan pemerataan akses layanan Pendidikan menengah serta vokasi melalui program SMA/SMK Negeri gratis dan Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK Swasta; Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK; Pemenuhan pendidikan tenaga kependidikan; Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru; Pengawasan dan penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP); Peningkatan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi Dan Pendidikan Non Formal; Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya; Pengembangan budaya dan seni daerah; Peningkatan kapasitas tenaga kebudayaan; Peningkatan peran perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.</p>
<p>5 KESETARAAN GENDER</p> 	<p>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.</p>
<p>6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK</p> 	<p>Pengendalian konservasi sumber daya air; mendukung peningkatan kapasitas air baku; meningkatkan layanan air minum rumah tangga; meningkatkan layanan sanitasi ke rumah tangga; mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui kerjasama <i>stakeholder</i> terkait untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik; Optimalisasi perlindungan hutan dan pengelolaan kawasan ekosistem essensial; Peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta rehabilitasi hutan dan lahan.</p>
<p>7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAL</p> 	<p>Mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik Non PLN, dengan strategi pembangunan Penyediaan tenaga listrik Non PLN; peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan; serta pengembangan penyediaan energy listrik berbasis tenaga surya dan juga berbasis nuklir; dan Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di wilayah 3T, dengan starteji pembangunan diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH dan PLTN, PLTB).</p>

	<p>Pengembangan subsistem industri hilir yang terintegrasi berbasis pada industri pengolahan komoditas unggulan local; Revitalisasi pelayanan perizinan penanaman modal dan peningkatan pengembangan penanaman modal; Mengembangkan model promosi pariwisata berbasis ETourism; Meningkatkan jumlah usaha pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata); Peningkatan pertumbuhan produk dan usaha wisata; Menumbuhkembang an industri kecil menengah dan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal, kompetensi inti daerah, dan kreatifitas intelektual; Menumbuhkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat Desa; Menumbuhkan wirausaha baru; Meningkatkan fasilitasi kemitraan, pengembangan manajemen UMKM, dan pembiayaan bagi pelakuUMKM; Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat; Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Meningkatkan produktivitas tenaga kerja; Meningkatkan produktifitas tenaga kerja; Meningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja; Meningkatkan Penyelesaian Kasus Perselisihan HubunganIndustrial; Meningkatkan jumlahperusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan.</p>
	<p>Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan; Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan Jembatan; Meningkatkan Pertumbuhan Industri sesuai Kebijakan RPIP; Pengembangan Sistem Pengendalian Sistem Inflasi Daerah; Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Berbasiskan Teknologi Informasi; Menumbuhkan Industri Kecil Menengah dan Industri Pengolahan serta Manufaktur Berbasis Sumber Daya Lokal; Kompetensi Daya Saing Daerah; Kreatifitas Intelektual serta Penguatan Kebijakan Sarana Perekonomian Daerah Yang Andal dan Berdaya Saing; Pengelolaan Data dan Informasi berbasis teknologi informasi; Mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui kerjasama stakeholder terkait untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.</p>
	<p>Melakukan intervensi terutama bagi tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada di bawah 40 persen berpendapatan terendah, yaitu petani (termasuk petani perkebunan dan nelayan), pekerja tidak penuh termasuk pekerja rentan, usaha mikro dengan pekerja keluarga, serta penduduk miskin tanpa kepemilikan asset; Penguatan kapasitas bagi masyarakat rentan tersebut dilakukan dengan strategi dan pendekatan yang komprehensif melalui pembekalan lima aset penting untuk dapat mandiri secara berkesinambungan, yaitu aset sumber daya alam, kohesi sosial, sarana dan prasarana, akses terhadap pembiayaan (finansial), penguatan sumber daya manusia; peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif bagi masyarakat (baik petani maupun nelayan budi daya) kurang mampu, peningkatan keterampilan dan keahlian melalui penguatan pendidikan</p>

	<p>vokasi dan keterampilan/keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.</p>
 <p>11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN</p>	<p>Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh pada tahun 2030 (indikator: jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP); Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan (indikator: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)).</p>
 <p>12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB</p>	<p>Meningkatkan kepastian hukum lingkungan; Mendorong peran serta dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah dan limbah B3; Mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui kerjasama <i>stakeholders</i> terkait untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.</p>
 <p>13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM</p>	<p>Meningkatkan Kualitas Air dan Udara; Menurunnya luas Kerusakan Kawasan Hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis sedangkan sasaran Penanggulangan Bencana; Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana; Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana; dan Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencanamelalui peningkatan peran serta dunia usaha, swasta dan masyarakat.</p>
 <p>14 EKOSISTEM LAUTAN</p>	<p>Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan Sarana Prasarana; Inovasi Teknologi Tepat Guna; Peningkatan Kualitas SDM serta pengembangan kelembagaan bidang perikanan tangkap; Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir; Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS); Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.</p>

 <p>15 EKOSISTEM DARATAN</p>	<p>Dalam rangka mencapai tujuan dan target Ekosistem daratan, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023 diarahkan pada tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang diarahkan mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatkan kualitas air dan udara; menurunkannya luas kerusakan kawasan hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis; dan meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah.</p>
 <p>16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH</p>	<p>Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, termasuk dalam rumah tangga dengan membuat peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak; Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; Menjaga dan menciptakan kondisi kondusif dan menjamin kebebasan sipil dan menghormati hak-hak politik sipil dan pengembangan demokrasi di daerah; Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak; Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; Meningkatkan penciptaan, pemeliharaan serta pengendalian kondusifitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat di Kalbar dan pengamanan objek vital; Meningkatkan perlindungan masyarakat deteksi dini dan pembinaan dan penyelenggaraan trantibumlinmas; Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial; Meningkatkan peran pemuda dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan; Meningkatkan pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam upaya penciptaan kondisi trantibum yang kondusif di Kalbar; Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan linmas; Meningkatkan kapasitas Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan Revitalisasi regulasi teknis dan operasional penyelenggaraan trantibum di Kalbar. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; Meningkatkan pelayanan bantuan hukum dan pemenuhan HAM, optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat; Meningkatkan kualitas produk hukum daerah; Optimalisasi peran PPNS daerah dalam penegakkan perda/perkada di Kalbar; Meningkatkan jumlah orang atau kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Meningkatkan administrasi kelembagaan instansi pemerintah di daerah; Meningkatkan perluasan reformasi birokrasi; Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik di daerah; Meningkatkan peran serta perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; Meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi</p>

	<p>efektif melalui kebijakan anti korupsi yang fokus kepada upaya pencegahan korupsi; Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan; Meningkatkan proses yang adil melalui transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik; Optimalisasi teknologi informasi pada tiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah; Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan; Merumuskan kebijakan mengenali pengendalian administrasi pembangunan terintegrasi; Menjadikan UKPBJ sebagai pusat keunggulan (<i>center of excellence</i>) pengadaan barang/jasa pemerintah daerah; Pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Meningkatkan implementasi system akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis aktual; Mengoptimalkan upaya intensifikasi penerimaan pada objek-objek pendapatan daerah; Pengelolaan pendapatan berbasis teknologi informasi; Mengoptimalkan sistem pelayanan pendapatan daerah; Optimalisasi sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan; Optimalisasi system dan layanan administrasi kepegawaian; Meningkatkan penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, media luar ruang dan online; Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi; Meningkatkan perangkat daerah yang menerapkan akuntabilitas kinerja di Provinsi Kalimantan Barat.</p>
	<p>Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan antara lain menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perdagangan luar negeri di daerah hingga kedaerah perbatasan melalui intensitas koordinasi antar <i>stakeholder</i> dan kerjasama regional ekonomi, serta fasilitasi peningkatan daya saing produk ekspor melalui hilirisasi produk.</p>

Sumber: Laporan Pemantauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2020.

4.7. PERUMUSAN ISU STRATEGIS

Isu strategis pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2023-2026 merupakan aspek dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Kalimantan Barat Tahun 2023-2026 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan strategis berdasarkan hasil analisa kinerja pemerintahan;
- b. Prioritas dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025;

- c. Kebijakan dalam RTRW 2005-2025;
- d. Agenda Pembangunan, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan *Major Projects* dalam RPJMN 2020-2024;
- e. Hasil evaluasi capaian SDGs, dan

Berdasarkan pertimbangan beberapa hal diatas, telah terumuskan sejumlah 4 (empat) isu strategis pembangunan jangka menengah Tahun 2023-2026 adalah:

1. KETAHANAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN;
2. PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING;
3. TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK;
4. AKSESIBILITAS INFRASTRUKTUR DAN KETAHANAN BENCANA.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan secara keseluruhan, pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode RPD (Rencana Pembangunan Daerah) sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB), menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun RPD 2024-2026 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. 9 Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2025
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
3. 5 Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023
4. Isu-Isu Strategis 2024-2026

Tabel Sandingan Misi RPJPD, Agenda Pemb RPJMN, Misi RPJMD dan Isu Strategis

Misi RPJPD 2025-2025	Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 Perpres Nomor 18 Tahun 2020	Misi RPJMD 2018- 2023	Isu Strategis 2024-2026	RPD 2024-2026
Perda Nomor 3 Tahun 2016		Perda Nomor 2		

		Tahun 2021		
Mewujudkan Budaya Politik yang Demokratis dan Toleran	Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif	Dimensi SDM	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing
Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			
Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Beradab				
Mewujudkan Pembangunan yang lebih Merata dan Berkeadilan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Dimensi Ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan
Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Damai dan Bersatu	Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	Dimensi Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	
Mewujudkan Infrastruktur yang Memadai	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan		
Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi	Mewujudkan Masyarakat yang Tertib		

Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berkeseimbangan	Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
Mewujudkan Perekonomian yang Maju				
Mewujudkan Supremasi Hukum dan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip Good Governance	Dimensi Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi yang Berprinsip Good Governance untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dari hasil penyandingan muatan tersebut teridentifikasi tiga dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga dimensi tersebut yaitu; dimensi perekonomian (*economic*), dimensi manusia (*human*), dan dimensi pemerintahan (*governance*).

Dimensi perekonomian merupakan dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. *Dimensi manusia* adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama. Sedangkan *dimensi pemerintahan* adalah dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan kepada warga dalam bertinggal dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif.

Ketiga dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026.

Tujuan dan Sasaran RPD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Provinsi Kalimantan Barat yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja

Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPD.

Masukkan Cascading, Proses Bisnis

Berdasarkan cascading di atas, Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *logframe* Provinsi Kalimantan Barat. Gambaran *cascading* di atas menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator keberhasilan yang melekat didalamnya. Masing masing sasaran terdapat intervensi program prioritas yang merupakan kumpulan dari program program pembangunan daerah yang melibatkan lintas perangkat daerah/ lintas urusan untuk mendorong pencapaian sasaran Pemerintah Daerah. Program prioritas daerah ditransformasikan ke program nomenklatur di Permendagri 90 tahun 2019 yang menfokuskan Langkah intervensi tersebut harus lakukan bersama-sama oleh Perangkat Daerah. Keberadaan Program Prioritas Daerah (Program Pemda) dalam arsitektur kinerja merupakan inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan pendekatan *money follow program* yang berorientasi pada pendekatan tematik. Program prioritas daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian Tujuan.

Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 :

Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Produktif dan Berdaya Saing

dengan sasaran *“Terciptanya Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing, Berfokus pada Keterjangkauan Pendidikan, Peningkatan Preventif dan Promotif dalam Kesehatan serta Meningkatnya Standar Hidup Layak”*.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Pembangunan sumberdaya manusia tolak ukur ketercapaian yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tujuan ini berkomitmen dalam penguatan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, *pertama*, adalah Terciptanya Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing, Berfokus pada Keterjangkauan Pendidikan, Peningkatan Preventif dan Promotif melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu serta terjangkau. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, terjangkau serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK. *Kedua* yaitu tingkat kesehatan masyarakat. Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sasaran ini utamanya menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. *Ketiga* Meningkatkan Standar Hidup Layak dengan memberikan upaya stabilitas harga pangan dan non pangan agar terjangkau masyarakat

Tujuan 2. Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan sasaran “*Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah*”.

Pembangunan inklusif yang dimaksudkan yaitu Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, dan pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya yang dilaksanakan dalam pembangunan inklusif melalui dukungan pemerataan infrastruktur di segala lini ekonomi yang berpotensi mendorong usaha masyarakat khususnya kelas ekonomi menengah kebawah hal ini diyakini akan mengurangi kesenjangan di masyarakat. penciptaan dorongan pada sektor unggulan seperti UMKM, Pertanian dan Pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk dimensi keberlanjutan perlu keseimbangan lingkungan termasuk pengendalian resiko bencana untuk menghindari keterancaman pada sektor produktif ekonomi masyarakat. Strategi pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan

manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Pelaksanaan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berdampak pada penurunan masyarakat miskin, untuk itu perlu di laksanakan oleh berbagai urusan yang saling bersinergi dalam mencapai tujuan.

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan sebuah pertumbuhan harus mampu menciptakan kesempatan ekonomi bagi penduduk miskin, serta memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan. Pendekatan ekonomi inklusif dalam pembangunan merupakan basis pembangunan ekonomi yang diharapkan akan menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta efektif mempercepat penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi inklusif dirumuskan sasaran yaitu meningkatnya produktifitas dan daya saing produk unggulan daerah yang berkelanjutan.

Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk unggulan daerah yang berkelanjutan, diartikan bahwa produktifitas, daya saing dan berkelanjutan menjadi fokus dari Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam membangun produk unggulan tidak lepas dari pembangunan infrastruktur sebagai konektifitas perputaran perekonomian. Makna berkelanjutan di sasaran artinya bahwa pembangunan ekonomi tetap memperhatikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana agar perekonomian tetap stabil.

Tujuan 3. Reformasi Birokrasi yang berprinsip Good Governance untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

dengan sasaran *“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik”*.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis, dimana ujungnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Birokrasi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mereformasi dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat melalui

akuntabilitas kinerja, inovasi daerah, kapasitas ASN, transformasi digital pada layanan publik. Pemerintah Kalimantan Barat berkomitmen kedepan akan lebih efektif dalam menjalankan roda pemerintah dengan mempelajari iklim di mana perubahan amat cepat dan ketidakpastian tinggi, pemerintah yang efektif juga mensyaratkan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi, kemampuan yang membuat institusi pemerintah dapat terus tetap relevan ketika kondisi berubah.

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan pelayanan publik yang berorientasi untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik

Sasaran dari Tujuan ketiga yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang artinya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan kedepan focus pada 3 area: pertama, layanan publik yang inovatif dan berkualitas di pemerintahan, kedua, kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien, ketiga manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.

Secara lengkap tujuan, sasaran beserta indikator dan targetnya per tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja pd Awal Periode RPD	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pd Akhir Periode RPD
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang		Indeks Pembangunan Manusia	68,62		70,98	71,61	72,13	72,13

	Produktif dan Berdaya Saing								
		Terciptanya SDM Yang Berdaya Saing, Berfokus pada Keterjangkauan Pendidikan, Peningkatan Preventif dan Promotif dalam Kesehatan serta Meningkatnya Standar Hidup Layak	- RLS - HLS - UHH - PPP	7,59 12,66 71,02 9.335.000		9,00 12,90 71,50 9.500.000	9,25 13,02 71,60 9.650.000	9,45 13,15 71,75 9.730.000	9,45 13,15 71,75 9.730.000
2	Mewujudkan Perekonomian Yang Inklusif dan Berkelanjutan		- Pertumbuhan Ekonomi - Penurunan GRK	6,48 -		5,82 27,24	6,16 27,62	6,45 27,99	6,45 27,99
		Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	- TPT - Angka Kemiskinan - IKLH - Nilai Penurunan GRK Per Sektor - Indeks Infrastruktur - Indeks Desa Mandiri	5,11 6,73 71,90 - 68,29 586		4,32 6,55 72,59 21,903,95 7,36 74,29 615	3,53 6,37 72,90 22,725,15 4,35 77,00 683	2,78 6,19 73,21 23,554,335 38 80,20 700	2,78 6,19 73,21 23,554,335.3 8 80,20 700
3	Reformasi		Indeks	B		BB	A	A	A

Birokrasi Yang Berprinsip Good Governance Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Reformasi Birokrasi						
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik	- SAKIP - IKM	BB 85,30		A 86,42	A 86,98	A 87,54	A 87,54

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dirumuskan Strategi Pembangunan Daerah. Strategi pembangunan yang dipilih merupakan panduan bagi penyusunan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bab ini berisi uraian tentang Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program prioritas selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

6.1.1. Meningkatkan Akses, Kualitas, dan Kuantitas Pendidikan dan Kesehatan

Maksud dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan di semua jenjang, peningkatan dan pemerataan kualitas belajar mengajar, peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dan pemenuhan sarana prasarana Pendidikan yang didukung dengan tata kelola Pendidikan yang transparan dan akuntabel, serta implementasi transformasi pelayanan Kesehatan yang adaptif dan terintegrasi dengan memfokuskan pada standarisasi fasilitas Kesehatan.

6.1.2. Menciptakan Kestabilan Harga untuk Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat

Maksud dari strategi ini adalah untuk menjaga kestabilan harga pangan yang beredar dimasyarakat, melakukan peningkatan terhadap ketersediaan barang, akses dan distribusi, melakukan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga sehingga harga yang beredar di masyarakat masih dalam kondisi yang stabil dan sesuai dengan daya beli masyarakat.

6.1.3. Penyediaan Infrastruktur Produksi

Maksud dari strategi ini adalah meningkatkan penyediaan infrastruktur produksi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kawasan industri/ekonomi khusus serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan hilisasi industri.

6.1.4. Penguatan dan Pengawasan Investasi

Maksud dari strategi ini adalah untuk meningkatkan iklim investasi di Provinsi Kalimantan Barat, maka penguatan dan pengawasan investasi dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dan insentif, dan peluang kerja sama antara calon investor dan pengusaha local, melalui peran aktif dan kolaboratif pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat.

6.1.5. Menciptakan Akses Pasar

Maksud dari strategi ini adalah menciptakan akses pasar baik lokal, regional maupun internasional, melakukan penguatan jaringan usaha dan distribusi barang baik dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga tercipta sistem perdagangan luas, serta tetap melakukan perlindungan terhadap konsumen dan pasar tradisional.

6.1.6. Pendampingan Pelaku Usaha

Maksud dari strategi ini adalah untuk melakukan pendampingan kelembagaan dan sertifikasi bagi pelaku usaha , serta pemberian bantuan yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha.

6.1.7. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lapangan Usaha Unggulan

Maksud dari Strategi ini adalah meningkatkan hasil produksi (intensifikasi), serta meningkatkan lahan produksi (ekstensifikasi) dari lapangan usaha unggulan (khususnya yang berbasis agraris) yang telah teridentifikasi secara potensial.

6.1.8. Mengembangkan Sistem Pemerintahan yang Dinamis, Adaptif dan Berorientasi pada Pelayanan

Maksud dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kualitas dari sistem pemerintahan yang berorientasi pada kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, serta beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut.

Perumusan Strategi (TB-48)

No.	Masalah	Strategi
1.	Dimensi Ekonomi	Penyediaan Infrastruktur Produktif
		Penguatan Investasi
	Dimensi Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Menciptakan Akses Pasar
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lapangan Usaha Unggulan
2.	Dimensi SDM	Meningkatkan Akses, Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Kesehatan
		Menciptakan Kestabilan Harga untuk Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat
3.	Dimensi Tata Kelola Pemerintahan	Mengembangkan Sistem Pemerintahan yang Dinamis, Adaptif dan Berorientasi pada Pelayanan

Perumusan Program Pembangunan Daerah (TB-51)

No.	Strategi	Program Pembangunan Daerah (Kepmen)	Indikator Kinerja	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1	Penyediaan Infrastruktur Produktif	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan 		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi 		
		Program Penataan Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan 		
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan 		
		Program Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Terselenggara 		
2	Penguatan Investasi	Program Pengembangan Umkm	<ul style="list-style-type: none"> Persentase UMKM yang terdigitalisasi 		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> Nilai kemudahan investasi 		
3	Menciptakan Akses Pasar	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi 		
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga	<ul style="list-style-type: none"> Persentase peserta pelatihan 		

Lapngan Usaha Unggulan	Kerja	kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi		
		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah 		
	Program Pengelolaan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase luas hutan yang dikelola 		
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya 		
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 		
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan • Angka Konsumsi Ikan 		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian 		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik • Persentase 			

			Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik		
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah • Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya 		
5	Meningkatkan Akses, Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) • jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) • Tingkat Penyerapan Lulusan SMK • Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD • Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) • Persentase guru profesiona • Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A • Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) 		

			<p>memenuhi kompetensi minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum 		
		<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi • Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar • Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Indeks Keluarga Sehat (IKS) • Angka Kematian Ibu (AKI) • Angka Kematian Neonatal (AKN) • Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi 		

			<p>Kalimantan Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan • Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD) • persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya • Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 		
		<p>Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Manusia Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan • Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis 		

			<p>Beban Kerja (ABK)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan • Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional 		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif • Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan 		
		Program Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak 		
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk 		

			meningkatkan kualitas keluarga		
		Program Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil 		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan 		
		Program Pembinaan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat • Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk • Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk • Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar • Nilai Tingkat Kegemaran Membaca • Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi 		
6	Menciptakan Kestabilan Harga untuk Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran 		

		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Ketersediaan Pangan 		
7	Mengembangkan Sistem Pemerintahan yang Dinamis, Adaptif dan Berorientasi pada Pelayanan	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu 		
		Program Penataan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi 		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah • Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah 		
		Program Kepegawaian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi • Persentase Pegawai Tugas Belajar yang lulus tepat waktu • Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit • Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit • Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem 		

			Merit <ul style="list-style-type: none">• Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit		
--	--	--	---	--	--

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Adapun Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (gap) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Dalam rangka mendukung pendanaan terhadap rencana program pembangunan selama periode tahun 2024-2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah. Peningkatan kemampuan dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak akan terus ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Disisi lain potensi pajak dari pajak air permukaan juga akan terus didorong utamanya terhadap usaha-usaha yang saat ini telah memanfaatkan air permukaan namun belum teridentifikasi atau tercatat dalam wajib pajak air permukaan. Kemudahan akses dalam pembayaran pajak melalui

penyederhanaan proses serta transformasi keuangan digital akan terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan akses teknologi informasi di Kalimantan Barat.

Sementara itu dalam mendorong kemandirian pembiayaan pelayanan publik utamanya dalam penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendorong peningkatan pendanaan dari BLUD utamanya pada RSUD Dr. Soedarso dan RSJ Provinsi. Hal ini seiring dengan telah meningkatnya fasilitas pelayanan yang dapat diberikan oleh RSUD Dr. Soedarso dan RSJ Provinsi. Selain itu beberapa unit kerja yang mampu memberikan peningkatan pada pendapatan retribusi daerah juga akan terus ditingkatkan. Beberapa laboratorium pengujian akan didorong peningkatan kualitas pengujiannya agar dapat diakses luas oleh masyarakat atau dunia usaha yang tidak hanya melayani pelayanan lingkup regional namun juga mampu melayani pada skala nasional.

Dari sisi Pendapatan Transfer, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya mengoptimalkan sumber pendapatan transfer melalui penyiapan usulan yang sesuai dengan kebutuhan dan selaras dengan prioritas nasional. Disisi lain peningkatan dana bagi hasil sumber daya alam akan terus ditingkatkan melalui penguatan tata kelola data serta pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan potensi daerah Kalimantan Barat yang telah didukung dengan akses infrastruktur yang memadai seperti melalui peningkatan kinerja ekspor atau sumber daya alam dan olahan sumber daya alam yang kinerja ekspornya tercatat melalui pintu ekspor di Kalimantan Barat.

Porsi pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD tentu saja tidak akan mampu memenuhi total kebutuhan pendanaan selama periode 2024-2026, sehingga dibutuhkan akselerasi dari sumber-sumber pendanaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber pendanaan lain yang direncanakan guna mendukung pendanaan pembangunan selama periode 2024-2026 antara lain meliputi, Pendanaan melalui Hibah Luar Negeri, Sinergi Pendanaan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Swasta, BUMD, BUMN dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya melalui skema Kerja Sama Daerah, Skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ Corporate Social Responsibility (CSR).

7.1.1. Sumber Pendanaan melalui Hibah Pemerintah Pusat dan Luar Negeri

7.1.2. Sumber Pendanaan melalui Kerja Sama Daerah

7.1.3. Sumber Pendanaan melalui Skema KPDBU

7.1.4. Sumber Pendanaan melalui Skema TSLDU/CSR

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun penyusunan program perangkat daerah dalam bab ini merujuk pada Nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel Program Perangkat Daerah hanya yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat dan bersifat indikatif.

Tabel Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta target dan pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2024 – 2026 selengkapnya tergambar sebagai berikut

7.2.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Tahapan Rancangan Akhir RPD 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4,167,873,297,174.00		4,342,372,094,299.00		4,683,088,483,955.00		13,193,333,875,428.00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1,710,149,337,983.00		1,725,597,790,783.00		1,762,468,351,783.00		5,198,215,480,549.00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Nilai	BB Nilai	753,580,262,200.00	A Nilai	790,133,715,000.00	A Nilai	830,358,776,000.00	A Nilai	2,374,072,753,200.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB Nilai	0.00	A Nilai	0.00	AA Nilai	0.00	AA Nilai	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C	68,98 %	69,34 %	953,614,075,783.00	69,51 %	932,409,075,783.00	70,22 %	928,950,575,783.00	70,22 %	2,814,973,727,349.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase implementasi sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka	70,00 %	70,00 %	1,800,000,000.00	85,00 %	1,900,000,000.00	100,00 %	2,004,000,000.00	100,00 %	5,704,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia	n/a %	49,77 %	1,020,000,000.00	52,85 %	1,020,000,000.00	54,51 %	1,020,000,000.00	54,51 %	3,060,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	n/a %	85,00 %	135,000,000.00	85,00 %	135,000,000.00	85,00 %	135,000,000.00	85,00 %	405,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,170,449,531,215.00	1,231,746,206,453.00	1,278,091,845,780.00	3,680,287,583,448.00						
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	909,107,158,933.00	BB Nilai	951,339,678,045.00	A Nilai	981,787,834,609.00	A Nilai	2,842,234,671,587.00	DINAS KESEHATAN KALIMANTAN BARAT	PROVINSI
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	DINAS KESEHATAN KALIMANTAN BARAT	PROVINSI
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Nilai Indikator Nasional Mutu (INM)	%	70,000 %	248,438,493,832.00	75,000 %	266,022,804,297.00	80,000 %	280,517,443,414.00	80,000 %	794,978,741,543.00	DINAS KESEHATAN KALIMANTAN BARAT	PROVINSI
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perbekalan Alat Kesehatan dan Teknologi Kesehatan	65,000 %	70,000 %	0.00	75,000 %	0.00	80,000 %	0.00	80,000 %	0.00	DINAS KESEHATAN KALIMANTAN BARAT	PROVINSI
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinya	60 %	70 %	11,484,683,850.00	75 %	12,870,374,411.00	80 %	14,333,218,057.00	225 %	38,688,276,318.00	DINAS KESEHATAN KALIMANTAN BARAT	PROVINSI
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tersertifikasi	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	DINAS KESEHATAN KALIMANTAN BARAT	PROVINSI
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Produksi Distribusi Kefarmasian dan Makanan Minuman sesuai standar	82 %	84 %	212,034,500.00	86 %	293,189,600.00	88 %	218,189,600.00	258 %	723,413,700.00	DINAS KESEHATAN KALIMANTAN BARAT	PROVINSI
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan UKBM	%	14 %	1,207,160,100.00	28 %	1,220,160,100.00	42 %	1,235,160,100.00	84 %	3,662,480,300.00	DINAS KESEHATAN KALIMANTAN BARAT	PROVINSI
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			842,574,885,528.00	924,179,441,548.00	1,140,395,478,951.00	2,907,149,806,027.00						
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	CC Nilai	CC Nilai	27,639,936,200.00	CC Nilai	28,702,076,200.00	CC Nilai	29,771,576,200.00	0 Nilai	86,113,588,600.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KALIMANTAN BARAT	PROVINSI

		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	0 Nilai	0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan / Pemeliharaan Sungai sebagai Pengendalian Banjir	%	53,280 %	30,897,920,200.00	53,400 %	35,134,450,520.00	53,520 %	38,505,905,072.00	0 %	104,538,275,792.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Irigasi Provinsi dalam Kondisi Baik	%	62,040 %	0.00	63,140 %	0.00	64,440 %	0.00	0 %	0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum	%	0,500 %	82,450,000,000.00	1,000 %	72,000,000,000.00	1,700 %	182,050,000,000.00	0 %	336,500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Persampahan Sesuai Standar	%	0,500 %	3,500,000,000.00	1,100 %	14,000,000,000.00	1,700 %	14,050,000,000.00	0 %	31,550,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Sesuai Standar	%	0,500 %	71,950,000,000.00	1,100 %	72,000,000,000.00	1,700 %	72,050,000,000.00	0 %	216,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota	%	0,500 %	13,950,000,000.00	1,100 %	17,000,000,000.00	1,700 %	17,050,000,000.00	0 %	48,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Kecamatan yang dikembangkan/tingkatkan kualitas kawasan permukiman di Kawasan Strategis Provinsi	Kecamatan	Kecamatan	0.00	Kecamatan	0.00	Kecamatan	0.00	0 Kecamatan	0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah luasan bangunan gedung yang dibangun dan ditata	M2	4674,540 M2	30,384,481,868.00	4952,400 M2	32,190,630,780.00	5246,950 M2	34,105,148,627.00	0 M2	96,680,261,275.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Luasan Kawasan yang dibangun dan ditata	M2	14079,840 M2	91,518,948,800.00	14967,860 M2	97,291,085,728.00	15774,470 M2	102,534,050,872.00	0 M2	291,344,085,400.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Kondisi Jalan Mantap	%	83,000 %	486,640,000,000.00	86,000 %	552,250,000,000.00	89,000 %	646,550,000,000.00	89,000 %	1,685,440,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	73,370 %	100,000 %	1,293,598,460.00	100,000 %	1,411,198,320.00	100,000 %	1,528,798,180.00	0 %	4,233,594,960.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan terhadap Pembangunan dengan RTRW	%	100,000 %	2,350,000,000.00	100,000 %	2,200,000,000.00	100,000 %	2,200,000,000.00	0 %	6,750,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN KAWASAN PERMUKIMAN				349,922,445,720.00		361,525,445,720.00		398,042,445,720.00		1,109,490,337,160.00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	13,022,907,020.00	A Nilai	13,280,907,020.00	AA Nilai	13,552,907,020.00	240 Nilai	39,856,721,060.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	A Nilai	0.00	AA Nilai	0.00	AA Nilai	0.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi Program pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani	100,000 %	100,000 %	7,670,000,000.00	100,000 %	8,010,000,000.00	100,000 %	8,250,000,000.00	100,000 %	23,930,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dalam Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	33,000 %	33,000 %	9,229,538,700.00	66,000 %	10,234,538,700.00	100,000 %	11,239,538,700.00	100,000 %	30,703,616,100.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Ketersediaan PSU di pusat kegiatan lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat	14,000 kabupaten/kota	14,000 kabupaten/kota	320,000,000,000.00	14,000 kabupaten/kota	330,000,000,000.00	14,000 kabupaten/kota	365,000,000,000.00	14,000 kabupaten/kota	1,015,000,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				40,382,976,648.00		41,534,776,902.00		43,568,216,017.00		125,485,969,567.00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	29,764,640,000.00	B Nilai	30,715,040,000.00	BB Nilai	31,868,244,000.00	190 Nilai	92,347,924,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	0.00	B Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase tingkat penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100,000 %	100,000 %	3,818,336,648.00	100,000 %	4,249,736,902.00	100,000 %	4,729,972,017.00	100,000 %	12,798,045,567.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase penanganan pelanggaran perda dan perkada yang diselesaikan	100,000 %	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Presentase peningkatan pembinaan masyarakat di Kalbar	100,000 %	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Presentase cakupan Satlinmas di Kalbar	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	INDEKS PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	N,A poin	0,440 poin	5,210,000,000.00	0,440 poin	4,825,000,000.00	0,450 poin	5,270,000,000.00	0,450 poin	15,305,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	INDEKS PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	N,A poin	0,520 poin	0.00	0,520 poin	0.00	0,530 poin	0.00	0,530 poin	0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		PERSENTASE LAYANAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	N/A %	100 %	1,590,000,000.00	100 %	1,745,000,000.00	100 %	1,700,000,000.00	100 %	5,035,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				54,394,120,080.00		57,788,432,893.00		60,522,145,704.00		172,704,698,677.00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	42,962,320,931.00	BB Nilai	45,338,173,835.00	A Nilai	47,614,146,837.00	A Nilai	135,914,641,603.00	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan masyarakat (lingkup PSKS) kewenangan provinsi	100 %	100 %	669,000,000.00	100 %	689,000,000.00	100 %	703,800,000.00	100 %	2,061,800,000.00	DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Cakupan layanan penanganan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan	100 %	100 %	349,000,000.00	100 %	350,000,000.00	100 %	350,000,000.00	100 %	1,049,000,000.00	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Klien PPKS Kewenangan Provinsi	100 %	100 %	6,484,799,149.00	100 %	7,472,259,058.00	100 %	7,858,198,867.00	100 %	21,815,257,074.00	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan	90 %	90 %	1,628,000,000.00	92 %	1,638,000,000.00	95 %	1,695,000,000.00	95 %	4,961,000,000.00	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial di Pengungsian Yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	100 %	2,001,000,000.00	100 %	2,001,000,000.00	100 %	2,001,000,000.00	100 %	6,003,000,000.00	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Cakupan layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100 %	100 %	300,000,000.00	100 %	300,000,000.00	100 %	300,000,000.00	100 %	900,000,000.00	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				344,141,318,292.00		354,071,329,571.00		403,934,458,086.00		1,102,147,105,949.00	

2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			37,376,605,160.00	41,269,575,708.00	45,644,878,821.00	124,291,059,689.00					
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	27,961,880,000.00	BB Nilai	30,678,633,000.00	A Nilai	33,618,053,300.00	A Nilai	92,258,566,300.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai IKM Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen	1,000 Dokumen	178,000,000.00	1,000 Dokumen	194,000,000.00	1,000 Dokumen	199,000,000.00	0 Dokumen	571,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja terlatih	Orang	1715,000 Orang	3,879,000,000.00	1731,000 Orang	4,109,000,000.00	1747,000 Orang	4,397,000,000.00	0 Orang	12,385,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Jumlah tenaga kerja terlatih	96 Orang	320 Orang	0.00	480 Orang	0.00	640 Orang	0.00	1.440 Orang	0.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	6011,000 Orang	6100,000 Orang	1,147,000,000.00	6150,000 Orang	1,245,000,000.00	6220,000 Orang	1,349,000,000.00	6220,000 Orang	3,741,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja	80,000 %	80,000 %	1,070,000,000.00	83,000 %	1,150,000,000.00	85,000 %	1,230,000,000.00	85,000 %	3,450,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang dilakukan pembinaan, Pemeriksaan, Pengujian dan Penegakan hukum terhadap norma K3	%	12,930 %	3,140,725,160.00	13,320 %	3,892,942,708.00	13,720 %	4,851,825,521.00	13,720 %	11,885,493,389.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Jumlah P4 yang dilakukan pada perusahaan	1.940 Dokumen	2.247 Dokumen	0.00	2.554 Dokumen	0.00	2.860 Dokumen	0.00	2.860 Dokumen	0.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				17,728,855,668.00		18,564,547,830.00		19,415,738,154.00		55,709,141,652.00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	11,632,016,284.00	BB Nilai	11,969,213,207.00	BB Nilai	12,333,756,408.00	BB Nilai	35,934,985,899.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase perangkat Daerah yang melaksanakan PUG	70,000 %	80,000 %	258,209,600.00	90,000 %	273,530,560.00	100,000 %	292,783,616.00	0 %	824,523,776.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memperoleh Layanan Sesuai Standar	100,000 %	100,000 %	2,022,097,564.00	100,000 %	2,134,043,621.00	100,000 %	2,256,281,643.00	0 %	6,412,422,828.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga	25% %	30% %	386,691,360.00	35% %	414,935,496.00	40% %	382,639,046.00	0 %	1,184,265,902.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	51% %	55% %	0.00	60% %	0.00	65% %	0.00	0 %	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.08.06		Persentase Perangkat Daerah Tingkat Provinsi yang Memiliki Data Gender dan Anak serta Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kewenangan Provinsi	65% %	75% %	222,318,140.00	85% %	244,549,954.00	97% %	269,004,950.00	97% %	735,873,044.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.08.07	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100% %	100% %	1,027,400,000.00	100% %	1,130,140,000.00	100% %	1,243,054,000.00	100% %	3,400,594,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang terlayani sesuai dengan standar dan keterlibatan pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam mencegah kekerasan terhadap anak	100% %	100% %	2,180,122,720.00	100% %	2,398,134,992.00	100% %	2,638,218,491.00	100% %	7,216,476,203.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	300 %	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				22,384,635,246.00		21,131,530,881.00		21,533,605,611.00		65,049,771,738.00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	11,304,421,396.00	BB Nilai	9,133,612,649.00	A Nilai	9,084,462,649.00	210 Nilai	29,522,496,694.00	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	240 Nilai	0.00	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK	Indeks Ketersediaan Pangan Provinsi	80,000 Nilai	76,200 Nilai	2,230,000,000.00	76,350 Nilai	2,345,000,000.00	76,520 Nilai	2,460,000,000.00	0 Nilai	7,035,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

	KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN											
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Ketersediaan Pangan (kalori & Protein)	80,51 Gram/Kapita/Hari	63,000 Gram/Kapita/Hari	6,734,858,250.00	63,000 Gram/Kapita/Hari	7,414,788,332.00	63,000 Gram/Kapita/Hari	7,612,502,262.00	0 Gram/Kapita/Hari	21,762,148,844.00	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persen Penurunan Kecamatan status rentan rawan pangan	%	19,1 %	380,000,000.00	19,1 %	430,000,000.00	18,5 %	500,000,000.00	56,7 %	1,310,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan dan mutu PSAT	90 %	92 %	1,735,355,600.00	94 %	1,808,129,900.00	96 %	1,876,640,700.00	282 %	5,420,126,200.00	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1,815,000,000.00		1,996,500,000.00		2,196,150,000.00		6,007,650,000.00	
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan bagi untuk Kepentingan Umum	100 %	100 %	475,000,000.00	100 %	522,500,000.00	100 %	574,750,000.00	100 %	1,572,250,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	100 %	345,000,000.00	100 %	379,500,000.00	100 %	417,450,000.00	100 %	1,141,950,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Fasilitasi Penetapan Obyek dan Subyek Redistribusi Tanah	100 %	100 %	335,000,000.00	100 %	368,500,000.00	100 %	405,350,000.00	100 %	1,108,850,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Fasilitasi Survey dan Pemetaan Tanah Ulayat Lintas Kabupaten / Kota	100 %	100 %	165,000,000.00	100 %	181,500,000.00	100 %	199,650,000.00	100 %	546,150,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Fasilitasi Perencanaan penggunaan Tanah yang hamparannya Lintas Daerah Kabupaten / Kota.	100 %	100 %	495,000,000.00	100 %	544,500,000.00	100 %	598,950,000.00	100 %	1,638,450,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				56,627,794,129.00		58,272,704,876.00		88,532,673,845.00		203,433,172,850.00	

2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	53,515,516,205.00	BB Nilai	55,022,699,160.00	BB Nilai	85,043,167,557.00	BB Nilai	193,581,382,922.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT						
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Presentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan (RPJP, RPJM, KRP) dengan RPPLH dan KLHS	20 %	30 %	485,000,000.00	40 %	410,000,000.00	50 %	451,000,000.00	50 %	1,346,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Uji Kualitas Lingkungan Hidup dan Inventarisasi GRK tingkat provinsi	28,57 %	35,71 %	950,230,855.00	35,71 %	1,045,253,941.00	35,71 %	1,149,779,335.00	35,71 %	3,145,264,131.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Ketaatan Unit Pengumpulan Limbah B3 Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	100 %	100 %	322,890,660.00	100 %	355,179,726.00	100 %	390,697,699.00	100 %	1,068,768,085.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Penanggungjawab Usaha kewenangan provinsi yang mematuhi peraturan perundang-undangan bidang LH (persen)	79,63 %	80 %	250,000,000.00	81 %	275,000,000.00	82 %	300,000,000.00	82 %	825,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat pengetahuan/ keterampilan/ pelatihan (persen)	41,94 %	43,55 %	100,000,000.00	45,16 %	100,000,000.00	46,77 %	100,000,000.00	46,77 %	300,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi (persen)	6,67 %	7 %	300,000,000.00	8 %	330,000,000.00	9 %	330,000,000.00	9 %	960,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup yang ditangani (persen)	100 %	100 %	400,000,000.00	100 %	400,000,000.00	100 %	400,000,000.00	100 %	1,200,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah pelaporan Pelaksanaan Penanganan Sampah Kab/kota	%	43 %	304,156,409.00	43 %	334,572,049.00	43 %	368,029,254.00	43 %	1,006,757,712.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				13,705,981,708.00		15,384,689,632.00		17,141,373,106.00		46,232,044,446.00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	9,520,922,907.00	BB Nilai	10,474,815,197.00	BB Nilai	11,523,296,717.00	BB Nilai	31,519,034,821.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT						
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP-el	97.03 %	99,5 %	829,581,950.00	99,6 %	931,549,900.00	99,7 %	1,018,539,400.00	99,7 %	2,779,671,250.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Pencetakan KIA	44,31 %	55 %	0.00	60 %	0.00	65 %	0.00	65 %	0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	98 %	98 %	1,155,000,000.00	99 %	1,281,000,000.00	100 %	1,413,500,000.00	100 %	3,849,500,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	45 %	50 %	0.00	55 %	0.00	60 %	0.00	60 %	0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	50 %	55 %	0.00	60 %	0.00	65 %	0.00	65 %	0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Capaian Data Kependudukan yang Akurat dan Valid	92 %	100 %	1,925,476,851.00	100 %	2,372,324,535.00	100 %	2,811,036,989.00	100 %	7,108,838,375.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Provinsi dan Kab/Kota di Kalbar	80 %	85 %	0.00	88 %	0.00	90 %	0.00	90 %	0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Capaian Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	100 %	275,000,000.00	100 %	325,000,000.00	100 %	375,000,000.00	100 %	975,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				21,725,513,080.00		23,187,264,388.00		24,796,490,828.00		69,709,268,296.00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	10,028,000,000.00	BB Nilai	10,295,000,000.00	BB Nilai	10,657,000,000.00	BB Nilai	30,980,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT						
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Meningkatnya penataan Desa	100 %	100 %	2,250,000,000.00	100 %	2,500,000,000.00	100 %	2,750,000,000.00	100 %	7,500,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa yang terimplementasi	100 %	100 %	1,500,000,000.00	100 %	1,650,000,000.00	100 %	1,800,000,000.00	100 %	4,950,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Yang Akutabel	100 %	100 %	2,072,749,080.00	100 %	2,280,023,988.00	100 %	2,481,026,388.00	100 %	6,833,799,456.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	100 %	100 %	5,874,764,000.00	100 %	6,462,240,400.00	100 %	7,108,464,440.00	100 %	19,445,468,840.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				34,287,543,300.00		29,023,843,300.00		29,678,223,800.00		92,989,610,400.00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	B Nilai	BB Nilai	22,478,043,300.00	A Nilai	17,051,593,300.00	A Nilai	16,510,746,300.00	230 Nilai	56,040,382,900.00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Layanan Jaringan Transportasi Jalan	73,000 %	77,5 %	10,185,000,000.00	81,5 %	10,596,000,000.00	85,5 %	11,152,102,500.00	0 %	31,933,102,500.00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Prosentase Pemenuhan Fasilitas Pada Simpul Jaringan Transportasi Jalan	71,000 %	76,000 %	0.00	81,000 %	0.00	86,000 %	0.00	86,000 %	0.00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase Layanan Jaringan Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	36,000 %	71,000 %	1,624,500,000.00	89,000 %	1,376,250,000.00	100,000 %	2,015,375,000.00	100,000 %	5,016,125,000.00	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				30,574,748,280.00		32,355,340,569.00		33,905,147,959.00		96,835,236,808.00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	12,993,823,280.00	BB Nilai	13,667,869,319.00	BB Nilai	14,381,053,146.00	210 Nilai	41,042,745,745.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	210 Nilai	0.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Presentase OPd dengan zona hijau/nilai 85-100	90,91 %	95,35 %	5,031,325,000.00	97,67 %	5,510,391,250.00	100 %	5,688,160,813.00	293,02 %	16,229,877,063.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Media Komunikasi Publik yang dikelola oleh OPD	60,87 %	85,17 %	0.00	92,57 %	0.00	100 %	0.00	277,74 %	0.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Total Bobot Domain Evaluasi SPBE	65,2 %	66,4 %	12,549,600,000.00	67 %	13,177,080,000.00	67,6 %	13,835,934,000.00	201 %	39,562,614,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				18,510,300,000.00		19,435,813,000.00		20,407,604,000.00		58,353,717,000.00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	12,028,034,000.00	A Nilai	12,629,433,000.00	A Nilai	13,260,905,000.00	A Nilai	37,918,372,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase koperasi simpan pinjam/unit simpan yang memiliki ijin usaha	%	92,73 %	183,912,000.00	93,1 %	193,107,000.00	93,44 %	202,762,000.00	93,44 %	579,781,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi	%	8,5 %	378,504,000.00	9 %	397,430,000.00	9,5 %	417,301,000.00	9,5 %	1,193,235,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	25 %	25,5 %	183,801,000.00	26 %	192,991,000.00	26,5 %	202,640,000.00	26,5 %	579,432,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya	95,24 %	95,56 %	2,131,254,000.00	96,11 %	2,237,817,000.00	96,67 %	2,349,708,000.00	96,67 %	6,718,779,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Volume Usaha Koperasi	Rp	6 T Rp	1,208,456,000.00	6,01 T Rp	1,268,878,000.00	6,02 T Rp	1,332,323,000.00	6,02 T Rp	3,809,657,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Pertumbuhan UMKM	NA %	0,29 %	865,914,000.00	0,29 %	909,210,000.00	0,3 %	954,671,000.00	0,3 %	2,729,795,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor	%	0,94 %	1,530,425,000.00	0,98 %	1,606,947,000.00	1,05 %	1,687,294,000.00	1,05 %	4,824,666,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				15,957,601,383.00		17,476,277,521.00		19,137,498,274.00		52,571,377,178.00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	13,297,250,000.00	A Nilai	14,582,890,000.00	A Nilai	15,995,470,000.00	240 Nilai	43,875,610,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	240 Nilai	0.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	100 %	674,890,000.00	100 %	742,380,000.00	100 %	816,620,000.00	300 %	2,233,890,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	529,010,460.00	1 Dokumen	581,911,506.00	1 Dokumen	640,102,657.00	3 Dokumen	1,751,024,623.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diproses sesuai SOP	%	100 %	856,450,923.00	100 %	942,096,015.00	100 %	1,036,305,617.00	100 %	2,834,852,555.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan usaha yang dilakukan pengendalian pelaksanaan PM	Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	450,000,000.00	20 Kegiatan Usaha	472,000,000.00	20 Kegiatan Usaha	489,000,000.00	60 Kegiatan Usaha	1,411,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Jumlah Kegiatan usaha yang dilakukan pengendalian pelaksanaan PM	Pelaku Usaha	34 Pelaku Usaha	0.00	34 Pelaku Usaha	0.00	34 Pelaku Usaha	0.00	102 Pelaku Usaha	0.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dokumen Perizinan Berusaha dan Realisasi Investasi	Dokumen	4 Dokumen	150,000,000.00	4 Dokumen	155,000,000.00	4 Dokumen	160,000,000.00	12 Dokumen	465,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				37,539,272,390.00		39,764,442,900.00		42,386,699,000.00		119,690,414,290.00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	19,607,500,000.00	A Nilai	20,316,250,000.00	A Nilai	21,382,562,500.00	240 Nilai	61,306,312,500.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,33 Nilai	88,5 Nilai	0.00	89 Nilai	0.00	89,5 Nilai	0.00	89,5 Nilai	0.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	B Nilai	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	240 Nilai	0.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Dibina	Orang	2.763 Orang	1,997,945,000.00	3.039 Orang	2,106,400,000.00	3.342 Orang	2,234,800,000.00	3.342 Orang	6,339,145,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	56 Medali	58 Medali	14,491,827,390.00	18 Medali	15,335,417,900.00	20 Medali	16,196,142,750.00	20 Medali	46,023,388,040.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan (kwarda) yang Aktif	N/A Aduan	100 Aduan	1,442,000,000.00	100 Aduan	2,006,375,000.00	100 Aduan	2,573,193,750.00	300 Aduan	6,021,568,750.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				718,986,186.00		754,935,496.00		792,682,271.00		2,266,603,953.00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang telah mengintegrasikan Data Statistik Sektoral	%	79 %	718,986,186.00	85 %	754,935,496.00	100 %	792,682,271.00	264 %	2,266,603,953.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				680,591,762.00		714,621,350.00		750,352,417.00		2,145,565,529.00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Status Kesiapan Keamanan Informasi : - Baik - Cukup Baik - Pemenuhan Kerangka Dasar - Tidak Layak	55,5 %	65 %	680,591,762.00	70 %	714,621,350.00	80 %	750,352,417.00	215 %	2,145,565,529.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				12,596,000,000.00		13,071,000,000.00		13,146,000,000.00		38,813,000,000.00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang di Kembangkan	n/a Objek	19 Objek	6,525,000,000.00	19 Objek	7,000,000,000.00	19 Objek	7,375,000,000.00	19 Objek	20,900,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah lembaga seni tradisi yang dikembangkan	n/a Objek	14 Objek	350,000,000.00	14 Objek	350,000,000.00	14 Objek	350,000,000.00	14 Objek	1,050,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	n/a Objek	15 Objek	846,000,000.00	15 Objek	846,000,000.00	15 Objek	846,000,000.00	15 Objek	2,538,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengunjungi museum	n/a %	1 %	4,875,000,000.00	1,2 %	4,875,000,000.00	1,3 %	4,575,000,000.00	1,3 %	14,325,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3,265,250,000.00		3,773,500,000.00		4,635,200,000.00		11,673,950,000.00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Perpustakaan	130 Perpustakaan	2,986,000,000.00	142 Perpustakaan	3,449,000,000.00	155 Perpustakaan	4,278,000,000.00	427 Perpustakaan	10,713,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi Daerah yang dilestarikan	45.371 Eksemplar	45.418 Eksemplar	279,250,000.00	45.668 Eksemplar	324,500,000.00	45.968 Eksemplar	357,200,000.00	137.054 Eksemplar	960,950,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				18,646,640,000.00		17,894,742,120.00		19,834,140,000.00		56,375,522,120.00	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	B Indeks	B Indeks	16,801,140,000.00	B Indeks	15,936,240,000.00	BB Indeks	17,510,640,000.00	BB Indeks	50,248,020,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,95 Nilai	74,000 Nilai	0.00	74,500 Nilai	0.00	74,750 Nilai	0.00	74,750 Nilai	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,40 Nilai	87,900 Nilai	0.00	88,400 Nilai	0.00	88,900 Nilai	0.00	88,900 Nilai	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Pengawasan Kearsipan LKD Provinsi	68,040 Nilai	68,100 Nilai	1,320,500,000.00	68,180 Nilai	1,428,502,120.00	68,260 Nilai	1,753,500,000.00	68,260 Nilai	4,502,502,120.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Jumlah Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan	50749,000 Arsip	51249,000 Arsip	0.00	51749,000 Arsip	0.00	52249,000 Arsip	0.00	0 Arsip	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah Provinsi	Persentase	42,500 Persentase	0.00	43,000 Persentase	0.00	43,500 Persentase	0.00	43,500 Persentase	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	44,500 Persentase	45,000 Persentase	0.00	45,500 Persentase	0.00	46,000 Persentase	0.00	46,000 Persentase	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip Daerah yang diselamatkan	500,000 Arsip	800,000 Arsip	465,000,000.00	900,000 Arsip	490,000,000.00	1000,000 Arsip	500,000,000.00	0 Arsip	1,455,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Arsip	Indeks	87,900 Indeks	60,000,000.00	88,400 Indeks	40,000,000.00	88,90 Indeks	70,000,000.00	88,90 Indeks	170,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				341,850,903,695.00		357,657,956,886.00		367,757,274,854.00		1,067,266,135,435.00	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				48,527,244,068.00		49,565,188,884.00		57,545,139,868.00		155,637,572,820.00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	A Nilai	BB Nilai	27,262,148,262.00	BB Nilai	27,847,891,237.00	BB Nilai	35,412,296,231.00	BB Nilai	90,522,335,730.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	BB Nilai	0.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT						

3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Kawasan Ruang Laut Dan Konservasi Yang Dikelola	60 %	62 %	1,349,822,126.00	64 %	1,376,818,568.00	66 %	1,404,354,941.00	66 %	4,130,995,635.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di berdayakan	43,2 %	49 %	0.00	55 %	0.00	60 %	0.00	60 %	0.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	172.149,3 Ton	174.000 Ton	13,228,331,294.00	175.000 Ton	13,513,897,920.00	176.000 Ton	13,760,075,878.00	176.000 Ton	40,502,305,092.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan budidaya	88.387,33 Ton	88.500 Ton	4,221,220,631.00	89.000 Ton	4,311,545,033.00	89.500 Ton	4,403,075,945.00	89.500 Ton	12,935,841,609.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan terhadap ketentuan peraturan dan per Undang-Undangan yang berlaku	55,07 %	58 %	1,387,285,700.00	60 %	1,415,031,350.00	62 %	1,443,332,000.00	62 %	4,245,649,050.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	26.773,57 Ton	27.311,72 Ton	1,078,436,055.00	27.584,84 Ton	1,100,004,776.00	27.860,68 Ton	1,122,004,873.00	82.757,24 Ton	3,300,445,704.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	51,91 Kg/KAP/TH	0.00	52,43 Kg/KAP/TH	0.00	52,96 Kg/KAP/TH	0.00	52,96 Kg/KAP/TH	0.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				8,630,000,000.00		8,990,000,000.00		9,255,000,000.00		26,875,000,000.00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang ditingkatkan	Destinasi	23,000 Destinasi	1,780,000,000.00	25,000 Destinasi	1,950,000,000.00	26,000 Destinasi	2,020,000,000.00	26,000 Destinasi	5,750,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				5,015,000,000.00		5,045,000,000.00		5,080,000,000.00		15,140,000,000.00	0.00

3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina	n/a Orang	180 Orang	1,115,000,000.00	180 Orang	1,225,000,000.00	180 Orang	1,335,000,000.00	540 Orang	3,675,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pengembangan Sumber Daya	Orang	210,000 Orang	720,000,000.00	210,000 Orang	770,000,000.00	210,000 Orang	820,000,000.00	0 Orang	2,310,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				190,199,376,776.00		195,129,889,255.00		201,173,355,991.00		586,502,622,022.00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	79,393,960,509.00	BB Nilai	81,842,923,020.00	A Nilai	84,622,963,225.00	220 Nilai	245,859,846,755.00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai IKM	Nilai	83 Nilai	0.00	83 Nilai	0.00	84 Nilai	0.00	84 Nilai	0.00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Padi	Kuintal/Ha	30,44 Kuintal/Ha	82,959,053,665.00	30,94 Kuintal/Ha	83,796,399,244.00	31,44 Kuintal/Ha	84,885,724,807.00	31,44 Kuintal/Ha	251,641,177,716.00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Presentase peningkatan penyediaan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu	%	5 %	0.00	5 %	0.00	5 %	0.00	5 %	0.00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		Rata - Rata Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	NA %	12,49 %	0.00	12,74 %	0.00	13 %	0.00	13 %	0.00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Produktivitas Komoditi Perkebunan	Kg/Ha/Tahun	5.999.820 Kg/Ha/Tahun	0.00	6.450.802 Kg/Ha/Tahun	0.00	7.095.882 Kg/Ha/Tahun	0.00	19.546.504 Kg/Ha/Tahun	0.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Populasi Ternak	Ekor	50.908.525 Ekor	0.00	51.038.655 Ekor	0.00	51.063.125 Ekor	0.00	153.010.305 Ekor	0.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Peningkatan Benih Tanaman Perkebunan Bersertifikat	Persentase	85 Persentase	0.00	86 Persentase	0.00	87 Persentase	0.00	258 Persentase	0.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rata - Rata Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	NA %	2,94 %	18,872,842,789.00	3 %	19,462,484,928.00	3,06 %	20,294,859,175.00	3,06 %	58,630,186,892.00	0.00
		Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan kawasan komoditas tanaman pangan dan hortikultura	%	1 %	0.00	1 %	0.00	1 %	0.00	1 %	0.00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Daerah Terkendali PHM/Zoonosa dan Penyakit Hewan Ekstotik Lainnya	%	76 %	2,287,011,323.00	78 %	2,724,146,647.00	80 %	3,246,683,356.00	234 %	8,257,841,326.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	47,6 %	47,6 %	0.00	49,6 %	0.00	51,6 %	0.00	148,8 %	0.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		Persentase Peningkatan Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta pelayanan Keswan	5 %	5 %	0.00	5 %	0.00	5 %	0.00	15 %	0.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Peningkatan Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Pelayanan Keswan	5 %	5 %	0.00	5 %	0.00	5 %	0.00	15 %	0.00	UPT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT dan area terdampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan dan di tangani	n/a Persentase	90 Persentase	1,497,000,000.00	91 Persentase	1,781,000,000.00	92 Persentase	2,129,500,000.00	92 Persentase	5,407,500,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan	5 %	5 %	905,634,700.00	5 %	1,091,866,435.00	5 %	1,398,000,000.00	5 %	3,395,501,135.00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Jenis Usaha dengan Penerapan GFP Peternakan	Jenis	1 Jenis	0.00	2 Jenis	0.00	4 Jenis	0.00	7 Jenis	0.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Jumlah Unit Usaha Perkebunan Yang Mendapatkan Sertifikasi Berkelanjutan	Unit	5 Unit	0.00	25 Unit	0.00	35 Unit	0.00	65 Unit	0.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Jumlah Unit Usaha Peternakan Yang Mendapatkan Izin Usaha	10 Unit	10 Unit	0.00	10 Unit	0.00	10 Unit	0.00	30 Unit	0.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Peningkatan unit usaha produksi benih perkebunan	15 Persentase	8 Persentase	0.00	8 Persentase	0.00	8 Persentase	0.00	24 Persentase	0.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani	NA %	2,5 %	4,283,873,790.00	3,5 %	4,431,068,980.00	7 %	4,595,625,428.00	7 %	13,310,568,198.00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Wilayah Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan Yang Berizin	%	70 %	0.00	70 %	0.00	70 %	0.00	210 %	0.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Jumlah SDM Peternakan Yang Mendapatkan Pendampingan	Orang	26 Orang	0.00	26 Orang	0.00	26 Orang	0.00	78 Orang	0.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Jumlah SDM Perkebunan Yang Mendapatkan Pendampingan	48 Orang	48 Orang	0.00	48 Orang	0.00	48 Orang	0.00	144 Orang	0.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				53,468,513,967.00		52,773,169,826.00		56,719,185,458.00		162,960,869,251.00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	15,687,598,980.00	BB Nilai	14,397,842,780.00	A Nilai	15,450,794,780.00	A Nilai	45,536,236,540.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan oleh KPH (%)	85 %	86 %	32,242,330,887.00	88 %	32,733,664,926.00	89 %	35,186,072,286.00	89 %	100,162,068,099.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Peningkatan Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentasi Luasan Kawasan TAHURA yang dikelola	Ha	3.923 Ha	850,000,000.00	3.923 Ha	815,000,000.00	3.923 Ha	880,000,000.00	3.923 Ha	2,545,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan sumber daya hutan	%	85 %	3,938,584,100.00	85 %	4,076,662,120.00	85 %	4,452,318,392.00	85 %	12,467,564,612.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Pengelolaan kegiatan pada Daerah Aliran Sungai lintas daerah kab/kota	%	3,7 %	750,000,000.00	3,7 %	750,000,000.00	7,41 %	750,000,000.00	7,41 %	2,250,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				25,478,161,884.00		26,946,468,321.00		28,257,250,537.00		80,681,880,742.00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	21,501,661,884.00	BB Nilai	22,520,968,321.00	BB Nilai	23,478,550,537.00	BB Nilai	67,501,180,742.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,000 %	94,000 %	0.00	94,500 %	0.00	95,000 %	0.00	95,000 %	0.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	cekungan air tanah yang dikelola	n/a Zona	2,000 Zona	410,000,000.00	2,000 Zona	505,000,000.00	2,000 Zona	610,000,000.00	2,000 Zona	1,525,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	jumlah penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan (DBH)	170 miliar Rp	450 miliar Rp	980,000,000.00	600 miliar Rp	1,170,000,000.00	750 miliar Rp	1,320,000,000.00	0 Rp	3,470,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah Potensi Bahan Bakar Nabati di Kalimantan Barat	n/a TOE	35,200 TOE	100,000,000.00	38,400 TOE	110,000,000.00	41,600 TOE	125,000,000.00	41,600 TOE	335,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Badan Usaha Sektor Ketenagalistrikan yang Diawasi Dibanding Total Badan Usaha Kelistrikan yang Berizin	n/a %	15,000 %	2,486,500,000.00	20,000 %	2,640,500,000.00	25,000 %	2,723,700,000.00	25,000 %	7,850,700,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Rasio elektrifikasi /Persentase badan usaha sektor ketenagalistrikan yang diawasi)	n/a %	99,7/15 %	0.00	99,75/20 %	0.00	99,8/25 %	0.00	0 %	0.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				12,025,120,000.00		20,509,820,000.00		10,765,520,000.00		43,300,460,000.00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7,053,120,000.00		15,016,420,000.00		4,768,420,000.00		26,837,960,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan non perizinan yang difasilitasi	%	100,000 %	100,000,000.00	100,000 %	105,000,000.00	100,000 %	110,000,000.00	100,000 %	315,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	persentase rata-rata kinerja realisasi pupuk bersubsidi yang diawasi terhadap alokasi pupuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian	81,4 %	81,5 %	2,140,000,000.00	81,6 %	2,375,000,000.00	81,7 %	2,590,000,000.00	81,7 %	7,105,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (disparitas)	%	7-5 %	0.00	6-4 %	0.00	5-3 %	0.00	5-3 %	0.00	DINAS PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PERINDUSTRIAN,
		nilai ekspor	2455 juta USD	2500 juta USD	1,000,000,000.00	2600 juta USD	1,045,000,000.00	2700 juta USD	1,075,000,000.00	2700 juta USD	3,120,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PERINDUSTRIAN,
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Permohonan Pelayanan yang Difasilitasi	100,000 %	100,000 %	1,682,000,000.00	100,000 %	1,913,400,000.00	100,000 %	2,162,100,000.00	100,000 %	5,757,500,000.00	DINAS PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PERINDUSTRIAN,
		Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	51,000 Nilai	0.00	52,000 Nilai	0.00	53,000 Nilai	0.00	53,000 Nilai	0.00	DINAS PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PERINDUSTRIAN,
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan PDN dalam belanja pemerintah daerah	%	10,000 %	50,000,000.00	15,000 %	55,000,000.00	20,000 %	60,000,000.00	20,000 %	165,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PERINDUSTRIAN,
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2,754,487,000.00		2,892,211,000.00		3,036,823,000.00		8,683,521,000.00		
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	kontribusi industri unggulan RPIP dalam PDRB	22.728 miliar Rp	24,627 miliar Rp	2,277,024,000.00	25,268 miliar Rp	2,390,875,000.00	25,910 miliar Rp	2,510,420,000.00	25,910 miliar Rp	7,178,319,000.00	DINAS PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PERINDUSTRIAN,

3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin yang dipantau dan dianalisa terhadap jumlah ijin yang sudah dikeluarkan	%	8 %	235,647,000.00	11 %	247,429,000.00	14 %	259,801,000.00	14 %	742,877,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase keterkinian industri dan kelengkapan informasi industri	%	100 %	241,816,000.00	100 %	253,907,000.00	100 %	266,602,000.00	100 %	762,325,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				768,000,000.00		851,209,600.00		1,005,000,000.00		2,624,209,600.00	
3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Realisasi Pencadangan Tanah untuk Satuan Permukiman kawasan Transmigrasi di Prov. Kalbar	%	50 %	260,000,000.00	50 %	258,209,600.00	0 %	315,000,000.00	0 %	833,209,600.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kepala Keluarga yang mendapatkan pelatihan dan penyuluhan di Kawasan Transmigrasi	365 Kepala Keluarga	120 Kepala Keluarga	437,000,000.00	120 Kepala Keluarga	513,000,000.00	116 Kepala Keluarga	600,000,000.00	356 Kepala Keluarga	1,550,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan	5 Satuan Permukiman (SP)	2 Satuan Permukiman (SP)	71,000,000.00	2 Satuan Permukiman (SP)	80,000,000.00	1 Satuan Permukiman (SP)	90,000,000.00	5 Satuan Permukiman (SP)	241,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				556,568,426,744.00		607,772,184,632.00		423,134,047,762.00		1,587,474,659,138.00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				476,798,763,334.00		523,977,578,634.00		334,193,016,157.00		1,334,969,358,125.00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	346,091,665,333.00	BB Nilai	380,342,764,175.00	BB Nilai	176,675,133,120.00	BB Nilai	903,109,562,628.00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR						

4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				8,493,686,920.00		9,343,055,612.00		10,277,361,174.00		28,114,103,706.00	0.00
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	100,000 %	100,000 %	5,977,433,500.00	100,000 %	6,575,176,850.00	100,000 %	7,232,694,532.00	100,000 %	19,785,304,882.00	BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual	- %	100 %	95,915,653,134.00	100 %	105,507,248,414.00	100 %	116,057,940,254.00	100 %	317,480,841,802.00	0.00
		Persentase Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	- %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	0.00
		Persentase Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	- %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	0.00
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	100 %	1,979,651,498.00	100 %	2,177,616,050.00	100 %	2,395,378,314.00	100 %	6,552,645,862.00	0.00
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro yang ditindaklanjuti/difasilitasi	- %	80,000 %	1,641,144,849.00	85,000 %	1,905,479,333.00	90,000 %	1,986,027,263.00	0 %	5,532,651,445.00	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Jumlah Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang Dihilangkan/Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti	- %	80,000 %	0.00	85,000 %	0.00	90,000 %	0.00	0 %	0.00	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Jumlah Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan BUMD/BLUD	- %	80 %	0.00	85 %	0.00	90 %	0.00	255 %	0.00	0.00
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				15,245,230,000.00		16,526,510,000.00		17,807,790,000.00		49,579,530,000.00	0.00
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Minimal Tingkat Deviasi Serapan Anggaran Pembangunan Tiap Triwulan	%	35,000 %	1,454,298,100.00	32,000 %	1,599,728,200.00	30,000 %	1,760,691,500.00	30,000 %	4,814,717,800.00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
4.02	SEKRETARIAT DPRD				79,769,663,410.00		83,794,605,998.00		88,941,031,605.00		252,505,301,013.00	

4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	75,478,337,637.00	B Nilai	79,053,315,143.00	B Nilai	83,692,078,282.00	180 Nilai	238,223,731,062.00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	65,000 Angka	67,000 Angka	0.00	68,000 Angka	0.00	70,000 Angka	0.00	0 Angka	0.00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai IKM Perangkat Daerah	85,000 Angka	85,000 Angka	0.00	87,000 Angka	0.00	87,000 Angka	0.00	0 Angka	0.00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Agenda DPRD Terlaksana Sesuai Rencana Kerja DPRD	100,000 %	100,000 %	4,291,325,773.00	100,000 %	4,741,290,855.00	100,000 %	5,248,953,323.00	0 %	14,281,569,951.00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2,235,874,162,997.00		1,698,448,181,173.00		1,783,442,885,591.00		5,717,765,229,761.00	
5.01	PERENCANAAN				27,134,417,200.00		28,336,853,000.00		28,928,736,950.00		84,400,007,150.00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	17,476,536,750.00	A Nilai	18,214,376,000.00	A Nilai	18,890,275,500.00	A Nilai	54,581,188,250.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Rencana Program Pembangunan Daerah Dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah	90,000 %	100,000 %	3,380,000,000.00	100,000 %	3,642,750,000.00	100,000 %	3,361,887,500.00	100,000 %	10,384,637,500.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Data Informasi Pembangunan	100,000 %	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
		Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	95,000 %	95,000 %	0.00	98,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	0.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		Tingkat Konsistensi Penjabaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	100,000 %	100,000 %	6,277,880,450.00	100,000 %	6,479,727,000.00	100,000 %	6,676,573,950.00	100,000 %	19,434,181,400.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Tingkat Konsistensi Penjabaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	%	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	0.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Tingkat Konsistensi Penjabaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,000 %	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	0.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Ketercapaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA Yang Berkinerja Baik	%	91,000 %	0.00	93,000 %	0.00	95,000 %	0.00	95,000 %	0.00	0.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Ketercapaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan Yang Berkinerja Baik	95,000 %	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	0.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Ketercapaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang Berkinerja Baik	95,000 %	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	0.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.02	KEUANGAN			2,115,599,922,609.00		1,573,058,001,212.00		1,651,424,733,026.00		5,340,082,656,847.00				

5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	163,616,396,217.00	A Nilai	171,864,198,939.00	A Nilai	180,323,837,209.00	A Nilai	515,804,432,365.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	100 %	100 %	1,936,597,497,497.00	100 %	1,384,834,354,241.00	100 %	1,454,071,914,753.00	100 %	4,775,503,766,491.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	95 %	96 %	8,266,427,779.00	96 %	8,764,591,949.00	96 %	9,202,895,547.00	96 %	26,233,915,275.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Pendapatan Daerah	80,2 Nilai	80,2 Nilai	7,119,601,116.00	80,3 Nilai	7,594,856,083.00	80,4 Nilai	7,826,085,517.00	80,4 Nilai	22,540,542,716.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Kontribusi Realisasi Retribusi terhadap Realisasi PAD	1,8 %	1,8 %	0.00	1,85 %	0.00	1,9 %	0.00	1,9 %	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.03	KEPEGAWAIAN				19,166,000,000.00		19,714,500,000.00		20,591,425,000.00		59,471,925,000.00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	13,593,000,000.00	BB Nilai	13,869,000,000.00	A Nilai	14,397,000,000.00	A Nilai	41,859,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT						
		Nilai IKM Perangkat Daerah	84,3 Nilai	85 Nilai	0.00	86 Nilai	0.00	87 Nilai	0.00	87 Nilai	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Sesuai Formasi / Kebutuhan	%	60 %	5,573,000,000.00	65 %	5,845,500,000.00	70 %	6,194,425,000.00	70 %	17,612,925,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		Persentase ASN yang dilakukan pengembangan	%	90 %	0.00	90 %	0.00	90 %	0.00	90 %	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	%	90 %	0.00	92 %	0.00	95 %	0.00	95 %	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				30,331,113,371.00		31,846,038,866.00		33,361,305,302.00		95,538,457,539.00	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Angka	BB Angka	20,778,930,000.00	BB Angka	21,367,604,500.00	BB Angka	21,878,381,250.00	BB Angka	64,024,915,750.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Indeks SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73 Angka	0.00	73 Angka	0.00	73 Angka	0.00	73 Angka	0.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis	%	34,79 %	9,552,183,371.00	40,53 %	10,478,434,366.00	46,08 %	11,482,924,052.00	121,4 %	31,513,541,789.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi manajerial dan fungsional	%	51,7 %	0.00	59,47 %	0.00	53,92 %	0.00	165,09 %	0.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				19,928,195,016.00		19,388,514,518.00		20,339,865,969.00		59,656,575,503.00	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	10,133,195,016.00	A Nilai	10,496,514,518.00	A Nilai	10,896,165,969.00	240 Nilai	31,525,875,503.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	A Nilai	0.00	240 Nilai	0.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Pemerintahan yang disesuaikan dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,000 %	9,795,000,000.00	100,000 %	8,892,000,000.00	100,000 %	9,443,700,000.00	100,000 %	28,130,700,000.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KALIMANTAN BARAT	DAN PROVINSI
		Persentase Inovasi yang telah sesuai dengan Standar Penilaian dan Pengukuran	60,000 %	60,000 %	0.00	60,000 %	0.00	60,000 %	0.00	0 %	0.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KALIMANTAN BARAT	DAN PROVINSI
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disesuaikan dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	100,000 %	0.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KALIMANTAN BARAT	DAN PROVINSI
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN				10,162,514,801.00		10,080,773,577.00		10,994,819,344.00		31,238,107,722.00		
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	7,833,622,401.00	B Nilai	7,496,967,097.00	BB Nilai	7,918,835,400.00	190 Nilai	23,249,424,898.00	BADAN DAERAH BARAT	PENGELOLA PROVINSI KALIMANTAN
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	0.00	B Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	190 Nilai	0.00	BADAN DAERAH BARAT	PENGELOLA PROVINSI KALIMANTAN
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan (Perda/ Pergub/ Keputusan Gubernur/ Surat Gubernur/ Surat Kepala Badan/ Kep. Kepala Badan) yang dihasilkan	Kebijakan	5,000 Kebijakan	2,328,892,400.00	5,000 Kebijakan	2,583,806,480.00	5,000 Kebijakan	3,075,983,944.00	5,000 Kebijakan	7,988,682,824.00	BADAN DAERAH BARAT	PENGELOLA PROVINSI KALIMANTAN
5.07					13,552,000,000.00		16,023,500,000.00		17,802,000,000.00		47,377,500,000.00		
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	B Nilai	BB Nilai	11,367,000,000.00	A Nilai	13,133,500,000.00	A Nilai	14,202,000,000.00	230 Nilai	38,702,500,000.00	BADAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PENGHUBUNG DAERAH
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	BB Nilai	0.00	A Nilai	0.00	AA Nilai	0.00	AA Nilai	0.00	BADAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PENGHUBUNG DAERAH

5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,000 %	100,000 %	2,185,000,000.00	100,000 %	2,890,000,000.00	100,000 %	3,600,000,000.00	100,000 %	8,675,000,000.00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				40,920,998,053.00		45,013,309,831.00		49,427,360,642.00		135,361,668,526.00	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				40,920,998,053.00		45,013,309,831.00		49,427,360,642.00		135,361,668,526.00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	29,961,359,263.00	A Nilai	32,957,707,248.00	A Nilai	36,253,244,665.00	240 Nilai	99,172,311,176.00	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	A Nilai	0.00	220 Nilai	0.00	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	100 %	7,494,076,360.00	100 %	8,243,483,910.00	100 %	9,067,832,224.00	100 %	24,805,392,494.00	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Peningkatan Kompetensi APIP dalam Penyelenggaraan Pengawasan dan Faillitasi Pengawasan	100 %	100 %	3,465,562,430.00	100 %	3,812,118,673.00	100 %	4,106,283,753.00	300 %	11,383,964,856.00	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Persentase Jumlah Hasil Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi, dan Pendampingan	%	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				656,364,000,000.00		39,148,500,000.00		40,433,500,000.00		735,946,000,000.00	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				656,364,000,000.00		39,148,500,000.00		40,433,500,000.00		735,946,000,000.00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	11,573,500,000.00	B Nilai	12,713,500,000.00	BB Nilai	13,583,500,000.00	BB Nilai	37,870,500,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	0.00	B Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	NA Nilai	B Nilai	0.00	B Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	BB Nilai	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	26,02 %	41,40 %	7,225,000,000.00	53,22 %	8,530,000,000.00	77,47 %	9,525,000,000.00	77,47 %	25,280,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	%	30,410 %	631,020,000,000.00	37,31 %	10,800,000,000.00	44,210 %	9,400,000,000.00	44,210 %	651,220,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	35,440 %	57,010 %	1,600,000,000.00	78,580 %	1,330,000,000.00	97,070 %	1,400,000,000.00	97,070 %	4,330,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	%	0,320 %	1,325,000,000.00	0,550 %	1,700,000,000.00	0,780 %	1,750,000,000.00	0,780 %	4,775,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kelompok Masyarakat yang diberikan Pemahaman terhadap Upaya Meningkatkan PEran Masyarakat Dalam Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat	14,53 %	33,91 %	3,620,500,000.00	53,29 %	4,075,000,000.00	72,67 %	4,775,000,000.00	72,67 %	12,470,500,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		JUMLAH			8,343,593,106,955.00		7,444,483,556,392.00		7,751,218,010,890.00		23,539,294,674,237.00	

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator sasaran pembangunan daerah yang menggambarkan indikator kinerja perangkat daerah dalam mendukung indikator utama daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL 2022	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	68,63	70,98	71,61	72,13	72,13
2.	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,07	5,82	6,16	6,45	6,45
3.	EMISI GRK (PERSENTASE PENURUNAN)	-	27,24	27,62	27,99	27,99
4.	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	B	BB	A	A	A
5.	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	5,11	4,32	3,53	2,78	2,78
6.	ANGKA KEMISKINAN	6,81	6,55	6,37	6,19	6,19

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan daerah merupakan indikator sasaran pembangunan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama daerah, dijelaskan dalam tabel berikut :

TABEL 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kode Program	Indikator	Satuan	Volume Awal	2024		2025		2026	
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
	Indeks Infrastruktur		69,59		73,54		75,29		77,17
	Indeks Reformasi Birokrasi		B		BB		A		A
	Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat		BB		A		A		A
	Indeks Pembangunan Manusia		68,63		70,98		71,61		72,13
	Pertumbuhan Ekonomi		5,07		5,82		6,16		6,45
	Desa Mandiri		586		615		683		700
	Tingkat Pengangguran Terbuka		5,11		4,32		3,53		2,78
	Angka Kemiskinan		6,81		6,55		6,37		6,19
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		71,90		72,59		72,90		73,21
	Usia Harapan Hidup		71,02		71,50		71,60		71,75
	Rata-Rata Lama Sekolah		7,59		9		9,25		9,45
	Harapan Lama Sekolah		12,66		12,9		13,02		13,15
	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan		9.335.000		9.500.000		9.650.000		9.730.000
	Nilai Penurunan Grk Per Sektor		-		21.903.957,36		22.725.154,35		23.554.335,38
	Indeks Kepuasan Masyarakat		85,30		86,42		86,98		87,54

Kode Program	Indikator	Satuan	Volume Awal	2024		2025		2026	
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
	Pendidikan								
	Rata-Rata Lama Sekolah		7,59		9		9,25		9,45
	Harapan Lama Sekolah		12,66		12,9		13,02		13,15
	Kesehatan								
	Usia Harapan Hidup		71,02		71,50		71,60		71,75
	Indeks Kepuasan Masyarakat		85,30		86,42		86,98		87,54
	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perbekalan Alat Kesehatan dan Teknologi Kesehatan	%	65	0	70.00	0	75.00	0	80.00
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tersertifikasi	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang sesuai standar	%	86	0	88.00	0	90.00	0	92.00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap	%		0	83.00	0	86.00	0	89.00
	Persentase Irigasi Provinsi dalam Kondisi Baik	%		0	62.04	0	63.14	0	64.44
	Persentase Peningkatan / Pemeliharaan Sungai sebagai Pengendalian Banjir	%		0	53.28	0	53.40	0	53.52
	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	%	73.37	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan terhadap Pembangunan dengan RTRW	%		0	100.00	0	100.00	0	100.00

Kode Program	Indikator	Satuan	Volume Awal	2024		2025		2026	
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
	Jumlah luasan bangunan gedung yang dibangun dan ditata	M2		0	4674.54	0	4952.40	0	5246.95
	Jumlah Luasan Kawasan yang dibangun dan ditata	M2		0	14079.84	0	14967.86	0	15774.47
	Perumaha dan Kawasan Permukiman								
	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	55.74	0	58	0	60	0	62
	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi	%	62.23	0	64.96	0	67.61	0	70.63
	Rasio Elektrifikasi	%	99.58	0	99.70	0	99.70	0	99.80
	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi Program pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dalam Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	33	0	33.00	0	66.00	0	100.00
	Jumlah Ketersediaan PSU di pusat kegiatan lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat	kabupaten/kota	14	0	14.00	0	14.00	0	14.00
	Jumlah Kecamatan yang dikembangkan/tingkatkan kualitas kawasan permukiman di Kawasan Strategis Provinsi	Kecamatan		0		0		0	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
	Presentase tingkat penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Persentase penanganan pelanggaran perda dan perkada yang diselesaikan	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Presentase peningkatan pembinaan masyarakat di Kalbar	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00

Kode Program	Indikator	Satuan	Volume Awal	2024		2025		2026	
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
	Presentase cakupan Satlinmas di Kalbar	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	%	26.08	0	41.49	0	53.35	0	77.65
	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	13.3	0		0		0	
	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	13.33	0	30.77	0	44.73	0	44.73
	Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	35.44	0	57.01	0	78.58	0	97.07
	Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	%	0.09	0	0.32	0	0.55	0	0.78
	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat	%	13.98	0	32.62	0	51.26	0	69.90
	Sosial								
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
	Tenaga Kerja								
	Jumlah tenaga kerja terlatih	Orang		0	1715.00	0	1731.00	0	1747.00
	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	6011	0	6100.00	0	6150.00	0	6220.00

Kode Program	Indikator	Satuan	Volume Awal	2024		2025		2026	
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja	%	80	0	80.00	0	83.00	0	85.00
	Persentase Perusahaan Menengah dan Besar yang membuat struktur skala upah	%	26	0	30.00	0	35.00	0	40.00
	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) pada Perusahaan besar dan menengah	%	13	0	20.00	0	25.00	0	30.00
	Persentase keberadaan LKS Tripartit pada Provinsi dan Kabupaten/Kota	%	92	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Jumlah P4 yang dilakukan pada perusahaan	Dokumen	1940	0	2247.00	0	2554.00	0	2860.00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	Pangan								
	Indeks Ketersediaan Pangan Provinsi	Nilai	80.00	0	76.20	0	76.35	0	76.52
	Pertanahan								
	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan bagi untuk Kepentingan Umum	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Persentase fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Persentase Fasilitasi Penetapan Obyek dan Subyek Redistribusi Tanah	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Persentase Fasilitasi Survey dan Pemetaan Tanah Ulayat Lintas Kabupaten / Kota	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00

Kode Program	Indikator	Satuan	Volume Awal	2024		2025		2026	
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
	Persentase Fasilitasi Perencanaan penggunaan Tanah yang hamparannya Lintas Daerah Kabupaten / Kota.	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Lingkungan Hidup								
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	Persentase Capaian Data Kependudukan yang Akurat dan Valid	%	92	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Provinsi dan Kab/Kota di Kalbar	%	80	0	85.00	0	88.00	0	90.00
	Persentase Capaian Penyusunan Profil Kependudukan	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	97.03%	0	99.50	0	99.60	0	99.70
	Persentase Pencetakan KIA	%	44.31	0	55.00	0	60.00	0	65.00
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	98	0	98.00	0	99.00	0	100.00
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	45	0	50.00	0	55.00	0	60.00
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	%	50	0	55.00	0	60.00	0	65.00
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	Perhubungan								

Kode Program	Indikator	Satuan	Volume Awal	2024		2025		2026	
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
	Komunikasi dan Informatika								
	Presentase OPD dengan zona hijau/nilai 85-100	%	90.91	0	95.35	0	97.67	0	100.00
	Persentase Total Bobot Domain Evaluasi SPBE	%	65.2	0	66.40	0	67.00	0	67.60
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
	Prosentase Meningkatnya Koperasi Bergerak di Bidang Sektor Jasa Keuangan yang Memeiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam	%	91.25	0	92.73	0	93.10	0	93.44
	Prosentase Peningkatan Kesehatan Koperasi	%	NA	0	46.67	0	47.14	0	47.50
	Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya	%	95.24	0	95.56	0	96.11	0	96.67
	Volume Usaha Koperasi	Rp		0	6 T	0	6.05 T	0	6.1 T
	Prosentase Pertumbuhan UMKM	%	NA	0	0.29	0	0.29	0	0.30
	Rasio Kewirausahaan	%	NA	0	0.95	0	0.99	0	1.02
	Prosentase Usaha Kecil yang Berkembang	%	0.05	0	0.05	0	0.06	0	0.06
	Prosentase Peserta Pelatihan UMKM yang Meningkatkan Pemahamannya	%	90.28	0	91.00	0	92.00	0	93.00
	Penanaman Modal								
	Persentase Pemetaan Potensi Investasi Berdasarkan Komoditas di Kalbar	%	80	0	80.00	0	80.00	0	80.00
	Persentase sektor unggulan Kalimantan Barat yang dipromosikan	%	100	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks	A	0	A	0	A	0	A

Kode Program	Indikator	Satuan	Volume Awal	2024		2025		2026	
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
	Persentase Izin dan Non Izin yang diproses sesuai SOP	%		0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Jumlah Kegiatan usaha yang dilakukan pengendalian pelaksanaan PM	Kegiatan Usaha		0	20.00	0	20.00	0	20.00
	Jumlah Kegiatan usaha yang dilakukan pengendalian pelaksanaan PM	Pelaku Usaha	0	0	34.00	0	34.00	0	34.00
	Dokumen Perizinan Berusaha dan Realisasi Investasi	Dokumen	0	0	4.00	0	4.00	0	4.00
	Kepemudaan								
	Olahraga								
	Statistik								
	Persentase data statistik sektoral OPD yang terintegrasi	%		0	70.00	0	80.00	0	100.00
	Persandian								
	Kebudayaan								
	Perpustakaan								
	Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Perpustakaan		0	130.00	0	142.00	0	155.00
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Jumlah Anggota Perpustakaan	Orang	34632	0	36000.00	0	38000.00	0	40500.00

Kode Program	Indikator	Satuan	Volume Awal	2024		2025		2026	
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
	Jumlah Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	314741	0	316668.00	0	319054.00	0	324354.00
	Kearsipan								
	Jumlah Koleksi Daerah yang dilestarikan	Eksemplar	45371	0	45418.00	0	45668.00	0	45968.00
	Nilai Pengawasan Kearsipan LKD Provinsi	Nilai	68.04	0	68.10	0	68.18	0	68.26
	Jumlah Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan	Arsip	50749	0	51249.00	0	51749.00	0	52249.00
	Persentase Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah Provinsi	Persentase		0	42.50	0	43.00	0	43.50
	Persentase Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Persentase	44.50	0	45.00	0	45.50	0	46.00
	Jumlah Arsip Daerah yang diselamatkan	Arsip	500	0	800.00	0	900.00	0	1000.00
	URUSAN PILIHAN								
	Kelautan dan Perikanan								
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	172149.3	0	174000.00	0	175000.00	0	176000.00
	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	88387.33	0	88500.00	0	89000.00	0	89500.00
	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan terhadap ketentuan peraturan dan per Undang-Undang yang berlaku	%	55.07	0	58.00	0	60.00	0	62.00
	Volume produk olahan perikanan	Ton	26773.57	0	27309.00	0	27855.00	0	28412.00
	Persentase Kawasan Ruang Laut Dan Konservasi Yang Dikelola	%	60	0	62.00	0	64.00	0	66.00
	Persentase desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di berdayakan	%	43.2	0	49.00	0	55.00	0	60.00

Kode Program	Indikator	Satuan	Volume Awal	2024		2025		2026	
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
	Pariwisata								
	Pertanian								
	Perkebunan								
	Kehutanan								
	Energi Sumber Daya Mineral								
	Rasio elektrifikasi /Persentase badan usaha sektor ketenagalistrikan yang diawasi)	%	n/a	0	99.7/15	0	99.75/20	0	99.8/25
	cekungan air tanah yang dikelola	Zona	n/a	0	2.00	0	2.00	0	2.00
	jumlah penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan	Rp	n/a	0	300 milyar	0	315 milyar	0	325 milyar
	Jumlah Potensi Bahan Bakar Nabati di Kalimantan Barat	TOE	n/a	0	35.20	0	38.40	0	41.60
	Perdagangan								
	Perindustrian								
	tingkat inflasi bahan makanan	%		0	5.50	0	5.40	0	5.30
	nilai ekspor	USD	n/a	0	2300 juta	0	2400 juta	0	2500 juta
	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	n/a	0	51.00	0	52.00	0	53.00

Kode Program	Indikator	Satuan	Volume Awal	2024		2025		2026	
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
	Persentase realisasi belanja PDN pada APBD	%	n/a	0	20.00	0	25.00	0	30.00
	kontribusi industri unggulan RPIP dalam PDRB	%	n/a	0	94.58	0	95.00	0	95.39
	Persentase izin yang dipantau dan dianalisa terhadap jumlah ijin keseluruhan yang sudah dikeluarkan	%	n/a	0	10.00	0	20.00	0	30.00
	Persentase keterkinian industri dan kelengkapan informasi industri	%	n/a	0	80.00	0	80.00	0	80.00
	Transmigrasi								
	Persentase Realisasi Pencadangan Tanah untuk Satuan Permukiman kawasan Transmigrasi di Prov. Kalbar	%		0	50.00	0	50.00	0	0.00
	Persentase Kepala Keluarga yang mendapatkan pelatihan dan penyuluhan di Kawasan Transmigrasi	Kepala Keluarga	365	0	120.00	0	120.00	0	116.00
	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan	Satuan Permukiman (SP)	5	0	2.00	0	2.00	0	1.00
	PENUNJANG URUSAN								
	Sekretariat Daerah								
	Sekretariat Dewan								
	Persentase Anggota DPRD Kab/Kota yang memiliki kompetensi pemerintahan	%		0	13.51	0	0.00	0	0.00
	Perencanaan Pembangunan								

Kode Program	Indikator	Satuan	Volume Awal	2024		2025		2026	
				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
	Keuangan								
	Kepegawaian								
	Persentase Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Daerah	%		0	100.00	0	100.00	0	100.00
	Persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis	%		0	34.79	0	40.53	0	46.08
	Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi manajerial dan fungsional	%		0	51.70	0	59.47	0	53.92
	Pendidikan dan Pelatihan								
	Penelitian dan Pengembangan								
	Pengelolaan Perbatasan								
	Pengelolaan Penghubung								
	Pengawasan								

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026 berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2025. Dokumen ini merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023. RPD ini juga merupakan penjabaran kebijakan periode keempat RPJPD (2005-2025) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Kalbar sampai dengan tahun 2026. Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif dan Legislatif, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program – program RPD. Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, integritas birokrasinya infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif.

9.1. Pedoman Transisi

Dengan telah ditetapkannya RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026, maka penyusunan dokumen tahunan mengacu pada dokumen RPD ini selama dokumen RPJMD periode berikutnya belum ditetapkan. Jika pilkada serentak berjalan sesuai jadwal dan tahapan yang berlaku, dan dokumen RPJMD dapat ditetapkan tepat waktu untuk periode 2025 – 2030, maka dokumen yang digunakan untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah mengacu pada Dokumen RPJMD Prov Kalbar Tahun 2025 – 2030. Jika hingga awal tahun 2025 belum dapat ditetapkan dokumen RPJMD Prov Kalbar Tahun 2025 – 2030, maka penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 masih mengacu pada Dokumen RPD ini.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026. Setiap tahunnya, RPD ini dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dari RPD ini, yaitu:

1. Seluruh stakeholder pembangunan termasuk di dalamnya DPRD, instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan komponen masyarakat lainnya berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib mengarahkan pelaksanaan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 dengan menggerakkan semua potensi daerah secara optimal.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat wajib mengkoordinasikan pelaksanaan program-program di dalam RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026.
4. Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kalimantan Barat wajib menyusun Rencana Strategis PD yang

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berpedoman kepada RPD ini dan memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Selanjutnya Renstra PD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) PD setiap tahunnya.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mempedomani RPD ini dalam menyusun dan/atau mengevaluasi RPJMD/RPD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya menyelaraskan sasaran dan program pembangunan Kabupaten/Kota dengan sasaran dan program pembangunan Provinsi.
6. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Perubahan RPD ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat wajib melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam proses penjabaran Perubahan RPD ini ke dalam Renstra PD Provinsi.
7. Bappeda Provinsi Kalimantan Barat wajib melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dalam RPD ini setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau penelitian yang dilakukan oleh Bappeda sendiri.
8. Mengingat peran penting Perangkat Daerah dan sumberdaya aparatur sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan ketercapaian visi, misi dan sasaran pembangunan yang termuat dalam Perubahan RPJMD, maka penyusunan Perangkat Daerah dan penataan aparatur harus berpedoman kepada RPD. Hal ini dimaksudkan untuk membagi atau memisahkan secara jelas tanggung jawab perangkat daerah dan menempatkan aparatur sesuai kompetensinya.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI